PEMERINTAH
KABUPATEN MALAKA

LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2025



dr. STEFANUS BRIA SERAN, MPH
BUPATI MALAKA

HENRI MELKI SIMU, A.Md
WAKIL BUPATI MALAKA

KABUPATEN MALAKA
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan penyertaan-Nya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Malaka Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dalam (1) satu tahun kepemimpinan, kami telah menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang berpedoman pada visi dan misi Kabupaten Malaka yang bersinergi dengan arah kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebagai komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, maka tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang kami jalankan disajikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Malaka Tahun 2025.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sehingga pemerintah daerah harus dapat menjalankan seluruh urusan pemerintahan secara baik dan bijaksana untuk mewujudkan *good governance* dan *clean governance* dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Malaka Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah merupakan agenda konstitusional tahunan yang memuat capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LPPD Kabupaten Malaka Tahun 2025 memuat penyelenggaraan pemerintahan daerah, capaian kinerja pembangunan guna mewujudkan visi misi daerah, pelaksanaan tugas pembantuan dan capaian penerapan Standar Pelayananan Minimal (SPM) yang digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tentunya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di tahun pertama masa kepemimpinan kami, tidak terlepas dari adanya kendala, hambatan maupun tantangan. Namun demikian, dengan semangat dan tekad yang bulat serta dengan mengerahkan segenap kemampuan dan dengan dukungan dari masyarakat Kabupaten Malaka maka kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan serta semakin baik dan meningkat setiap tahunnya.

Kami mengapresiasi sinergi DPRD, Forkopimda, ASN serta seluruh lapisan masyarakat atas dukungan dan peran aktif membangun kembali fondasi yang kokoh dan dinamis untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malaka. Kami berharap LPPD ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai keadaan, perkembangan, permasalahan dan pemecahannya serta dijadikan landasan dalam pengambilan kebijakan untuk kemajuan Kabupaten Malaka di masa mendatang.

Betun, 29 Maret 2026

Bupati Malaka,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

dr. Stefanus Bria Seran, MPH

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA
INSPEKTORAT DAERAH
Jln. Sukabihanawa, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah
Telp. ... Fax. ... Email: malakainspektorat@gmail.com
BETUN
Kode Pos 85762

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Malaka untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah ini .

Betun, 27 Maret 2026
Inspektur Daerah,

PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA
INSPEKTORAT DAERAH

Agustinus R. Leki,S.Kom.,M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19730704 200112 1 002

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Review Inspektorat..... iii
Daftar Isi iv
Daftar Tabel..... vi
Daftar Gambar..... xv
Daftar Grafik xvi
Bab I Pendahuluan 1
1.1. Gambaran Umum 1
1.1.1. Penjelasan Umum 1
1.1.2. Data Umum Wilayah 7
1.1.3. Demografi 21
1.1.4. Data Pegawai 24
1.1.5. Alokasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dirinci Per Program dan Kegiatan..... 26
1.1.6. Realisasi APBD T.A. 2025 140
1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah 142
1.2.1. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan UrusanPemerintah Daerah..... 142
1.2.2. Visi Misi Kabupaten Malaka 157
1.2.3 Permasalahan Strategis Berdasarkan Dokumen Perencanaan..... 162
1.2.4. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah 171
1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal..... 175
Bab II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 177
2.1. Capaian Kinerja Makro 177
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan..... 179
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 220

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.3.1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja 220
2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja 225
2.2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah..... 226
2.3.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai 230
2.3.5. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja 254
Bab III Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan 255
Bab IV Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 265
Bab V Penutup 342

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Rekapitulasi Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Konkuren Wajib Pelayanan Dasar	4
Tabel	1.2	Rekapitulasi Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan	5
Tabel	1.3	Rekapitulasi Perangkat Daerah Penyelenggara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6
Tabel	1.4	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Malaka	8
Tabel	1.5	Kemiringan Lahan Wilayah Kabupaten Malaka	11
Tabel	1.6	Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari	12
Tabel	1.7	Perkembangan Suhu/Temperatur di Kabupaten Malaka	13
Tabel	1.8	Perkembangan Tingkat Kelembapan di Kabupaten Malaka	13
Tabel	1.9	Jenis Batuan di Kabupaten Malaka Beserta Luasannya	17
Tabel	1.10	Nama dan Panjang Sungai di Kabupaten Malaka	17
Tabel	1.11	Sebaran Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Malaka Sesuai Kewenangan	18
Tabel	1.12	Sebaran Sumber Mata Air menurut Kecamatan Di Kabupaten Malaka	19
Tabel	1.13	Nama dan Lokasi Embung di Kabupaten Malaka	20
Tabel	1.14	Jumlah Penduduk Kabupaten Malaka Tahun 2025	21
Tabel	1.15	Indeks Kepadatan Penduduk Kabupaten Malaka	22
Tabel	1.16	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Malaka	23
Tabel	1.17	Jumlah Pegawai Kabupaten Malaka berdasarkan Jenjang Pendidikan	24
Tabel	1.18	Jumlah Pegawai Kabupaten Malaka berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang	25
Tabel	1.19	Jumlah Pegawai Kabupaten Malaka berdasarkan Jabatan/Eselon	25
Tabel	1.20	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Bagian Administrasi Pembangunan	26
Tabel	1.21	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Bagian Administrasi Pembangunan	26
Tabel	1.22	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Bagian Hukum	27
Tabel	1.23	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Bagian Hukum	27
Tabel	1.24	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Bagian Kesejahteraan Rakyat	28
Tabel	1.25	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Bagian Kesejahteraan Rakyat	29

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel	1.26	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Bagian Organisasi	30
Tabel	1.27	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Bagian Organisasi	30
Tabel	1.28	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	31
Tabel	1.29	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Pengadaan Barang dan Jasa	32
Tabel	1.30	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Bagian Pemerintahan	33
Tabel	1.31	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Bagian Pemerintahan	33
Tabel	1.32	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	35
Tabel	1.33	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	35
Tabel	1.34	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	36
Tabel	1.35	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	37
Tabel	1.36	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Bagian Umum	38
Tabel	1.37	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Bagian Umum	38
Tabel	1.38	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Sekretariat DPRD	40
Tabel	1.39	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Sekretariat DPRD	40
Tabel	1.40	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Inspektorat Daerah	42
Tabel	1.41	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Inspektorat Daerah	42
Tabel	1.42	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	44
Tabel	1.43	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	44
Tabel	1.44	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Dinas Kesehatan	45
Tabel	1.45	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Dinas Kesehatan	46

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel	1.46	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Perikanan	49
Tabel	1.47	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Perikanan	49
Tabel	1.48	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	51
Tabel	1.49	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	51
Tabel	1.50	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Dinas Komunikasi dan Informatika	53
Tabel	1.51	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Dinas Komunikasi dan Informatika	53
Tabel	1.52	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Dinas Lingkungan Hidup	55
Tabel	1.53	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Dinas Lingkungan Hidup	55
Tabel	1.54	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Dinas Pariwisata	57
Tabel	1.55	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Dinas Pariwisata	58
Tabel	1.56	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	60
Tabel	1.57	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	60
Tabel	1.58	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	64
Tabel	1.59	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	64
Tabel	1.60	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Dinas Pemuda dan Olahraga	66
Tabel	1.61	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Dinas Pemuda dan Olahraga	67
Tabel	1.62	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	68
Tabel	1.63	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	69

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel	1.64	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	71
Tabel	1.65	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	71
Tabel	1.66	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Dinas P2KBP3A	76
Tabel	1.67	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Dinas P2KBP3A	76
Tabel	1.68	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Dinas Perhubungan	79
Tabel	1.69	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Dinas Perhubungan	80
Tabel	1.70	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi	81
Tabel	1.71	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi	82
Tabel	1.72	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	84
Tabel	1.73	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	84
Tabel	1.74	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	86
Tabel	1.75	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	86
Tabel	1.76	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	88
Tabel	1.77	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	88
Tabel	1.78	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Dinas Sosial	90
Tabel	1.79	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Dinas Sosial	91
Tabel	1.80	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	93
Tabel	1.81	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	93
Tabel	1.82	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	95

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel	1.83	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	95
Tabel	1.84	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	98
Tabel	1.85	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	98
Tabel	1.86	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	100
Tabel	1.87	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	100
Tabel	1.88	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Badan Pengelola Perbatasan Daerah	103
Tabel	1.89	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Badan Pengelola Perbatasan Daerah	104
Tabel	1.90	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	105
Tabel	1.91	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	106
Tabel	1.92	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Satuan Polisi Pamong Praja	109
Tabel	1.93	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Satuan Polisi Pamong Praja	109
Tabel	1.94	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan	111
Tabel	1.95	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan	111
Tabel	1.96	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Kecamatan Botin Loebele	112
Tabel	1.97	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Kecamatan Botin Loebele	113
Tabel	1.98	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Kecamatan Io Kufeu	115
Tabel	1.99	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Kecamatan Io Kufeu	115
Tabel	1.100	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Kecamatan Kobalima	117

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel	1.101	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Kecamatan Kobalima	117
Tabel	1.102	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Kecamatan Kobalima Timur	119
Tabel	1.103	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Kecamatan Kobalima Timur	119
Tabel	1.104	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Kecamatan Laenmanen	121
Tabel	1.105	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Kecamatan Laenmanen	122
Tabel	1.106	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Kecamatan Malaka Barat	124
Tabel	1.107	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Kecamatan Malaka Barat	124
Tabel	1.108	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Kecamatan Malaka Tengah	126
Tabel	1.109	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Kecamatan Malaka Tengah	126
Tabel	1.110	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Kecamatan Malaka Timur	128
Tabel	1.111	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Kecamatan Malaka Timur	128
Tabel	1.112	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Kecamatan Rinhat	130
Tabel	1.113	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Kecamatan Rinhat	130
Tabel	1.114	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Kecamatan Sasitamean	132
Tabel	1.115	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Kecamatan Sasitamean	133
Tabel	1.116	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Kecamatan Weliman	135
Tabel	1.117	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Kecamatan Weliman	135
Tabel	1.118	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Kecamatan Wewiku	137
Tabel	1.119	Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Kecamatan Wewiku	137

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel	1.120	Alokasi dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	140
Tabel	1.121	Permasalahan dan Isu Strategis Kabupaten Malaka	162
Tabel	2.1	Indikator Kinerja Makro	177
Tabel	2.2	IKK Urusan Pendidikan	180
Tabel	2.3	IKK Urusan Kesehatan	181
Tabel	2.4	IKK Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	185
Tabel	2.5	IKK Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	189
Tabel	2.6	IKK Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	190
Tabel	2.7	IKK Urusan Sosial	192
Tabel	2.8	IKK Urusan Tenaga Kerja	193
Tabel	2.9	IKK Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	195
Tabel	2.10	IKK Urusan Pangan	196
Tabel	2.11	IKK Urusan Pertanahan	196
Tabel	2.12	IKK Urusan Lingkungan Hidup	197
Tabel	2.13	IKK Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	198
Tabel	2.14	IKK Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	200
Tabel	2.15	IKK Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	201
Tabel	2.16	IKK Urusan Perhubungan	202
Tabel	2.17	IKK Urusan Komunikasi dan Informatika	203
Tabel	2.18	IKK Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	204
Tabel	2.19	IKK Urusan Penanaman Modal	204
Tabel	2.20	IKK Urusan Kepemudaan dan Olahraga	205
Tabel	2.21	IKK Urusan Statistik	206
Tabel	2.22	IKK Urusan Persandian	206
Tabel	2.23	IKK Urusan Kebudayaan	207
Tabel	2.24	IKK Urusan Perpustakaan	208
Tabel	2.25	IKK Urusan Kearsipan	208
Tabel	2.26	IKK Urusan Kelautan dan Perikanan	209
Tabel	2.27	IKK Urusan Pariwisata	209
Tabel	2.28	IKK Urusan Pertanian	210
Tabel	2.29	IKK Urusan Perdagangan	211
Tabel	2.30	IKK Urusan Perindustrian	211
Tabel	2.31	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	213

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel	2.32	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan	213
Tabel	2.33	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	215
Tabel	2.34	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan	215
Tabel	2.35	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan	216
Tabel	2.36	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengadaan	218
Tabel	2.37	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Hubungan dengan Perwakilan Daerah	218
Tabel	2.38	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Publik	219
Tabel	2.39	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 - Sasaran Strategis 1	221
Tabel	2.40	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 - Sasaran Strategis 2	221
Tabel	2.41	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 - Sasaran Strategis 3	222
Tabel	2.42	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 - Sasaran Strategis 4	222
Tabel	2.43	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 - Sasaran Strategis 5	223
Tabel	2.44	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 - Sasaran Strategis 6	223
Tabel	2.45	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 - Sasaran Strategis 7	223
Tabel	2.46	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 - Sasaran Strategis 8	223
Tabel	2.47	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 - Sasaran Strategis 9	224
Tabel	2.48	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 - Sasaran Strategis 10	224
Tabel	2.49	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 - Sasaran Strategis 11	225
Tabel	2.50	Skala Pengukuran Ordinal	226
Tabel	2.51	Pencapaian Indikator dan Sasaran	227
Tabel	2.52	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1	230
Tabel	2.53	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2	232
Tabel	2.54	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3	234
Tabel	2.55	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4	236
Tabel	2.56	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5	239
Tabel	2.57	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6	241
Tabel	2.58	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7	243
Tabel	2.59	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8	245
Tabel	2.60	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9	247
Tabel	2.61	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10	250
Tabel	2.62	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11	252
Tabel	3.1	Matriks Tugas Pembantuan	259

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel	4.1	Urusan Pendidikan - Capaian SPM	269
Tabel	4.2	Urusan Pendidikan - Anggaran Dasar	271
Tabel	4.3	Urusan Pendidikan - Rincian Kegiatan	272
Tabel	4.4	Urusan Pendidikan - Permasalahan	284
Tabel	4.5	Urusan Kesehatan - Capaian SPM	285
Tabel	4.6	Urusan Kesehatan - Anggaran Dasar	298
Tabel	4.7	Urusan Kesehatan - Rincian Kegiatan	299
Tabel	4.8	Urusan Kesehatan - Permasalahan	300
Tabel	4.9	Urusan Pekerjaan Umum - Capaian SPM	302
Tabel	4.10	Urusan Pekerjaan Umum - Anggaran Dasar	304
Tabel	4.11	Urusan Pekerjaan Umum - Rincian Kegiatan	305
Tabel	4.12	Urusan Pekerjaan Umum - Permasalahan	309
Tabel	4.13	Urusan Perumahan Rakyat - Capaian SPM	310
Tabel	4.14	Urusan Perumahan Rakyat - Anggaran Dasar	315
Tabel	4.15	Urusan Perumahan Rakyat - Rincian Kegiatan	315
Tabel	4.16	Urusan Perumahan Rakyat - Permasalahan	317
Tabel	4.17	Urusan Trantibumlinmas - Capaian SPM	318
Tabel	4.18	Urusan Trantibumlinmas - Anggaran Dasar	325
Tabel	4.19	Urusan Trantibumlinmas - Rincian Kegiatan	326
Tabel	4.20	Urusan Trantibumlinmas - Permasalahan	334
Tabel	4.21	Urusan Sosial - Capaian SPM	335
Tabel	4.22	Urusan Sosial - Anggaran Dasar	339
Tabel	4.23	Urusan Sosial - Rincian Kegiatan	340
Tabel	4.24	Urusan Sosial - Permasalahan	341

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Peta Administrasi Kabupaten Malaka	9
Gambar	1.2	Peta Jenis Tanah Kabupaten Malaka	14
Gambar	1.3	Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Malaka	157
Gambar	3.1	DIPA Tugas Pembantuan	261

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR GRAFIK

Grafik	1.1	Kepadatan Penduduk Tahun 2025	22
Grafik	1.2	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016-2025	23
Grafik	1.3	Pegawai Kabupaten Malaka berdasarkan Jenjang Pendidikan	24
Grafik	4.1	Presentasi Realisasi Capaian SPM	267
Grafik	4.2	Presentasi Permasalahan SPM	267
Grafik	4.3	Presentasi realisasi anggaran SPM	268

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

1.1.1. Penjelasan Umum

Kabupaten Malaka merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Belu yang ditetapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka Di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 11 Januari 2013. Atas dasar pembentukan tersebut, Kabupaten Malaka diresmikan pada tanggal 22 April 2013 oleh Presiden Republik Indonesia (Bpk. Joko Widodo) yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bpk. H. Gawaman Fauzi.

Adapun dasar pembentukan Kabupaten Malaka adalah sebagai berikut:

1. untuk mendorong perkembangan dan kemajuan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Belu, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat di wilayah perbatasan, sehingga dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
2. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Belu, sehingga perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dalam kurun waktu 5 (lima tahun) tahun terhitung sejak tahun 2013–2018, Kabupaten Malaka telah melaksanakan 10 (sepuluh) aspek penyelenggaraan Daerah Otonomi Baru, yaitu:

1) pembentukan organisasi perangkat daerah;
2) pengisian personil;
3) Pengisian keanggotaan DPRD;
4) penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan;
5) pembiayaan;
6) pengalihan aset dan dokumen;
7) pelaksanaan penetapan batas wilayah;
8) penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan;
9) Penyiapan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan
10) Pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan.

dan sejak tahun 2018, Kabupaten Malaka berubah statusnya dari Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi Daerah Otonomi.

Sebagai Daerah Otonomi, Kabupaten Malaka memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun aspek utama penyelenggaraan otonomi daerah antara lain sebagai berikut:

1) asas penyelenggaraan
    - ❖ desentralisasi: penyerahan urusan pemerintahan dari pusat ke daerah otonom.
    - ❖ dekonsentrasi: pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah.
    - ❖ tugas pembantuan: penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu.
2) kewenangan daerah
    - ❖ mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri.
    - ❖ memilih pimpinan daerah (Bupati dan DPRD).
    - ❖ mengelola aparatur dan kekayaan daerah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- ❖ memungut pajak dan retribusi daerah.
- ❖ mengelola sumber daya alam dan pendapatan sah lainnya.

3) prinsip pelaksanaan
   - ❖ demokrasi: mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
   - ❖ peran serta masyarakat: melibatkan warga dalam pembangunan daerah.
   - ❖ pemerataan dan keadilan: menjamin keseimbangan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.
   - ❖ potensi dan keragaman daerah: memperhatikan kekhasan dan kekayaan lokal.
4) instrumen pendukung
   - ❖ keuangan: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DAU, DAK), pinjaman.
   - ❖ Sumber Daya Manusia (SDM): pengelolaan aparatur daerah.
   - ❖ kelembagaan: struktur organisasi perangkat daerah yang efektif.
   - ❖ peraturan: kewenangan membuat Peraturan Daerah (Perda).

Adapun tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malaka, mengembangkan kehidupan demokrasi dan keadilan, mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) urusan yakni:

1) Urusan Pemerintahan Absolut.
   adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
2) Urusan Pemerintahan Konkuren.
   adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah kabupaten.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Untuk urusan konkuren, dibagi menjadi 2 (dua) urusan:

a. Urusan pemerintahan wajib.

   adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.

b. Urusan pemerintahan pilihan.

   adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

3) Urusan Pemerintahan Umum.

adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Untuk Tahun 2025, Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintahan Umum di Kabupaten Malaka sudah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Malaka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka, sebagai interpretasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dirinci pada tabel berikut:

Tabel 1.1. Rekapitulasi Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Konkuren Wajib Pelayanan Dasar

NO	URUSAN WAJIB	PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan dan,
		Rumah Sakit Penyangga Perbatasan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Sosial	Dinas Sosial
7	Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
10	Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	URUSAN WAJIB	PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA
11	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	Perhubungan	Dinas Perhubungan
16	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
18	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
20	Statistik	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika
22	Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tabel 1.2. Rekapitulasi Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan

NO	URUSAN PILIHAN	PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA
1	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
2	Pariwisata	Dinas Pariwisata
3	Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4	Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5	Perindustrian	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 1.3. Rekapitulasi Perangkat Daerah Penyelenggara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA
1	Bidang Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
2	Bidang Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
3	Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	Bidang Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5	Bidang Pengawasan	Inspektorat Daerah
6	Bidang Pengadaan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
7	Bidang Hubungan dengan Perwakilan Daerah	Bagian Hukum
8	Bidang Pelayanan Publik	Bagian Organisasi
9	Fungsi Penunjang Lainnya	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Sekretariat DPRD
		Bagian Administrasi Pembangunan
		Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Bagian Organisasi
		Bagian Pemerintahan
		Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		Bagian Umum
		Kecamatan Malaka Tengah
		Kecamatan Malaka Barat
		Kecamatan Wewiku
		Kecamatan Weliman
		Kecamatan Rinhat
		Kecamatan Sasitamean
		Kecamatan Io Kufeu
		Kecamatan Laen Manen
		Kecamatan Malaka Timur
		Kecamatan Kobalima
		Kecamatan Kobalima Timur
		Kecamatan Botin Leobele

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1.1.2. Data Umum Wilayah

- Astronomis

  Kabupaten Malaka terletak 124° 38’ 32.17’’ Bujur Timur-125° 5’ 21.38” Bujur Timur dan 9° 18’ 7.19’’ LS-9° 47’ 26.68” Lintang Selatan.

- Geografis

  Kabupaten Malaka terletak di Pulau Timor bagian Selatan. Kabupaten Malaka memiliki batas darat dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste dan batas laut dengan Australia.

- Administratif

  Kabupaten Malaka merupakan salah satu kabupaten dari 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terletak di Pulau Timor. Kabupaten Malaka merupakan daerah agraris dengan luas wilayah 1.160,63 Km2, terdiri dari 12 kecamatan dan 127 desa.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 1.4. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Malaka

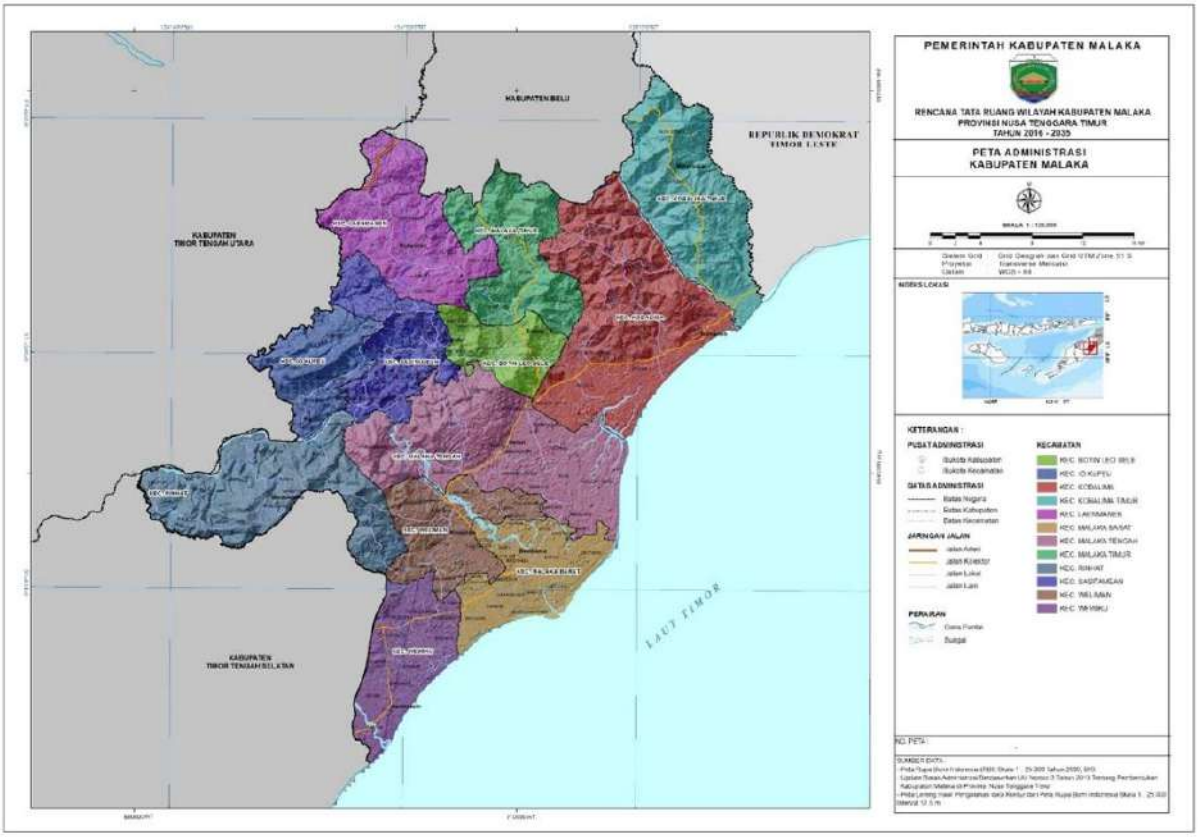
No	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Km2	Persen	Jumlah Desa	Nama Desa
1	Malaka Tengah	Betun	168.69	14.53%	17	Desa Barene, Desa Kakaniuk, Desa Kateri, Desa Bakiruk, Desa Kamanasa, Desa Wehali, Desa Umakatahan, Desa Umanen Lawalu, Desa Kletek, Desa Naimana, Desa Fahiluka, Desa Lawalu, Desa Harekakae, Desa Barada, Desa Bereliku, Desa Railor Tahak, Desa Suai
2	Malaka Barat	Besikama	87.41	7.53%	16	Desa Motaulun, Desa Sikun, Desa Fafoe, Desa Lasaen, Desa Umatoos, Desa Rabasahain, Desa Umalor, Desa Besikama, Desa Maktihan, Desa Loofoun, Desa Rabasa, Desa Rabasa Haerain, Desa Motaain, Desa Oan Mane, Desa Raimataus, Desa Naas
3	Wewiku	Alkani	97.90	8.44%	12	Desa Halibasar, Desa Weulun, Desa Webriamata, Desa Badarai, Desa Weoe, Desa Lorotolus, Desa Seserai, Desa Alkani, Desa Lamea, Desa Rabasa Biris, Desa Biris, Desa Weseben
4	Weliman	Kmilaran	88.25	7.60%	14	Desa Wesey, Desa Haitimuk, Desa Laleten, Desa Kleseleon, Desa Angkaes, Desa Wederok, Desa Lamudur, Desa Forekmodok, Desa Umalawain, Desa Lakulo, Desa Leunklot, Desa Haliklaran, Desa Bonetasea, Desa Taaba
5	Rinhat	Biudukfoho	151.72	13.07%	20	Desa Saenama, Desa Wekmidar, Desa Lotas, Desa Nanin, Desa Alala, Desa Oekmurak, Desa Webetun, Desa Naet, Desa Biudukfoho, Desa Niti, Desa Tafuli, Desa Boen, Desa Wekeke, Desa Raisamane, Desa Weain, Desa Nabutaek, Desa Tafuli I, Desa Nanebot, Desa Muke, Desa Naiusu
6	Io Kufeu	Fatuao	67.79	5.84%	7	Desa Biau, Desa Kufeu, Desa Tunmat, Desa Tunabesi, Desa Bani-Bani, Desa Fatoin, Desa Ikan Tuanbeis
7	Sasitamean	Kaputu	65.48	5.64%	9	Desa As Manulea, Desa Manulea, Desa Naibone, Desa Fatuaruin, Desa Builaran, Desa Manumutin Silole, Desa Umutnana, Desa Beaneno, Desa Naisau
8	Laen Manen	Maan	94.02	8.10%	9	Desa Meotroi, Desa Tesa, Desa Kapitan Meo, Desa Tniumanu, Desa Uabau, Desa Boni Bais, Desa Nauke Kusa, Desa Bisesmus, Desa Oenaek
9	Malaka Timur	Boas	83.28	7.18%	6	Desa Raiulun, Desa Wemeda, Desa Kusa, Desa Numponi, Desa Dirma, Desa Sanleo
10	Kobalima Timur	Maromarai	96.11	8.28%	4	Desa Alas Utara, Desa Kotabiru, Desa Alas, Desa Alas Selatan
11	Kobalima	Raihenek	120.95	10.42%	8	Desa Babulu, Desa Babulu Selatan, Desa Sisi, Desa Rainawe, Desa Litamali, Desa Lakekun Utara, Desa Lakekun, Desa Lakekun Barat
12	Botin Leobele	Sarina	39.03	3.36%	5	Desa Babotin, Desa Kereana, Desa Babotin Maemina, Desa Babotin Selatan, Desa Takarai
JUMLAH			**1,160.63**	**100%**	**127**	

Sumber: RTRW Malaka 2017-2037

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Malaka Tengah dengan luas wilayah sebesar 168,69 Km2 atau 14,53 persen dari luas wilayah Kabupaten Malaka, sedangan kecamatan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Botin Leobele dengan luas wilayah sebesar 39,03 Km2 atau 3,36 persen dari luas wilayah Kabupaten Malaka. Apabila dilihat dari jumlah desa, kecamatan dengan desa yang paling banyak terletak pada Kecamatan Rinhat dengan jumlah desa sebanyak 20 (dua puluh) desa dan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit terletak di Kecamatan Kobalima Timur, dengan jumlah desa sebanyak 4 (empat) desa.

Gambar 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Malaka



Letak Kabupaten Malaka sangat strategis karena berbatasan darat dengan Negara Republic Democratic Timor Leste (RDTL) dan berbatasan laut dengan Negara Timor Leste dan Negara Australia. Batas-batas wilayah Kabupaten Malaka sebagai berikut:

Utara	:	berbatasan dengan Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu;
Timur	:	berbatasan dengan Negara Republic Demokratic Timor Leste (RDTL);
Selatan	:	berbatasan dengan Laut Timor;
Barat	:	berbatasan dengan Kecamatan Biboki Tan Pah, Kecamatan Insana, Kecamatan Bikomi Selatan di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Kecamatan Kokbaun, Kecamatan Fatukopa, Kecamatan Toianas, Kecamatan Boking di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

❖ Topografi

1. Kemiringan Lahan

   Pada umumnya kemiringan lahan wilayah Kabupaten Malaka didominasi kemiringannya antara 0-45%. Keadaan kemiringan lahan wilayah Kabupaten Malaka akan dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelas dengan masing-masing lokasi sebagai berikut:

   a. Daerah dengan kemiringan lereng 0-8%, yang merupakan dataran landai, terdapat di pesisir pantai selatan yakni Kecamatan Wewiku, Malaka Barat, sebagian besar Kecamatan Weliman, Malaka Tengah dan Kobalima;
   b. Daerah kemiringan lereng 8-15%, merupakan daerah datar yang meliputi sebagian Kecamatan Kobalima, Kobalima Timur, kemudian sebagian Kecamatan Malaka Timur, Laenmanen, Kecamatan Rinhat, Malaka Tengah dan Botin Leobele;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

c. Daerah desngan kemiringan lereng 15-30% yaitu daerah landai atau bergelombang yang meliputi daerah lembah yang terletak diantara pegunungan, terdistribusi di sebagian besar Kecamatan Sasitamean dan Kecamatan Io Kufeu, kemudian sebagian Kobalima Timur, Malaka Timur, Rinhat dan Botin Leobele;

d. Daerah dengan kemiringan lereng 30-45%, yaitu daerah yang bergelombang dan berbukit terdapat sedikit di kecamatan Malaka Timur.

Tabel 1.5. Kemiringan Lahan Wilayah Kabupaten Malaka

No.	Kemiringan Lereng	Luas	
		Ha	%
1	0-3%	31,074.80	26.8
2	3-8%	21,640.61	18.7
3	8-15%	38,745.92	33.4
4	15-25%	19,596.19	16.9
5	25-40%	4,948.44	4.26
6	> 40%	57.04	0.05
Jumlah		**116,063.00**	**100**

Sumber: RTRW Kab. Malaka 2017-2037, Data Diolah

2. Ketinggian Lahan

Dataran tinggi (538-806 m.dpal) di Kabupaten Malaka menempati kawasan bagian utara, yakni Kecamatan Laenmanen, Io Kufeu, sebagian Kecamatan Sasitamean, Malaka Timur dan Kobalima Timur. Bentuk topografi wilayah Kabupaten Malaka merupakan daerah datar berbukit-bukit hingga pegunungan.

❖ Klimatologi

Kabupaten Malaka dan umumnya NTT dekat dengan Australia, arus angin yang banyak mengandung uap air dari Asia dan Samudera Pasifik sampai di wilayah Kabupaten Malaka kandungan uap airnya sudah berkurang yang mengakibatkan hari hujan di Kabupaten Malaka lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah yang lebih dekat dengan Asia.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kabupaten Malaka memiliki iklim tropis dengan musim hujan yang sangat pendek (Desember-Maret) dan musim kemarau yang panjang (April-November).

Adapun curah hujan rata-rata per kecamatan di Kabupaten Malaka sebagai berikut:

1. <1000 mm/tahun meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kobalima;
2. antara 1000-1500 mm/tahun meliputi wilayah Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Malaka Timur, Kecamatan Sasitamean, dan sebagian Kecamatan Kobalima;
3. antara 1500-2000 mm/tahun meliputi wilayah Kecamatan Rinhat.

Tabel 1.6. Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm/tahun)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (jam)
Januari/January	148,5	18	9,65
Februari/February	372,6	22	6,11
Maret/March	146,9	16	7,36
April/April	171,3	18	3,71
Mei/May	8 888,00	4	8,09
Juni/June	0,8	3	7,32
Juli/July	36	6	9,78
Agustus/August	8 888,00	4	9,33
September/September	...	...	8,92
Oktober/October	...	...	10,12
November/November	92	9	10,42
Desember/December	190,9	17	10,46

Sumber: Malaka Dalam Angka, Data Diolah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 1.7. Perkembangan Suhu/Temperatur di Kabupaten Malaka

No	Bulan	Kelembapan (%)		
		Minimum	Rata-Rata	Maksimum
1	Januari	22,90	28,50	32,80
2	Februari	23,00	28,00	32,50
3	Maret	22,20	28,20	33,80
4	April	23,30	28,20	33,40
5	Mei	19,80	28,00	33,00
6	Juni	20,30	27,50	33,20
7	Juli	20,00	27,30	32,00
8	Agustus	20,80	27,40	32,90
9	September	20,20	27,60	34,00
10	Oktober	22,60	28,80	36,00
11	November	24,20	29,40	35,80
12	Desember	24,20	29,20	35,00
Sumber: Malaka Dalam Angka, Data Diolah.				

Temperatur rata-rata di Kabupaten Malaka sebesar 28,18°C dengan interval suhu 20,00°C - 36,00°C. Temperatur terendah (20,00°C) terjadi pada bulan Juli dan temperatur tertinggi (36,00°C) terjadi pada bulan Oktober.

Tabel 1.8. Perkembangan Tingkat Kelembapan di Kabupaten Malaka

No.	Bulan	Kelembaban (%)		
		Minimun	Rata-Rata	Maksimum
1	Januari	60,00	81,20	98,00
2	Februari	63,00	84,40	99,00
3	Maret	59,00	83,00	98,00
4	April	50,00	82,30	98,00
5	Mei	55,00	75,50	98,00
6	Juni	46,00	76,30	98,00
7	Juli	45,00	72,60	97,00
8	Agustus	32,00	68,10	97,00
9	September	32,00	70,40	97,00
10	Oktober	38,00	75,90	96,00
11	November	42,00	78,60	98,00
12	Desember	46,00	81,70	98,00
Sumber: Malaka Dalam Angka, Data Diolah.				

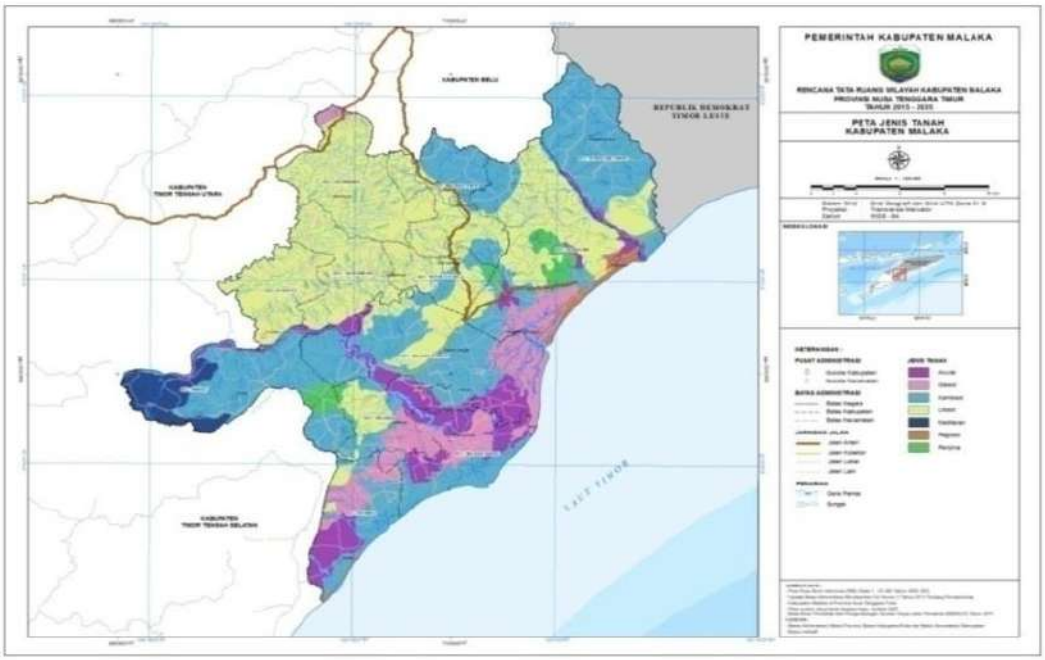
Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kelembaban udara adalah tingkat kebasahan udara karena dalam udara air selalu terkandung dalam bentuk uap air. Banyaknya kandungan uap air dalam udara hangat lebih banyak daripada kandungan uap air dalam udara dingin. Kelembaban udara di Kabupaten Malaka relatif atau berubah sesuai tempat dan waktu. Pada siang hari kelembaban relatif berangsur-angsur turun kemudian pada sore hari sampai menjelang pagi bertambah besar. Berdasarkan suhu tersebut diatas, diperkirakan rata-rata tingkat kelembaban di Kabupaten Malaka berkisar antara 32-84%.

❖ Geologi

Struktur geologi adalah struktur perubahan lapisan batuan sedimen akibat kerja kekuatan tektonik, sehingga tidak lagi memenuhi hukum superposisi disamping itu struktur geologi juga merupakan struktur kerak bumi produk deformasi tektonik. Kondisi geografi wilayah Kabupaten Malaka, secara fisiografi termasuk dalam zona pegunungan selatan Pulau Timor. Stratigrafi daerah tersusun oleh batuan sedimen dan batuan terobosan dengan struktur geologi adalah lipatan, sesar dan kekar.

Gambar 1.2. Peta Jenis Tanah Kabupaten Malaka



Jenis batuan-batuan yang dijumpai di Kabupaten Malaka dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a) Batu Gamping Koral.

   Elemen penyusun utama batu ini adalah koral berupa coelentera. Batuan ini merupakan perkembangan dari colonial koral, oleh sebab itu batuan ini belum banyak mengalami pencampuran dengan mineral lain. Jenis batu gamping koral ini banyak ditemukan di Kecamatan Laenmanen, Malaka Timur dan Kobalima Timur dengan luas keseluruhan 19.631,30 Ha.

b) Batuan Ultra Basa.

   Batuan ultra basa adalah batuan beku yang kandungan silika dan kaliumnya rendah dan tinggi akan kandungan FeO dan mineral mafik. Jenis batuan ultra basa ini banyak ditemukan di Kecamatan Kobalima dengan luas keseluruhan 7.113,40 Ha.

c) Formasi Aitutu.

   Formasi ini banyak dijumpai di Kecamatan Rinhat, Sasitamean dan Botin Leobele dengan luas keseluruhan 20.420,50 Ha. Bagian bawah terdiri dari selang-seling batu dengan Nepal dan batu gamping. Bagian atas terdiri dari pergantian pelapisan kolsilulit (batu gamping serpihan) dengan serpih yang berwarna kelabu.

d) Formasi Bisane.

   Formasi Bisane merupakan serpih kelabu yang berumur Perem. Formasi ini terdapat di Kecamatan Kobalima dan Malaka Timur dengan luas keseluruhan 1.672,20 Ha.

e) Formasi Maubisse Lava.

   Formasi maubisse lava terdiri dari batu gamping merah kecoklatan sampai ungu berselingan tipis batu rijang. Formasi ini hanya terdapat di Kecamatan Kobalima Timur dengan luas keseluruhan 57.72 Ha.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

f) Formasi Maubisse Lava Bantal.

Formasi maubisse lava bantal bersusunan basal dan spilit serta batuan volkanik trakit, senit forfir dan andesite leuko. Formasi ini banyak dijumpai di Kecamatan Wewiku, Malaka Barat, Malaka Tengah, Weliman dan Kobalima dengan luas keseluruhan 35.544,27 Ha.

g) Formasi Noele.

Formasi Noele terdiri dari napal pasiran, konglomerat dan tufa dasit. Formasi ini hanya terdapat di Kecamatan Laenmanen dengan luas keseluruhan 341.53 Ha.

h) Formasi Noil Toko.

Formasi Noil Toko terdiri dari konglomerat, batu gamping konglomeratan, batu gamping globigerina, batu pasir gampingan, napal, tuf, tufa gampingan dan serpih. Hasil pelapukan formasi ini membentuk jenis tanah Rendzina da Grumosol. Formasi ini terdapat di Kecamatan Malaka Timur dan Kobalima Timur dengan luas keseluruhan 641.78 Ha.

i) Formasi Wailuli.

Formasi Wailuli terdiri dari kalkarenit, serpih lanauan, napal dan grewake. Formasi ini tersebar di banyak tempat, yakni Kecamatan Io Kufeu, Sasitamean, Laenmanen, Kobalima, Kobalima Timur, Botin Leobele, Malaka Tengah, Weliman dan Rinhat dengan luas keseluruhan 21.985,62 Ha.

j) Kompleks Bobonaro.

Kompleks Bobonaro terdiri dari dua satuan batuan yaitu lempung serpihan dan bongkahan-bongkahan asing yang bermacam-macam jenis dan ukuran. Kontak dengan formasi di atasnya adalah tektonik (ketidaksejajaran). Kompleks bobonaro dapat dijumpai di Kecamatan Malaka Tengah, Kobalima dan Io Kufeu dengan luas keseluruhan 4225.70 Ha.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 1.9. Jenis Batuan di Kabupaten Malaka Beserta Luasannya

No	Jenis Batuan	Luas (Ha)
1	Batu Gamping Koral	19,631.30
2	Batuan Ultra Basa	7,113.40
3	Formasi Aitutu	20,420.50
4	Formasi Bisane	1,672.20
5	Formasi Maubisse Lava	57.72
6	Formasi Maubisse Lava Bantal	35,544.27
7	Formasi Noele	341.53
8	Formasi Noil Toko	641.78
9	Formasi Wailuli	21,985.62
10	Kompleks Bobonaro	4,225.70
11	Konglomerate & Kelakar	4.64
12	Lainnya	4,424.34
JUMLAH		**116,063.00**

Sumber: RTRW Kabupaten Malaka 2017-2037, Data Diolah

❖ Hidrologi

a) Daerah Aliran Sungai

Di wilayah Kabupaten Malaka terdapat 7 sungai dengan panjang seluruhnya 198 Km. Berdasarkan arah alirannya, sungai-sungai diwilayah Kabupaten Malaka daerah aliran sungai (DAS) bermuara di Laut Timor.

b) Sungai, Danau dan Rawa

Aliran sungai yang besar biasanya mengalir sepanjang tahun, tetapi ada juga sungai yang kering pada musim kemarau. Hal ini terjadi karena fluktuasi curah hujan yang sangat kontras antar bulan dan dipengaruhi juga oleh kondisi geologi serta morfologi wilayah.

Tabel 1.10. Nama dan Panjang Sungai di Kabupaten Malaka

No.	Kecamatan	Nama Sungai	Panjang (Km)
1	Malaka Barat	Benenain	100
		Mota Delek	15
2	Malaka Tengah	Baen	30
		Wedik	10
		Talimetan	8
		Motahoar	7
3	Kobalima	Motababulu	28
Sumber: RTRW Kabupaten Malaka 2017-2037, Data Diolah.			

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sungai-sungai seperti yang disebutkan di atas sudah banyak yang digunakan untuk irigasi namun beberapa diantaranya masih bersifat irigasi non teknis. Saat ini telah dibangun irigasi teknis (sistem irigasi Malaka) mulai dari jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder sampai jaringan irigasi tersier yang memanfaatkan air dari Bendung Benenai (Sungai Benenain di Kecamatan Malaka Tengah) yang mampu mengairi daerah irigasi seluas 10.000 Ha bahkan sampai 15.000 Ha mencakup wilayah pelayanan Kecamatan Malaka Barat, Kecamatan Malaka Tengah, dan Kecamatan Kobalima.

Berikut gambaran terinci sebaran daerah irigasi di Kabupaten Malaka berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.

Tabel 1.11. Sebaran Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Malaka Sesuai Kewenangan

No.	Daerah Irigasi	Luas Irigasi Permukaan (Ha)
A.	Pemerintah Pusat (BWS Nusa Tenggara II)	
1	D.I. Malaka	10.386
	Jumlah	10.386
B.	Pemerintah Provinsi NTT	
1	D.I. Alas	1.650
2	D.I. Weliman	1.000
	Jumlah	2.650
C.	Pemerintah Kabupaten Malaka	
1	D.I. Bakateu	100
2	D.I. Eturaifou	125
3	D.I. Lakekun I & II	250
4	D.I. Raimea	800
5	D.I. Tolok	600
6	D.I. Tubaki	300
7	D.I. Webua	100
8	D.I. Wemaromak	200
9	D.I. Wematek	215
10	D.I. Haumalae	100
11	D.I. Motadelek	750
12	D.I. Non'au	650
13	D.I. Nukraek	125
14	D.I. Rabasa	500
15	D.I. Weau	75
16	D.I. Weharani	250
	Jumlah	5.140
	Jumlah	**18.176**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sedangkan sumber mata air yang ada di Kabupaten Malaka sebanyak 55 (Lima Puluh Lima) mata air yang dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.12. Sebaran Sumber Mata Air menurut Kecamatan Di Kabupaten Malaka

No.	Lokasi			Sumber Mata Air		Vol/Debit Air (L/Det)
	Kecamatan	Desa	Dusun			
1.	Sasitamean	As Manulea	Loleon	1	Oenoah	1
				2	Oeboakmatin	0,5
				3	Oekfureuk	2
			Klatun	4	Klatun	7
				5	Naibone	1
				6	Naibone	1
				7	Beaneno	1
2.	Malaka Tengah	Wehali	Laran	1	Matankanuan	5
				2	Webeibau	7
				3	Weau	10
				4	Wemaromak (Feto)	3
				5	Wemaromak (Mane)	2
		Kamanasa		6	Wetubaki	8
				7	Wehanok	
3.	Kobalima	Lakekun Barat	Lakekun	1	Wematek	0,5
		Litamali	Litamali	2	Wemasu	3
		Rainawe	Rainawe	3	Weseli 1	2,5
				4	Weseli 2	
				5	Webua 1	
				6	Webua 2	3
				7	Wemariuk	
				8	Webualaran	
				9	Seli	
				10	Wesalan	
				11	Weheda/Wehali	
4.	Weliman	Haitimuk		1	Weliman	5
		Leunklot		2	Leunklot	7,5
		Wesey		3	Wesei	7,5
5.	Rinhat	Biudukfoho		1	Biudukfoho	2,5
		Niti		2	Webora	0,5
6.	Laenmanen	Tesa	Bora B	1	Oefkoun	0,21
				2	Wemeat	0,1
				3	Eoleben	0,5
		Kapitanmeo	Oehae	4	Oenasi 1	1
				5	Oenasi 2	1
				6	Oenasi 3	1
				7	Klatun	1
				8	Oefuin	1
				9	Oenifu	1
				10	Oebaat	1
		Bonibais	Baunasa	1	Inkatis	5
7.	Malaka Timur	Wemeda	Babahane	2	Babahane	2
		Numponi		3	Basnaba	2
8.	Kobalima Timur			1	Debudila	
				2	Wenaes	
				3	Wederok	

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Lokasi			Sumber Mata Air	Vol/Debit Air (L/Det)
	Kecamatan	Desa	Dusun		
				4 Weasurahuk	
				5 Wefahi	
				6 Wefuru	
				7 Welakuran	
				8 Weferik	
				9 Abat Oan	
				10 Weati	
				11 Weheda	
				12 Saluhu	
			Jumlah	55 Sumber air	

Sumber: RTRW Kab. Malaka 2017-2037. (Data Diolah)

Tampungan air lainnya yang ada di Kabupaten Malaka berupa embung dan bendungan. Tampungan air yang ada tersebut digunakan untuk kebutuhan air baku, irigasi dan lain-lain. Adapun data-data untuk tampungan air tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.13. Nama dan Lokasi Embung di Kabupaten Malaka

No.	Nama Waduk/ Embung Irigasi	Lokasi		Tahun Pembuatan
		Kecamatan	Desa/Kel./Dsn	
1	Embung Kusa	Malaka Timur	Desa Kusa	1993
2	Oeniareu	Malaka Timur	Dusun Oeniareu	1996
3	Bonan	Malaka Timur	Dusun Bonan	1996
4	Okleo	Rinhat	Desa Biudukfoho	2001
5	Tniumanu	Laenmanen	Desa Tniumanu	2008
6	Halioan	Malaka Tengah	Desa Barene	2008
7	Saenama	Rinhat	Desa Saenama	2009
8	Boen	Rinhat	Desa Boen	2009
9	Naisau	Sasitamean	Desa Naisau	2009
10	Meotroy	Laenmanen	Desa Meotroy	2009
11	Babulu I	Kobalima	Desa Babulu	2009
12	Biris	Rinhat	Desa Biris	2010
13	Fatukbesi	Malaka Tengah	Desa Kakaniuk	NA
14	Umutnana	Sasitamean	Desa Umutnana	NA
15	Fatukmetak	Malaka Timur	Desa Sanleo	NA
16	Bereama	Kobalima	Desa Babulu Selatan	NA
17	Alas Selatan	Kobalima Timur	Desa Alas Selatan	NA
18	Embung Mirana	Laenmane	Desa Uabau	2014
19	Embung Takarai	Botin Leobele	Desa Takarai	2014
20	Embung Raimetan	Kobalima	Desa Babulu Selatan	2014
21	Embung Wesei	Weliman	Desa Wesey	2014
22	Embung Nunfutu	Rinhat	Desa Wekeke	2014
23	Embung Dirma	Malaka Timur	Desa Dirma	2015
24	Embung Umutnan	Sasitamean	Desa Umutnana	2015

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Nama Waduk/ Embung Irigasi	Lokasi		Tahun Pembuatan
		Kecamatan	Desa/Kel./Dsn	
25	Embung Raiulun	Malaka Timur	Desa Raiulun	2016
26	Embung Raisamane	Rinhat	Desa Raisamane	2016
27	Embung Babulu	Kobalima	Desa Babulu	2016
28	Embung Konservasi	Kobalima Timur	Desa Alas Selatan	2015
29	Embung Konservasi	Kobalima	Desa Sisi	2015
30	Embung Konservasi	Rinhat	Desa Niti	2015
31	Embung Konservasi	Rinhat	Desa Boen	2015
32	Embung Peternakan	Rinhat	Desa Raisamane	2015
33	Embung Peternakan	Sasitamean	Desa Faturuin	2015
34	Embung Kehutanan	Kobalima	Des Babulu Selatan	2015
35	Embung Kehutanan	Kobalima Timur	Desa Kota Biru	2015
35	Embung Peternakan	Malaka Tengah	Desa Kakaniuk	2017
37	Embung Peternakan	Kobalima	Desa Sisi	2017

1.1.3. Demografi

Jumlah Penduduk Kabupaten Malaka keadaan sampai dengan Semester II Tahun 2025 sebanyak 215.050 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk menurut jenis kelamin antara lain: jumlah penduduk Laki-Laki sebanyak 106.580 jiwa dan jumlah penduduk Perempuan sebanyak 108.470 jiwa.

Tabel 1.14. Jumlah Penduduk Kabupaten Malaka Tahun 2025

No.	Kecamatan	Lk	Pr	Lk+Pr	Jumlah KK
1	Malaka Tengah	22.492	22.938	45.430	13.470
2	Malaka Barat	13.147	13.401	26.548	7.882
3	Wewiku	10.946	11.152	22.098	6.482
4	Weliman	11.787	11.908	23.695	6.927
5	Rinhat	8.334	8.435	16.769	4.887
6	Io Kufeu	4.691	4.851	9.542	2.785
7	Sasitamean	4.932	5.076	10.008	2.978
8	Laenmanen	7.663	7.468	15.131	4.173
9	Malaka Timur	5.815	5.796	11.611	3.401
10	Kobalima Timur	3.479	3.739	7.218	2.212
11	Kobalima	10.413	10.705	21.118	6.161
12	Botin Leobele	2.881	3.001	5.882	1.728
JUMLAH		**106.580**	**108.470**	**215.050**	**63.086**

Sumber data: Dinas Dukcapil Kab. Malaka, Semester II 2025 (data diolah)

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

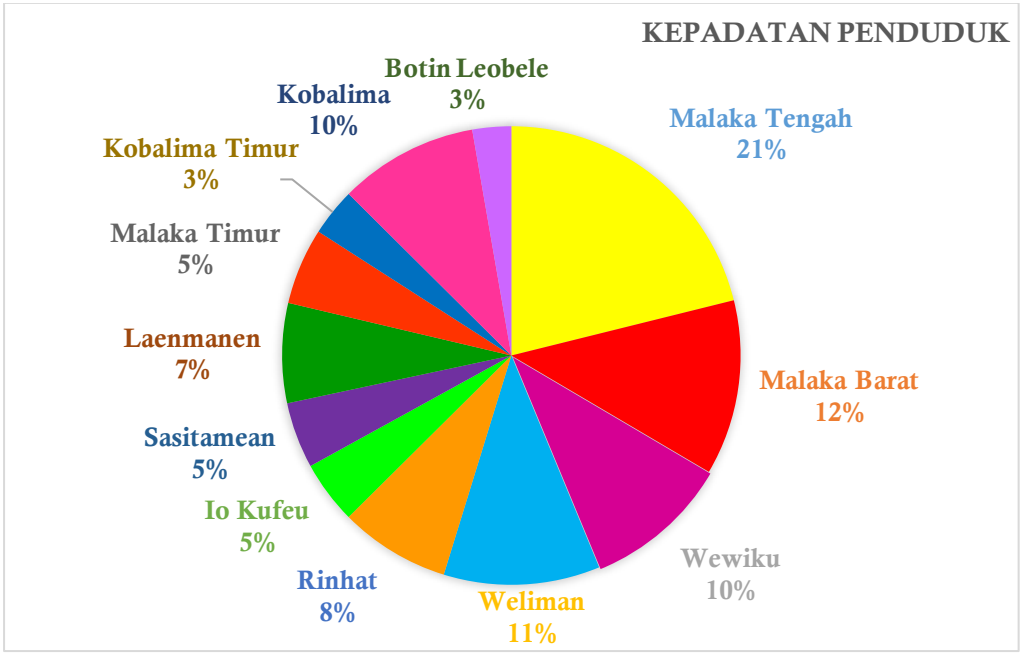
Tingkat kepadatan penduduk terlampir dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.15. Indeks Kepadatan Penduduk Kabupaten Malaka

No.	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Luas (Km²)	Kepadatan
1	Malaka Tengah	45.430	240,01	189
2	Malaka Barat	26.548	277,87	96
3	Wewiku	22.098	203,98	108
4	Weliman	23.695	235,5	101
5	Rinhat	16.769	95,14	176
6	Io Kufeu	9.542	129,58	74
7	Sasitamean	10.008	142,81	70
8	Laenmanen	15.131	144,63	105
9	Malaka Timur	11.611	129,71	90
10	Kobalima Timur	7.218	71,16	101
11	Kobalima	21.118	163,92	129
12	Botin Leobele	5.882	146,07	40
Jumlah		**215.050**	**194,864**	**1.104**

Sumber data: Dinas Dukcapil Kab. Malaka, Semester II 2025 (data diolah)

Grafik 1.1. Kepadatan Penduduk Tahun 2025



Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Malaka pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar **1,96**%, dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1.16. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Malaka

Kecamatan	2024	2025	Pertumbuhan Penduduk (%)
Malaka Tengah	44.627	45.430	1,80%
Malaka Barat	26.197	26.548	1,34%
Wewiku	21.620	22.098	2,21%
Weliman	23.211	23.695	2,09%
Rinhat	16.296	16.769	2,90%
Io Kufeu	9.424	9.542	1,25%
Sasitamean	9.790	10.008	2,23%
Laenmanen	14.761	15.131	2,51%
Malaka Timur	11.422	11.611	1,65%
Kobalima Timur	7.085	7.218	1,88%
Kobalima	20.740	21.118	1,82%
Botin Leo Bele	5.735	5.882	2,56%
JUMLAH	**210.908**	**215.050**	**1,96%**

Sumber: Dinas Dukcapil Kab. Malaka, Keadaan smester II 2025 (data diolah)

Grafik 1.2. Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016-2025



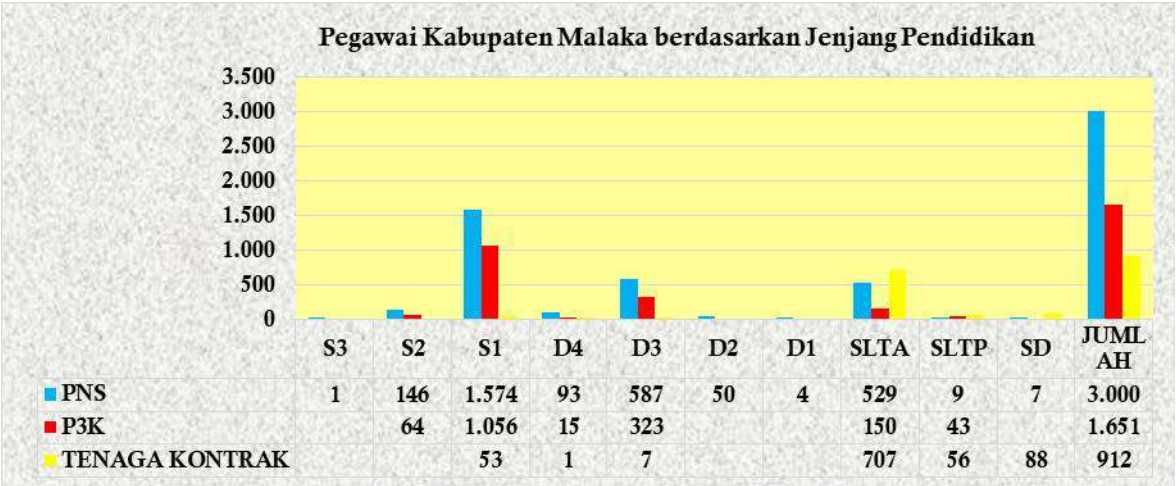
1.1.4. Data Pegawai.

Tabel 1.17. Jumlah Pegawai Kabupaten Malaka berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	PNS	P3K	Tenaga Kontrak
S3	1		
S2	146	64	
S1	1.574	1.056	53
D4	93	15	1
D3	587	323	7
D2	50		
D1	4		
SLTA	529	150	707
SLTP	9	43	56
SD	7		88
Jumlah	**3.000**	**1.651**	**912**

Sumber data: BKPSDM Kabupaten Malaka

Grafik 1.3. Pegawai Kabupaten Malaka berdasarkan Jenjang Pendidikan



Tabel 1.18. Jumlah Pegawai Kabupaten Malaka berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang

PANGKAT	GOLONGAN	RUANG	PNS	P3K
Juru Muda	I	A		43
Juru Muda Tingkat I	I	B	1	
Juru	I	C	4	
Juru Tingkat I	I	D	4	
Pengatur Muda	II	A	93	150
Pengatur Muda Tingkat I	II	B	50	
Pengatur	II	C	219	323
Pengatur Tingkat I	II	D	142	
Penata Muda	III	A	688	1.071
Penata Muda Tingkat I	III	B	770	64
Penata	III	C	294	
Penata Tingkat I	III	D	432	
Pembina	IV	A	153	
Pembina Tingkat I	IV	B	134	
Pembina Utama Muda	IV	C	15	
Pembina Utama Madya	IV	D	1	
Pembina Utama	IV	E		
JUMLAH			**3.000**	**1.651**

Tabel 1.19. Jumlah Pegawai Kabupaten Malaka berdasarkan Jabatan/Eselon

JABATAN	PNS	P3K
Eselon II A	1	
Eselon II B	31	
Eselon IIII	151	
Eselon IV	58	
Fungsional Tertentu	1.992	1.651
Fungsional Umum	767	
JUMLAH	**3.000**	**1.651**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1.1.5. Alokasi dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dirinci Per Program dan Kegiatan.

1) Sekretariat Daerah

a) Bagian Administrasi Pembangunan

Tabel 1.20. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja – Bagian Administrasi Pembangunan

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**462.419.500**	**433.445.184**	**93,73%**
1	**Belanja Operasi**	**457.539.500**	**428.565.184**	**93,67%**
	a. Belanja Barang dan Jasa	457.539.500	428.565.184	93,67%
2	**Belanja Modal**	**4.880.000**	**4.880.000**	**100,00%**
	a. Belanja Peralatan dan Mesin;	4.880.000	4.880.000	100,00%

Tabel 1.21. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Bagian Administrasi Pembangunan

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Bagian Administrasi Pembangunan				**462.419.500**	**433.445.184**	**93,73%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**330.604.500**	**308.070.184**	**93,18%**
	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		59.220.000	39.000.000	65,86%
		1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	59.220.000	39.000.000	65,86%
	B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		5.400.000	5.400.000	100,00%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.400.000	5.400.000	100,00%
	C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		174.981.500	174.981.500	100,00%
		1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.147.500	17.147.500	100,00%
		2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.658.000	9.658.000	100,00%
		3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148.176.000	148.176.000	100,00%
	D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4.880.000	4.880.000	100,00%
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.880.000	4.880.000	100,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Bagian Administrasi Pembangunan				**462.419.500**	**433.445.184**	**93,73%**
	E		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.200.000	7.894.200	77,39%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100,00%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.200.000	4.894.200	67,98%
	F		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.923.000	75.914.484	99,99%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.690.000	75.689.484	100,00%
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0,00%
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	233.000	225.000	96,57%
2	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**131.815.000**	**125.375.000**	**95,11%**
	A		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	131.815.000	125.375.000	95,11%
		1	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	131.815.000	125.375.000	95,11%

b) Bagian Hukum

Tabel 1.22. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja – Bagian Hukum

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**1.637.994.000**	**1.567.930.800**	**95,72%**
1	**Belanja Operasi**	**1.637.994.000**	**1.567.930.800**	**95,72%**
	a. Belanja Barang dan Jasa	1.637.994.000	1.567.930.800	95,72%

Tabel 1.23. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Bagian Hukum

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Bagian Hukum				**1.637.994.000**	**1.567.930.800**	**95,72%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**361.124.000**	**292.300.870**	**80,94%**
	A		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	116.520.000	50.880.000	43,67%
		1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	116.520.000	50.880.000	43,67%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Bagian Hukum				**1.637.994.000**	**1.567.930.800**	**95,72%**
	B		Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.716.000	188.533.381	99,90%
		1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.391.000	11.384.500	99,94%
		2	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	8.893.000	8.892.981	100,00%
		3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	168.432.000	168.255.900	99,90%
	C		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.500.000	2.500.000	45,45%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	100,00%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.000.000	0	0,00%
	D		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.388.000	50.387.489	100,00%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.880.000	43.879.989	100,00%
		2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	4.800.000	4.800.000	100,00%
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.708.000	1.707.500	99,97%
2	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**1.276.870.000**	**1.275.629.930**	**99,90%**
	A		Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	1.276.870.000	1.275.629.930	99,90%
		1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	272.708.000	272.583.130	99,95%
		2	Fasilitasi Bantuan Hukum	1.004.162.000	1.003.046.800	99,89%

c) Bagian Kesejahteraan Rakyat

Tabel 1.24. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja – Bagian Kesejahteraan Rakyat

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**5.217.423.550**	**5.154.166.475**	**98,79%**
1	**Belanja Operasi**	**5.199.823.550**	**5.141.167.475**	**98,87%**
	a. Belanja Barang dan Jasa	5.199.823.550	5.141.167.475	98,87%
2	**Belanja Modal**	**17.600.000**	**12.999.000**	**73,86%**
	a. Belanja Peralatan dan Mesin;	17.600.000	12.999.000	73,86%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 1.25. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Bagian Kesejahteraan Rakyat

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Bagian Kesejahteraan Rakyat				**5.217.423.550**	**5.154.166.475**	**98,79%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**249.292.480**	**234.674.950**	**94,14%**
	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		66.180.000	54.130.000	81,79%
		1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	66.180.000	54.130.000	81,79%
	B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		3.000.000	3.000.000	100,00%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3.000.000	3.000.000	100,00%
	C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		131.499.980	130.366.999	99,14%
		1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.647.010	8.646.500	99,99%
		2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.650.970	7.650.000	99,99%
		3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.202.000	114.070.499	99,02%
	D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3.570.000	2.890.000	80,95%
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.570.000	2.890.000	80,95%
	E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.500.000	2.500.000	100,00%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	100,00%
	F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		42.542.500	41.787.951	98,23%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.300.000	40.297.951	99,99%
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.500.000	750.000	50,00%
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	742.500	740.000	99,66%
2	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**1.021.472.070**	**980.697.075**	**96,01%**
	A	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		1.021.472.070	980.697.075	96,01%
		1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	225.557.000	225.369.000	99,92%
		2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	795.915.070	755.328.075	94,90%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Bagian Kesejahteraan Rakyat				**5.217.423.550**	**5.154.166.475**	**98,79%**
3	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			**3.946.659.000**	**3.938.794.450**	**99,80%**
	A	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		3.946.659.000	3.938.794.450	99,80%
		1	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	3.946.659.000	3.938.794.450	99,80%

d) Bagian Organisasi

Tabel 1.26. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja – Bagian Organisasi

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**497.860.000**	**481.242.345**	**96,66%**
1	**Belanja Operasi**	**497.860.000**	**481.242.345**	**96,66%**
	a. Belanja Barang dan Jasa	497.860.000	481.242.345	96,66%

Tabel 1.27. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Bagian Organisasi

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Bagian Organisasi				**497.860.000**	**481.242.345**	**96,66%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**			**497.860.000**	**481.242.345**	**96,66%**
	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		52.110.000	36.090.000	69,26%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	0	0,00%
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52.110.000	36.090.000	69,26%
	B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4.200.000	4.200.000	100,00%
		1	Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.200.000	4.200.000	100,00%
	C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		84.276.000	84.279.000	100,00%
		1	Penyediaan Bahan Logistik kantor	10.600.000	10.600.000	100,00%
		2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.010.000	5.013.000	100,06%
		3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	68.666.000	68.666.000	100,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Bagian Organisasi				**497.860.000**	**481.242.345**	**96,66%**
	D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		7.000.000	6.402.345	91,46%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100,00%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	6.000.000	5.402.345	90,04%
	E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		45.880.000	45.880.000	100,00%
		1	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	43.880.000	43.880.000	100,00%
		2	Pemeliharaan Peralatan dan mesin	2.000.000	2.000.000	100,00%
	F	Penataan Organisasi		304.394.000	304.391.000	100,00%
		1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	136.749.000	136.749.000	100,00%
		2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan TataLaksana	70.272.000	70.269.000	100,00%
		3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	46.730.000	46.730.000	100,00%
		4	Koordinasi Penyusunan LAKIP	50.643.000	50.643.000	100,00%

e) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Tabel 1.28. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja – Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**890.643.500**	**639.255.474**	**71,77%**
1	**Belanja Operasi**	**769.871.500**	**639.255.474**	**83,03%**
	a. Belanja Barang dan Jasa	769.871.500	639.255.474	83,03%
2	**Belanja Modal**	**120.772.000**	**0**	**0,00%**
	a. Belanja Peralatan dan Mesin;	120.772.000	0	0,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 1.29. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa				**890.643.500**	**639.255.474**	**71,77%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**485.883.500**	**314.395.474**	**64,71%**
	A	Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah		62.340.000	45.420.000	72,86%
		1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62.340.000	45.420.000	72,86%
	B	Administrasi Kepegawaian dan Perangkat Daerah		18.320.000	0	0,00%
		1	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.000.000	0	0,00%
		2	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	4.320.000	0	0,00%
	C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		216.111.500	211.166.300	97,71%
		1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.467.500	12.467.500	100,00%
		2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.193.000	19.160.000	99,83%
		3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.451.000	179.538.800	97,34%
	D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		15.210.000	11.001.274	72,33%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	4.500.000	100,00%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.710.000	6.501.274	60,70%
	E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		51.720.000	46.807.900	90,50%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.140.000	33.140.000	100,00%
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	9.377.900	93,78%
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.580.000	4.290.000	50,00%
	F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		122.182.000	0	0,00%
		1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	75.484.000	0	0,00%
		2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.698.000	0	0,00%
2	**PROGRAM PEREKONOMIAAN DAN PEMBANGUNAN**			**404.760.000**	**324.860.000**	**80,26%**
	A	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa		404.760.000	324.860.000	80,26%
		1	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	144.600.000	121.200.000	83,82%
		2	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	164.760.000	138.660.000	84,16%
		3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	95.400.000	65.000.000	68,13%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

f) Bagian Pemerintahan

Tabel 1.30. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Bagian Pemerintahan

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**1.687.425.925**	**1.649.959.495**	**97,78%**
1	**Belanja Operasi**	**1.638.425.925**	**1.600.959.495**	**97,71%**
	a. Belanja Barang dan Jasa	1.638.425.925	1.600.959.495	97,71%
2	**Belanja Modal**	**49.000.000**	**49.000.000**	**100,00%**
	a. Belanja Peralatan dan Mesin;	49.000.000	49.000.000	100,00%

Tabel 1.31. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Bagian Pemerintahan

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Bagian Pemerintahan				**1.687.425.925**	**1.649.959.495**	**97,78%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.427.563.500**	**1.405.597.070**	**98,46%**
	A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		133.075.000	133.075.000	100,00%
		1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	133.075.000	133.075.000	100,00%
	B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		140.660.000	121.380.000	86,29%
		1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	140.660.000	121.380.000	86,29%
	C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4.200.000	4.200.000	100,00%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4.200.000	4.200.000	100,00%
	D	Administrasi Umum Perangkat Daerah		284.172.000	284.172.000	100,00%
		1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.112.000	24.112.000	100,00%
		2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.034.000	6.034.000	100,00%
		3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	254.026.000	254.026.000	100,00%
	E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		50.290.000	50.290.000	100,00%
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.290.000	50.290.000	100,00%
	F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		17.250.000	14.900.000	86,38%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	100,00%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.750.000	12.400.000	84,07%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Bagian Pemerintahan				**1.687.425.925**	**1.649.959.495**	**97,78%**
	G		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.995.500	63.995.500	100,00%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.500.000	58.500.000	100,00%
		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.495.500	5.495.500	100,00%
	H		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	733.921.000	733.584.570	99,95%
		1	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	280.390.000	280.075.000	99,89%
		2	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	453.531.000	453.509.570	100,00%
2	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**50.000.000**	**34.500.000**	**69,00%**
	A		Administrasi Tata Pemerintahan	0	0	0,00%
		1	Penataan Administrasi Pemerintahan	0	0	0,00%
		2	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	0	0	0,00%
	B		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	50.000.000	34.500.000	69,00%
		1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	50.000.000	34.500.000	69,00%
3	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**209.862.425**	**209.862.425**	**100,00%**
	A		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	209.862.425	209.862.425	100,00%
		1	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	209.862.425	209.862.425	100,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

g) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Tabel 1.32. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**697.015.100**	**638.371.855**	**91,59%**
1	**Belanja Operasi**	**668.515.100**	**638.371.855**	**95,49%**
	a. Belanja Barang dan Jasa	668.515.100	638.371.855	95,49%
2	**Belanja Modal**	**28.500.000**	**0**	**0,00%**
	a. Belanja Peralatan dan Mesin;	28.500.000		0,00%

Tabel 1.33. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Bagian Perekonomian				**697.015.100**	**638.371.855**	**91,59%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**324.649.100**	**268.217.155**	**82,62%**
	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		48.780.000	45.895.000	94,09%
		1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48.780.000	45.895.000	94,09%
	B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		26.400.000	8.400.000	31,82%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	2.400.000	2.400.000	100,00%
		2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24.000.000	6.000.000	25,00%
	C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		121.972.500	121.970.000	100,00%
		1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.573.000	21.573.000	100,00%
		2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.943.500	12.943.500	100,00%
		3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.456.000	87.453.500	100,00%
	D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		38.500.000	3.000.000	7,79%
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.500.000	3.000.000	7,79%
	E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		16.150.000	16.106.000	99,73%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	10.000.000	100,00%
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.150.000	6.106.000	99,28%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Bagian Perekonomian				**697.015.100**	**638.371.855**	**91,59%**
	F		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72.846.600	72.846.155	100,00%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.090.000	56.089.555	100,00%
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000	12.000.000	100,00%
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	4.756.600	4.756.600	100,00%
2	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**372.366.000**	**370.154.700**	**99,41%**
	A		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	372.366.000	370.154.700	99,41%
		1	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	308.912.000	306.704.700	99,29%
		2	Perencanaan dan Pengawasaan Ekonomi Mikro Kecil	63.454.000	63.450.000	99,99%

h) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Tabel 1.34. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**950.024.950**	**893.455.017**	**94,05%**
1	**Belanja Operasi**	**915.224.950**	**858.655.407**	**93,82%**
	a. Belanja Barang dan Jasa	915.224.950	858.655.407	93,82%
2	**Belanja Modal**	**34.800.000**	**34.799.610**	**100,00%**
	b. Belanja Peralatan dan Mesin;	34.800.000	34.799.610	100,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 1.35. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				**950.024.950**	**893.455.017**	**94,05%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**			**950.024.950**	**893.455.017**	**94,05%**
	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		54.240.000	34.740.000	64,05%
		1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	54.240.000	34.740.000	64,05%
	B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12.600.000	12.600.000	100,00%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	12.600.000	12.600.000	100,00%
		2	Pendidikan dan Pelathan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0,00%
	C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		23.461.250	23.422.250	99,83%
		1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.906.500	5.896.500	99,83%
		2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.689.750	3.689.750	100,00%
		3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.865.000	13.836.000	99,79%
	D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		36.210.000	36.089.610	99,67%
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.210.000	36.089.610	99,67%
	E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		12.710.000	10.590.625	83,33%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	100,00%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	10.710.000	8.590.625	80,21%
	F	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan		55.753.700	50.596.422	90,75%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	46.290.000	44.584.318	96,32%
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.950.000	5.498.404	61,43%
		3	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	513.700	513.700	100,00%
	G	Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan		755.050.000	725.416.110	96,08%
		1	Fasilitasi Keprotokolan	196.300.000	166.863.499	85,00%
		2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	558.750.000	558.552.611	99,96%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

i) Bagian Umum

Tabel 1.36. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Bagian Umum

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**28.715.861.854**	**26.906.429.472**	**93,70%**
1	**Belanja Operasi**	**24.919.694.864**	**23.362.271.852**	**93,75%**
	a. Belanja Pegawai	7.349.904.254	6.979.507.885	94,96%
	b. Belanja Barang dan Jasa	17.569.790.610	16.382.763.967	93,24%
2	**Belanja Modal**	**3.796.166.990**	**3.544.157.620**	**93,36%**
	a. Belanja modal aset tetap lainnya;	3.796.166.990	3.544.157.620	93,36%

Tabel 1.37. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Bagian Umum

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Bagian Umum				**28.715.861.854**	**26.906.429.472**	**93,70%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KOTA**			**24.309.961.854**	**22.517.779.472**	**92,63%**
	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.106.618.523	6.753.004.163	95,02%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.656.798.923	6.362.541.163	95,58%
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	449.819.600	390.463.000	86,80%
	B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		15.000.000	15.000.000	100,00%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15.000.000	15.000.000	100,00%
	C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.642.900.960	2.207.024.395	83,51%
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	110.000.000	110.000.000	100,00%
		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	113.954.960	85.548.885	75,07%
		3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	131.000.000	130.999.510	100,00%
		4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	986.940.000	620.100.000	62,83%
		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.301.006.000	1.260.376.000	96,88%
	D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah		4.157.378.540	3.853.049.170	92,68%
		1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.971.113.000	2.871.900.000	96,66%
		2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.186.265.540	981.149.170	82,71%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Bagian Umum				**28.715.861.854**	**26.906.429.472**	**93,70%**
	E		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	497.055.000	357.419.448	71,91%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45.000.000	44.998.000	100,00%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	452.055.000	312.421.448	69,11%
	F		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.543.744.000	2.259.286.754	88,82%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.045.840.000	1.789.501.879	87,47%
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.522.000	112.972.000	93,74%
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	377.382.000	356.812.875	94,55%
	G		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	893.105.331	816.966.722	91,47%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	693.105.331	616.966.722	89,01%
		2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	200.000.000	200.000.000	100,00%
	H		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	5.675.659.500	5.489.988.820	96,73%
		1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	5.675.659.500	5.489.988.820	96,73%
	I		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	778.500.000	766.040.000	98,40%
		1	Fasilitasi Keprotokolan	778.500.000	766.040.000	98,40%
2	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**4.405.900.000**	**4.388.650.000**	**99,61%**
	A		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.405.900.000	4.388.650.000	99,61%
		1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	4.405.900.000	4.388.650.000	99,61%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2) Sekretariat DPRD

Tabel 1.38. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Sekretariat DPRD

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**28.830.061.751**	**27.222.342.798**	**94,42%**
1	**Belanja Operasi**	**28.750.061.751**	**27.142.422.798**	**94,41%**
	a. Belanja Pegawai	11.830.588.111	11.061.503.506	93,50%
	b. Belanja Barang dan Jasa	16.919.473.640	16.080.919.292	95,04%
2	**Belanja Modal**	**80.000.000**	**79.920.000**	**99,90%**
	a. Belanja Peralatan dan Mesin;	80.000.000	79.920.000	99,90%

Tabel 1.39. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Sekretariat DPRD

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Sekretariat DPRD				**28.830.061.751**	**27.222.342.798**	**94,42%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**17.860.739.751**	**16.966.135.793**	94,99%
	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.384.149.812	1.292.565.166	93,38%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.115.613.812	1.053.880.666	94,47%
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	268.536.000	238.684.500	88,88%
	B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		7.800.000	7.800.000	100,00%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	7.800.000	7.800.000	100,00%
	C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		39.528.640	39.499.211	99,93%
		1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.994.000	28.964.711	99,90%
		2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.534.640	10.534.500	100,00%
	D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		186.005.000	108.622.083	58,40%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.405.000	17.400.000	99,97%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.600.000	91.222.083	54,11%
	E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		304.580.000	297.788.183	97,77%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	284.580.000	278.033.208	97,70%
		2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	20.000.000	19.754.975	98,77%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Sekretariat DPRD				**28.830.061.751**	**27.222.342.798**	**94,42%**
	F		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	10.884.554.299	10.170.867.840	93,44%
		1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	10.714.974.299	10.007.622.840	93,40%
		2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	169.580.000	163.245.000	96,26%
	G		Layanan Administrasi DPRD	5.054.122.000	5.048.993.310	99,90%
		1	Fasilitasi Fraksi DPRD	771.326.000	768.805.435	99,67%
		2	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	2.442.836.000	2.440.227.875	99,89%
		3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.839.960.000	1.839.960.000	100,00%
2	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			**10.969.322.000**	**10.256.207.005**	**93,50%**
	A		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	388.507.000	304.897.869	78,48%
		1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	388.507.000	304.897.869	78,48%
	B		Pembahasan Kebijakan Anggaran	905.156.000	782.190.111	86,41%
		1	Pembahasan KUA dan PPAS	65.735.000	65.689.000	99,93%
		2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	99.090.000	99.032.110	99,94%
		3	Pembahasan APBD	319.765.000	254.355.401	79,54%
		4	Pembahasan APBD Perubahan	420.566.000	363.113.600	86,34%
	C		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	175.833.000	145.616.919	82,82%
		1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	44.845.000	44.790.000	99,88%
		2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	43.800.000	24.977.119	57,03%
		3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	43.260.000	42.579.800	98,43%
		4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	43.928.000	33.270.000	75,74%
	D		Peningkatan Kapasitas DPRD	1.869.640.000	1.680.505.565	89,88%
		1	Pendalaman Tugas DPRD	930.262.000	794.236.284	85,38%
		2	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	586.000.000	585.983.000	100,00%
		3	Penyusunan Program Kerja DPRD	353.378.000	300.286.281	84,98%
	E		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.906.100.000	4.841.084.400	98,67%
		1	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	100.400.000	40.820.000	40,66%
		2	Pelaksanaan Reses	4.805.700.000	4.800.264.400	99,89%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Sekretariat DPRD				**28.830.061.751**	**27.222.342.798**	**94,42%**
	F		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	120.625.000	75.152.800	62,30%
		1	Pengawasan Kode Etik DPRD	120.625.000	75.152.800	62,30%
	G		Fasilitasi Tugas DPRD	2.603.461.000	2.426.759.341	93,21%
		1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1.503.520.000	1.348.126.023	89,66%
		2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	126.351.000	105.115.246	83,19%
		3	Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	973.590.000	973.518.072	99,99%

3) Inspektorat Daerah

Tabel 1.40. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Inspektorat Daerah

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**7.412.993.291**	**6.505.360.839**	**87,76%**
1	**Belanja Operasi**	**7.249.493.291**	**6.341.918.989**	**87,48%**
	a. Belanja Pegawai	4.021.868.596	3.919.523.055	97,46%
	b. Belanja Barang dan Jasa	3.227.624.695	2.422.395.934	75,05%
2	**Belanja Modal**	**163.500.000**	**163.441.850**	**99,96%**
	a. Belanja Peralatan dan Mesin;	163.500.000	163.441.850	99,96%

Tabel 1.41. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Inspektorat Daerah

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Inspektorat Daerah				**7.412.993.291**	**6.505.360.839**	**87,76%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**5.488.238.291**	**5.114.102.239**	**93,18%**
	A		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.293.230.596	4.056.750.055	94,49%
		1	Penyediaan gaji dan tunjangan PNS	4.021.868.596	3.919.523.055	97,46%
		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	271.362.000	137.227.000	50,57%
	B		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	508.549.000	428.000.851	84,16%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	34.200.000	34.200.000	100,00%
		2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	474.349.000	393.800.851	83,02%
	C		Administrasi Umum Perangkat Daerah	419.323.695	370.878.638	88,45%
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	1.344.500	1.343.500	99,93%
		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.564.820	20.416.745	99,28%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Inspektorat Daerah				**7.412.993.291**	**6.505.360.839**	**87,76%**
		3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.410.375	17.410.375	100,00%
		4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	380.004.000	331.708.018	87,29%
	D		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	166.370.000	166.311.850	99,97%
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	166.370.000	166.311.850	99,97%
	E		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.725.000	9.818.436	66,68%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.000.000	80,00%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.225.000	7.818.436	63,95%
	F		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.040.000	82.342.409	95,70%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.540.000	77.417.409	99,84%
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.500.000	4.925.000	57,94%
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**			**1.924.755.000**	**1.391.258.600**	**72,28%**
	A		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.575.180.000	1.141.528.600	72,47%
		1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	85.362.000	77.262.000	90,51%
		2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	407.414.000	394.184.000	96,75%
		3	Reviu Laporan Kinerja	19.650.000	19.650.000	100,00%
		4	Reviu Laporan Keuangan	110.000.000	54.350.000	49,41%
		5	Pengawasan Desa	805.312.000	505.730.000	62,80%
		6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	147.442.000	90.352.600	61,28%
	B		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	349.575.000	249.730.000	71,44%
		1	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	349.575.000	249.730.000	71,44%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Tabel 1.42. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**2.496.938.646**	**2.367.803.973**	**94,83%**
1	**Belanja Operasi**	**2.496.938.646**	**2.367.803.973**	**94,83%**
	a. Belanja Pegawai	1.191.200.796	1.093.584.297	91,81%
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.305.737.850	1.274.219.676	97,59%

Tabel 1.43. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				**2.496.938.646**	**2.367.803.973**	**94,83%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA**			**1.918.968.546**	**1.791.830.933**	**93,37%**
	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.363.787.046	1.238.904.297	90,84%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.191.200.796	1.093.584.297	91,81%
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	172.586.250	145.320.000	84,20%
	B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		7.200.000	7.200.000	100,00%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Adtribut kelengkapannya	7.200.000	7.200.000	100,00%
	C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		138.986.500	138.454.286	99,62%
		1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.075.000	19.073.500	99,99%
		2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.911.500	13.911.500	100,00%
		3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.000.000	105.469.286	99,50%
	D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		47.215.000	45.501.350	96,37%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.800.000	10.720.000	99,26%
		2	Penyediaaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	36.415.000	34.781.350	95,51%
	E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah		361.780.000	361.771.000	100,00%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	136.480.000	136.480.000	100,00%
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.500.000	28.500.000	100,00%
		3	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor	196.800.000	196.791.000	100,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				**2.496.938.646**	**2.367.803.973**	**94,83%**
2	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**			**296.192.250**	**294.420.290**	**99,40%**
	A	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		296.192.250	294.420.290	99,40%
		1	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	296.192.250	294.420.290	99,40%
3	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**			**211.459.500**	**211.234.500**	**99,89%**
	A	Pelayanan Pencatatan Sipil		475.000	475.000	100,00%
		1	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	475.000	475.000	100,00%
	B	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		210.984.500	210.759.500	99,89%
		1	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	210.984.500	210.759.500	99,89%
4	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**			**2.758.350**	**2.758.250**	**100,00%**
	A	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		2.758.350	2.758.250	100,00%
		1	Pembinaan dan Pengawasan terkai Pengelolan Informasi Administrasi Kependudukan	2.758.350	2.758.250	100,00%
5	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**			**67.560.000**	**67.560.000**	**100,00%**
	A	Penyusunan Profil Kependudukan		67.560.000	67.560.000	100,00%
		1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	67.560.000	67.560.000	100,00%

5) Dinas Kesehatan

Tabel 1.44. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Dinas Kesehatan

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**128.509.345.048**	**122.652.928.892**	**95,44%**
1	**Belanja Operasi**	**99.043.970.199**	**96.081.388.733**	**97,01%**
	a. Belanja Pegawai	33.308.489.416	32.834.356.913	98,58%
	b. Belanja Barang dan Jasa	65.735.480.783	63.247.031.820	96,21%
2	**Belanja Modal**	**29.465.374.849**	**26.571.540.158**	**90,18%**
	a. Belanja Peralatan dan Mesin	3.721.666.700	4.695.852.172	126,18%
	b. Belanja Bangunan dan Gedung;	24.748.206.149	20.892.351.986	84,42%
	c. Belanja Irigasi dan Jaringan	995.502.000	983.336.000	98,78%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 1.45. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Dinas Kesehatan

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Kesehatan				**128.509.345.048**	**122.652.928.892**	**95,44%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**35.378.564.416**	**34.214.272.497**	**96,71%**
	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		33.895.129.416	33.054.076.913	97,52%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.308.489.416	32.834.356.913	98,58%
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	586.640.000	219.720.000	37,45%
	B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		319.200.000	0	0,00%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	319.200.000	0	0,00%
	C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		286.790.000	284.404.805	99,17%
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.885.000	5.885.000	100,00%
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.154.000	6.154.000	100,00%
		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.285.000	72.285.000	100,00%
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.224.000	19.224.000	100,00%
		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183.242.000	180.856.805	98,70%
	D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		51.965.000	51.934.500	99,94%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	100,00%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.965.000	46.934.500	99,94%
	E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		825.480.000	823.856.279	99,80%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	825.480.000	823.856.279	99,80%
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**85.805.112.132**	**81.429.171.140**	**94,90%**
	A	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		34.325.405.849	29.821.462.919	86,88%
		1	Pembangunan Puskesmas	14.218.531.265	10.704.080.173	75,28%
		2	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.703.606.000	3.634.729.039	98,14%
		3	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	3.276.600.000	3.225.723.174	98,45%
		4	Pengembangan Puskesmas	3.479.770.884	3.460.923.200	99,46%
		5	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	3.785.600.000	3.563.872.400	94,14%
		6	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	302.416.700	294.750.000	97,46%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Kesehatan				**128.509.345.048**	**122.652.928.892**	**95,44%**
		7	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	158.628.000	158.542.896	99,95%
		8	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	5.120.623.000	4.500.652.037	87,89%
		9	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	279.630.000	278.190.000	99,49%
	B	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		51.412.658.283	51.540.670.221	100,25%
		1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	160.150.000	121.030.000	75,57%
		2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	207.328.000	200.378.000	96,65%
		3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	6.800.000	6.800.000	100,00%
		4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	52.182.000	49.482.000	94,83%
		5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6.800.000	6.800.000	100,00%
		6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	232.030.000	228.780.000	98,60%
		7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	20.400.000	20.400.000	100,00%
		8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	13.600.000	13.600.000	100,00%
		9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	14.280.000	14.280.000	100,00%
		10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.280.000	14.280.000	100,00%
		11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	14.280.000	14.280.000	100,00%
		12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	64.134.680	34.439.340	53,70%
		13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	129.980.000	129.980.000	100,00%
		14	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	536.486.000	483.818.997	90,18%
		15	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	117.300.000	117.300.000	100,00%
		16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	6.800.000	6.800.000	100,00%
		17	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	398.092.000	382.082.000	95,98%
		18	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	8.000.000.000	9.946.535.834	124,33%
		19	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	6.750.000	300.000	4,44%
		20	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	17.588.808.603	17.586.198.603	99,99%
		21	Operasional Pelayanan Puskesmas	23.077.738.000	21.432.090.189	92,87%
		22	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	664.539.000	651.115.258	97,98%
		23	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	25.500.000	25.500.000	100,00%
		24	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	27.200.000	27.200.000	100,00%
		25	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	27.200.000	27.200.000	100,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Kesehatan				**128.509.345.048**	**122.652.928.892**	**95,44%**
	C		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	67.048.000	67.038.000	99,99%
		1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	67.048.000	67.038.000	99,99%
3	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**6.914.353.500**	**6.662.078.853**	**96,35%**
	A		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	5.449.440.000	5.239.462.163	96,15%
		1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	5.342.050.000	5.141.232.163	96,24%
		2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	107.390.000	98.230.000	91,47%
	B		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.464.913.500	1.422.616.690	97,11%
		1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.464.913.500	1.422.616.690	97,11%
4	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**			**411.315.000**	**347.406.402**	**84,46%**
	A		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	411.315.000	347.406.402	84,46%
		1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	411.315.000	347.406.402	84,46%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6) Dinas Perikanan

Tabel 1.46. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Dinas Perikanan

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**2.252.285.656**	**2.007.019.719**	**89,11%**
1	**Belanja Operasi**	**2.219.035.656**	**1.973.769.719**	**88,95%**
	a. Belanja Pegawai	1.164.142.876	996.988.674	85,64%
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.054.892.780	976.781.045	92,60%
2	**Belanja Modal**	**33.250.000**	**33.250.000**	**100,00%**
	a. Belanja Peralatan dan Mesin;	33.250.000	33.250.000	100,00%

Tabel 1.47. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Dinas Perikanan

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Perikanan				**2.252.285.656**	**2.007.019.719**	**89,11%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.816.015.656**	**1.580.779.719**	**87,05%**
	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.337.624.376	1.133.616.174	84,75%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.164.142.876	996.988.674	85,64%
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	173.481.500	136.627.500	78,76%
	B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		84.812.500	84.812.500	100,00%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	8.400.000	8.400.000	100,00%
		2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000	5.000.000	100,00%
		3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	71.412.500	71.412.500	100,00%
	C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		182.128.780	181.842.710	99,84%
		1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.710.000	15.567.750	99,09%
		2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.046.280	9.036.280	99,89%
		3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.372.500	157.238.680	99,91%
	D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		21.250.000	21.250.000	100,00%
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.250.000	21.250.000	100,00%
	E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		15.000.000	10.541.000	70,27%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	2.000.000	40,00%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	8.541.000	85,41%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Perikanan				**2.252.285.656**	**2.007.019.719**	**89,11%**
	F		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.200.000	148.717.335	84,88%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	129.870.000	112.881.386	86,92%
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.330.000	6.934.949	45,24%
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	28.901.000	96,34%
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**			**65.825.000**	**65.825.000**	**100,00%**
	A		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	65.825.000	65.825.000	100,00%
		1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	10.200.000	10.200.000	100,00%
		2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	55.625.000	55.625.000	100,00%
3	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**			**360.232.500**	**350.262.500**	**97,23%**
	A		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	360.232.500	350.262.500	97,23%
		1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	94.716.000	91.346.000	96,44%
		2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	45.682.500	45.682.500	100,00%
		3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	219.834.000	213.234.000	97,00%
4	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**10.212.500**	**10.152.500**	**99,41%**
	A		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	10.212.500	10.152.500	99,41%
		1	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	10.212.500	10.152.500	99,41%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

7) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Tabel 1.48. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**1.969.037.534**	**1.863.814.933**	**94,66%**
1	**Belanja Operasi**	**1.969.037.534**	**1.863.814.933**	**94,66%**
	a. Belanja Pegawai	1.481.954.034	1.421.874.703	95,95%
	b. Belanja Barang dan Jasa	487.083.500	441.940.230	90,73%

Tabel 1.49. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi				**1.969.037.534**	**1.863.814.933**	**94,66%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.889.809.534**	**1.785.870.133**	**94,50%**
	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.585.520.034	1.486.849.703	93,78%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.481.954.034	1.421.874.703	95,95%
		2	Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	103.566.000	64.975.000	62,74%
	B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		10.200.000	10.200.000	100,00%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta adribut kelengkapannya	10.200.000	10.200.000	100,00%
	C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		202.249.500	202.249.430	100,00%
		1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	250.000	250.000	100,00%
		2	Penyediaan bahan Logistik Kantor	19.010.000	19.010.000	100,00%
		3	Penyediaan bahan Cetak dan Penggandaan	8.222.500	8.222.430	100,00%
		4	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.767.000	174.767.000	100,00%
	D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		16.745.000	13.628.500	81,39%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100,00%
		2	Penyediaan jasa sumber daya air dan Listrik	13.745.000	10.628.500	77,33%
	E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		75.095.000	72.942.500	97,13%
		1	Penyediaan pemeliharaan Kendaraan Dinas	59.880.000	59.880.000	100,00%
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.110.000	1.635.000	52,57%
		3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.105.000	11.427.500	94,40%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi				**1.969.037.534**	**1.863.814.933**	**94,66%**
2	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**			**0**	**0**	**0,00%**
	A	Pelindung PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Kabupaten/Kota		0	0	0,00%
		1	Penyediaan Layanan terpadu pada Calon Pekerja Migran		0	0,00%
3	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**			**48.188.000**	**46.905.000**	**97,34%**
	A	Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam Satu Daerah Kab/Kota		31.160.000	31.060.000	99,68%
		1	Penyelenggaraan pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan jamsostek serta pengupahan	31.160.000	31.060.000	99,68%
	B	Pencegahan Dan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Yang Berdampak Pada Kepentingan Di Satu Daerah Kab/Kota		17.028.000	15.845.000	93,05%
		1	Penyelesaiaan perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan penutupan perusahaan yg Berdampak pada kepentingan di satu Daerah Kab/Kota	17.028.000	15.845.000	93,05%
4	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**			**13.440.000**	**13.440.000**	**100,00%**
	A	Kegiatan Penyediaan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi		13.440.000	13.440.000	100,00%
		1	Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	13.440.000	13.440.000	100,00%
5	**PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**			**7.096.000**	**7.096.000**	**100,00%**
	A	Penataan Persebaran Penduduk Yg Berasal Dari Satu Daerah Kab/Kota		7.096.000	7.096.000	100,00%
		1	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	7.096.000	7.096.000	100,00%
6	**PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**			**10.504.000**	**10.503.800**	**100,00%**
	A	Pengembangan Satuan Permukiman Pada Tahap Kemandirian		10.504.000	10.503.800	100,00%
		1	Penguatan Infrastruktur, Sosial Ekonomo, dan kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	10.504.000	10.503.800	100,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8) Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 1.50. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**2.305.081.041**	**1.804.304.638**	**78,28%**
1	**Belanja Operasi**	**2.292.081.041**	**1.804.304.638**	**78,72%**
	a. Belanja Pegawai	1.000.872.031	958.164.212	95,73%
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.291.209.010	846.140.426	65,53%
2	**Belanja Modal**	**13.000.000**	**0**	**0,00%**
	a. Belanja Peralatan dan Mesin;	13.000.000	0	0,00%

Tabel 1.51. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Dinas Komunikasi dan Informatika

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Komunikasi dan Informatika				**2.305.081.041**	**1.804.304.638**	**78,28%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.344.387.161**	**1.187.190.485**	**88,31%**
	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.092.298.031	1.011.084.212	92,56%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.000.872.031	958.164.212	95,73%
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.586.000	0	0,00%
		3	Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	75.840.000	52.920.000	69,78%
	B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		7.200.000	7.200.000	100,00%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	7.200.000	7.200.000	100,00%
	C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		170.609.130	106.144.810	62,22%
		1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.786.120	14.250.790	84,90%
		2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.700.010	10.349.650	88,46%
		3	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.800.000	0	0,00%
		4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.323.000	81.544.370	58,11%
	D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	0	0,00%
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Komunikasi dan Informatika				**2.305.081.041**	**1.804.304.638**	**78,28%**
	E		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.400.000	6.685.800	64,29%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.240.000	2.200.000	98,21%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	8.160.000	4.485.800	54,97%
	F		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.880.000	56.075.663	87,78%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.880.000	55.575.663	99,46%
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000	500.000	6,25%
2	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**			**753.642.200**	**483.516.630**	**64,16%**
	A		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	753.642.200	483.516.630	64,16%
		1	Relasi Media	515.832.600	326.501.800	63,30%
		2	Pelayanan Informasi Publik	155.525.250	120.659.830	77,58%
		3	Penyusunan Konten	82.284.350	36.355.000	44,18%
		4	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	0	0	0,00%
3	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**			**207.051.680**	**133.597.523**	**64,52%**
	A		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	110.262.000	94.124.523	85,36%
		1	Pengelola Nama Domain dan Sub Domian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelola Nama Domain Pemerintah Desa	110.262.000	94.124.523	85,36%
	B		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	96.789.680	39.473.000	40,78%
		1	Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah Yang Integritas	96.789.680	39.473.000	40,78%
		2	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas Sesuai Dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	0	0	0,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

9) Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 1.52. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Pendapatan dan Belanja - Dinas Lingkungan Hidup

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**2.860.123.507**	**2.580.919.857**	**90,24%**
1	**Belanja Operasi**	**2.243.123.507**	**1.986.471.248**	**88,56%**
	a. Belanja Pegawai	1.139.982.563	1.113.610.636	97,69%
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.103.140.944	872.860.612	79,13%
2	**Belanja Modal**	**617.000.000**	**594.448.609**	**96,34%**
	a. Belanja Peralatan dan Mesin;	617.000.000	594.448.609	96,34%

Tabel 1.53. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Dinas Lingkungan Hidup

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Lingkungan Hidup				**2.860.123.507**	**2.580.919.857**	**90,24%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.675.773.063**	**1.599.305.104**	**95,44%**
	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.222.362.563	1.170.850.636	95,79%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.139.982.563	1.113.610.636	97,69%
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	82.380.000	57.240.000	69,48%
	B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		57.402.000	57.402.000	100,00%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	6.600.000	6.600.000	100,00%
		2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50.802.000	50.802.000	100,00%
	C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		150.138.950	128.959.620	85,89%
		1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.616.400	10.155.500	87,42%
		2	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	14.918.550	13.786.682	92,41%
		3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.604.000	105.017.438	84,96%
	D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		6.999.050	6.999.050	100,00%
		1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0,00%
		2	Pengadaan Mebel	0	0	0,00%
		3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.450.000	3.450.000	100,00%
		4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.549.050	3.549.050	100,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Lingkungan Hidup				**2.860.123.507**	**2.580.919.857**	**90,24%**
	E		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.520.000	9.164.000	73,19%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	3.575.000	89,38%
		2	Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air dan Listrik	8.520.000	5.589.000	65,60%
	F		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	226.350.500	225.929.798	99,81%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.740.000	41.740.000	100,00%
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.180.000	174.759.298	99,76%
		3	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	9.430.500	9.430.500	100,00%
2	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**			**168.911.300**	**0**	**0,00%**
	A		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	168.911.300	0	0,00%
		1	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	168.911.300		0,00%
3	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**			**47.380.000**	**41.223.000**	**87,01%**
	A		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	47.380.000	41.223.000	87,01%
		1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	21.380.000	21.380.000	100,00%
		2	Pelaksanaan Pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara, dan laut	26.000.000	19.843.000	76,32%
4	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**			**38.539.960**	**38.539.960**	**100,00%**
	A		Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	38.539.960	38.539.960	100,00%
		1	Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	38.539.960	38.539.960	100,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Lingkungan Hidup				**2.860.123.507**	**2.580.919.857**	**90,24%**
5	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			**194.289.760**	**189.173.760**	**97,37%**
	A		Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota	194.289.760	189.173.760	97,37%
		1	Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	116.849.760	112.294.760	96,10%
		2	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	77.440.000	76.879.000	99,28%
6	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**			**735.229.424**	**712.678.033**	**96,93%**
	A		Pengelolaan Sampah	671.274.424	648.723.033	96,64%
		1	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA/ Kabupaten/Kota	671.274.424	648.723.033	96,64%
	B		Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	63.955.000	63.955.000	100,00%
		1	Monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah	63.955.000	63.955.000	100,00%

10) Dinas Pariwisata

Tabel 1.54. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Dinas Pariwisata

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**3.375.488.841**	**2.704.465.709**	**80,12%**
1	**Belanja Operasi**	**2.346.488.841**	**2.219.051.709**	**94,57%**
	a. Belanja Pegawai	1.113.857.781	1.046.086.358	93,92%
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.232.631.060	1.172.965.351	95,16%
2	**Belanja Modal**	**1.029.000.000**	**485.414.000**	**47,17%**
	a. Belanja Peralatan dan Mesin;	714.000.000	306.414.000	42,92%
	b. Belanja Irigasi dan Jaringan;	315.000.000	179.000.000	56,83%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 1.55. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Dinas Pariwisata

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Pariwisata				**3.375.488.841**	**2.704.465.709**	**80,12%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA**			**1.512.238.781**	**1.415.961.577**	**93,63%**
	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.190.117.781	1.097.086.358	92,18%
		1	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	1.113.857.781	1.046.086.358	93,92%
		2	Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76.260.000	51.000.000	66,88%
	B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		6.600.000	6.600.000	100,00%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	6.600.000	6.600.000	100,00%
	C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		200.978.000	200.118.240	99,57%
		1	Penyedia Bahan Logistik Kantor	4.760.000	4.760.000	100,00%
		2	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	5.780.000	5.780.000	100,00%
		3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.438.000	189.578.240	99,55%
	D	Pengadaan Barang Millik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		36.000.000	35.988.000	99,97%
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	36.000.000	35.988.000	99,97%
	E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		10.003.000	7.632.000	76,30%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.750.000	87,50%
		2	Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	8.003.000	5.882.000	73,50%
	F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		68.540.000	68.536.979	100,00%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.040.000	63.036.979	100,00%
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000	4.500.000	100,00%
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.000.000	1.000.000	100,00%
2	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI**			**712.526.280**	**536.164.982**	**75,25%**
	A	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		172.183.890	172.039.232	99,92%
		1	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	172.183.890	172.039.232	99,92%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Pariwisata				**3.375.488.841**	**2.704.465.709**	**80,12%**
	B		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	540.342.390	364.125.750	67,39%
		1	Pengadaan/PemeliharaanRehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengbelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	443.190.000	267.016.000	60,25%
		2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	46.152.390	46.144.750	99,98%
		3	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Priwisata Kabupaten/Kota	51.000.000	50.965.000	99,93%
3	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**			**83.996.750**	**83.459.900**	**99,36%**
	A		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	83.996.750	83.459.900	99,36%
		1	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	46.251.000	45.751.000	98,92%
		2	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	37.745.750	37.708.900	99,90%
4	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**			**0**	**0**	**0,00%**
	A		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	0	0	0,00%
		1	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	0	0	0,00%
5	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**			**1.066.727.030**	**668.879.250**	**62,70%**
	A		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.066.727.030	668.879.250	62,70%
		1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingakat Daerah Kabupaten/Kota	1.066.727.030	668.879.250	62,70%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

11) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tabel 1.56. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**60.197.699.031**	**40.777.175.054**	**67,74%**
1	**Belanja Operasi**	**20.013.642.546**	**15.466.642.319**	**77,28%**
	a. Belanja Pegawai	4.411.076.400	4.169.450.569	94,52%
	b. Belanja Barang dan Jasa	15.602.566.146	11.297.191.750	72,41%
2	**Belanja Modal**	**40.184.056.485**	**25.310.532.735**	**62,99%**
	a. Belanja Peralatan dan Mesin;	1.090.511.075	237.972.900	21,82%
	b. Belanja Bangunan dan Gedung;	757.420.800	542.249.925	71,59%
	c. Belanja Jalan;	19.232.192.851	24.530.309.910	127,55%
	d. Belanja Irigasi dan Jaringan;	19.103.931.759	0	0,00%

Tabel 1.57. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				**60.197.699.031**	**40.777.175.054**	**67,74%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**8.782.003.700**	**7.688.548.132**	**87,55%**
	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.813.151.400	5.411.795.557	93,10%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.411.076.400	4.169.450.569	94,52%
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.402.075.000	1.242.344.988	88,61%
	B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		34.200.000	0	0,00%
		1	Pengadaan Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	34.200.000	0	0,00%
	C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		735.657.000	735.177.414	99,93%
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.325.000	17.307.500	99,90%
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.000.000	21.000.000	100,00%
		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	170.356.000	170.107.000	99,85%
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.020.000	30.019.900	100,00%
		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	496.956.000	496.743.014	99,96%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				**60.197.699.031**	**40.777.175.054**	**67,74%**
	D		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.289.290.800	832.772.825	64,59%
		1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	179.540.000	0	0,00%
		2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	330.095.000	268.312.900	81,28%
		3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	779.655.800	564.459.925	72,40%
	E		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.510.000	73.549.705	67,78%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60.890.000	57.257.500	94,03%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.620.000	16.292.205	34,21%
	F		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	801.194.500	635.252.631	79,29%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	460.222.000	453.440.131	98,53%
		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	340.972.500	181.812.500	53,32%
2	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**			**6.850.107.950**	**3.517.902.339**	**51,36%**
	A		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.559.593.950	3.229.380.079	49,23%
		1	Normalisasi/Restorasi Sungai	550.657.650	537.944.029	97,69%
		2	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	5.988.796.300	2.676.786.050	44,70%
		3	Pembangunan Bendungan	6.940.000	1.500.000	21,61%
		4	Pembangunan Tanggul Sungai	13.200.000	13.150.000	99,62%
	B		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasiyang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	290.514.000	288.522.260	99,31%
		1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	290.514.000	288.522.260	99,31%
3	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**			**13.682.463.716**	**10.923.399.534**	**79,84%**
	A		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	13.682.463.716	10.923.399.534	79,84%
		1	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	13.520.257.641	10.843.713.034	80,20%
		2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	162.206.075	79.686.500	49,13%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				**60.197.699.031**	**40.777.175.054**	**67,74%**
4	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**			**5.304.970.527**	**4.734.854.750**	**89,25%**
	A	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		5.304.970.527	4.734.854.750	89,25%
		1	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	5.304.970.527	4.734.854.750	89,25%
5	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**			**1.420.575.168**	**23.244.000**	**1,64%**
	A	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.420.575.168	23.244.000	1,64%
		1	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.420.575.168	23.244.000	1,64%
6	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**			**51.200.000**	**44.400.000**	**86,72%**
	A	Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Dan Sertifikat Laik Fungsi		51.200.000	44.400.000	86,72%
		1	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	51.200.000	44.400.000	86,72%
7	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**			**0**	**0**	**0,00%**
	A	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungaannya di Daerah Kabupaten/Kota		0	0	0,00%
		1	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0,00%
8	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**			**22.060.183.895**	**13.056.065.673**	**59,18%**
	A	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		22.060.183.895	13.056.065.673	59,18%
		1	Pembangunan Jalan	16.678.471.851	12.872.154.373	77,18%
		2	Pemeliharaan Berkala Jalan	613.900.000	83.913.300	13,67%
		3	Pembangunan Jembatan	4.305.972.000	99.998.000	2,32%
		4	Pemeliharaan Rutin Jalan	461.840.044	0	0,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				**60.197.699.031**	**40.777.175.054**	**67,74%**
9	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**			**1.062.152.075**	**323.192.126**	**30,43%**
	A	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		235.020.000	225.342.126	95,88%
		1	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	235.020.000	225.342.126	95,88%
	B	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		827.132.075	97.850.000	11,83%
		1	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	827.132.075	97.850.000	11,83%
10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**			**757.812.000**	**284.101.000**	**37,49%**
	A	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		757.812.000	284.101.000	37,49%
		1	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	757.812.000	284.101.000	37,49%
11	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			**66.400.000**	**42.940.000**	**64,67%**
	A	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		66.400.000	42.940.000	64,67%
		1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	66.400.000	42.940.000	64,67%
12	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**			**159.830.000**	**138.527.500**	**86,67%**
	A	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		159.830.000	138.527.500	86,67%
		1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	159.830.000	138.527.500	86,67%
13	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**			**0**	**0**	**0,00%**
	A	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		0	0	0,00%
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 1.58. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**5.770.840.211**	**4.896.871.217**	**84,86%**
1	**Belanja Operasi**	**5.577.340.211**	**4.704.064.217**	**84,34%**
	a. Belanja Pegawai	2.162.377.596	1.849.298.780	85,52%
	b. Belanja Barang dan Jasa	3.414.962.615	2.854.765.437	83,60%
2	**Belanja Modal**	**193.500.000**	**192.807.000**	**99,64%**
	a. Belanja Peralatan dan Mesin;	193.500.000	192.807.000	99,64%

Tabel 1.59. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				**5.770.840.211**	**4.896.871.217**	**84,86%**
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**			**3.370.706.066**	**2.839.155.885**	**84,23%**
	A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		20.064.960	15.027.960	74,90%
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.065.000	5.028.000	49,96%
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.499.990	2.499.990	100,00%
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.499.990	2.499.990	100,00%
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.499.990	2.499.990	100,00%
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.499.990	2.499.990	100,00%
	B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.420.747.596	1.917.458.780	79,21%
		1	Penyediaan Gaji ASN	2.162.377.596	1.849.298.780	85,52%
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	258.370.000	68.160.000	26,38%
	C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12.600.000	12.600.000	100,00%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12.600.000	12.600.000	100,00%
	D	Administrasi Umum Perangkat Daerah		390.227.360	387.803.747	99,38%
		1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.012.860	45.800.860	95,39%
		2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.460.500	11.460.500	100,00%
		3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330.754.000	330.542.387	99,94%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				**5.770.840.211**	**4.896.871.217**	**84,86%**
	E		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0,00%
		1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0,00%
		2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0,00%
	F		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.130.000	20.955.306	74,49%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.870.000	7.250.000	81,74%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.260.000	13.705.306	71,16%
	G		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	354.776.150	341.769.292	96,33%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	142.276.150	129.269.292	90,86%
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.500.000	8.500.000	100,00%
		3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	204.000.000	204.000.000	100,00%
	H		Penataan Organisasi	144.160.000	143.540.800	99,57%
		1	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	144.160.000	143.540.800	99,57%
2	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**			**561.468.575**	**474.269.575**	**84,47%**
	A		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerntahan Desa	561.468.575	474.269.575	84,47%
		1	Faslitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	78.609.500	78.586.500	99,97%
		2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	222.190.075	183.411.075	82,55%
		3	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	193.339.000	152.402.000	78,83%
		4	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	67.330.000	59.870.000	88,92%
3	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**			**1.838.665.570**	**1.583.445.757**	**86,12%**
	A		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.838.665.570	1.583.445.757	86,12%
		1	Identifkasi dan Invertarisasi Masyarakat Hukum Adat	0	0	0,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				**5.770.840.211**	**4.896.871.217**	**84,86%**
		2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakt Hukum Adat	161.448.060	155.910.000	96,57%
		3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakt Hukum Adat	859.917.000	610.387.647	70,98%
		4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	35.080.510	35.080.510	100,00%
		5	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	23.606.000	23.600.000	99,97%
		6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	758.614.000	758.467.600	99,98%

13) Dinas Pemuda dan Olahraga

Tabel 1.60. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**12.113.165.581**	**9.661.874.126**	**79,76%**
1	**Belanja Operasi**	**12.079.165.581**	**9.634.274.126**	**79,76%**
	a. Belanja Pegawai	968.037.381	911.083.880	94,12%
	b. Belanja Barang dan Jasa	11.111.128.200	8.723.190.246	78,51%
2	**Belanja Modal**	**34.000.000**	**27.600.000**	**81,18%**
	a. Belanja Peralatan dan Mesin;	34.000.000	27.600.000	81,18%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 1.61. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Dinas Pemuda dan Olahraga

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Pemuda dan Olahraga				**12.113.165.581**	**9.661.874.126**	**79,76%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.219.694.381**	**1.090.697.971**	**89,42%**
	A	KEGIATAN		1.045.807.381	968.333.880	92,59%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	968.037.381	911.083.880	94,12%
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	77.770.000	57.250.000	73,61%
	B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		5.400.000	5.400.000	100,00%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.400.000	5.400.000	100,00%
	C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		89.065.000	40.383.792	45,34%
		1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.500.000	2.500.000	100,00%
		2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.950.000	5.000.000	62,89%
		3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.615.000	32.883.792	41,83%
	D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	0	0,00%
		1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0,00%
	E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12.942.000	11.262.300	87,02%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	3.369.000	84,23%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.942.000	7.893.300	88,27%
	F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		66.480.000	65.317.999	98,25%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.980.000	63.187.999	98,76%
		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.500.000	2.130.000	85,20%
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**			**99.995.000**	**1.240.000**	**1,24%**
	A	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		99.995.000	1.240.000	1,24%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Pemuda dan Olahraga				**12.113.165.581**	**9.661.874.126**	**79,76%**
		1	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	99.995.000	1.240.000	1,24%
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**			**10.743.476.200**	**8.569.936.155**	**79,77%**
	A		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.743.476.200	8.569.936.155	79,77%
		1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	10.129.641.200	8.106.690.759	80,03%
		2	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	613.835.000	463.245.396	75,47%
4	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**			**50.000.000**	**0**	**0,00%**
	A		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	50.000.000	0	0,00%
		1	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	50.000.000	0	0,00%

14) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 1.62. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**1.992.001.124**	**1.852.371.349**	**92,99%**
1	**Belanja Operasi**	**1.992.001.124**	**1.852.371.349**	**92,99%**
	a. Belanja Pegawai	1.279.454.024	1.190.245.349	93,03%
	b. Belanja Barang dan Jasa	712.547.100	662.126.000	92,92%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 1.63. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				**1.992.001.124**	**1.852.371.349**	**92,99%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.769.497.874**	**1.640.600.099**	**92,72%**
	A	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		18.929.000	18.899.000	99,84%
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.291.000	5.283.000	99,85%
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.638.000	13.616.000	99,84%
	B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.399.874.024	1.281.319.349	91,53%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.279.454.024	1.190.245.349	93,03%
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	115.920.000	86.580.000	74,69%
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.500.000	4.494.000	99,87%
	C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		7.800.000	7.800.000	100,00%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	7.800.000	7.800.000	100,00%
	D	Administrasi Umum Perangkat Daerah		168.220.850	164.066.850	97,53%
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000	1.000.000	100,00%
		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.122.000	28.978.000	96,20%
		3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.504.850	16.752.350	85,89%
		4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.635.000	5.635.000	100,00%
		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.959.000	111.701.500	99,77%
	E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	0	0,00%
		1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0,00%
	F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		30.054.000	23.894.900	79,51%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	5.700.000	95,00%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.560.000	16.890.000	74,87%
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.494.000	1.304.900	87,34%
	G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		144.620.000	144.620.000	100,00%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.620.000	66.620.000	100,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				**1.992.001.124**	**1.852.371.349**	**92,99%**
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	3.000.000	100,00%
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000	75.000.000	100,00%
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**			**57.030.000**	**56.948.000**	**99,86%**
	A		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	57.030.000	56.948.000	99,86%
		1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	19.210.000	19.130.000	99,58%
		2	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	37.820.000	37.818.000	99,99%
3	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**			**52.800.000**	**52.705.000**	**99,82%**
	A		Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	52.800.000	52.705.000	99,82%
		1	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	24.000.000	23.945.000	99,77%
		2	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	28.800.000	28.760.000	99,86%
4	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**			**20.755.000**	**20.640.000**	**99,45%**
	A		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20.755.000	20.640.000	99,45%
		1	Pengawasan Penanaman Modal	20.755.000	20.640.000	99,45%
5	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**			**91.918.250**	**81.478.250**	**88,64%**
	A		Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	91.918.250	81.478.250	88,64%
		1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	91.918.250	81.478.250	88,64%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

16) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel 1.64. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**188.108.982.606**	**177.027.769.995**	**94,11%**
1	**Belanja Operasi**	**184.783.906.140**	**173.189.548.413**	**93,73%**
	a. Belanja Pegawai	139.236.559.277	131.113.733.888	94,17%
	b. Belanja Barang dan Jasa	21.911.279.863	19.628.657.785	89,58%
	c. Belanja Hibah	23.636.067.000	22.447.156.740	94,97%
2	**Belanja Modal**	**3.325.076.466**	**3.838.221.582**	**115,43%**
	a. Belanja Peralatan dan Mesin;	1.575.041.476	2.001.199.150	127,06%
	b. Belanja Bangunan dan Gedung;	66.587.000	65.528.850	98,41%
	c. Belanja modal aset tetap lainnya;	1.683.447.990	1.771.493.582	105,23%

Tabel 1.65. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				**188.108.982.606,45**	**177.027.769.995**	**94,11%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**140.413.441.097**	**131.869.382.868**	**93,92%**
	A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0	0	0,00%
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0,00%
	B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		139.905.145.277	131.369.859.888	93,90%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	139.236.559.277	131.113.733.888	94,17%
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	668.586.000	256.126.000	38,31%
	C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		15.000.000	15.000.000	100,00%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15.000.000	15.000.000	100,00%
	D	Administrasi Umum Perangkat Daerah		127.635.820	126.400.118	99,03%
		1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.395.820	4.395.820	100,00%
		2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.050.000	5.050.000	100,00%
		3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.190.000	116.954.298	98,95%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				**188.108.982.606,45**	**177.027.769.995**	**94,11%**
	E		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.120.000	17.695.357	70,44%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100,00%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.120.000	16.695.357	69,22%
	F		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	340.540.000	340.427.505	99,97%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	340.540.000	340.427.505	99,97%
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**45.067.419.509**	**43.973.636.127**	**97,57%**
	A		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	24.143.088.672	23.769.016.787	98,45%
		1	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	0	0,00%
		2	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0	0	0,00%
		3	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	105.000.000	104.996.743	100,00%
		4	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	148.179.825	131.079.825	88,46%
		5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	418.783.000	398.142.000	95,07%
		6	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	22.254.014.347	22.043.352.650	99,05%
		7	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	460.767.000	404.610.499	87,81%
		8	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	381.349.630	379.587.050	99,54%
		9	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	168.652.295	119.204.295	70,68%
		10	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	139.492.575	121.260.575	86,93%
		11	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	66.850.000	66.783.150	99,90%
	B		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	14.623.838.837	14.417.541.690	98,59%
		1	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	0	0,00%
		2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	547.085.000	535.872.600	97,95%
		3	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	258.730.800	258.548.598	99,93%
		4	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	174.997.000	173.200.000	98,97%
		5	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	12.663.974.152	12.624.517.317	99,69%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				**188.108.982.606,45**	**177.027.769.995**	**94,11%**
		6	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	305.257.060	174.510.000	57,17%
		7	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	73.343.825	64.792.825	88,34%
		8	Pembangunan Ruang Kelas Baru	600.451.000	586.100.350	97,61%
		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0	0	0,00%
	C		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	5.359.441.000	4.852.106.650	90,53%
		1	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	0	0	0,00%
		2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	0	0	0,00%
		3	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.588.992.000	4.459.448.400	97,18%
		4	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	0	0	0,00%
		5	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0	0	0,00%
		6	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	227.653.000	194.593.750	85,48%
		7	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	242.799.500	184.079.500	75,82%
		8	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0	0	0,00%
		9	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	299.996.500	13.985.000	4,66%
	D		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	941.051.000	934.971.000	99,35%
		1	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	729.010.000	726.772.000	99,69%
		2	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0	0	0,00%
		3	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	212.041.000	208.199.000	98,19%
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**			**0**	**0**	**0,00%**
	A		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	0	0	0,00%
		1	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	0		0,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				**188.108.982.606,45**	**177.027.769.995**	**94,11%**
	B		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0,00%
		1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			0,00%
		2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional			0,00%
	C		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0,00%
		1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat			0,00%
		2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat			0,00%
4	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**			**956.730.000**	**525.088.000**	**54,88%**
	A		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	956.730.000	525.088.000	54,88%
		1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	110.778.500	96.388.000	87,01%
		2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	845.951.500	428.700.000	50,68%
5	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**			**0**	**0**	**0,00%**
	A		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0	0	0,00%
		1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0	0	0,00%
6	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**			**1.576.832.000**	**576.523.000**	**36,56%**
	A		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0,00%
		1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	0	0	0,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				**188.108.982.606,45**	**177.027.769.995**	**94,11%**
		2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	0	0	0,00%
	B		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	506.832.000	506.523.000	99,94%
		1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	506.832.000	506.523.000	99,94%
		2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	0	0	0,00%
	C		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.070.000.000	70.000.000	6,54%
		1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	0	0	0,00%
		2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	1.070.000.000	70.000.000	6,54%
7	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**			**0**	**0**	**0,00%**
	A		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0,00%
		1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	0	0	0,00%
		2	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	0	0	0,00%
8	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**			**94.560.000**	**83.140.000**	**87,92%**
	A		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	94.560.000	83.140.000	87,92%
		1	Penetapan Cagar Budaya	94.560.000	83.140.000	87,92%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

17) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 1.66. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja – Dinas P2KBP3A

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**6.493.563.996**	**5.713.811.876**	**87,99%**
1	**Belanja Operasi**	**6.493.563.996**	**5.713.811.876**	**87,99%**
	a. Belanja Pegawai	1.726.328.576	1.639.395.637	94,96%
	b. Belanja Barang dan Jasa	4.767.235.420	4.074.416.239	85,47%

Tabel 1.67. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Dinas P2KBP3A

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				**6.493.563.996**	**5.713.811.876**	**87,99%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.861.281.996**	**1.730.313.127**	**92,96%**
	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.830.188.576	1.700.595.637	92,92%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.726.328.576	1.639.395.637	94,96%
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	103.860.000	61.200.000	58,93%
	B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		11.400.000	10.200.000	89,47%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	11.400.000	10.200.000	89,47%
		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	0	0,00%
	C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		19.693.420	19.517.490	99,11%
		1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.370.000	6.345.000	99,61%
		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.323.420	13.172.490	98,87%
2	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**			**64.588.750**	**36.144.900**	**55,96%**
	A	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		64.588.750	36.144.900	55,96%
		1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	64.588.750	36.144.900	55,96%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				**6.493.563.996**	**5.713.811.876**	**87,99%**
3	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**			**4.080.000**	**4.080.000**	**100,00%**
	A	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		4.080.000	4.080.000	100,00%
		1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4.080.000	4.080.000	100,00%
4	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**224.015.000**	**216.124.399**	**96,48%**
	A	Administrasi Umum Perangkat Daerah		46.383.000	45.842.250	98,83%
		1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.017.000	7.476.250	93,25%
		2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.366.000	38.366.000	100,00%
	B	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	0	0,00%
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0,00%
	C	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		23.142.000	15.792.200	68,24%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	4.000.000	66,67%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.142.000	11.792.200	68,79%
	D	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		154.490.000	154.489.949	100,00%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.800.000	150.799.949	100,00%
		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.690.000	3.690.000	100,00%
5	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**			**2.195.926.000**	**1.750.674.000**	**79,72%**
	A	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		628.526.000	313.274.000	49,84%
		1	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	0	0	0,00%
		2	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	0	0	0,00%
		3	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	628.526.000	313.274.000	49,84%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				**6.493.563.996**	**5.713.811.876**	**87,99%**
	B		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.567.400.000	1.437.400.000	91,71%
		1	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1.567.400.000	1.437.400.000	91,71%
6	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**			**1.502.472.250**	**1.465.275.450**	**97,52%**
	A		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	64.200.000	64.200.000	100,00%
		1	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	64.200.000	64.200.000	100,00%
	B		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	503.768.250	484.931.450	96,26%
		1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	23.069.250	23.062.450	99,97%
		2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	455.379.000	439.949.000	96,61%
		3	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	25.320.000	21.920.000	86,57%
		4	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	0	0	0,00%
	C		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	934.504.000	916.144.000	98,04%
		1	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	0	0	0,00%
		2	Pembinaan Terpadu Kampung KB	252.034.000	252.034.000	100,00%
		3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	682.470.000	664.110.000	97,31%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				**6.493.563.996**	**5.713.811.876**	**87,99%**
7	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**			**641.200.000**	**511.200.000**	**79,73%**
	A	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		641.200.000	511.200.000	79,73%
		1	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	130.000.000	0	0,00%
		2	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	511.200.000	511.200.000	100,00%
		3	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	0		0,00%

18) Dinas Perhubungan

Tabel 1.68. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Dinas Perhubungan

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**2.812.836.203**	**2.254.002.100**	**80,13%**
1	**Belanja Operasi**	**2.552.836.203**	**2.254.002.100**	**88,29%**
	a. Belanja Pegawai	1.326.424.648	1.228.537.582	92,62%
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.226.411.555	1.025.464.518	83,62%
2	**Belanja Modal**	**260.000.000**	**0**	**0,00%**
	a. Belanja Peralatan dan Mesin;	260.000.000	0	0,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 1.69. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Dinas Perhubungan

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Perhubungan				**2.812.836.203**	**2.254.002.100**	**80,13%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.941.481.438**	**1.720.872.850**	**88,64%**
	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.445.724.648	1.301.617.582	90,03%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.326.424.648	1.228.537.582	92,62%
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	119.300.000	73.080.000	61,26%
	B	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		103.854.570	103.854.570	100,00%
		1	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	0	0	0,00%
		2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	103.854.570	103.854.570	100,00%
	C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		7.800.000	0	0,00%
		1	Pengadaan Pakian Dinas besrta Atribut Kelengkapannya	7.800.000	0	0,00%
	D	Administrasi Umum Perangkat Daerah		250.377.220	240.757.650	96,16%
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penenrangan Bangunan Kantor	4.994.180	4.655.000	93,21%
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.945.000	4.895.000	98,99%
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.422.000	2.422.000	100,00%
		4	Penyediaan Bahan Logistok Kantor	9.739.540	9.583.000	98,39%
		5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.180.500	20.179.500	100,00%
		6	Penyediaan Bahan /Material	0	0	0,00%
		7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0	0,00%
		8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	208.096.000	199.023.150	95,64%
	E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		18.385.000	2.592.700	14,10%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	2.050.000	41,00%
		2	Penyediaan jas Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.385.000	542.700	4,05%
	F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		115.340.000	72.050.348	62,47%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	115.340.000	72.050.348	62,47%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Perhubungan				**2.812.836.203**	**2.254.002.100**	**80,13%**
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			**871.354.765**	**533.129.250**	**61,18%**
	A	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		300.000.000	243.012.900	81,00%
		1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	300.000.000	243.012.900	81,00%
	B	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		9.999.640	0	0,00%
		1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	9.999.640	0	0,00%
	C	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		0	0	0,00%
		1	Koordinasi dan sinkronisasi Pengewasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	0,00%
	D	Pelaksanaan Menajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		561.355.125	290.116.350	51,68%
		1	Penataan Menajemen dan Rekayasa Lalu lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	561.355.125	290.116.350	51,68%

19) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi

Tabel 1.70. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**2.767.755.687**	**2.576.241.309**	**93,08%**
1	**Belanja Operasi**	**2.517.755.687**	**2.327.112.809**	**92,43%**
	a. Belanja Pegawai	1.144.531.937	1.025.552.309	89,60%
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.373.223.750	1.301.560.500	94,78%
2	**Belanja Modal**	**250.000.000**	**249.128.500**	**99,65%**
	a. Belanja Peralatan dan Mesin;	250.000.000	249.128.500	99,65%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 1.71. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi				**2.767.755.687**	**2.576.241.309**	**93,08%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN**			**2.040.295.687**	**1.854.396.809**	**90,89%**
	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.342.225.937	1.188.350.309	88,54%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.144.531.937	1.025.552.309	89,60%
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	197.694.000	162.798.000	82,35%
	B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		5.400.000	5.400.000	100,00%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.400.000	5.400.000	100,00%
	C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		372.930.150	354.503.250	95,06%
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.967.000	4.788.000	68,72%
		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.827.600	22.475.200	61,03%
		3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.330.550	19.028.950	93,60%
		4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	308.805.000	308.211.100	99,81%
	D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		201.000.000	200.288.500	99,65%
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	201.000.000	200.288.500	99,65%
	E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		23.115.000	18.281.050	79,09%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.025.000	1.020.500	50,40%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.090.000	17.260.550	81,84%
	F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		95.624.600	87.573.700	91,58%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.780.000	73.780.000	100,00%
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.270.000	8.604.000	60,29%
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.574.600	5.189.700	68,51%
2	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**			**209.740.000**	**209.740.000**	**100,00%**
	A	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		209.740.000	209.740.000	100,00%
		1	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	209.740.000	209.740.000	100,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi				**2.767.755.687**	**2.576.241.309**	**93,08%**
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**			**13.700.000**	**13.680.000**	**99,85%**
	A		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	13.700.000	13.680.000	99,85%
		1	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	13.700.000	13.680.000	99,85%
4	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**			**6.800.000**	**6.780.000**	**99,71%**
	A		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	6.800.000	6.780.000	99,71%
		1	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	6.800.000	6.780.000	99,71%
5	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**			**66.800.000**	**66.740.000**	**99,91%**
	A		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	60.000.000	59.940.000	99,90%
		1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	60.000.000	59.940.000	99,90%
	B		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.800.000	6.800.000	100,00%
		1	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	6.800.000	6.800.000	100,00%
6	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**			**13.600.000**	**13.520.000**	**99,41%**
	A		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	13.600.000	13.520.000	99,41%
		1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	6.800.000	6.720.000	98,82%
		2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	6.800.000	6.800.000	100,00%
7	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**			**404.580.000**	**399.144.500**	**98,66%**
	A		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	404.580.000	399.144.500	98,66%
		1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	24.580.000	24.530.000	99,80%
		2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	380.000.000	374.614.500	98,58%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi				**2.767.755.687**	**2.576.241.309**	**93,08%**
8	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**			**12.240.000**	**12.240.000**	**100,00%**
	A	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		12.240.000	12.240.000	100,00%
		1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12.240.000	12.240.000	100,00%

20) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tabel 1.72. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**1.916.148.631**	**1.767.321.347**	**92,23%**
1	**Belanja Operasi**	**1.616.148.631**	**1.467.329.747**	**90,79%**
	a. Belanja Pegawai	944.110.271	862.509.747	91,36%
	b. Belanja Barang dan Jasa	672.038.360	604.820.000	90,00%
2	**Belanja Modal**	**300.000.000**	**299.991.600**	**100,00%**
	a. Belanja Peralatan dan Mesin;	300.000.000	299.991.600	100,00%

Tabel 1.73. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				**1.916.148.631**	**1.767.321.347**	**92,23%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.363.502.631**	**1.224.296.347**	**89,79%**
	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.038.788.271	919.879.747	88,55%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	944.110.271	862.509.747	91,36%
		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	94.678.000	57.370.000	60,59%
	B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4.800.000	4.800.000	100,00%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4.800.000	4.800.000	100,00%
	C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		149.071.360	139.767.923	93,76%
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.992.500	2.850.000	71,38%
		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.149.480	7.987.700	56,45%
		3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.469.380	4.938.173	90,29%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				**1.916.148.631**	**1.767.321.347**	**92,23%**
		4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.972.000	2.510.000	63,19%
		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.488.000	121.482.050	100,00%
	D		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0,00%
		1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0,00%
		2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0,00%
	E		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.990.000	71.689.235	96,89%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.970.000	2.320.000	58,44%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.020.000	69.369.235	99,07%
	F		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.853.000	88.159.442	91,02%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	87.850.000	84.269.525	95,92%
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	0	0,00%
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.003.000	3.889.917	64,80%
2	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**			**503.505.000**	**494.059.400**	**98,12%**
	A		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	353.505.000	348.233.600	98,51%
		1	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	299.991.600	100,00%
		2	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	0	0	0,00%
		3	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53.505.000	48.242.000	90,16%
	B		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	145.825.800	97,22%
		1	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	150.000.000	145.825.800	97,22%
		2	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	0	0	0,00%
3	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**			**49.141.000**	**48.965.600**	**99,64%**
	A		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	49.141.000	48.965.600	99,64%
		1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	38.566.000	38.505.600	99,84%
		2	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	10.575.000	10.460.000	98,91%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

21) Dinas Pertanian

Tabel 1.74. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Dinas Pertanian

No	Uraian	Setelah Perubahan	Realisasi	%
BELANJA		**23.602.954.646**	**12.291.721.875**	**52,08%**
1	**Belanja Operasi**	**23.601.454.646**	**12.290.221.875**	**52,07%**
	a. Belanja Pegawai	5.831.770.116	5.706.492.201	97,85%
	b. Belanja Barang dan Jasa	17.769.684.530	6.583.729.674	37,05%
2	**Belanja Modal**	**1.500.000**	**1.500.000**	**100,00%**
	a. Belanja Peralatan dan Mesin	1.500.000	1.500.000	100,00%

Tabel 1.75. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Dinas Pertanian

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				**23.602.954.646**	**12.291.721.875**	**52,08%**
1	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**			**7.381.000.000**	**2.543.675.650**	**34,46%**
	A	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		7.381.000.000	2.543.675.650	34,46%
		1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.381.000.000	2.543.675.650	34,46%
2	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**			**18.074.000**	**6.856.000**	**37,93%**
	A	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		18.074.000	6.856.000	37,93%
		1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	18.074.000	6.856.000	37,93%
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**7.496.911.776**	**7.098.552.386**	**94,69%**
	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.095.410.116	5.822.652.201	95,53%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.831.770.116	5.706.492.201	97,85%
		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	263.640.000	116.160.000	44,06%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				**23.602.954.646**	**12.291.721.875**	**52,08%**
	B		Administrasi Umum Perangkat Daerah	798.145.850	762.010.160	95,47%
		1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.970.000	50.821.000	99,71%
		2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.914.850	28.346.100	91,69%
		3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	716.261.000	682.843.060	95,33%
	C		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.915.000	13.032.200	42,15%
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.915.000	13.032.200	42,15%
	D		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	433.814.850	368.608.825	84,97%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	415.520.000	353.323.975	85,03%
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.500.000	12.250.000	98,00%
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.794.850	3.034.850	52,37%
	E		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.025.960	92.649.000	93,56%
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99.025.960	92.649.000	93,56%
	F		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	39.600.000	39.600.000	100,00%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	39.600.000	39.600.000	100,00%
4	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			**5.888.650.250**	**380.185.400**	**6,46%**
	A		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	5.888.650.250	380.185.400	6,46%
		1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4.955.360.250	59.885.400	1,21%
		2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	933.290.000	320.300.000	34,32%
5	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**			**2.063.483.620**	**1.585.551.939**	**76,84%**
	A		Pengembangan Prasarana Pertanian	2.063.483.620	1.585.551.939	76,84%
		1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	2.063.483.620	1.585.551.939	76,84%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				**23.602.954.646**	**12.291.721.875**	**52,08%**
6	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**			**754.835.000**	**676.900.500**	**89,68%**
	A	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		754.835.000	676.900.500	89,68%
		1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	754.835.000	676.900.500	89,68%
		2	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	0	0	0,00%

22) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tabel 1.76. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**3.510.015.068**	**3.306.917.926**	**94,21%**
1	**Belanja Operasi**	**3.445.015.068**	**3.279.167.926**	**95,19%**
	a. Belanja Pegawai	2.373.670.893	2.275.931.684	95,88%
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.071.344.175	1.003.236.242	93,64%
2	**Belanja Modal**	**65.000.000**	**27.750.000**	**42,69%**
	a. Belanja Peralatan dan Mesin;	65.000.000	27.750.000	42,69%

Tabel 1.77. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				**3.510.015.068**	**3.306.917.926**	**94,21%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KABUPATEN/KOTA**			**2.850.370.068**	**2.648.170.861**	**92,91%**
	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.510.810.893	2.347.291.684	93,49%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.373.670.893	2.275.931.684	95,88%
		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	137.140.000	71.360.000	52,03%
	B	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		0	0	0,00%
		1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				**3.510.015.068**	**3.306.917.926**	**94,21%**
	C		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.400.000	17.400.000	100,00%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	17.400.000	17.400.000	100,00%
	D		Administrasi Umum Perangkat Daerah	168.777.175	168.728.012	99,97%
		1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.394.500	16.394.500	100,00%
		2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.610.500	7.610.500	100,00%
		3	Penyediaan Bahan/Material	1.476.175	1.476.000	99,99%
		4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143.296.000	143.247.012	99,97%
	E		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	65.000.000	27.750.000	42,69%
		1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0,00%
		2	Pengadaan Mebel	30.000.000	27.750.000	92,50%
		3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000	0	0,00%
	F		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.022.000	9.686.900	87,89%
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.022.000	9.686.900	87,89%
	G		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.360.000	77.314.265	99,94%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.360.000	77.314.265	99,94%
		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0,00%
2	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			**30.875.000**	**30.875.000**	**100,00%**
	A		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.875.000	30.875.000	100,00%
		1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	30.875.000	30.875.000	100,00%
3	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**			**30.440.000**	**30.440.000**	**100,00%**
	A		Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum	30.440.000	30.440.000	100,00%
		1	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	30.440.000	30.440.000	100,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				**3.510.015.068**	**3.306.917.926**	**94,21%**
4	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**			**598.330.000**	**597.432.065**	**99,85%**
	A	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		568.000.000	567.102.065	99,84%
		1	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	568.000.000	567.102.065	99,84%
	B	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		30.330.000	30.330.000	100,00%
		1	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	30.330.000	30.330.000	100,00%

23) Dinas Sosial

Tabel 1.78. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Dinas Sosial

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**2.796.628.810**	**2.694.780.926**	**96,36%**
1	**Belanja Operasi**	**2.794.128.810**	**2.694.780.926**	**96,44%**
	a. Belanja Pegawai	951.357.460	973.092.707	102,28%
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.562.771.350	1.721.688.219	110,17%
	c. Belanja Bantuan Sosial	280.000.000		0,00%
2	**Belanja Modal**	**2.500.000**	**0**	**0,00%**
	a. Belanja Peralatan dan Mesin;	2.500.000		0,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 1.79. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Dinas Sosial

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Sosial				**2.796.628.810**	**2.694.780.926**	**96,36%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.603.775.860**	**1.531.522.126**	**95,49%**
	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.034.517.460	973.092.707	94,06%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	951.357.460	913.092.707	95,98%
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	83.160.000	60.000.000	72,15%
	B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		6.000.000	0	0,00%
		1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.000.000	0	0,00%
	C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		310.613.775	309.400.420	99,61%
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.108.700	10.104.500	99,96%
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.193.000	8.081.000	98,63%
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.510.000	3.982.000	88,29%
		4	Penyediaan Logistik Kantor	24.996.900	24.992.500	99,98%
		5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.154.175	33.154.000	100,00%
		6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undanagan	0	0	0,00%
		7	Penyediaan Bahan Material	0	0	0,00%
		8	Fasilitas Kunjungan Tamu	27.675.000	27.675.000	100,00%
		9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.976.000	201.411.420	99,72%
	D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	0	0,00%
		1	Penggaadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0,00%
		2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0,00%
	E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		65.274.625	61.666.057	94,47%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.000.000	10.095.000	91,77%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	11.635.000	9.025.057	77,57%
		3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.140.000	13.096.000	99,67%
		4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.499.625	29.450.000	99,83%
	F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Uruan Pemerintahan Daerah		187.370.000	187.362.942	100,00%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	187.370.000	187.362.942	100,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Dinas Sosial				**2.796.628.810**	**2.694.780.926**	**96,36%**
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**			**358.160.385**	**346.113.450**	**96,64%**
	A		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	358.160.385	346.113.450	96,64%
		1	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	95.915.530	83.912.200	87,49%
		2	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	262.244.855	262.201.250	99,98%
3	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			**433.055.470**	**427.500.850**	**98,72%**
	A		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Asuhan	433.055.470	427.500.850	98,72%
		1	Penyediaan Permakanan	160.979.800	160.309.600	99,58%
		2	Pemberian bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	272.075.670	267.191.250	98,20%
4	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**			**113.666.825**	**113.344.000**	**99,72%**
	A		Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	113.666.825	113.344.000	99,72%
		1	Pendataan Fakir Miskin cakupan Daerah Kabupaten/kota	113.666.825	113.344.000	99,72%
5	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**			**287.970.270**	**276.300.500**	**95,95%**
	A		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/kota	287.970.270	276.300.500	95,95%
		1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	41.006.445	40.871.500	99,67%
		2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	246.963.825	235.429.000	95,33%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

24) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tabel 1.80. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Uraian	Setelah Perubahan	Realisasi	%
BELANJA		**86.602.297.930**	**82.665.712.976**	**95,45%**
1	**Belanja Operasi**	**86.602.297.930**	**82.665.712.976**	**95,45%**
	a. Belanja Pegawai	64.791.116.030	64.763.345.229	99,96%
	b. Belanja Barang dan Jasa	21.811.181.900	17.902.367.747	82,08%

Tabel 1.81.Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				**86.602.297.930**	**82.665.712.976**	**95,45%**
1	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**			**10.725.907.000**	**10.304.627.914**	**96,07%**
	A	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		10.725.907.000	10.304.627.914	96,07%
		1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.725.907.000	10.304.627.914	96,07%
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**73.723.178.430**	**70.685.142.702**	**95,88%**
	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		73.477.496.030	70.452.611.296	95,88%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	64.791.116.030	64.763.345.229	99,96%
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.686.380.000	5.689.266.067	65,50%
	B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12.600.000	12.600.000	100,00%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	12.600.000	12.600.000	100,00%
	C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		80.597.400	79.403.206	98,52%
		1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.155.500	24.926.000	99,09%
		2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.865.900	23.916.000	96,18%
		3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.576.000	30.561.206	99,95%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				**86.602.297.930**	**82.665.712.976**	**95,45%**
	D		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.545.000	9.653.200	44,80%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.500.000	2.890.000	44,46%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.045.000	6.763.200	44,95%
	E		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.940.000	130.875.000	99,95%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan	80.940.000	80.875.000	99,92%
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0,00%
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	50.000.000	100,00%
3	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**			**245.629.000**	**191.979.674**	**78,16%**
	A		Mutasi Dan Pomosi ASN	31.593.000	31.537.000	99,82%
		1	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	31.593.000	31.537.000	99,82%
	B		Pengembangan Kompetensi ASN	214.036.000	160.442.674	74,96%
		1	Peningkatan Kapasitas ASN	140.423.000	137.133.674	97,66%
		2	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	73.613.000	23.309.000	31,66%
4	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**			**1.048.244.000**	**764.859.229**	**72,97%**
	A		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pengembangan bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	1.048.244.000	764.859.229	72,97%
		1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pengembangan bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	1.048.244.000	764.859.229	72,97%
5	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**			**859.339.500**	**719.103.457**	**83,68%**
	A		Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan	859.339.500	719.103.457	83,68%
		1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	859.339.500	719.103.457	83,68%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

25) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 1.82. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**6.776.838.560**	**6.560.201.505**	**96,80%**
1	**Belanja Operasi**	**3.868.338.560**	**3.660.701.505**	**94,63%**
	a. Belanja Pegawai	928.083.336	865.261.633	93,23%
	b. Belanja Barang dan Jasa	2.464.231.900	2.381.634.932	96,65%
	c. Belanja Hibah	476.023.324	413.804.940	86,93%
2	**Belanja Modal**	**2.908.500.000**	**2.899.500.000**	**99,69%**
	a. Belanja Peralatan dan Mesin;	2.908.500.000	2.899.500.000	99,69%

Tabel 1.83. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				**6.776.838.560**	**6.560.201.505**	**96,80%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**69.545.200**	**69.545.200**	**100,00%**
	A	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		69.545.200	69.545.200	100,00%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.545.200	69.545.200	100,00%
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**			**1.095.062.000**	**1.094.685.432**	**99,97%**
	A	Pemberdayaan dan Pegembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.095.062.000	1.094.685.432	99,97%
		1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota	1.095.062.000	1.094.685.432	99,97%
3	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.369.500.536**	**4.292.702.033**	**98,24%**
	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.022.103.336	954.391.633	93,38%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	928.083.336	865.261.633	93,23%
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.700.000	20.700.000	100,00%
		3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verfikasi Keuangan SKPD	73.320.000	68.430.000	93,33%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				**6.776.838.560**	**6.560.201.505**	**96,80%**
	B		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.400.000	5.400.000	100,00%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.400.000	5.400.000	100,00%
	C		Administrasi Umum Perangkat Daerah	290.350.210	290.265.400	99,97%
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	980.000	980.000	100,00%
		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	20.000.000	100,00%
		3	Penyedia Barang Cetakan dan Pengadaan	14.714.210	14.714.200	100,00%
		4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	254.656.000	254.571.200	99,97%
	D		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.911.390.000	2.902.390.000	99,69%
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.911.390.000	2.902.390.000	99,69%
	E		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.376.990	9.375.000	99,98%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	3.500.000	100,00%
		2	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.500.000	3.500.000	100,00%
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.376.990	2.375.000	99,92%
	F		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	130.880.000	130.880.000	100,00%
		1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	130.880.000	130.880.000	100,00%
4	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**			**576.340.824**	**513.764.640**	**89,14%**
	A		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	576.340.824	513.764.640	89,14%
		1	Pelaksaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	576.340.824	513.764.640	89,14%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				**6.776.838.560**	**6.560.201.505**	**96,80%**
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**			**43.500.000**	**43.497.000**	**99,99%**
	A	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		43.500.000	43.497.000	99,99%
		1	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	43.500.000	43.497.000	99,99%
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**			**152.250.000**	**152.167.500**	**99,95%**
	A	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		152.250.000	152.167.500	99,95%
		1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	152.250.000	152.167.500	99,95%
7	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**			**470.640.000**	**393.839.700**	**83,68%**
	A	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kawaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik		470.640.000	393.839.700	83,68%
		1	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	470.640.000	393.839.700	83,68%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

26) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 1.84. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**1.731.067.442**	**1.633.140.872**	**94,34%**
1	**Belanja Operasi**	**1.731.067.442**	**1.633.140.872**	**94,34%**
	a. Belanja Pegawai	1.057.619.642	1.013.694.672	95,85%
	b. Belanja Barang dan Jasa	673.447.800	619.446.200	91,98%

Tabel 1.85. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah				**1.731.067.442**	**1.633.140.872**	**94,34%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.622.417.442**	**1.525.727.012**	**94,04%**
	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.141.019.642	1.061.114.672	93,00%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.057.619.642	1.013.694.672	95,85%
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	83.400.000	47.420.000	56,86%
	B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		81.000.000	81.000.000	100,00%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	6.000.000	6.000.000	100,00%
		2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	75.000.000	75.000.000	100,00%
	C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		165.840.000	165.839.840	100,00%
		1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.340.000	8.339.840	100,00%
		2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.500.000	7.500.000	100,00%
		3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	150.000.000	100,00%
	D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	0	0,00%
		1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0		0,00%
		2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0		0,00%
	E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		42.000.000	25.217.500	60,04%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.500.000	8.500.000	100,00%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000	8.217.500	32,87%
		3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.500.000	8.500.000	100,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah				**1.731.067.442**	**1.633.140.872**	**94,34%**
	F		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.557.800	192.555.000	100,00%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	117.557.800	117.555.000	100,00%
		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000	75.000.000	100,00%
2	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**			**108.650.000**	**107.413.860**	**98,86%**
	A		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	90.854.000	90.853.860	100,00%
		1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	90.854.000	90.853.860	100,00%
	B		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0	0	0,00%
		1	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	0		0,00%
		2	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	0		0,00%
	C		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	17.796.000	16.560.000	93,05%
		1	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	17.796.000	16.560.000	93,05%
	D		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	0	0	0,00%
		1	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	0	0	0,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

27) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Tabel 1.86. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**197.651.703.096**	**166.893.312.878**	**84,44%**
1	**Belanja Operasi**	**19.724.225.675**	**17.388.495.918**	**88,16%**
	a. Belanja Pegawai	7.696.542.490	6.972.777.306	90,60%
	b. Belanja Barang dan Jasa	10.352.083.185	8.939.718.612	86,36%
	f. Belanja Bantuan Sosial	1.675.600.000	1.476.000.000	88,09%
2	**Belanja Modal**	**288.558.625**	**275.620.400**	**95,52%**
	a. Belanja Peralatan dan Mesin	288.558.625	275.620.400	95,52%
3	**Belanja Tidak Terduga**	**13.484.678.001**	**12.786.790.000**	**94,82%**
4	**Belanja Transfer**	**164.154.240.795**	**136.442.406.560**	**83,12%**
	a. Belanja Bagi Hasil	2.627.183.995	2.004.340.536	76,29%
	b. Belanja Bantuan Keuangan	161.527.056.800	134.438.066.024	83,23%

Tabel 1.87. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah				**197.651.703.096**	**166.893.312.878**	**84,44%**
1	**PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**			**1.878.622.000**	**1.678.394.536**	**89,34%**
	A	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kg Dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.878.622.000	1.678.394.536	89,34%
		1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.878.622.000	1.678.394.536	89,34%
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**12.468.950.840**	**11.095.799.232**	**88,99%**
	A	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		10.297.886.740	9.271.144.306	90,03%
		1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	7.696.542.490	6.972.777.306	90,60%
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.546.854.000	2.253.152.500	88,47%
		3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	54.490.250	45.214.500	82,98%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah				**197.651.703.096**	**166.893.312.878**	**84,44%**
	B		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	179.322.000	139.586.000	77,84%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25.200.000	0	0,00%
		2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	154.122.000	139.586.000	90,57%
	C		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.225.044.025	1.060.090.086	86,53%
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.928.525	12.711.500	67,16%
		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	133.475.000	132.003.074	98,90%
		3	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	180.666.500	104.987.500	58,11%
		4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	288.900.000	248.389.000	85,98%
		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	603.074.000	561.999.012	93,19%
	D		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	290.648.625	280.210.400	96,41%
		1	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	200.955.000	194.844.000	96,96%
		2	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	89.693.625	85.366.400	95,18%
	E		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.725.000	97.615.987	53,42%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.495.000	5.050.500	67,38%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	175.230.000	92.565.487	52,83%
	F		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	293.324.450	247.152.453	84,26%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	163.030.000	153.677.053	94,26%
		2	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	51.430.000	22.421.900	43,60%
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	78.864.450	71.053.500	90,10%
3	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			**180.502.255.796**	**151.678.312.510**	**84,03%**
	A		Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.603.654.750	1.463.644.700	91,27%
		1	Koordinasi Dan Penyusunan KUA Dan PPAS	183.958.500	176.861.200	96,14%
		2	Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi RKA-SKPD	310.706.000	232.586.500	74,86%
		3	Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	401.420.000	383.630.000	95,57%
		4	Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi DPA-SKPD	384.582.000	352.976.500	91,78%
		5	Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	322.988.250	317.590.500	98,33%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah				**197.651.703.096**	**166.893.312.878**	**84,44%**
	B		Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	595.736.250	550.099.350	92,34%
		1	Koordinasi Dan Pengelolaan Kas Daerah	122.466.000	108.379.350	88,50%
		2	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama Dan Pemantauan Transaksi Non Tunai Dengan Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	87.389.000	71.624.000	81,96%
		3	Rekonsiliasi Data Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan Dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	303.393.000	297.353.000	98,01%
		4	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Yang Berkaitan Dengan Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	82.488.250	72.743.000	88,19%
	C		Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	544.346.000	435.371.900	79,98%
		1	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD Dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	392.909.000	355.440.900	90,46%
		2	Koordinasi Dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	83.409.000	79.931.000	95,83%
		3	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Kerugian Daerah	68.028.000	0	0,00%
	D		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	177.758.518.796	149.229.196.560	83,95%
		1	Belanja Bantuan Keuangan	161.646.656.800	134.438.066.024	83,17%
		2	Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak	13.484.678.001	12.786.790.000	94,82%
		3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	2.627.183.995	2.004.340.536	76,29%
4	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			**814.672.550**	**561.378.000**	**68,91%**
	A		Pengelolaan Barang Milik Daerah	814.672.550	561.378.000	68,91%
		1	Penyusunan Standar Harga	103.391.750	61.712.000	59,69%
		2	Inventarisasi Barang Milik Daerah	217.980.000	201.719.000	92,54%
		3	Pengamanan Barang Milik Daerah	217.676.000	90.067.000	41,38%
		4	Penilaian Barang Milik Daerah	131.273.000	92.289.000	70,30%
		5	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	82.512.500	72.235.000	87,54%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah				**197.651.703.096**	**166.893.312.878**	**84,44%**
		6	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	61.839.300	43.356.000	70,11%
5	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			**1.987.201.910**	**1.879.428.600**	**94,58%**
	A	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		1.987.201.910	1.879.428.600	94,58%
		1	Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	118.337.000	67.284.000	56,86%
		2	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	225.249.910	202.420.000	89,86%
		3	Pendataan Dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	361.829.000	353.703.800	97,75%
		4	Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBBP2) Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	394.467.000	382.937.800	97,08%
		5	Penagihan Pajak Daerah	887.319.000	873.083.000	98,40%
6	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**			**0**	**0**	**0,00%**
	A	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		0	0	0,00%
		1	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	0		0,00%

28) Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Tabel 1.88. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Badan Pengelola Perbatasan Daerah

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**1.564.657.247**	**1.370.976.524**	**87,62%**
1	**Belanja Operasi**	**1.534.432.247**	**1.343.930.024**	**87,58%**
	a. Belanja Pegawai	1.009.201.177	948.439.934	93,98%
	b. Belanja Barang dan Jasa	525.231.070	395.490.090	75,30%
2	**Belanja Modal**	**30.225.000**	**27.046.500**	**89,48%**
	a. Belanja Peralatan dan Mesin;	30.225.000	27.046.500	89,48%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 1.89. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Badan Pengelola Perbatasan Daerah

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Badan Pengelola Perbatasan Daerah				**1.564.657.247**	**1.370.976.524**	**87,62%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.428.658.247**	**1.307.816.524**	**91,54%**
	A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat		20.349.000	20.010.000	98,33%
		1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.273.000	8.016.000	96,89%
		2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	12.076.000	11.994.000	99,32%
	B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.084.261.177	1.002.559.934	92,46%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.009.201.177	948.439.934	93,98%
		2	Penyediaan Tugas Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	75.060.000	54.120.000	72,10%
	C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		5.400.000	5.400.000	100,00%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.400.000	5.400.000	100,00%
	D	Administrasi Umum Perangkat Daerah		197.931.270	174.279.120	88,05%
		1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.549.250	17.148.745	92,45%
		2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.404.510	6.404.355	100,00%
		3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.943.510	9.818.510	30,74%
		4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141.034.000	140.907.510	99,91%
	E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		33.378.100	29.179.570	87,42%
		1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0,00%
		2	Pengadaan Mebel	12.801.550	8.959.410	69,99%
		3	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	20.576.550	20.220.160	98,27%
	F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		19.620.000	13.009.500	66,31%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	3.000.000	50,00%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	13.620.000	10.009.500	73,49%
	G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		67.718.700	63.378.400	93,59%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.460.000	58.980.000	99,19%
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	1.235.000	41,17%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Badan Pengelola Perbatasan Daerah				**1.564.657.247**	**1.370.976.524**	**87,62%**
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0,00%
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.258.700	3.163.400	60,16%
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**			**135.999.000**	**63.160.000**	**46,44%**
	A	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja sama		54.264.000	21.600.000	39,81%
		1	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	12.750.000	12.420.000	97,41%
		2	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	41.514.000	9.180.000	22,11%
	B	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan		64.735.000	24.560.000	37,94%
		1	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	64.735.000	24.560.000	37,94%
	C	Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan		17.000.000	17.000.000	100,00%
		1	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	17.000.000	17.000.000	100,00%

29) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Tabel 1.90. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**4.895.012.712**	**4.560.608.375**	**93,17%**
1	**Belanja Operasi**	**4.871.512.712**	**4.537.108.375**	**93,14%**
	a. Belanja Pegawai	2.411.050.212	2.235.194.775	92,71%
	b. Belanja Barang dan Jasa	2.460.462.500	2.301.913.600	93,56%
2	**Belanja Modal**	**23.500.000**	**23.500.000**	**100,00%**
	a. Belanja Peralatan dan Mesin;	23.500.000	23.500.000	100,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 1.91. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah				**4.895.012.712**	**4.560.608.375**	**93,17%**
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**			**0**	**0**	**0,00%**
	A	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		0	0	0,00%
		1	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	0	0	0,00%
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.405.962.712**	**3.074.708.775**	**90,27%**
	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.640.080.212	2.399.001.775	90,87%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.411.050.212	2.235.194.775	92,71%
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	165.240.000	100.017.000	60,53%
		3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	63.790.000	63.790.000	100,00%
	B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		17.400.000	0	0,00%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	17.400.000	0	0,00%
		2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		0	0,00%
	C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		505.545.300	433.179.700	85,69%
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.476.600	1.474.000	99,82%
		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.040.200	10.010.000	99,70%
		3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.788.500	8.788.500	100,00%
		4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	485.240.000	412.907.200	85,09%
	D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	0	0,00%
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0,00%
	E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		31.237.500	30.851.300	98,76%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	100,00%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.237.500	25.851.300	98,53%
	F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		211.699.700	211.676.000	99,99%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.070.000	120.070.000	100,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah				**4.895.012.712**	**4.560.608.375**	**93,17%**
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	5.000.000	100,00%
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	86.629.700	86.606.000	99,97%
3	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**			**756.427.750**	**756.364.100**	**99,99%**
	A	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		254.433.750	254.403.000	99,99%
		1	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	254.433.750	254.403.000	99,99%
	B	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		0	0	0,00%
		1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0,00%
		2	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0,00%
	C	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		501.994.000	501.961.100	99,99%
		1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	501.994.000	501.961.100	99,99%
		2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	0	0	0,00%
4	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**			**50.501.250**	**50.376.000**	**99,75%**
	A	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		25.501.250	25.386.000	99,55%
		1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	0	0,00%
		2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9.333.000	9.310.500	99,76%
		3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	0	0	0,00%
		4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10.000.000	9.937.300	99,37%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah				**4.895.012.712**	**4.560.608.375**	**93,17%**
		5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6.168.250	6.138.200	99,51%
		6	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0	0	0,00%
		7	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0	0	0,00%
	B		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	0	0	0,00%
		1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	0	0,00%
		2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0	0	0,00%
		3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	0	0	0,00%
		4	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0	0	0,00%
	C		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	25.000.000	24.990.000	99,96%
		1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	0	0,00%
		2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	25.000.000	24.990.000	99,96%
		3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	0	0	0,00%
		4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0	0	0,00%
		5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	0	0	0,00%
5	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**			**682.121.000**	**679.159.500**	**99,57%**
	A		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	314.798.000	314.723.400	99,98%
		1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	67.198.000	67.176.500	99,97%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah				**4.895.012.712**	**4.560.608.375**	**93,17%**
		2	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	247.600.000	247.546.900	99,98%
	B		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	67.198.000	67.139.400	99,91%
		1	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	67.198.000	67.139.400	99,91%
	C		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	300.125.000	297.296.700	99,06%
		1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	300.125.000	297.296.700	99,06%

30) Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 1.92. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja – Satuan Polisi Pamong Praja

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**3.280.767.810**	**3.041.446.129**	**92,71%**
1	**Belanja Operasi**	**3.219.017.810**	**2.979.869.129**	**92,57%**
	a. Belanja Pegawai	1.859.290.560	1.707.723.896	91,85%
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.359.727.250	1.272.145.233	93,56%
2	**Belanja Modal**	**61.750.000**	**61.577.000**	**99,72%**
	a. Belanja Peralatan dan Mesin;	61.750.000	61.577.000	99,72%

Tabel 1.93. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan – Satuan Polisi Pamong Praja

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Satuan Polisi Pamong Praja				**3.280.767.810**	**3.041.446.129**	**92,71%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.154.669.560**	**1.920.190.134**	**89,12%**
	A		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.984.690.560	1.767.723.896	89,07%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.859.290.560	1.707.723.896	91,85%
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	125.400.000	60.000.000	47,85%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Satuan Polisi Pamong Praja				**3.280.767.810**	**3.041.446.129**	**92,71%**
	B		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.000.000	17.982.000	99,90%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	18.000.000	17.982.000	99,90%
	C		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.029.000	1.986.000	49,29%
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.029.000	1.986.000	49,29%
	D		Penyediaan Jasa Peninjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.880.000	6.721.071	56,57%
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	11.880.000	6.721.071	56,57%
	E		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.070.000	125.777.167	92,44%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,biaya Pemeliharaan,pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.070.000	113.027.167	94,13%
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	2.750.000	45,83%
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	100,00%
2	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**1.126.098.250**	**1.121.255.995**	**99,57%**
	A		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Kota	1.126.098.250	1.121.255.995	99,57%
		1	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	1.109.298.750	1.104.511.495	99,57%
		2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	16.799.500	16.744.500	99,67%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

31) Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan

Tabel 1.94. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan

No	Uraian	Setelah Perubahan	Realisasi	%
BELANJA		**79.341.506.464**	**80.223.737.748**	**101,11%**
1	**Belanja Operasi**	**62.802.330.313**	**65.287.760.073**	**103,96%**
	a. Belanja Pegawai	31.217.019.724	33.179.943.537	106,29%
	b. Belanja Barang dan Jasa	31.585.310.589	32.107.816.536	101,65%
2	**Belanja Modal**	**16.539.176.151**	**14.935.977.675**	**90,31%**
	a. Belanja Peralatan dan Mesin;	8.764.176.151	8.592.430.065	98,04%
	b. Belanja Bangunan dan Gedung;	5.675.000.000	4.249.217.610	74,88%
	c. Belanja Jalan;	2.100.000.000	2.094.330.000	99,73%

Tabel 1.95. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan				**79.341.506.464**	**80.223.737.748**	**101,11%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**15.690.479.724**	**14.714.419.026**	**93,78%**
	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		15.541.679.724	14.714.419.026	94,68%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.803.119.724	14.540.419.026	98,23%
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	722.960.000	165.600.000	22,91%
		3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan	15.600.000	8.400.000	53,85%
	B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		148.800.000	0	0,00%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	148.800.000	0	0,00%
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**51.385.256.740**	**53.834.890.558**	**104,77%**
	A	Penyediaan Fasilitas Pelayan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		21.385.256.740	19.701.105.224	92,12%
		1	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.960.514.151	4.950.887.144	99,81%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan				**79.341.506.464**	**80.223.737.748**	**101,11%**
		2	Pengadaan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	0	0	0,00%
		3	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.926.000.000	2.750.948.000	94,02%
		4	Pengembangan Rumah Sakit	8.974.993.500	7.484.578.801	83,39%
		5	Pengadaan Obat,Bahan Habis Pakai,Bahan Medis Habis Pakai,Vaksin,Makanan dan Minuman di Fasilitas Pelayanan	4.523.749.089	4.514.691.279	99,80%
	B		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000.000	34.133.785.334	113,78%
		1	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	30.000.000.000	34.133.785.334	113,78%
3	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**12.265.770.000**	**11.674.428.164**	**95,18%**
	A		Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP Dan UKM Di Wilayah Kabupaten/Kota	12.265.770.000	11.674.428.164	95,18%
		1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	12.265.770.000	11.674.428.164	95,18%

32) Kecamatan Botin Loebele

Tabel 1.96. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Kecamatan Botin Loebele

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**1.049.989.092,00**	**841.804.418,00**	**80,17%**
1	**Belanja Operasi**	**1.033.339.092,00**	**841.804.418,00**	**81,46%**
	a. Belanja Pegawai	614.432.342,00	583.984.418,00	95,04%
	b. Belanja Barang dan Jasa	418.906.750,00	257.820.000,00	61,55%
2	**Belanja Modal**	**16.650.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	a. Belanja Peralatan dan Mesin;	16.650.000,00	0,00	0,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 1.97. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Kecamatan Botin Loebele

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Kecamatan Botin Leobele				**1.049.989.092**	**841.804.418**	**80,17%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**900.056.092**	**741.744.418**	**82,41%**
	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		675.032.342	630.904.418	93,46%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	614.432.342	583.984.418	95,04%
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60.600.000	46.920.000	77,43%
	B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		3.600.000	0	0,00%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3.600.000	0	0,00%
	C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		113.873.750	38.718.000	34,00%
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.975.500	4.300.000	23,92%
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.650.000	0	0,00%
		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.002.000	18.760.000	62,53%
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.747.250	7.158.000	27,80%
		5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.999.000	0	0,00%
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.500.000	8.500.000	100,00%
	D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	0	0,00%
		1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0,00%
	E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		17.550.000	8.740.000	49,80%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000	6.790.000	90,53%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.050.000	1.950.000	19,40%
	F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		90.000.000	63.382.000	70,42%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	90.000.000	63.382.000	70,42%
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**10.045.000**	**10.000.000**	**99,55%**
	A	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		10.045.000	10.000.000	99,55%
		1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.045.000	10.000.000	99,55%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Kecamatan Botin Leobele				**1.049.989.092**	**841.804.418**	**80,17%**
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**24.488.000**	**18.360.000**	**74,98%**
	A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		11.900.000	10.540.000	88,57%
		1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11.900.000	10.540.000	88,57%
	B	Pemberdayaan dan Kesehjahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan		12.588.000	7.820.000	62,12%
		1	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	12.588.000	7.820.000	62,12%
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**9.102.000**	**0**	**0,00%**
	A	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		9.102.000	0	0,00%
		1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9.102.000	0	0,00%
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**29.968.000**	**2.000.000**	**6,67%**
	A	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH		29.968.000	2.000.000	6,67%
		1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	29.968.000	2.000.000	6,67%
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**76.330.000**	**69.700.000**	**91,31%**
	A	Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		76.330.000	69.700.000	91,31%
		1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	24.990.000	23.800.000	95,24%
		2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	24.990.000	22.100.000	88,44%
		3	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	26.350.000	23.800.000	90,32%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

33) Kecamatan Io Kufeu

Tabel 1.98. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Kecamatan Io Kufeu

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**1.247.200.648**	**1.104.429.017**	**88,55%**
1	**Belanja Operasi**	**1.218.340.648**	**1.075.569.017**	**88,28%**
	a. Belanja Pegawai	809.471.712	777.919.017	96,10%
	b. Belanja Barang dan Jasa	408.868.936	297.650.000	72,80%
2	**Belanja Modal**	**28.860.000**	**28.860.000**	**100,00%**
	a. Belanja Peralatan dan Mesin;	28.860.000	28.860.000	100,00%

Tabel 1.99. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Kecamatan Io Kufeu

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Kecamatan Io Kufeu				**1.247.200.648**	**1.104.429.017**	**88,55%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.091.302.648**	**1.025.757.917**	**93,99%**
	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		885.131.712	824.839.017	93,19%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	809.471.712	777.919.017	96,10%
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	75.660.000	46.920.000	62,01%
	B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		6.000.000	6.000.000	100,00%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	6.000.000	6.000.000	100,00%
	C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		90.445.900	89.098.900	98,51%
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.716.000	11.716.000	100,00%
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.330.000	31.330.000	100,00%
		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	10.000.000	100,00%
		4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.999.900	9.999.900	100,00%
		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.400.000	26.053.000	95,08%
	D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5.020.000	5.020.000	100,00%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	100,00%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.520.000	2.520.000	100,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Kecamatan Io Kufeu				**1.247.200.648**	**1.104.429.017**	**88,55%**
	E		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.705.036	100.800.000	96,27%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83.400.000	83.400.000	100,00%
		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.305.036	17.400.000	81,67%
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**30.418.000**	**6.400.000**	**21,04%**
	A		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.418.000	6.400.000	21,04%
		1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.694.000	6.400.000	54,73%
		2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.724.000	0	0,00%
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**22.900.000**	**3.200.000**	**13,97%**
	A		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.900.000	3.200.000	13,97%
		1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22.900.000	3.200.000	13,97%
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**21.824.000**	**6.032.100**	**27,64%**
	A		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	21.824.000	6.032.100	27,64%
		1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.824.000	3.400.000	49,82%
		2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15.000.000	2.632.100	17,55%
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**21.408.000**	**16.300.000**	**76,14%**
	A		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	21.408.000	16.300.000	76,14%
		1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	21.408.000	16.300.000	76,14%
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**59.348.000**	**46.739.000**	**78,75%**
	A		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	59.348.000	46.739.000	78,75%
		1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.124.000	1.700.000	33,18%
		2	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	20.000.000	19.000.000	95,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Kecamatan Io Kufeu				**1.247.200.648**	**1.104.429.017**	**88,55%**
		3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	24.340.000	18.399.000	75,59%
		4	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9.884.000	7.640.000	77,30%

34) Kecamatan Kobalima

Tabel 1.100. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Kecamatan Kobalima

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**1.089.197.545**	**870.696.743**	**79,94%**
1	**Belanja Operasi**	**1.079.297.545**	**870.696.743**	**80,67%**
	a. Belanja Pegawai	739.384.295	705.056.743	95,36%
	b. Belanja Barang dan Jasa	339.913.250	165.640.000	48,73%
2	**Belanja Modal**	**9.900.000**	**0**	**0,00%**
	a. Belanja Peralatan dan Mesin;	9.900.000	0	0,00%

Tabel 1.101. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Kecamatan Kobalima

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Kecamatan Kobalima				**1.089.197.545**	**870.696.743**	**79,94%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**989.782.545**	**818.636.743**	**82,71%**
	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		804.964.295	745.156.743	92,57%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	739.384.295	705.056.743	95,36%
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanan Tugas ASN	65.580.000	40.100.000	61,15%
	B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		4.200.000	0	0,00%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya	4.200.000	0	0,00%
	C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		69.543.250	11.841.000	17,03%
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	0	0,00%
		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	3.455.000	34,55%
		3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.053.250	4.646.000	65,87%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Kecamatan Kobalima				**1.089.197.545**	**870.696.743**	**79,94%**
		4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	46.490.000	3.740.000	8,04%
	D		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.520.000	1.559.000	8,90%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	800.000	53,33%
		2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.120.000	759.000	12,40%
		3	Penyediaan Jasa dan Perlengapan Kantor	9.900.000	0	0,00%
	E		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.555.000	60.080.000	64,22%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	74.080.000	60.080.000	81,10%
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	0	0,00%
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.475.000	0	0,00%
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**6.775.000**	**5.780.000**	**85,31%**
	A		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	6.775.000	5.780.000	85,31%
		1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3.400.000	3.400.000	100,00%
		2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.375.000	2.380.000	70,52%
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**3.400.000**	**3.400.000**	**100,00%**
	A		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3.400.000	3.400.000	100,00%
		1	Peningkatan Partisipatif Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.400.000	3.400.000	100,00%
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**7.650.000**	**5.440.000**	**71,11%**
	A		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.650.000	5.440.000	71,11%
		1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.250.000	2.040.000	48,00%
		2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.400.000	3.400.000	100,00%
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**46.400.000**	**10.900.000**	**23,49%**
	A		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	46.400.000	10.900.000	23,49%
		1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	43.000.000	7.500.000	17,44%
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.400.000	3.400.000	100,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Kecamatan Kobalima				**1.089.197.545**	**870.696.743**	**79,94%**
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**35.190.000**	**26.540.000**	**75,42%**
	A		Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35.190.000	26.540.000	75,42%
		1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.400.000	3.400.000	100,00%
		2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	15.170.000	9.860.000	65,00%
		3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	9.990.000	7.500.000	75,08%
		4	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	6.630.000	5.780.000	87,18%

35) Kecamatan Kobalima Timur

Tabel 1.102. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Kecamatan Kobalima Timur

No	Uraian	Setelah Perubahan	Realisasi	%
BELANJA		**1.153.697.398**	**1.081.698.008**	**93,76%**
1	**Belanja Operasi**	**1.143.697.398**	**1.071.698.008**	**93,70%**
	a. Belanja Pegawai	771.162.512	759.661.508	98,51%
	b. Belanja Barang dan Jasa	372.534.886	312.036.500	83,76%
2	**Belanja Modal**	**10.000.000**	**10.000.000**	**100,00%**
	a. Belanja Peralatan dan Mesin;	10.000.000	10.000.000	100,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 1.103. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Kecamatan Kobalima Timur

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Kecamatan Kobalima Timur				**1.153.697.398**	**1.081.698.008**	**93,76%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.050.647.648**	**978.868.008**	**93,17%**
	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		837.822.512	806.581.508	96,27%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	771.162.512	759.661.508	98,51%
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	66.660.000	46.920.000	70,39%
	B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		5.400.000	4.800.000	88,89%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.400.000	4.800.000	88,89%
	C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		68.451.700	67.448.930	98,54%
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	100,00%
		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.131.700	12.131.500	100,00%
		3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.740.000	8.058.500	92,20%
		4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.580.000	42.258.930	99,25%
	D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		10.000.000	10.000.000	100,00%
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	10.000.000	100,00%
	E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.550.000	3.150.000	41,72%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.560.000	3.150.000	88,48%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.990.000	0	0,00%
	F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		121.423.436	86.887.570	71,56%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.980.000	86.887.570	99,89%
		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.443.436	0	0,00%
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**8.500.000**	**8.500.000**	**100,00%**
	A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		8.500.000	8.500.000	100,00%
		1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.500.000	8.500.000	100,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Kecamatan Kobalima Timur				**1.153.697.398**	**1.081.698.008**	**93,76%**
3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**45.789.750**	**45.720.000**	**99,85%**
	A		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	45.789.750	45.720.000	99,85%
		1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	21.720.000	21.720.000	100,00%
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	24.069.750	24.000.000	99,71%
4	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**48.760.000**	**48.610.000**	**99,69%**
	A		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	48.760.000	48.610.000	99,69%
		1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	23.200.000	23.200.000	100,00%
		2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12.960.000	12.960.000	100,00%
		3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12.600.000	12.450.000	98,81%

36) Kecamatan Laenmanen

Tabel 1.104. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Kecamatan Laenmanen

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**1.201.190.255**	**1.171.178.734**	**97,50%**
1	**Belanja Operasi**	**1.201.190.255**	**1.171.178.734**	**97,50%**
	a. Belanja Pegawai	852.560.475	846.813.984	99,33%
	b. Belanja Barang dan Jasa	348.629.780	324.364.750	93,04%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 1.105. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Kecamatan Laenmanen

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Kecamatan Laenmanen				**1.201.190.255**	**1.171.178.734**	**97,50%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.119.670.255**	**1.089.858.734**	**97,34%**
	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		947.600.505	917.793.984	96,85%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	852.560.475	846.813.984	99,33%
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	95.040.030	70.980.000	74,68%
	B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		6.600.000	6.600.000	100,00%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	6.600.000	6.600.000	100,00%
	C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		67.019.750	67.014.750	99,99%
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.550.000	1.550.000	100,00%
		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.500.000	7.500.000	100,00%
		3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.969.750	7.969.750	100,00%
		4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	49.995.000	99,99%
	D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	0	0,00%
		1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0,00%
		2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0,00%
	E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6.000.000	6.000.000	100,00%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100,00%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	3.000.000	3.000.000	100,00%
	F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		92.450.000	92.450.000	100,00%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak,Perijinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	83.400.000	83.400.000	100,00%
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	2.000.000	100,00%
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.050.000	7.050.000	100,00%
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**3.880.000**	**3.880.000**	**100,00%**
	A	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		3.880.000	3.880.000	100,00%
		1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3.880.000	3.880.000	100,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**3.880.000**	**3.880.000**	**100,00%**
	A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		3.880.000	3.880.000	100,00%
		1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.880.000	3.880.000	100,00%
4	**PROGRAM KORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**12.760.000**	**12.760.000**	**100,00%**
	A	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		12.760.000	12.760.000	100,00%
		1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.760.000	7.760.000	100,00%
		2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.000.000	5.000.000	100,00%
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**16.000.000**	**16.000.000**	**100,00%**
	A	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		16.000.000	16.000.000	100,00%
		1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	16.000.000	16.000.000	100,00%
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**45.000.000**	**44.800.000**	**99,56%**
	A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		45.000.000	44.800.000	99,56%
		1	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	22.500.000	22.480.000	99,91%
		2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	7.500.000	7.440.000	99,20%
		3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	7.500.000	7.440.000	99,20%
		4	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	7.500.000	7.440.000	99,20%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

37) Kecamatan Malaka Barat

Tabel 1.106. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Kecamatan Malaka Barat

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**1.684.831.583**	**1.471.489.942**	**87,34%**
1	**Belanja Operasi**	**1.663.331.583**	**1.449.989.942**	**87,17%**
	a. Belanja Pegawai	1.293.035.783	1.250.013.142	96,67%
	b. Belanja Barang dan Jasa	370.295.800	199.976.800	54,00%
2	**Belanja Modal**	**21.500.000**	**21.500.000**	**100,00%**
	a. Belanja Peralatan dan Mesin;	21.500.000	21.500.000	100,00%

Tabel 1.107. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Kecamatan Malaka Barat

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Kecamatan Malaka Barat				**1.684.831.583**	**1.471.489.942**	**87,34%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.642.631.583**	**1.451.289.942**	**88,35%**
	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.372.415.783	1.296.933.142	94,50%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.293.035.783	1.250.013.142	96,67%
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	79.380.000	46.920.000	59,11%
	B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		9.000.000	9.000.000	100,00%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9.000.000	9.000.000	100,00%
	C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		81.000.000	20.760.000	25,63%
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.450.000	89,00%
		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.520.000	7.520.000	100,00%
		3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.770.000	6.770.000	100,00%
		4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61.710.000	2.020.000	3,27%
	D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		21.500.000	21.500.000	100,00%
		1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0,00%
		2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.500.000	21.500.000	100,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Kecamatan Malaka Barat				**1.684.831.583**	**1.471.489.942**	**87,34%**
	E		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.480.000	12.480.000	100,00%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	100,00%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.480.000	7.480.000	100,00%
	F		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.235.800	90.616.800	61,97%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.646.800	85.616.800	83,41%
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	5.000.000	100,00%
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	38.589.000	0	0,00%
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**9.860.000**	**9.860.000**	**100,00%**
	A		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.860.000	9.860.000	100,00%
		1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9.860.000	9.860.000	100,00%
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**10.000.000**	**10.000.000**	**100,00%**
	A		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.000.000	10.000.000	100,00%
		1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.000.000	10.000.000	100,00%
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**15.000.000**	**0**	**0,00%**
	A		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.000.000	0	0,00%
		1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	15.000.000	0	0,00%
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	0	0,00%
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**7.340.000**	**340.000**	**4,63%**
	A		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.340.000	340.000	4,63%
		1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0	0	0,00%
		2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	7.000.000	0	0,00%
		3	Koordinasi Pelaksanaan Wilayah Kecamatan	340.000	340.000	100,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

38) Kecamatan Malaka Tengah

Tabel 1.108. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Kecamatan Malaka Tengah

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**1.211.749.177**	**999.423.008**	**82,48%**
1	**Belanja Operasi**	**1.211.749.177**	**999.423.008**	**82,48%**
	a. Belanja Pegawai	803.066.177	710.563.008	88,48%
	b. Belanja Barang dan Jasa	408.683.000	288.860.000	70,68%

Tabel 1.109. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Kecamatan Malaka Tengah

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Kecamatan Malaka Tengah				**1.211.749.177**	**999.423.008**	**82,48%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.038.466.177**	**911.348.008**	**87,76%**
	A	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH		869.966.177	757.483.008	87,07%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	803.066.177	710.563.008	88,48%
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	66.900.000	46.920.000	70,13%
	B	ADMINSRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH		5.400.000	0	0,00%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.400.000		0,00%
	C	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		19.870.000	19.435.000	97,81%
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	2.500.000	100,00%
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0,00%
		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	10.000.000	100,00%
		4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.160.000	6.935.000	96,86%
		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210.000	0	0,00%
	D	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		9.830.000	5.585.000	56,82%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	3.125.000	62,50%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.830.000	2.460.000	50,93%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Kecamatan Malaka Tengah				**1.211.749.177**	**999.423.008**	**82,48%**
	E		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	133.400.000	128.845.000	96,59%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.400.000	78.845.000	94,54%
		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	50.000.000	100,00%
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK**			**20.000.000**	**0**	**0,00%**
	A		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	20.000.000	0	0,00%
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20.000.000	0	0,00%
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**20.698.000**	**20.185.000**	**97,52%**
	A		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	12.760.000	12.310.000	96,47%
		1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12.760.000	12.310.000	96,47%
	B		PEMBERDAYAAN DAN KESEJATERAAN KELUARGA TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN	7.938.000	7.875.000	99,21%
		1	Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat	7.938.000	7.875.000	99,21%
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**20.000.000**	**0**	**0,00%**
	A		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.000.000	0	0,00%
		1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.000.000	0	0,00%
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**25.240.000**	**4.915.000**	**19,47%**
	A		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	25.240.000	4.915.000	19,47%
		1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5.240.000	4.760.000	90,84%
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	20.000.000	155.000	0,78%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Kecamatan Malaka Tengah				**1.211.749.177**	**999.423.008**	**82,48%**
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**87.345.000**	**62.975.000**	**72,10%**
	A	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		87.345.000	62.975.000	72,10%
		1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	19.440.000	11.560.000	59,47%
		2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16.280.000	8.155.000	50,09%
		3	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan	51.625.000	43.260.000	83,80%

39) Kecamatan Malaka Timur

Tabel 1.110. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Kecamatan Malaka Timur

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**1.244.368.502**	**1.046.878.050**	**84,13%**
1	**Belanja Operasi**	**1.244.368.502**	**1.046.878.050**	**84,13%**
	a. Belanja Pegawai	785.543.644	746.878.050	95,08%
	b. Belanja Barang dan Jasa	458.824.858	300.000.000	65,38%

Tabel 1.111. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Kecamatan Malaka Timur

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Kecamatan Malaka Timur				**1.244.368.502**	**1.046.878.050**	**84,13%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.102.292.502**	**945.046.050**	**85,73%**
	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		852.083.644	793.798.050	93,16%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	785.543.644	746.878.050	95,08%
		2	Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	66.540.000	46.920.000	70,51%
	B	Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		5.400.000	5.400.000	100,00%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	5.400.000	5.400.000	100,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Kecamatan Malaka Timur				**1.244.368.502**	**1.046.878.050**	**84,13%**
	C		Administrasi Umum Perangkat Daerah Perencanaan	84.133.250	49.264.000	58,55%
		1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.377.000	18.213.000	99,11%
		2	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor/Cetak dan penggandaan	13.556.250	13.451.000	99,22%
		3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.200.000	17.600.000	33,72%
	D		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0,00%
		1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0,00%
	E		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.260.000	14.260.000	100,00%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.500.000	100,00%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.760.000	11.760.000	100,00%
	F		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.415.608	82.324.000	56,23%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.820.000	79.643.500	99,78%
		2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66.595.608	2.680.500	4,03%
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANANAN PUBLIK**			**9.709.000**	**9.709.000**	**100,00%**
	A		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Di Tingkat Kecamatan	9.709.000	9.709.000	100,00%
		1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0	0	0,00%
		2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	9.709.000	9.709.000	100,00%
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**10.200.000**	**10.200.000**	**100,00%**
	A		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.200.000	10.200.000	100,00%
		1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.200.000	10.200.000	100,00%
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM**			**64.213.000**	**23.969.000**	**37,33%**
	A		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	64.213.000	23.969.000	37,33%
		1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	40.244.000	0	0,00%
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	23.969.000	23.969.000	100,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Kecamatan Malaka Timur				**1.244.368.502**	**1.046.878.050**	**84,13%**
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**57.954.000**	**57.954.000**	**100,00%**
	A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		57.954.000	57.954.000	100,00%
		1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.890.000	5.890.000	100,00%
		2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan	19.474.000	19.474.000	100,00%
		3	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan	32.590.000	32.590.000	100,00%

40) Kecamatan Rinhat

Tabel 1.112. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Kecamatan Rinhat

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**1.595.987.808**	**1.431.213.567**	**89,68%**
1	**Belanja Operasi**	**1.585.987.808**	**1.431.213.567**	**90,24%**
	a. Belanja Pegawai	1.095.063.718	1.070.357.725	97,74%
	b. Belanja Barang dan Jasa	490.924.090	360.855.842	73,51%
2	**Belanja Modal**	**10.000.000**	**0**	**0,00%**
	a. Belanja Peralatan dan Mesin;	10.000.000	0	0,00%

Tabel 1.113. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Kecamatan Rinhat

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Kecamatan Rinhat				**1.595.987.808**	**1.431.213.567**	**89,68%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**			**1.488.881.808**	**1.345.473.067**	**90,37%**
	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.175.595.218	1.118.477.725	95,14%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.095.063.718	1.070.357.725	97,74%
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80.531.500	48.120.000	59,75%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Kecamatan Rinhat				**1.595.987.808**	**1.431.213.567**	**89,68%**
	B		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.000.000	9.000.000	100,00%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	9.000.000	9.000.000	100,00%
	C		Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.640.810	45.961.342	57,71%
		1	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	7.500.000	100,00%
		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.998.560	5.998.000	99,99%
		3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.377.250	9.377.000	100,00%
		4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.765.000	23.086.342	40,67%
	D		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.000.000	0	0,00%
		1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	0,00%
		2	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	15.000.000	0	0,00%
		3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0,00%
	E		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.500.000	11.956.000	88,56%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	4.500.000	75,00%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.500.000	7.456.000	99,41%
	F		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196.145.780	160.078.000	81,61%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113.350.000	87.475.000	77,17%
		2	Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	82.795.780	72.603.000	87,69%
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK**			**13.128.000**	**8.878.000**	**67,63%**
	A		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13.128.000	8.878.000	67,63%
		1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	13.128.000	8.878.000	67,63%
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**17.000.000**	**17.000.000**	**100,00%**
	A		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	17.000.000	17.000.000	100,00%
		1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17.000.000	17.000.000	100,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Kecamatan Rinhat				**1.595.987.808**	**1.431.213.567**	**89,68%**
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**10.000.000**	**8.640.000**	**86,40%**
	A	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		10.000.000	8.640.000	86,40%
		1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.000.000	8.640.000	86,40%
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**0**	**0**	**0,00%**
	A	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		0	0	0,00%
		1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	0	0	0,00%
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**66.978.000**	**51.222.500**	**76,48%**
	A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		66.978.000	51.222.500	76,48%
		1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	19.560.000	14.667.000	74,98%
		2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.418.000	0	0,00%
		3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	36.555.500	91,39%

41) Kecamatan Sasitamean

Tabel 1.114. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Kecamatan Sasitamean

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**1.359.484.162**	**1.224.547.757**	**90,07%**
1	**Belanja Operasi**	**1.359.484.162**	**1.224.547.757**	**90,07%**
	a. Belanja Pegawai	1.011.991.862	978.697.757	96,71%
	b. Belanja Barang dan Jasa	347.492.300	245.850.000	70,75%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 1.115. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Kecamatan Sasitamean

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Kecamatan Sasitamean				**1.359.484.162**	**1.224.547.757**	**90,07%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.242.391.162**	**1.131.177.757**	**91,05%**
	A	Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah		0	0	0,00%
		1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0,00%
		2	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0,00%
	B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.088.391.862	1.028.262.757	94,48%
		1	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	1.011.991.862	978.697.757	96,71%
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	76.400.000	49.565.000	64,88%
	C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		7.200.000	7.200.000	100,00%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	7.200.000	7.200.000	100,00%
	D	Administrasi Umum Perangkat Daerah		37.599.300	13.210.000	35,13%
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.134.800	2.100.000	98,37%
		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.342.000	2.210.000	34,85%
		3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.972.500	5.160.000	74,01%
		4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.150.000	3.740.000	16,88%
	E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5.200.000	5.095.000	97,98%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.700.000	2.700.000	100,00%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.500.000	2.395.000	95,80%
	F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		104.000.000	77.410.000	74,43%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.000.000	77.410.000	97,99%
		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	0	0,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Kecamatan Sasitamean				**1.359.484.162**	**1.224.547.757**	**90,07%**
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**37.540.000**	**35.567.000**	**94,74%**
	A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		37.540.000	35.567.000	94,74%
		1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	37.540.000	35.567.000	94,74%
3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**3.490.000**	**2.450.000**	**70,20%**
	A	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		3.490.000	2.450.000	70,20%
		1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	3.490.000	2.450.000	70,20%
4	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**76.063.000**	**55.353.000**	**72,77%**
	A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		76.063.000	55.353.000	72,77%
		1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11.040.000	2.395.000	21,69%
		2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11.460.000	6.360.000	55,50%
		3	FasilitasiPelaksanaanTugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	10.790.000	4.130.000	38,28%
		4	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	13.610.000	13.440.000	98,75%
		5	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	29.163.000	29.028.000	99,54%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

42) Kecamatan Weliman

Tabel 1.116. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Kecamatan Weliman

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**1.441.586.747**	**1.240.111.970**	**86,02%**
1	**Belanja Operasi**	**1.441.586.747**	**1.240.111.970**	**86,02%**
	a. Belanja Pegawai	1.111.037.164	1.028.381.970	92,56%
	b. Belanja Barang dan Jasa	330.549.583	211.730.000	64,05%

Tabel 1.117. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Kecamatan Weliman

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Kecamatan Weliman				**1.441.586.747**	**1.240.111.970**	**86,02%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.356.326.747**	**1.198.869.970**	**88,39%**
	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.168.977.164	1.076.321.970	92,07%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.111.037.164	1.028.381.970	92,56%
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	56.920.000	46.920.000	82,43%
		3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.020.000	1.020.000	100,00%
	B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		7.200.000	7.200.000	100,00%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	7.200.000	7.200.000	100,00%
	C	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		53.784.583	29.743.000	55,30%
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.920.000	4.525.000	45,61%
		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	16.073.000	80,37%
		3	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	23.864.583	9.145.000	38,32%
	D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	0	0,00%
		1	Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel	0	0	0,00%
		2	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	0	0	0,00%
	E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.545.000	1.510.000	59,33%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100,00%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.545.000	510.000	33,01%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Kecamatan Weliman				**1.441.586.747**	**1.240.111.970**	**86,02%**
	F		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.830.000	59.105.000	59,80%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas atau Operasional Lapangan	73.830.000	58.905.000	79,78%
		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	200.000	0,80%
	G		Penataan Organisasi	24.990.000	24.990.000	100,00%
		1	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian kualitas pelayanan Publik dan Tata Laksana	24.990.000	24.990.000	100,00%
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**3.060.000**	**3.060.000**	**100,00%**
	A		Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.060.000	3.060.000	100,00%
		1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait	3.060.000	3.060.000	100,00%
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**21.800.000**	**20.502.000**	**94,05%**
	A		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	17.550.000	16.932.000	96,48%
		1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17.550.000	16.932.000	96,48%
	B		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	4.250.000	3.570.000	84,00%
		1	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	4.250.000	3.570.000	84,00%
4	**KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**6.800.000**	**5.780.000**	**85,00%**
	A		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.800.000	5.780.000	85,00%
		1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.800.000	5.780.000	85,00%
5	**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**41.700.000**	**1.530.000**	**3,67%**
	A		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	41.700.000	1.530.000	3,67%
		1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	40.000.000	0	0,00%
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.700.000	1.530.000	90,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Kecamatan Weliman				**1.441.586.747**	**1.240.111.970**	**86,02%**
6	**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**11.900.000**	**10.370.000**	**87,14%**
	A	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		11.900.000	10.370.000	87,14%
		1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11.900.000	10.370.000	87,14%

43) Kecamatan Wewiku

Tabel 1.118. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Belanja - Kecamatan Wewiku

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
BELANJA		**1.172.992.460**	**1.011.934.517**	**86,27%**
1	**Belanja Operasi**	**1.172.992.460**	**1.011.934.517**	**86,27%**
	a. Belanja Pegawai	795.954.460	749.904.517	94,21%
	b. Belanja Barang dan Jasa	377.038.000	262.030.000	69,50%

Tabel 1.119. Alokasi, Realisasi dan Capaian Rincian Program dan Kegiatan - Kecamatan Wewiku

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Kecamatan Wewiku				**1.172.992.460**	**1.011.934.517**	**86,27%**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA**			**1.016.097.460**	**889.969.517**	**87,59%**
	A	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		863.574.460	798.024.517	92,41%
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	795.954.460	749.904.517	94,21%
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	67.620.000	48.120.000	71,16%
	B	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		5.400.000	5.400.000	100,00%
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.400.000	5.400.000	100,00%
	C	Administrasi Umum Perangkat Daerah		49.623.000	18.927.500	38,14%
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	1.389.000	13,89%
		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.997.850	7.042.500	70,44%
		3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.831.150	6.926.000	70,45%
		4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.794.000	3.570.000	18,04%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Kecamatan Wewiku				**1.172.992.460**	**1.011.934.517**	**86,27%**
	D		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.590.000	2.510.000	26,17%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	1.500.000	30,00%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	4.590.000	1.010.000	22,00%
	E		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	87.910.000	65.107.500	74,06%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.410.000	57.607.500	74,42%
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000	0	0,00%
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.500.000	7.500.000	100,00%
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK**			**21.420.000**	**19.040.000**	**88,89%**
	A		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan	21.420.000	19.040.000	88,89%
		1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	11.220.000	11.220.000	100,00%
		2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.200.000	7.820.000	76,67%
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DANKELURAHAN**			**22.800.000**	**22.795.000**	**99,98%**
	A		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	22.800.000	22.795.000	99,98%
		1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22.800.000	22.795.000	99,98%
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM**			**13.600.000**	**12.070.000**	**88,75%**
	A		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman danKetertiban Umum	13.600.000	12.070.000	88,75%
		1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13.600.000	12.070.000	88,75%
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAHAN UMUM**			**38.045.000**	**8.220.000**	**21,61%**
	A		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah	38.045.000	8.220.000	21,61%
		1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	25.125.000	0	0,00%
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12.920.000	8.220.000	63,62%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Pagu	Realisasi	%
Kecamatan Wewiku				**1.172.992.460**	**1.011.934.517**	**86,27%**
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**61.030.000**	**59.840.000**	**98,05%**
	A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan danPengawasan Pemerintahan Desa		61.030.000	59.840.000	98,05%
		1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.980.000	15.130.000	94,68%
		2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, danKewajiban Lembaga Kemasyarakatan	9.860.000	9.860.000	100,00%
		3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12.920.000	12.580.000	97,37%
		4	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12.410.000	12.410.000	100,00%
		5	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	9.860.000	9.860.000	100,00%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1.1.6. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2025

Tabel 1.120. Alokasi dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
PENDAPATAN		**884.477.859.329**	**833.431.598.063**	**94,23%**
1	**Pendapatan Asli Daerah**	**67.914.651.656**	**66.637.044.585**	**98,12%**
	a. Pajak Daerah	22.112.791.023	16.328.651.325	73,84%
	b. Retribusi Daerah	30.914.241.100	33.100.397.205	107,07%
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.423.379.166	5.423.379.166	100,00%
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	9.464.240.367	11.784.616.889	124,52%
2	**Pendapatan Transfer**	**808.563.207.673**	**756.571.637.183**	**93,57%**
	a. Transfer Pemerintah Pusat	785.330.644.000	736.610.224.684	93,80%
	1) Dana Perimbangan	673.198.412.000	649.126.551.460	96,42%
	a) Dana Transfer Umum	489.885.448.000	474.515.160.044	96,86%
	(1) DBH	3.875.948.000	3.786.110.700	97,68%
	(2) DAU	486.009.500.000	470.729.049.344	96,86%
	b) Dana Transfer Khusus	183.312.964.000	174.611.391.416	95,25%
	(1) DAK Fisik	53.302.620.000	52.856.882.792	99,16%
	(2) DAK Non Fisik	130.010.344.000	121.754.508.624	93,65%
	2) Dana Insentif Daerah	0	0	0,00%
	3) Dana Otonomi Khusus	0	0	0,00%
	4) Dana Keistimewaan	0	0	0,00%
	5) Dana desa	112.132.232.000	87.483.673.224	78,02%
	b. Transfer antar-daerah	23.232.563.673	19.961.412.499	85,92%
	1) Pendapatan Bagi Hasil	23.232.563.673	19.961.412.499	85,92%
	2) Bantuan Keuangan	0	0	0,00%
3	**lain-lain Pendapatan Daerah yang sah**	**8.000.000.000**	**10.222.916.295**	**127,79%**
	a. Hibah	0	0	0,00%
	b. Dana Darurat	0	0	0,00%
	c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan	8.000.000.000	10.222.916.295	127,79%
BELANJA		**930.146.741.928**	**833.348.619.153**	**89,59%**
1	**Belanja Operasi**	**649.251.006.566**	**604.307.338.754**	**93,08%**
	a. Belanja Pegawai	345.467.965.061	336.205.137.393	97,32%
	b. Belanja Barang dan Jasa	277.715.351.180	243.485.239.681	87,67%
	c. Belanja Bunga	0	0	#DIV/0!
	d. Belanja Subsidi	0	0	0,00%
	e. Belanja Hibah	24.112.090.324	22.860.961.680	94,81%
	f. Belanja Bantuan Sosial	1.955.600.000	1.756.000.000	89,79%
2	**Belanja Modal**	**103.256.816.566**	**79.812.083.839**	**77,29%**
	a. Belanja Tanah;	0	0	0,00%
	b. Belanja Peralatan dan Mesin;	28.355.678.017	24.227.528.876	85,44%
	c. Belanja Bangunan dan Gedung;	31.247.063.949	25.749.348.371	82,41%
	d. Belanja Jalan;	14.930.080.851	11.434.829.349	76,59%
	e. Belanja Irigasi dan Jaringan;	26.740.545.759	16.328.892.061	61,06%
	f. Belanja modal aset tetap lainnya;	1.983.447.990	2.071.485.182	104,44%
3	**Belanja Tidak Terduga**	**13.484.678.001**	**12.786.790.000**	**94,82%**
4	**Belanja Transfer**	**164.154.240.795**	**136.442.406.560**	**83,12%**
	a. Belanja Bagi Hasil	2.627.183.995	2.004.340.536	76,29%
	b. Belanja Bantuan Keuangan	161.527.056.800	134.438.066.024	83,23%

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
	PEMBIAYAAN	**10.247.553.683**	**10.247.553.683**	**100,00%**
1	**Penerimaan Pembiayaan**	**5.247.553.683**	**5.247.553.683**	**100,00%**
	a. SiLPA	5.247.553.683	5.247.553.683	100,00%
	b. Pencairan Dana Cadangan	0	0	0,00%
	c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0,00%
	d. Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0,00%
	e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0,00%
	f. Penerimaan Pembiayaan lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangundangan	0	0	0,00%
2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**5.000.000.000**	**5.000.000.000**	**100,00%**
	a. Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	0	0	0,00%
	b. Penyertaan modal daerah	5.000.000.000	5.000.000.000	100,00%
	c. Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0,00%
	d. Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0,00%
	e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	0,00%

1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

1.2.1. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi *riil* saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu.

Dalam menentukan isu strategis pembangunan daerah, terdapat beberapa komponen yang diperhatikan untuk mendapatkan inti permasalahan yang harus menjadi prioritas pembangunan di daerah. Berdasarkan analisis terhadap evaluasi capaian pembangunan yang telah dilakukan serta mempertimbangan program pembangunan jangka menengah dan jangka panjang serta konstelasi/dinamika regional dan nasional, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka dan dijadikan isu strategis yang menjadi fokus penanganan pada kegiatan pembangunan di Tahun 2025.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Malaka umumnya berkisar pada ketimpangan infrastruktur, masih rendahnya kualitas SDM, tingginya angka kemiskinan, tata kelola pemerintahan yang belum optimal, perencanaan yang kurang partisipatif, dan terbatasnya fiskal daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya dan tahun berjalan, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

a) Urusan wajib pelayanan dasar

Permasalahan pembangunan yang teridentifikasi pada 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan

   - ❖ kualitas layanan pendidikan yang belum optimal dan tidak merata;
   - ❖ rendahnya partisipasi masyarakat pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar maupun pendidikan kesetaraan; dan
   - ❖ belum optimalnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pendidikan.

2. Kesehatan

   - ❖ masih adanya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki jaminan kesehatan;
   - ❖ derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Malaka yang tercermin oleh Angka Harapan Hidup (AHH) masih di bawah capaian Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional, dimana capaian sampai akhir tahun 2024 sebesar 65,99 sedangkan target nasional/provinsi tahun 2024 sebesar 71,83;
   - ❖ belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM tenaga kesehatan;
   - ❖ ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan baik di RSUPP Betun, uskesmas dan puskesmas pembantu masih perlu ditingkatkan standarnya;
   - ❖ tingginya kasus gizi buruk dan stunting
   - ❖ tingginya kasus penyakit menular dan tidak menular; dan
   - ❖ belum optimalnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan kesehatan.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

   - ❖ belum optimalnya kuantitas dan kualitas jalan kabupaten dan desa;
   - ❖ belum optimalnya perluasan dan pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan kabupaten;
   - ❖ belum tersedianya rencana induk pada beberapa sektor yang terintegrasi dengan rencana tata ruang; dan
   - ❖ belum optimalnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pekerjaan umum.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

   - ❖ masih adanya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki rumah layak huni;
   - ❖ Belum tersedianya lahan pemakaman di daerah;
   - ❖ belum tersedianya regulasi terkait penetapan kawasan permukiman kumuh;
   - ❖ penyediaan sumber air baku belum memadai; dan
   - ❖ belum optimalnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan perumahan rakyat.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

   - ❖ masih terdapatnya potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban;
   - ❖ daerah masuk dalam Indeks Rawan Bencana (IRB) kategori tinggi;
   - ❖ paradigma penanggulangan bencana masih memiliki konsep *emergency response*, belum *preventive response*; dan
   - ❖ belum optimalnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6. Sosial

- ❖ masih tingginya angka kemiskinan dan belum terintegrasinya program penanggulangan kemiskinan;
- ❖ belum tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akurat;
- ❖ belum optimalnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- ❖ adanya ancaman bencana alam yang terjadi di wilayah kabupaten Malaka; dan
- ❖ belum optimalnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan sosial.

b) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Permasalahan pembangunan yang teridentifikasi pada 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

1. Tenaga Kerja

- ❖ tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi;
- ❖ jumlah angkatan kerja yang sangat besar;
- ❖ kualitas tenaga kerja relatif rendah;
- ❖ belum optimalnya fasilitasi pembentukan wirausaha baru untuk peningkatan perekonomian masyarakat, baik terkait pelatihan produksi, pengelolaan dan manajemen usaha, permodalan dan pemasaran;
- ❖ masih kurangnya sinergitas antara informasi kesempatan kerja dari pengusaha dan penyediaan tenaga kerja sesuai yang dibutuhkan.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

   - ❖ masih rendahnya partisipasi perempuan dalam ruang publik;
   - ❖ kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi di Kabupaten Malaka;
   - ❖ belum tersedianya tenaga ahli dalam penanganan korban tindak kekerasan; dan
   - ❖ belum optimalnya peran jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak.

3. Pangan

   - ❖ belum tersedianya data perhitungan cadangan pangan di Kabupaten Malaka untuk mengetahui tingkat kesiapan dan ketahanan daerah dalam menghadapi potensi krisis pangan; dan
   - ❖ belum optimalnya kerjasama penyediaan pangan dengan daerah-daerah penghasil bahan pangan, sehingga akan mampu mendukung stabilitas harga pangan.

4. Pertanahan

   - ❖ masih adanya sengketa dan konflik lahan di masyarakat seperti tumpang tindih lahan, konflik penguasaan dan sengketa tanah waris yang berdampak pada proses legalisasi hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan pemerintah daerah;
   - ❖ belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah; dan
   - ❖ masih perlunya pengadaan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan umum.

5. Lingkungan Hidup

   - ❖ belum tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH);
   - ❖ menurunnya kualitas lingkungan;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- ❖ belum optimalnya pengelolaan dan pengolahan sampah;
- ❖ masih rendahnya ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- ❖ belum tersedianya SDM yang memenuhi persyaratan sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) di daerah menjadi kendala dalam penanganan kasus pengaduan pencemaran lingkungan didalam upaya penegakan hukum lingkungan; dan
- ❖ Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- ❖ masih terdapat masyarakat yang belum memiliki dokumen baik dokumen kependudukan maupun catatan sipil;
- ❖ masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan bukti identitas diri;
- ❖ masih rendahnya kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
- ❖ sarana dan prasarana pendukung administrasi kependudukan tidak memadai; dan
- ❖ kurangnya SDM yang menangani IT pada aplikasi SIAK dan AFIS KTP-el.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- ❖ rendahnya Pendapatan Asli Desa (PADes), yang mengakibatkan tinggginya ketergantungan desa terhadap dana transfer;
- ❖ rendahnya kapasitas aparatur desa;
- ❖ belum optimalnya pemahaman dan pemanfaatan teknologi informasi/TI untuk meningkatkan daya saing perdesaan menuju desa berkembang dan desa maju;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- ❖ terbatasnya sarana dan prasarana;
- ❖ alokasi anggaran pemberdayaan yang kerap minim dibandingkan pembangunan infrastruktur; dan
- ❖ belum optimalnya peran lembaga dan organisasi yang ada di masyarakat seperti Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Posyandu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa dan Lembaga Adat.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- ❖ keterbatasan aparatur di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- ❖ masih rendahnya angka capaian Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR);
- ❖ peningkatan cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB aktif belum diikuti dengan penurunan *unmet need* secara proporsional sebagai akibat dari fokus penggarapan program keluarga berencana masih berorientasi pada peningkatan alih cara dibandingkan dengan porsi penggarapan kepada PUS yang tidak ber-KB khususnya kategori PUS Ingin Anak Ditunda (IAT) dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL); dan
- ❖ belum optimalnya pelaksanaan kegiatan KIE dan pemanfaatan kegiatan kKB momentum sebagai sarana pembinaan akseptor oleh para PLKB, PKB, TPD, dan KB.

9. Perhubungan

- ❖ minimnya infrastruktur dan fasilitas: kualitas dan kuantitas sarana-prasarana perhubungan yang masih rendah, seperti terminal angkutan (pedesaan/kota) yang tidak memadai, minimnya rambu lalu lintas, penerangan jalan umum (PJU), dan keterbatasan alat pengujian kendaraan bermotor; dan

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- ❖ masih rendahnya kualitas layanan angkutan umum yang memicu ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi, menyebabkan ketidakteraturan lalu lintas.

10. Komunikasi dan Informatika
    - ❖ belum tersedianya sarana prasarana dan jaringan *utilitas* untuk menunjang sistem informasi perangkat daerah yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendukung kelancaran tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis digital;
    - ❖ belum optimalnya pemanfaatan Media Center yang menjadi sumber pengintegrasian data di Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
    - ❖ kurangnya pemahaman keamanan informasi/persandian dan data statistik sektoral yang belum akurat/ter-*update*.
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
    - ❖ jumlah koperasi meningkat secara kuantitas, namun tidak diimbangi dengan kualitas (banyak koperasi tidak aktif);
    - ❖ koperasi sulit berkembang karena modal terbatas;
    - ❖ terbatasnya kemampuan UMKM untuk mengakses pembiayaan;
    - ❖ kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi yang masih rendah;
    - ❖ masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi anggota koperasi; dan
    - ❖ belum optimalnya pola kemitraan atau kerjasama antara Koperasi dan UMKM, dengan pengusaha besar belum optimal baik di bidang permodalan maupun pemasaran.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

12. Penanaman Modal

- masih terbatasnya ruang usaha di daerah, menyulitkan untuk mendatangkan investor asing yang akan menanamkan modalnya di daerah di sektor tertentu, khususnya sektor industri; dan
- kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan dan investasi;
- pengendalian dan pengawasan terhadap penanaman modal belum optimal.

13. Kepemudaan dan Olahraga

- rendahnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri;
- rendahnya partisipasi pemuda organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan;
- keterbatasan sarana olahraga yang representatif dan tidak meratanya fasilitas olah raga hingga ke tingkat desa/kecamatan.
- manajemen pembinaan prestasi belum optimal: kurangnya pembinaan olahraga sejak usia dini (pelajar/mahasiswa) yang terstruktur dan berkelanjutan.

14. Statistik

- Penyelenggaraan statistik sektoral belum optimal: partisipasi perangkat daerah (SKPD) dalam menyediakan dan memperbarui (*update*) data statistik sektoral masih rendah.
- rendahnya kualitas dan integrasi data: belum adanya standarisasi data sektoral dan metadata baku, sehingga data yang dihasilkan antar instansi sering kali berbeda (tidak koheren) dan sulit diintegrasikan ke dalam sistem tunggal (*Single Data System*);

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- ❖ belum tersedianya anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan statistik sektoral, seperti sosialisasi, pembinaan, dan pengumpulan data;
- ❖ keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): kurangnya jumlah aparatur yang memiliki kompetensi teknis di bidang statistik sektoral, pengolahan data, dan pemahaman terkait statistik;
- ❖ keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan data, terutama untuk data geospasial.

15. Persandian

- ❖ kurangnya pegawai fungsional sandiman terampil yang memiliki kompetensi teknis di bidang keamanan informasi.
- ❖ belum adanya dukungan anggaran untuk pelaksanaan urusan ini sehingga berdampak pada pelatihan SDM, pengadaan alat persandian, penerapan sertifikat elektronik, dan peningkatan koordinasi terkait keamanan data.

16. Kebudayaan

- ❖ belum ditetapkannya cagar budaya di tingkat kabupaten sehingga tindak lanjut terhadap program pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan belum maksimal;
- ❖ masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah sebagai bagian dari pembelajaran sejarah daerah; dan
- ❖ belum optimalnya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pelaku seni dalam pemanfaatan budaya.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

17. Perpustakaan

- ❖ keterbatasan anggaran: pendanaan yang kurang memadai menghambat pengembangan sarana, prasarana, dan pengadaan koleksi bahan pustaka yang *update*;
- ❖ layanan peningkatan minat baca masyarakat belum berlangsung dengan baik, sehingga minat baca masyarakat masih tergolong rendah;
- ❖ masih terbatasnya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan.
- ❖ kualitas dan kuantitas SDM terbatas: masih kurangnya tenaga pustakawan yang kompeten dan profesional, baik dari segi kualitas maupun jumlah;
- ❖ Pengawasan fungsi manajemen perpustakaan yang belum berjalan dengan baik.
- ❖ budaya baca dan publikasi rendah: masih rendahnya tingkat kunjungan dan minat baca masyarakat, yang diperparah dengan kurang aktifnya promosi dan sosialisasi pelayanan perpustakaan.

18. Kearsipan

- ❖ SDM kearsipan terbatas: kurangnya jumlah fungsional arsiparis yang kompeten dan berdedikasi khusus untuk mengelola arsip;
- ❖ pengelolaan konvensional: belum optimalnya penerapan sistem manajemen arsip elektronik dan digitalisasi dokumen, sehingga pengelolaan masih bersifat konvensional dan lambat;
- ❖ rendahnya pembinaan kearsipan di tingkat perangkat daerah, menyebabkan penataan arsip inaktif tidak teratur.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

c) Urusan Pilihan

Permasalahan pembangunan yang teridentifikasi pada 5 (lima) urusan pilihan adalah sebagai berikut

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

   - ❖ belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana budidaya perikanan;
   - ❖ belum optimalnya penguasaan teknologi pengelolaan dan pengolahan perikanan;
   - ❖ belum memadainya sumber daya manusia (SDM) perikanan; dan
   - ❖ belum optimalnya sarana pemasaran dan pengolahan hasil perikanan.

2. Pariwisata

   - ❖ kurangnya promosi destinasi wisata di Kabupaten Malaka yang berdampak pada masih rendahnya angka kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan asing;
   - ❖ keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana; dan
   - ❖ belum optimalnya pengembangan pariwisata daerah sebagai sektor ekonomi kreatif;

3. Pertanian

   - ❖ Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan non pertanian masih belum bisa dikendalikan; dan
   - ❖ masih kurangnya optimasi lahan yang disebabkan karena kurang tersedia sumberdaya;
   - ❖ keterbatasan alat mesin pertanian (alsintan); dan
   - ❖ tingginya biaya saprodi: harga pupuk dan benih yang mahal serta seringkali langka di tingkat petani.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Perdagangan

   - ❖ masih rendahnya kepatuhan pemilik/pengguna UTTP (pelaku usaha, industri, pedagang, fasilitas publik, dan sektor jasa) dalam memenuhi kewajiban pemeriksaan dan pengesahan alat ukur (tera/teraulang) sesuai ketentuan metrologi legal; dan
   - ❖ infrastruktur dan sarana distribusi: pasar rakyat yang belum representatif (kumuh)

5. Perindustrian

   - ❖ masih rendahnya tingkat pertambahan jumlah industri kecil dan menengah;
   - ❖ terbatasnya akses permodalan bagi para pelaku usaha industri kecil dan menengah; dan
   - ❖ rendahnya daya saing produk, pemasaran dan kualitas produk usaha industri kecil dan menengah.

d) Fungsi Penujang Urusan Pemerintahan

1. Bidang Perencanaan

   - ❖ masih terdapat ketidakselarasan antara dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) dengan rencana kerja tahunan (RKPD) dan dokumen anggaran (APBD).
   - ❖ keterbatasan sumber daya manusia; dan
   - ❖ perencanaan sering kali tidak berbasis bukti (*evidence-based policy*) karena lemahnya kualitas data statistik dan kajian, yang menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi permasalahan secara akurat.

2. Bidang Keuangan

   - ❖ ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat: PAD (Pendapatan Asli Daerah) masih rendah, sehingga daerah sangat bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, yang membatasi kemandirian fiskal;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- ❖ belum optimalnya pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- ❖ belum optimalnya pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan; dan
- ❖ keterlambatan dalam penyusunan dan pelaporan keuangan serta kualitas laporan keuangan yang belum optimal.

3. Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
   - ❖ jumlah sumber daya manusia yang terbatas;
   - ❖ pendistribusian pegawai yang belum optimal yang disebabkan analisa beban kerja dan analisa jabatan yang kurang tepat; dan
   - ❖ belum optimalnya sistem pengembangan pola karir dan sistem pengembangan kompetensi pegawai.
4. Bidang Penelitian dan Pengembangan
   - ❖ keterbatasan sumber daya (SDM & anggaran): minimnya jumlah peneliti yang berkualitas dan terbatasnya dana untuk kegiatan penelitian mandiri;
   - ❖ sarana dan prasarana: kurangnya infrastruktur penunjang kegiatan penelitian; dan
   - ❖ masih rendahnya tingkat penerapan dan pelembagaan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Bidang Pengawasan
   - ❖ belum optimalnya capaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
   - ❖ masih rendahnya kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
6. Bidang Pengadaan
   - ❖ belum optimalnya jumlah dan kapasitas Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JFPBJ) yang kompeten;
   - ❖ kurangnya pemahaman mendalam mengenai sistem *e-procurement* (LPSE/SPSE) menyebabkan keterlambatan dalam proses pemilihan penyedia; dan

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- ❖ terbatasnya penyedia barang/jasa yang berkualitas dan memenuhi kualifikasi;

7. Bidang Hubungan dengan Perwakilan Daerah
   - ❖ harmonisasi aturan: belum optimalnya sinkronisasi substansi rancangan peraturan bupati dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
8. Bidang Pelayanan Publik
   - ❖ rendahnya kapasitas SDM aparatur: minimnya kompetensi dan pemahaman aparatur mengenai standar pelayanan publik mengakibatkan lambatnya pelayanan, yang sering kali berdampak pada ketidakpuasan masyarakat; dan
   - ❖ sarana dan prasarana tidak memadai.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1.2.2. Visi Misi Kabupaten Malaka

1) Visi

Membangun Kembali Fondasi yang Kokoh dan Dinamis untuk Mencapai Kemakmuran dan Kesejahteraan Masyarakat Malaka.



Gambar 1.3
Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Malaka

Pernyataan visi memiliki makna filosofis yang akan dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap/komitmen dan perilaku/partisipasi segenap pemangku kepentingan (stakeholders) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun kedepan

a) Fondasi yang kokoh dan dinamis

Salah satu elemen kunci dalam pembangunan yang berkelanjutan adalah fondasi yang kokoh dan dinamis. Fondasi ini mencakup infrastruktur, ekonomi, sosial, serta budaya yang saling terintegrasi untuk mendukung kemajuan daerah agar dapat berdaya saing dan berkelanjutan. Dalam setiap aspek pembangunan, membangun fondasi yang kokoh dan dinamis adalah langkah penting untuk mencapai tujuan jangka panjang, menuju Indonesia Emas 2045.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Fondasi Yang Kokoh dan Dinamis dapat diartikan sebagai landasan yang tidak hanya kuat tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tuntutan Kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, fondasi ini meliputi infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan gedung, serta infrastruktur lainnya termasuk pencegahan dan penanggulangan bencana. Selain infrastruktur tersebut, fondasi juga meliputi pembangunan kegiatan non-fisik seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat (Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan) serta sistem pemerintahan yang berintegritas, inovatif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Fondasi yang kokoh dan dinamis juga mengharuskan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sangat penting, karena mereka adalah pihak yang paling merasakan dampak dari setiap kebijakan dan program. Melalui dialog yang konstruktif, pemerintah dapat memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Keterlibatan ini akan menciptakan rasa memiliki yang kuat terhadap proyek- proyek pembangunan, sehingga masyarakat lebih termotivasi untuk mendukung keberlanjutan inisiatif tersebut.

Fondasi yang kokoh dan dinamis harus diarahkan pada tujuan pembangunan berkelanjutan, artinya, setiap upaya pembangunan tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Penggunaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijak agar generasi mendatang masih dapat menikmati hasilnya. Dengan pendekatan yang holistik ini, daerah tidak hanya akan berkembang pesat, tetapi juga tetap lestari dalam jangka panjang.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

b) Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat

Pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan kemajuan daerah, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang saling berkaitan dan menjadi indikator keberhasilan dalam pembangunan daerah. Hal tersebut tidak dapat diraih tanpa adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya/pemerhati pembangunan.

Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk menyediakan infrastruktur yang memadai seperti jalan, jembatan dan fasilitas umum juga sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu juga pemerintah daerah perlu menerapkan pelayanan publik yang berkualitas. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan sangat diperlukan. Dengan keterlibatan aktif dari semua unsur, diharapkan dapat memastikan bahwa setiap upaya yang dilaksanakan untuk menuju pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

Pembangunan daerah yang dibangun di atas fondasi yang kokoh dan dinamis yang didukung dengan pemantapan ketangguhan ekonomi daerah melalui ketersediaan pangan yang berdaya saing dan peningkatan kapasitas fiskal daerah, memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), meningkatkan interkoneksi antar wilayah untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, memperkuat pelayanan publik melalui peningkatan sistem pemerintahan yang berintegritas, inovatif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, melibatkan masyarakat dan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan adalah langkah-langkah penting yang perlu diambil. Ketika semua elemen ini bersinergi, suatu daerah tidak hanya akan

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik tetapi juga kualitas hidup masyarakat yang terus meningkat.

2) Misi

terdapat 5 (lima) upaya pembangunan untuk mencapai visi Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029, yaitu:

- **Misi-1**: Mewujudkan Pertanian dan Pangan yang Berdaya Saing. misi ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pada misi ini, memuat komitmen Bupati Malaka dan Wakil Bupati Malaka dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui pengembangan sektor-sektor unggulan daerah dan penciptaan iklim investasi yang nyaman serta penciptaan lapangan pekerjaan. Beberapa hal ini diharapkan dapat mendukung peningkatan pendapatan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya maupun peningkatan pendapatan asli daerah untuk mendukung terwujudnya kemandirian fiskal daerah.
- **Misi-2**: Meningkatkan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan, Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menyeluruh Untuk Masyarakat. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan upaya aksesibilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau untuk semua masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana pada fasilitas kesehatan, peningkatan sumber daya manusia kesehatan dan penyediaan bantuan biaya pengobatan gratis bagi masyarakat tidak mampu.
- **Misi-3**: Mewujudkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Terutama di Daerah-Daerah Produktif Serta Infrastruktur Lainnya termasuk Pencegahan dan Penanggulangan Bencana. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malaka dipengaruhi oleh interaksi ekonomi, sosial dan budaya antarwilayah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Oleh karena itu sangat diperlukan infrastruktur sebagai penghubung antar wilayah maupun infrastruktur yang mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat dari bencana. Misi bertujuan untuk meningkatkan interkoneksi antar wilayah untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan infrastruktur layanan dasar bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta komitmen Pemerintah Daerah terhadap pencegahan dan penanggulangan bencana serta perubahan iklim.

- **Misi-4**: Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Aspek Jumlah, Kualitas, Kompetensi dan Persebarannya serta Mengembangan Karakter ASN dan Masyarakat.

  Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) ASN dan Masyarakat yang Berkarakter, Inovatif, dan Berintegritas melalui upaya peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan dasar dan pengembangan karakter bagi masyarakat serta peningkatan kualitas SDM ASN.

- **Misi-5**: Mengembangkan Olahraga Berprestasi.

  Misi bertujuan untuk Mewujudkan Masyarakat Malaka yang bugar, berkarakter unggul, dan berprestasi di tingkat regional dan nasional. Pada misi ini memuat komitmen Bupati Malaka dan Wakil Bupati Malaka dalam pengembangan bidang olahraga melalui penyediaan sarana prasarana dan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam event-event olahraga yang diselenggarakan.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1.2.3. Permasalahan Strategis Berdasarkan Dokumen Perencanaan

Tabel 1.121. Permasalahan dan Isu Strategis Kabupaten Malaka

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Letak geografis yang berbatasan langsung dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste	Peran strategis Kabupaten Malaka sebagai wilayah perbatasan berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 yang belum optimal	Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan ekonomi wilayah belum optimal	1. SDGs-16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (*Peace, Justice, and Strong Institutions*): 2. SDGs-17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnerships for the Goals*):	Geopolitik dan Geoekonomi	1. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan 2. Belum Optimalnya Supremasi Hukum Yang Menjamin Keadilan, kepastian hukum	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas, inovatif dan adaptif
Memiliki lahan potensial untuk pengembangan sektor unggulan daerah	Potensi utama sumber daya alam yang cukup variatif namun belum dimanfaatkan dengan baik	Belum optimalnya ketahanan pangan	1. SDGs-8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*): 2. SDGs-12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (*Responsible Consumption and Production*): 3. SDGs-14:	Rendahnya Produktivitas	1. Pertanian sebagai sektor terbesar dalam PDRB belum bisa memberikan nilai tambah yang optimal sebagai akibat belum berkembangnya industri pengolahan (hilirisasi); 2. Belum Optimalnya Pengembangan Pariwisata	Peningkatan produktivitas potensi unggulan daerah dan daya saing perekonomian daerah

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
			Ekosistem Lautan (*Life Below Water*): 4. SDGs-15: Ekosistem Daratan (Life on Land			
Adanya regulasi yang mendukung perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup	Belum terwujudnya kabupaten yang berwawasan lingkungan	Penyediaan Infrastruktur dasar yang belum merata	SDGs-13: Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*):	Krisis Lingkungan	Belum Optimalnya Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau	Penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas antar wilayah serta infrastruktur pencegahan dan penanggulangan bencana
Adanya regulasi yang mengatur tentang penataan ruang	Belum optimalnya penataan ruang wilayah	Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan ekonomi wilayah belum optimal	SDGs-11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (*Sustainable Cities and Communities*):	1. Krisis Lingkungan; 2. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas, inovatif dan adaptif
Adanya potensi sumber daya lokal yang mendukung kegiatan mitigasi bencana	Mitigasi bencana alam belum optimal	Penanggulangan Bencana Alam yang belum optimal	1. SDGs-13: Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*): 2. SDGs-9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (*Industry, Innovation, and Infrastructure*):	Krisis Lingkungan	Perubahan Iklim, Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Bencana	Penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas antar wilayah serta infrastruktur pencegahan dan penanggulangan bencana

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Bonus Demografi. Populasi yang terus bertumbuh memberikan potensi tenaga kerja yang besar	Jumlah penduduk paling banyak sehingga terdapat perbedaan konsentrasi penduduk yang cukup signifikan. Hal ini terutama dikarenakan kondisi fisik geografis beberapa wilayah yang sulit terjangkau	Penyediaan Infrastruktur dasar yang belum merata	SDGs-9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (*Industry, Innovation, and Infrastructure*):	1. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat; 2. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif.	Kesenjangan dan Ketertinggalan Daerah (masih banyaknya Daerah Tertinggal)	Penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas antar wilayah serta infrastruktur pencegahan dan penanggulangan bencana
Memiliki potensi pertanian, peternakan, dan perikanan yang dapat dikembangkan	Masih tingginya tingkat kemiskinan	Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan ekonomi wilayah belum optimal	1. SDGs-1: Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*): 2. SDGs-2: Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*): 3. SDGs-3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*Good Health and Well- being*): 4. SDGs-4: Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*):	1. Rendahnya Produktivitas; 2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia; 3. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat; 4. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif	1. Kemiskinan 0. Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kemerosotan Nilai-Nilai Budaya	Peningkatan produktivitas potensi unggulan daerah dan daya saing perekonomian daerah

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Potensi penyerapan tenaga kerja sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan	Penyerapan tenaga kerja belum optimal	Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan ekonomi wilayah belum optimal	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*):	1. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif; 2. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	1. Kemiskinan 2. Kesenjangan dan Ketertinggalan Daerah (masih banyaknya Daerah Tertinggal)	Peningkatan produktivitas potensi unggulan daerah dan daya saing perekonomian daerah
Memiliki potensi pertanian, peternakan, dan perikanan yang dapat dikembangkan	Rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah	Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan ekonomi wilayah belum optimal	1. SDGs-8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*):	1. Rendahnya Produktivitas; 2. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif	1. Pertanian sebagai sektor terbesar dalam PDRB belum bisa memberikan nilai tambah yang optimal sebagai akibat belum berkembangnya industri pengolahan (hilirisasi) 2. Belum Optimalnya Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau; 3. Belum Optimalnya Pengembangan Pariwisata	Peningkatan produktivitas potensi unggulan daerah dan daya saing perekonomian daerah

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Tersedianya fasilitas kesehatan dasar dan rujukan serta SDM bidang kesehatan	Tingkat kesehatan masyarakat yang kurang optimal	Belum optimalnya layanan pendidikan dan kesehatan	SDGs-3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*Good Health and Well-being*):	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kemerosotan Nilai-Nilai Budaya	Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia
Memiliki sarana prasarana dan SDM Pelayanan KB	Belum optimalnya pelaksanaan program KB dan pengembangan keluarga	Belum optimalnya layanan pendidikan dan kesehatan	SDGs-3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*Good Health and Well-being*):	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kemerosotan Nilai-Nilai Budaya	Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia
Tersedianya fasilitas kesehatan dasar dan rujukan serta SDM bidang kesehatan	Belum optimalnya kualitas hidup anak dan perempuan	Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan ekonomi wilayah belum optimal	SDGs-3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*Good Health and Well-being*):	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kemerosotan Nilai-Nilai Budaya	Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia
Adanya Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Olahraga berprestasri	Belum maksimalnya daya saing pemuda dan olahraga	Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan ekonomi wilayah belum optimal	SDGs-3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*Good Health and Well-being*):	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kemerosotan Nilai-Nilai Budaya	Optimalisasi Pengembangan olahraga berprestasi dan daya saing pemuda
1. Potensi sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan; 2. Tersedianya SDM dan fasilitas pelayanan dasar; 3. Tersedianya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Malaka lebih rendah dibandingkan kabupaten sekitar	Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan ekonomi wilayah belum optimal	1. SDGs-1: Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*): 2. SDGs-2: Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*): 3. SDGs-3: Kehidupan Sehat	1. Rendahnya Produktivitas; 2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia; 3. Kebutuhan Hidup Tinggi	1. Pertanian sebagai sektor terbesar dalam PDRB belum bisa memberikan nilai tambah yang optimal sebagai akibat belum berkembangnya	Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
fasilitas kesehatan dasar dan rujukan serta SDM bidang kesehatan			dan Sejahtera (*Good Health and Well- being*): Menjamin kehidupan 4. SDGs-4: Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*): 5. SDGs-6: Air Bersih dan Sanitasi Layak; (Clean Water and Sanitation): 6. SDGS-8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Decent Work and Economic Growth): 7. SDGs-9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (Industry, Innovation, and Infrastructure): 8. SDGs-12: Konsumsi dan Produksi yang	pada Usia Produktif; 4. Geopolitik dan Geoekonomi; 5. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	industri pengolahan (hilirisasi) 2. Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kemerosotan Nilai-Nilai Budaya 3. Belum Optimalnya Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau	

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
			Bertanggung Jawab (Responsible Consumption and Production):			
Banyak perempuan yang terlibat dalam sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM, yang dapat diperkuat dengan dukungan akses modal, pelatihan keterampilan, dan teknologi.	Belum optimalnya pemberdayaan perempuan	Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan ekonomi wilayah belum optimal	SDGs-3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*Good Health and Well-being*):	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kemerosotan Nilai-Nilai Budaya	Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia
Tersedianya SDM dan fasilitas pelayanan dasar	Kualitas dan daya saing sumber daya manusia belum optimal	Belum optimalnya layanan pendidikan dan kesehatan	SDGs-4: Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*):	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM serta Kemerosotan Nilai-Nilai Budaya	Peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia
Potensi sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan	Penyediaan infrastruktur dasar dan wilayah yang belum optimal	Penyediaan Infrastruktur dasar yang belum merata	1. SDGs-9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (*Industry, Innovation, and Infrastructure*): 2. SDGs-10:Berkurangny a Kesenjangan (*Reduced*	1. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif; 2. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Kesenjangan dan Ketertinggalan Daerah (masih banyaknya Daerah Tertinggal)	Penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas antar wilayah serta infrastruktur pencegahan dan penanggulangan bencana

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
			Inequalities): 3. SDGs-11:Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (*Sustainable Cities and Communities*):			
Tersedianya regulasi dan lembaga penanganan konflik serta koordinasi antar tokoh agama yang harmonis	Stabilitas keamanan daerah belum optimal	Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan ekonomi wilayah belum optimal	SDGs-16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (*Peace, Justice, and Strong Institutions*):	Geopolitik dan Geoekonomi	Belum Optimalnya Supremasi Hukum Yang Menjamin Keadilan, kepastian hukum	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas, inovatif dan adaptif
Memiliki lahan potensial untuk pengembangan sektor unggulan daerah	Penanaman modal di daerah yang kurang optimal	Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan ekonomi wilayah belum optimal	SDGs-17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnerships for the Goals*):	Geopolitik dan Geoekonomi	Belum Optimalnya Supremasi Hukum Yang Menjamin Keadilan, kepastian hukum	Peningkatan produktivitas potensi unggulan daerah dan daya saing perekonomian daerah
1. Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem e-government dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, serta efektivitas pengelolaan pemerintahan;	Belum maksimalnya pengelolaan pemerintahan	Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan ekonomi wilayah belum optimal	1. SDGs-16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (*Peace, Justice, and Strong Institutions*): 2. SDGs-17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	1. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan 2. Belum Optimalnya Supremasi Hukum Yang Menjamin Keadilan, kepastian hukum	Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas, inovatif dan adaptif

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS RPJMD	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
2. Adanya kebijakan nasional tentang reformasi birokrasi, sistem merit ASN, dan transparansi keuangan daerah.			(*Partnerships for the Goals*):			

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1.2.4. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah

Kegiatan pembangunan di Kabupaten Malaka Tahun 2025, berpedoman pada dokumen perencanaan RPJMD (5 tahun), dan RKPD (tahunan) untuk menjamin kesesuaian target kinerja, kebutuhan masyarakat, dan kerangka anggaran (APBD). Pembangunan dilaksanakan melalui pendekatan tematik, integratif, dan spasial yang disinkronisasikan antara kebijakan nasional dan potensi daerah.

Pemerintahan Kabupaten Malaka di bawah kepemimpinan Dr. Stefanus Bria Seran, MPH (SBS) dan Henri Melki Simu (HMS), berfokus pada pembangunan kembali fondasi daerah melalui pendekatan yang dinamis, kolaboratif, dan menyentuh sektor-sektor fundamental masyarakat.

Berikut adalah kegiatan pembangunan di Kabupaten Malaka Tahun 2025:

1) **Misi-1**: Mewujudkan Pertanian dan Pangan yang Berdaya Saing. Revitalisasi sektor pertanian: balik tanah gratis

   Pemerintah SBS-HMS menghidupkan kembali program unggulan "balik tanah gratis" bagi petani. Program yang dikelola Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini bertujuan meningkatkan produktivitas pangan dan mengurangi beban biaya produksi petani, sekaligus memberikan angin segar bagi ketahanan pangan daerah.

   Pemerintah juga memberikan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), benih dan sarana produksi (saprodi) bagi kelompok petani untuk meningkatkan efisiensi dan hasil panen.

2) **Misi-2**: Meningkatkan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan, Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menyeluruh Untuk Masyarakat.

   Program unggulan terdepan adalah pengobatan gratis berbasis e-KTP, yang memungkinkan seluruh masyarakat mengakses pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan di fasilitas kesehatan pemerintah hanya dengan menunjukkan KTP tanpa biaya apapun.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Program kesehatan di era kepemimpinan SBS HMS tidak lagi semata-mata berorientasi pada pengobatan, tetapi mengedepankan pendekatan preventif dan promotif sebagai strategi utama peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Berbagai program seperti pemeriksaan kesehatan rutin, penyuluhan gizi, perbaikan sanitasi lingkungan, hingga imunisasi menjadi bagian penting dalam kebijakan kesehatan daerah.

Langkah strategis yang dilakukan antara lain:

- Integrasi Program JKN dan BPJS Kesehatan: Pemerintah Kabupaten Malaka telah mencapai cakupan maksimal *(Universal Health Coverage*) dengan mengintegrasikan JKN-BPJS Kesehatan untuk seluruh warga masyara, memastikan akses pelayanan gratis.
- Penguatan pelayanan kesehatan dasar: melalui program edukasi keliling desa untuk menjangkau masyarakat yang jauh dari pusat kesehatan.
- Peningkatan sarana dan prasarana: komitmen pada perbaikan sarana prasarana kesehatan, termasuk peningkatan RSUPP Betun, penambahan tenaga dokter spesialis serta penempatan pejabat struktural yang kompeten.
- Program *Sister Hospital*: kerjasama strategis, salah satunya dengan RSUD KRT. Setjonegoro Wonosobo, untuk meningkatkan kualitas layanan RSUPP Betun.
- Fokus pada Kesehatan Ibu dan Anak: peningkatan pelayanan kesehatan khusus untuk anak usia dini sebagai generasi penerus bangsa.
- Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan: kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan keahlian tenaga kesehatan.
- Visitasi pelayanan khusus: menerima tim visitasi pengampu pelayanan kanker untuk meningkatkan layanan penyakit khusus di RSUPP Betun.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3) **Misi-3**: Mewujudkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Terutama di Daerah-Daerah Produktif Serta Infrastruktur Lainnya termasuk Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

   Pada tahun 2025, sejumlah ruas jalan di Kabupaten Malaka telah dibangun dengan konstruksi hotmix.

   - **Infrastruktur Jalan:** Penyelesaian perbaikan jalan Kateri, optimalisasi jalan dan jembatan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah.
   - **Infrastruktur Desa:** peningkatan kualitas jalan desa, jembatan, listrik, dan jaringan internet.
   - **Sarana Dasar:** Peningkatan akses air bersih.

   Selain itu, pemerintah juga membangun bronjong atau tanggul penahan banjir di beberapa wilayah seperti Malaka Barat, Malaka Tengah, dan Kecamatan Rinhat guna mengurangi risiko bencana banjir.

4) **Misi-4**: Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Aspek Jumlah, Kualitas, Kompetensi dan Persebarannya serta Mengembangan Karakter ASN dan Masyarakat.

   Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemerintah daerah menargetkan peningkatan jumlah, kualitas, kompetensi serta pemerataan SDM di Kabupaten Malaka.

   Pada Tahun 2025, Pemerintah telah mengirim sejumlah putra-putri daerah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 dan S3, serta memberikan kesempatan bagi tenaga kesehatan lulusan D3 untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1.

   Pemerintah juga melakukan penjaringan ASN berkualitas yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar jabatan, menempatkan ASN yang tepat di posisi strategis (*right man on the right place*) untuk mempercepat layanan publik serta **Profiling ASN** yang bertujuan memetakan aset SDM.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Di samping itu juga, dengan memperhatikan masih kurangnya dukungan aparatur dalam mendukung program kerja pemerintah pusat dan daerah, diadakan seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

5) **Misi-5**: Mengembangkan Olahraga Berprestasi.
   Pada sektor olahraga, SBS–HMS memberikan perhatian khusus pada pembinaan atlet muda untuk semua cabang olahraga, terutama di cabang olahraga sepak bola. Program ini diselaraskan dengan program pembinaan dari Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).
   Pemerintah Kabupaten Malaka telah mendirikan Sekolah Sepak Bola (SSB) di 9 (sembilan) kecamatan dengan total 10 SSB, termasuk tambahan SSB Aintasi di Kecamatan Malaka Tengah. Program ini diharapkan mampu melahirkan bibit-bibit atlet sepak bola berbakat dari Kabupaten Malaka yang dapat berprestasi hingga tingkat regional maupun nasional.
6) Mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada dan memperluas basis pajak/retribusi daerah, pendaataan objek pajak, serta penertiban kendaraan dinas

Guna mewujudkan tercapainya kegiatan pembangunan yang berkelanjutan, Pemerintahan SBS HMS juga berkolaborasi (kerja sama lintas sektor), bersinergi, melakukan kemitraan dengan berbagai pihak serta menyelaraskan (harmonisasi) program atau kebijakan perangkat daerah agar berjalan beriringan tanpa tumpang tindih.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka diterapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*.

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Malaka dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh perangkat daerah sebagai pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Secara terperinci pada Bab. IV akan dibahas mengenai Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB II
CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian indikator makro daerah Kabupaten Malaka, sebagaimana terinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja		Perubahan (%)
		2024	2025	
1	Indeks Pembangunan Manusia	65,13	65,84	1,09%
2	Angka Kemiskinan	13,92	13,52	-2,87%
3	Angka Pengangguran Terbuka	5,41	2,07	-61,74%
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,76	3,10	-17,55%
5	Pendapatan Per kapita	6.879	0,00	-100,00%
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,00	0,00	0

Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang diukur dari tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat yang diukur dengan angka harapan hidup (AHH) saat kelahiran, pengetahuan diukur dengan angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (MYS), serta standar hidup layak yang diukur dengan kemampuan daya beli. Dialansir dari data Malaka Dalam Angka 2026, Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2025 naik 0,71% dibandingkan tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia semakin baik sejalan dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia di kabupaten dan secara nasional.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Presentase **Jumlah Penduduk Miskin** di Kabupaten Malaka tahun 2025 menurun sebesar 0,40%, karena didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan perbaikan kondisi ketenagakerjaan, serta program pemerintah daerah yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Malaka tahun 2025 menurun sebesar 3,34% dibandingkan dengan Tahun 2024, Hal ini disebabkan karena pada tahun 2025 dilaksanakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan adanya penyerapan tenaga kerja berdampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan menurunkan angka pengangguran. .

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Malaka tahun 2025 menurun sebesar 0,66% dibandingkan dengan Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena perekonomian di Kabupaten Malaka yang sangat bergantung pada sektor pertanian dan perikanan. Kerentanan terhadap cuaca (iklim tropis dengan curah hujan bervariasi) menyebabkan fluktuasi produksi pertanian yang signifikan. Gagal panen atau cuaca ekstrem akan langsung menurunkan pendapatan daerah. Disamping itu dipengaruhi juga oleh kondisi infrastruktur yang belum memadai, terutama akses jalan dan pendukung sektor pertanian, menghambat konektivitas dan distribusi barang, sehingga menahan laju pertumbuhan ekonomi serta rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pemerintah pusat.

Pendapatan Per Kapita dan Rasio Gini Kabupaten Malaka Tahun 2025 sampai dengan data disajikan (Maret 2025) belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik.
Rasio gini tersebut menunjukkan ketimpangan pendapatan atau pengeluaran masyarakat di Kabupaten Malaka.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2.2. IKK Urusan Pendidikan

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil (%)	Sumber Data
1.a.1	Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	Menyajikan informasi tentang partisipasi anak usia 5 s.d. 6 tahun pada pendidikan anak usia dini dalam rangka pemenuhan hak anak atas pendidikan	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	4.665	57,72%	Dinas Pendikan dan Kebudayaan
			Jumlah anak usia 5-6 tahun di Kabupaten Malaka	8.082		
1.a.2	Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Menyajikan informasi tentang partisipasi anak usia 7 s.d. 15 tahun pada pendidikan dasar dalam rangka pemenuhan hak anak atas Pendidikan	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar	29.846	78,70%	Dinas Pendikan dan Kebudayaan
			Jumlah anak usia 7-15 tahun di Kabupaten Malaka	37.924		
1.a.3	Persentase Anak Usia 7-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	Menyajikan informasi tentang partisipasi anak usia 7 s.d. 18 tahun pada pendidikan kesetaraan dalam rangka pemenuhan hak anak atas pendidikan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	2.540	100,00%	Dinas Pendikan dan Kebudayaan
			Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah	2.540		
1.a.4	Persentase Toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik	Menyajikan informasi tentang kondisi dan kualitas sarana serta prasarana pada setiap satuan pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten	Jumlah toilet Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	70	21,74%	Dinas Pendikan dan Kebudayaan
			Jumlah Seluruh Toilet	322		
1.a.5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik	Menyajikan informasi tentang kondisi dan kualitas sarana serta prasarana yang salah satu diantaranya adalah ruang kelas pada setiap satuan pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten	Jumlah Ruang Kelas Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	647	29,14%	Dinas Pendikan dan Kebudayaan
			Jumlah Ruang Kelas	2.220		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2.3 IKK Urusan Kesehatan

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
1.b.1	Persentase Kematian Ibu	Mengukur persentase penurunan kematian ibu pada saat melahirkan dan setelah melahirkan per tahun pada Pemerintah Kabupaten	Jumlah Kematian Ibu Tahun N	3	0,07%	Dinas Kesehatan
			Jumlah Ibu Melahirkan Tahun N	4.239		
1.b.2	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Mengukur dan mengetahui prevalensi anak dibawah umur 5 tahun (balita) yang mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada suatu wilayah.	Jumlah balita umur 0-59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 standar deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu	5.274	29,74%	Dinas Kesehatan
			Jumlah balita umur 0-59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama	17.732		
1.b.3	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Mengukur capaian pelayanan kesehatan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kabupaten dalam kurun waktu satu tahun.	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	2.701	63,72%	Dinas Kesehatan
			Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten dalam kurun waktu satu tahun yang sama	4.239		
1.b.4	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Mengukur capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kabupaten dalam kurun waktu satu tahun.	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten dalam kurun waktu satu tahun	4.239	100,00%	Dinas Kesehatan
			Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	4.239		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
1.b.5	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Mengukur capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kabupaten dalam kurun waktu satu tahun.	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	3.262	77,40%	Dinas Kesehatan
			Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	4.215		
1.b.6	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Mengukur capaian pelayanan kesehatan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kabupaten dalam kurun waktu satu tahun.	Jumlah balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3	16.841	83,71%	Dinas Kesehatan
			Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama	20.117		
1.b.7	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Mengukur capaian pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun.	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten dalam kurun waktu satu tahun ajaran	37.265	98,26%	Dinas Kesehatan
			Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama	37.924		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
1.b.8	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Sesuai Standar	Mengukur capaian pelayanan kesehatan pada penduduk usia produktif sesuai standar di wilayah kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun.	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	117.442	87,17%	Dinas Kesehatan
			Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten dalam kurun waktu satu tahun	134.729		
1.b.9	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Mengukur capaian pelayanan kesehatan pada penduduk usia lanjut (60 tahun ke atas) sesuai standar di wilayah kabupaten dalam kurun waktu satu tahun.	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	22.790	79,94%	Dinas Kesehatan
			Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)	28.510		
1.b.10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Mengukur persentase penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	3.438	91,07%	Dinas Kesehatan
			Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten dalam kurun waktu satu tahun yang sama	3.775		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
1.b.11	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Mengukur persentase penderita Diabetes Melitus berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	1.210	73,29%	Dinas Kesehatan
			Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten berdasarkan angka prevalensi kabupaten dalam kurun waktu satu tahun yang sama	1.651		
1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Mengukur persentase penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat di kabupaten yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	120	71,01%	Dinas Kesehatan
			Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten dalam kurun waktu satu tahun yang sama	169		
1.b.13	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Mengukur persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar.	Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	3.189	100,00%	Dinas Kesehatan
			Jumlah perkiraan orang yang terduga Tuberkulosis dalam kurun waktu satu tahun yang sama	3.189		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
1.b.14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	Mengukur persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV (pelayanan kesehatan HIV) sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, Pasien IMS, Pasien TBC, WPS, LSL, Penasun, WBP, dan Transgender/Waria) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	4.348	84,81%	Dinas Kesehatan
			Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, Pasien IMS, Pasien TBC, WPS, LSL, Penasun, WBP, dan Transgender/Waria) di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	5.127		

Tabel 2.4 IKK Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
1.c.1	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten	Mengukur kondisi daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang memiliki kondisi fisik/kinerja jaringan irigasi dengan kategori baik	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik (Ha)	3.621	70,45%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten (Ha)	5.140		
1.c.2	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten	Mengukur persentase jalan di Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang dibandingkan keseluruhan jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten	Panjang jalan kewenangan Kabupaten (Km) (panjang jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang)	172	44,68%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota (Km)	385		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
1.c.3	Persentase Peningkatan Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Terlindungi dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Jumlah Penduduk Di Kabupaten	Mengukur persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di Kabupaten	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di Kabupaten pada tahun N	23.696	11,02%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Jumlah total penduduk Kabupaten	215.050		
1.c.4	Persentase Jumlah Rumah yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Mengukur persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah dioleh di Pengolahan Lumpur Tinja + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik	38.034	70,74%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk	38.034		
			rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT	0		
			rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	0		
			Jumlah rumah di Kabupaten	53.763		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
1.c.5	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Mengukur persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infraskttur pengendalian dan mitigasi banjir	Luas Kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir (Ha)	1.027	50,20%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Luas Kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir (Ha)	2.046		
1.c.6	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Kewenangan Kabupaten	Mengukur persentase luas kawasan sepanjang daerah pantai rawan abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman Pantai	Luas Kawasan sepanjang Pantai yang rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai kewenangan kabupaten (Ha)	0	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob kewenangan kabupaten (Ha)	578		
1.c.7	Persentase Kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten	Mengukur pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang sesuai peruntukannya	Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang digunakan sesuai peruntukannya	3.611,15	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku	3.611,15		
1.c.8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Mengukur persentase pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten	Jumlah pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang diterbitkan	0	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Jumlah permohonan persetujuan bangunan gedung untuk	0		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
			masyarakat berpenghasilan rendah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk			
1.c.9	Persentase Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Mengukur persentase tenaga operator atau teknisi atau analisis yang memiliki sertifikat kompetensi di Kabupaten	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi Pemerintah Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	34	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analisis yang terlibat dalam kegiatan konstruksi Pemerintah Kabupaten	34		
1.c.10	Persentase Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Sudah diterbitkan di Kabupaten	Mengukur tingkat kesesuaian pelaksanaan KKPR berdasarkan ketentuan yang termuat dalam seluruh dokumen KKPR	Jumlah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 (satu) tahun	0	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Jumlah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 (satu) tahun	0		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2.5 IKK Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
1.d.1	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Mengukur persentase warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh rumah layak huni.	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun 2025	0	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten yang akan ditangani pada tahun 2025	2.553		
1.d.2	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang Ditangani	Mengukur persentase luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani.	Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani tahun 2025	0	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Target luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha pada tahun 2025	78		
1.d.3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	Mengukur cakupan layanan rumah tidak layak huni di wilayah pemerintah daerah.	Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani pada tahun 2025	0	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Jumlah rumah tidak layak huni pada tahun 2025	32		
1.d.4	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Mengukur persentase perumahan yang dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum.	Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun 2025	715	100,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun 2025	715		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2.6 IKK Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
1.e.1	Persentase Dokumen Kebencanaan yang Telah Ditetapkan dan Masih Berlaku	Mengukur dan memastikan dokumen kebencanaan sebagai acuan resmi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penanggulangan bencana secara terpadu, terarah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku	Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun 2025	0	0,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah dokumen kebencanaan Kajian Resiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dan Rencana Kontijensi (Rekon) = 3	0		
1.e.2	Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	Untuk mewujudkan kondisi daerah yang aman, tertib dan tenteram untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara optimal	Jumlah Pengaduan Pelanggaran Trantibum Yang Ditangani	10	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah Pengaduan Pelanggaran Trantibum Yang Dilaporkan	10		
1.e.3	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	Memastikan aturan daerah dijalankan dengan baik dan mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan di daerah	Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan	7	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi	7		
1.e.4	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi risiko dampak bencana sebelum terjadi di masyarakat dan lingkungan	Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	156	1,49%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
			Pelatihan Pencegahan	103		
			Gladi Kesiapan Terhadap Bencana	53		
			Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana berdasarkan target yang telah ditetapkan	10.479		
1.e.5	Persentase Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Mengukur jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.240	100,00%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	1.240		
1.e.6	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Untuk melakukan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap	48	100,00%	Satuan Polisi Pamong Praja
			Total kejadian kebakaran di kabupaten	48		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2.7 IKK Urusan Sosial

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
1.f.1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Mengukur persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	61	26,41%	Dinas Sosial
			Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	231		
1.f.2	Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Mengukur persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti.	Jumlah anak Terlantar di Luar Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	10	25,00%	Dinas Sosial
			Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sesuai hasil asesmen	40		
1.f.3	Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Mengukur persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	393	36,94%	Dinas Sosial
			Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sesuai hasil asesmen	1.064		
1.f.4	Persentase Gelandangan dan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	Mengukur persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	0	0,00%	Dinas Sosial
			Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	0		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
1.f.5	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial Dan/Atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten	Mengukur persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten.	Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	190	100,00%	Dinas Sosial
			Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten	190		
1.f.6	Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Mengukur persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar.	Jumlah Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	65	0,21%	Dinas Sosial
			Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten	31.511		

Tabel 2.8 IKK Urusan Tenaga Kerja

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
2.a.1	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	Untuk menilai komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam rangka keselarasan dengan kebijakan dan strategi pembangunan ketenagakerjaan daerah sebagaimana dirumuskan dalam RTKD, sehingga perencanaan ketenagakerjaan pemerintahan daerah dapat lebih terarah.	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah	1	50,00%	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
			Jumlah kegiatan keseluruhan yang direncanakan di Kabupaten	2		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
2.a.2	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan)	Mengukur persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak	11	3,82%	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
			Jumlah Perusahaan	288		
2.a.3	Persentase Pekerja Bukan Penerima Upah dan Atau Pekerja Rentan Yang Mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	mengukur tingkat kepesertaan pekerja mandiri, pekerja informal, atau pekerja lepas dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan risiko kerja	Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten	4.474	100,00%	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
			Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten	4.474		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2.9 IKK Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
2.b.1	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi anak dalam mendapatkan layanan secara cepat, akurat, komprehensif dan terintegrasi	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	17	100,00%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	17		
2.b.2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Mengukur capaian layanan komprehensif terhadap perempuan korban kekeransan dan tindak pidana perdagangan orang	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	24	100,00%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	24		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2.10 IKK Urusan Pangan

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
2.c	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	Untuk mengetahui tingkat kesiapan dan ketahanan daerah dalam menghadapi potensi krisis pangan. Cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota adalah stok pangan pokok (beras) yang disiapkan dan dikelola oleh Pemerintah kabupaten/kota untuk antisipasi keadaan darurat, gejolak harga, atau keadaan tertentu guna menjamin ketersediaan dan stabilitas pangan.	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten	0,00	0,00%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Target Jumlah Cadangan Pangan	1,04		

Tabel 2.11 IKK Urusan Pertanahan

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
2.d.1	Persentase Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	Mengukur penetapan hak atas tanah yang telah bersertifikat dari seluruh tanah yang masuk dalam aset pemerintah daerah.	Luas tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan pemerintah daerah	1.905.335	21,04%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset pemerintah daerah	9.056.269		
2.d.2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Mengukur kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah.	Luas Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada Kondisi Eksisting	104.692	94,15%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Luas Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	111.199		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
2.d.3	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang Sudah Dilegalkan	Mengukur kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah.	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang Sudah Legal	1	33,33%	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
			Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang Diamanatkan Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	3		

Tabel 2.12 IKK Urusan Lingkungan Hidup

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
2.e.1	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	4	17%	Dinas Lingkungan Hidup
			Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung	24		
2.e.2	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	Mengukur capaian penanganan sampah di wilayah Kabupaten	Jumlah sampah yang diangkut, pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle, Pusat Daur Ulang, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, Stasiun Peralihan Antara, Pembangkit Listrik Energi Sampah/ Pembangkit Listrik	28.297	100%	Dinas Lingkungan Hidup

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
			Tenaga Sampah, Refuse Derived Fuel, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan dan pemrosesan akhir sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/ Tempat Pengolahan Sampah Terpadu kabupaten/kota atau Tempat Pemrosesan Akhir/ Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Regional di wilayah kabupaten			
			Jumlah seluruh timbulan sampah di wilayah kabupaten	28.297		

Tabel 2.13 IKK Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
2.f.1	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan	Menjamin kepastian hukum, keakuratan data penduduk, perlindungan identitas, dan mendukung kebijakan publik berbasis data.	Akta kelahiran yang diterbitkan	33.801	53,96%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah anak usia 0 -17 tahun	62.639		
2.f.2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.	Jumlah Anak yang Memiliki KIA	1.162	1,94%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah anak wajib KIA	59.779		
2.f.3	Jumlah Data Profil Kependudukan yang Disusun dan Dipublikasikan	Menyajikan informasi tentang kependudukan secara sistematis, akurat dan mudah dipahami untuk digunakan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah	Jumlah Data profil Kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	2	100,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2 (dua) Dokumen	2		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
2.f.4	Presentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	Angka rasio atau perbandingan dalam satuan persen antara jumlah penduduk yang telah memiliki/menerima fisik KTP elektronik dengan total jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP (wajib KTP) di suatu wilayah. Menjamin kepastian hukum, keakuratan data penduduk, perlindungan identitas, dan mendukung kebijakan publik berbasis data.	Jumlah penduduk berumur 17 tahun keatas yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik	152.503	98,22%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah Penduduk 17 tahun keatas	155.271		
2.f.5	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	Menjamin kepastian hukum, keakuratan data penduduk, perlindungan identitas, dan mendukung kebijakan publik berbasis data.	Akta kematian yang diterbitkan	3.261	100,00%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (kematian) yang tercatat dan melaporkan	3.261		
2.f.6	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	Menjamin kepastian hukum, keakuratan data penduduk, perlindungan identitas, dan mendukung kebijakan publik berbasis data.	Akta perkawinan yang diterbitkan	17.494	98,61%	#DIV/0!
			Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perkawinan) yang tercatat dan melaporkan	17.741		
2.f.7	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	Menjamin kepastian hukum, keakuratan data penduduk, perlindungan identitas, dan mendukung kebijakan publik berbasis data.	Akta perceraian yang diterbitkan	162	16,95%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perceraian) yang tercatat dan melaporkan	956		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2.14 IKK Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Satuan Hasil
2.g.1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Meningkatkan kapasitas desa sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara berkelanjutan tanpa ketergantungan besar pada bantuan luar. Mewujudkan desa yang kuat secara ekonomi, sosial, dan ekologi serta mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat/daerah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membentuk desa yang inovatif dan kompetitif juga mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan (sustainable development)	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun	36	66,67%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Jumlah desa tertinggal (per awal tahun N)	54		
2.g.2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Meningkatkan kapasitas desa sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara berkelanjutan tanpa ketergantungan besar pada bantuan luar. Mewujudkan desa yang kuat secara ekonomi, sosial, dan ekologi serta mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat/daerah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membentuk desa yang inovatif dan kompetitif juga mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan (*sustainable development*)	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa maju dan mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun	24	40,68%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Jumlah desa berkembang (per-awal tahun N)	59		
2.g.3	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa	Agar desa dapat bekerja sama dalam bidang pembangunan, pemerintahan, pemberdayaan, dan pelayanan juga mengoptimalkan potensi desa, pembangunan desa melalui kolaborasi yang efisien, efektif, dan bermanfaat bagi masyarakat, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dapat menyelesaikan masalah bersama agar menjamin kualitas layanan publik yang bisa mendukung integrasi pembangunan daerah	Jumlah kerja sama desa yang telah ditetapkan dan berlaku	127	100,00%	dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Jumlah kerja sama desa yang ditangani	127		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2.15 IKK Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
2.h.1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per Wanita Usia Subur Usia 15-49 Tahun	Mengukur angka kelahiran total (Total Fertility Rate)	Total Fertility Rate/TFR Kabupaten	2,42	115,24%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Target Fertility Rate/TFR Kabupaten yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap Kabupaten yang bersangkutan	2,10		
2.h.2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Mengukur tingkat pemakaian kontrasepsi modern	Total peserta KB Aktif Modern	7.749	30,30%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Total Pasangan Usia Subur Usia 15-49 Tahun	25.573		
2.h.3	Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)	Mengukur persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (*unmet need*) di Kabupaten Malaka	19,05	88,20%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Target persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk provinsi	21,6		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2.16 IKK Urusan Perhubungan

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
2.i.1	Konektivitas Kabupaten	Memberikan informasi terukur tentang keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah.Memberikan informasi terukur tentang keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah.	KTDaerah = (KTD x WTD) + (KTL x WTL)		1	Dinas Perhubungan
			KTD = Konektivitas Transportasi Darat	1		
			KTL = Konektivitas Transportasi Laut	0		
2.i.2	Volume/Capacity Ratio Di Jalan Kabupaten	Mengukur kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	V/C ratio di jalan Kabupaten		0,5	Dinas Perhubungan
2.i.3	Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	Menghitung persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem keselamatan.	Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	37	100,00%	Dinas Perhubungan
			Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata	37		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2.17 IKK Urusan Komunikasi dan Informatika

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
2.j.1	Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Terhubungnya akses internet pada perangkat daerah yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendukung kelancaran tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berbasis digital	Jumlah Perangkat Daerah dan atau unit pelaksana daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo	0	0,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Perangkat Daerah dan atau unit pelaksana teknis daerah	50		
2.j.2	Presentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Mengukur jenis layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dalam satu sistem terpadu untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat proses birokrasi dan memberikan pelayanan yang lebih efisien.	Jumlah layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	5	100,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah layanan publik	5		
2.j.3	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Memberikan layanan informasi kepada masyarakat terkait informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten	91.958	65,20%	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah penduduk	141.037		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2.18 IKK Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
2.k.1	Mengukur Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Mengukur pertumbuhan volume usaha koperasi	∑ Volume usaha koperasi tahun berjalan - ∑Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	-437.180.104.216	-15,65%	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
			Volume usaha koperasi tahun 2025	2.357.010.279.887		
			Volume usaha koperasi tahun 2024	2.794.190.384.103		
			∑ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	2.794.190.384.103		
2.k.2	Persentase Usaha Kecil Yang Bertransformasi Dari Informal ke Formal	Menjamin usaha kecil mendapat perlindungan dan kepastian hukum, terintegrasi pada data nasional, dan peningkatan kualitas kebijakan dalam kemudahan berusaha.	∑ Usaha Mikro yang Memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB	55	23,31%	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
			∑ Usaha Mikro	236		

Tabel 2.19 IKK Urusan Penanaman Modal

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Satuan Hasil
2.1.1	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten	Mengukur persentase peningkatan investasi di Kabupaten	Jumlah Investasi Tahun N - Jumlah nilai Investasi tahun N-1 di Kabupaten	953.138.294	12,15%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Jumlah Nilai Investasi Tahun N-1 di Kabupaten	7.845.508.037		
			Jumlah investasi tahun 2025	8.798.646.331		
			Jumlah investasi tahun 2024	7.845.508.037		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Satuan Hasil
2.1.2	Persentase Realisasi Investasi Terhadap Target Investasi	Mengukur persentase realisasi investasi terhadap target investasi di Kabupaten	Total realisasi investasi kabupaten	8.798.646.331	8,80%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Target investasi Kabupaten yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi kepada kabupaten yang bersangkutan	100.000.000.000		

Tabel 2.20 IKK Urusan Kepemudaan dan Olahraga

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
2.m.1	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten	0	0,00%	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Jumlah target pemuda usia (16-30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di kabupaten	0		
2.m.2	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Mengukur tingkat keterlibatan pemuda dalam kehidupan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten	0	0,00%	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten	60.538		
2.m.3	Persentase Atlet yang Berasal Dari Kabupaten yang Masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	Mengukur efektivitas pembinaan olahraga daerah dan peningkatan prestasi atlet.	Jumlah atlet daerah di kabupaten yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	1	0,20%	dinas Pemuda dan Olahraga
			Jumlah atlet daerah yang dibina di tingkat kabupaten (Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah, Induk Cabang Olahraga)	496		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
2.m.4	Persentase Jumlah Atlet Berprestasi	Mengukur efektivitas pembinaan olahraga daerah dan peningkatan prestasi atlet	Jumlah atlet peraih medali	139	100,00%	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Jumlah atlet yang ikut event nasional dan internasional	139		

Tabel 2.21 IKK Urusan Statistik

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
2.n	Persentase Kepatuhan Daftar Data yang Dilaporkan kepada Wali Data Berdasarkan Kesepakatan Forum Satu Data Daerah	Mengukur tingkat kepatuhan data yang dilaporkan terhadap kesepakatan forum satu data daerah persentase	Jumlah daftar data yang di laporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	0	0,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah daftar data yang disepakati oleh forum satu data daerah	0		

Catatan: Pada Tahun 2025, urusan statistik belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malaka

Tabel 2.22 IKK Urusan Persandian

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
2.o	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	Mengukur tingkat keamanan informasi pemerintah provinsi	Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI) hasil verifikasi	0	0,00%	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Nilai optimal indeks Keamanan Informasi (KAMI) (918)	0		

Catatan: Pada Tahun 2025, urusan persandian belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malaka

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2.23 IKK Urusan Kebudayaan

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
2.p.1	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Memastikan warisan budaya tetap lestari dan dimanfaatkan pada masa sekarang dan mendatang	Jumlah cagar Budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	1	100,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			dilindungi	1		
			dikembangkan	1		
			dimanfaatkan	1		
			Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan	1		
2.p.2	Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat Yang Mengunjungi Pusat Seni dan Pusat Sejarah	Mengukur tingkat pertumbuhan partisipasi masyarakat dalam kunjungan ke pusat seni dan pusat sejarah dalam periode tertentu.	Jumlah Kinjungan ke Pusat Peninggalan Bersejarah Tahun N - Jumlah Kunjungan ke Pusat Peninggalan Bersejarah Tahun N-1	0	0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Kunjungan ke Pusat Peninggalan Bersejarah Tahun N-1	0		
			Tahun 2025	0		
			Tahun 2024	0		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2.24 IKK Urusan Perpustakaan

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
2.q.1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Masyarakat	Suatu ukuran nilai yang menggambarkan kinerja dalam pembangunan Perpustakaan pada tingkat provinsi sebagai upaya meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan untuk meningkatkan serta menumbuhkan budaya kegemaran membaca masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca (TKM)		2.425	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Pra Membaca	58		
			Saat Membaca	65		
			Pasca Membaca	68		
2.q.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Suatu ukuran nilai yang menggambarkan kinerja dalam pembangunan Perpustakaan pada tingkat provinsi sebagai upaya meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan untuk meningkatkan serta menumbuhkan budaya kegemaran membaca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)		0,97	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tabel 2.25 IKK Urusan Kearsipan

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
2.r	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	Menjamin tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	T = Tingkat ketersediaan arsip		50,00%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%		
			I = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%		
			s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	0%		
			j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0%		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2.26 IKK Urusan Kelautan dan Perikanan

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
3.a.1	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Mengukur total produksi perikanan dari seluruh Kabupaten di wilayah Kabupaten	Produksi Perikanan tangkap dan budidaya (ton)	1.784	44%	Dinas Perikanan
			Target produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	4.035		
3.a.2	Angka Konsumsi Ikan	Mengukur rata-rata jumlah ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam satu wilayah selama satu tahun, yang dihitung dalam satuan kilogram/kapita/tahun di Kabupaten	Angka Konsumsi Ikan (KI)		1.784,45	Dinas Perikanan
			Angka Konsumsi Ikan Rumah Tangga (KRT)	89,95		
			Angka Konsumsi Ikan Luar Rumah Tangga (KLRT)	0,00		
			Angka Konsumsi Ikan Tidak Tercatat (KTT)	1.694,49		

Tabel 2.27 IKK Urusan Pariwisata

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
3.b.1	Persentase Investasi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan, Minum	Untuk mengukur seberapa besar minat dan keterlibatan investor dalam penyediaan akomodasi, makan, minum	Realisasi investasi sektor Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum yang dapat diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	0	0,00%	Dinas Pariwisata
			Realisasi Investasi tahun 2025	0		
3.b.2	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Asing	Untuk mengukur sejauh mana perkembangan dan daya tarik sektor pariwisata daerah dalam menarik	Jumlah wisatawan asing tahun 2025 - Jumlah wisatawan asing tahun 2024	-82	-77,36%	Dinas Pariwisata
			Jumlah wisatawan asing tahun 2024	106		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
		kunjungan wisatawan asing yang masuk ke kabupaten	Wisatawan Asing Tahun 2025	24		
			Wisatawan Asing Tahun 2024	106		
3.b.3	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten	Untuk mengukur sejauh mana perkembangan dan daya tarik sektor pariwisata daerah dalam menarik kunjungan wisatawan nusantara yang masuk ke kabupaten	Jumlah wisatawan nusantara tahun 2025 - Jumlah wisatawan nusantara tahun 2024	5.778	20,75%	dinas Pariwisata
			Jumlah wisatawan nusantara tahun 2024	27.844		
			Wisatawan Nusantara Tahun 2025	33.622		
			Wisatawan Nusantara Tahun 2024	27.844		

Tabel 2.28 IKK Urusan Pertanian

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
3.c.1	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Mengukur tingkat produksi pangan dan atau ketersediaan pangan berbasis potensi sumber daya lokal	Produksi tanaman pangan tahun 2025 – Produksi tanaman pangan tahun 2024	-3.402,78	-2,51%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Produksi tanaman pangan tahun 2024	135.423,56		
			Produksi Tanaman Pangan Tahun 2025	132.020,77		
			Produksi Tanaman Pangan Tahun 2024	135.423,56		
3.c.2	Persentase peningkatan produksi hortikultura	Mengukur tingkat produksi hortikultura berbasis potensi sumber daya lokal	Produksi hortikultura tahun 2025 – Produksi hortikultura tahun 2024	-58.419,53	-37,87%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Produksi hortikultura tahun 2024	154.271,50		
			Produksi Tanaman Holtikultura Tahun 2025	95.851,98		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
			Produksi Tanaman Holtikultura Tahun 2024	154.271,50		

Tabel 2.29 IKK Urusan Perdagangan

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
3.d.1	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	mengukur tingkat kepatuhan pemilik/pengguna UTTP (pelaku usaha, industri, pedagang, fasilitas publik, dan sektor jasa) dalam memenuhi kewajiban pemeriksaan dan pengesahan alat ukur (tera/tera ulang) sesuai ketentuan metrologi legal	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku	9	75%	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
			Jumlah potensi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten	12		

Tabel 2.30 IKK Urusan Perindustrian

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
3.e.1	Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Daerah	Mendukung pencapaian cita-cita dan tujuan pembangunan Industri nasional	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	0	0,00%	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
			Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB	0		
			Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	0		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
			Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	0		
			Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	0		
3.d.2	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Yang Melaporkan Informasi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Memenuhi kewajiban hukum/kepatuhan pelaku usaha industri keceil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	0	0,00%	dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
			Jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah	610		
3.d.3	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	Mengukur tingkat pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	Jumlah industry kecil dan menengah tahun 2025 - Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2024	30	5,17%	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
			Jumlah industry kecil dan menengah tahun N-1	580		
			Jumlah Industri Kecil dan Menengah Tahun 2025	610		
			Jumlah Industri Kecil dan Menengah Tahun 2024	580		
3.d.4	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Dibandingkan Realisasi Investasi Seluruh Sektor	Meningkatkan kontribusi industri terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Jumlah investasi sektor industri	1.121.011.000	12,74%	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
			Total investasi seluruh sektor	8.798.646.331		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2.31 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
4.a	Persentase Kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Mengukur sejauh mana program dan kegiatan yang direncanakan dalam dokumen perencanaan tahunan dapat sejalan dengan 17 Program Prioritas Presiden	Program dan atau kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan	15	88,24%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 program prioritas presiden	17		

Tabel 2.32 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
4.b.1	Persentase Belanja Pegawai Daerah Tidak Termasuk Belanja Untuk Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan Tunjangan Sejenis Lainnya yang Bersumber dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang Telah Ditentukan Penggunaannya	Mengukur Rasio Anggaran Belanja Pegawai Daerah diluar Guru	Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD)	374.338.759.870	40,25%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	930.146.741.928		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
4.b.2	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	Mengukur Rasio Anggaran Belanja Pegawai Daerah diluar Guru	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	66.637.044.585	8,00%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Realisasi Pendapatan Daerah	833.431.598.063		
4.b.3	Persentase Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Terhadap Total Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025	Mengukur Persentase Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Kabupaten	Total Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun 2025	463.965.997.212	55,67%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025	833.348.619.153		
4.b.4	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Mengukur Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	82.106.155.728	11,78%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Total Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	696.906.212.593		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2.33 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Satuan Hasil
4.c	Persentase Aparatur Sipil Negara Pendidikan Perguruan Tinggi (Aparatur Sipil Negara Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Mengukur perbandingan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpendidikan tinggi terhadap jumlah keseluruhan ASN. Pegawai yang dihitung bukan guru maupun tenaga kesehatan, sehingga fokusnya adalah pada *pegawai struktural, administratif, dan fungsional pendukung lainnya.*	Jumlah Aparatur Sipil Negara lulusan perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1.081	71,49%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Seluruh jumlah Aparatur Sipil Negara (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1.512		

Tabel 2.34 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
4.d	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Inovasi dan Telah Menjadi Bagian dari Program Kegiatan	Untuk mengukur tingkat penerapan dan pelembagaan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta menilai sejauh mana inovasi tersebut didukung melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik.	Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah	2	100,00%	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
			Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah	2		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2.35 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus	Satuan Hasil	Sumber Data
4.e.1	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.	Tingkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai berikut: 1. Melakukan Penilaian Mandiri (PM), nilai capaian 1; 2. Melakukan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK), nilai capaian 2; 3. Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; 4. Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan 5. Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas, nilai capaian 5. Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah.	0	Inspektorat Daerah
4.e.2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Untuk mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif diperlukan peningkatan mutu kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.	Tingkatan Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai berikut: a. Melakukan Penilaian Mandiri (PM), nilai capaian 2; b. Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; c. Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan d. Dievaluasi - dengan hasil level 3, nilai capaian 5. Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan	4	Inspektorat Daerah

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
			Pembangunan atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah.			
4.e.3	Manajemen Risiko Indeks	Untuk menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.	Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah sebagai berikut: a. Melakukan Penilaian Mandiri (PM), nilai capaian 1; b. Melakukan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK), nilai capaian 2; c. Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; d. Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan e. Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas, nilai capaian 5. Penentuan level berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah yang di dalamnya terdapat capaian Manajemen Risiko Indeks.		0	Inspektorat Daerah
4.e.4	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran N-1	Untuk menilai komitmen dan kualitas perbaikan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan.	Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1	230	95,04%	Inspektorat Daerah
			Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1	242		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2.36 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengadaan

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus	Satuan Hasil	Sumber Data
4.f.1	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	mengukur kesiapan dan kemampuan UKPBJ Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara profesional.	Skor indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	8,89	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4.f.2	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Mengukur kinerja perencanaan dan pelaksanaan pengadaan secara elektronik pemerintah kabupaten	Skor indikator tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	8,73	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
4.f.3	Kualifikasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	Mengukur seberapa jauh kebutuhan formasi, kualifikasi, dan pengembangan kapasitas SDM pengadaan sudah terpenuhi di pemerintah kabupaten	Skor indikator kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Jasa	24,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Tabel 2.37 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Hubungan dengan Perwakilan Daerah

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus		Satuan Hasil	Sumber Data
4.g.1	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Untuk menilai ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan memastikan kepatuhan, kelancaran pelaksanaan anggaran, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.	1. Tepat Waktu; 2. Tidak Tepat Waktu.	1 0	100,00%	Bagian Hukum
4.g.2	Persentase Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tahun N	Untuk menilai sejauh mana Ranperda yang direncanakan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun N berhasil ditetapkan menjadi Perda.	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan Tahun N Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang dalam program pembentukan peraturan daerah tahun N	6 12	50,00%	Bagian Hukum

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2.38 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Publik

IKK	Outcome	Konsep/Definisi	Rumus	Satuan Hasil
4.h	Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Untuk mengukur kesesuaian penyelenggaraan pelayanan publik dengan standar pelayanan, prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Nilai penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	39,31

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat:

2.3.1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai program/kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi perangkat daerah untuk mencapainya.

Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malaka Tahun 2025.

Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah rencana kinerja Pemerintah Kabupaten Malaka tahun 2025

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu:

a. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
b. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar reevaluasi kinerja aparatur;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; dan

d. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Malaka Tahun 2025 ditetapkan dalam 11 (sebelas) sasaran strategis kerja, yaitu:

1. Sasaran Strategis 1

   Meningkatkan kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan

2.39 Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 - Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025
lndeks Ketahanan Pangan (IKP)	Persen	80,25
Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan, Perikanan (%)	Persen	39, 18
Luas lahan pertanian pangan yang diolah	Hektar	33.155
Produksi Padi	Ton	27.000
Produksi Jagung	Ton	73,883

2. Sasaran Strategis 2

   Terwujudnya dukungan belanja daerah yang optimal untuk mendorong produktivitas dan mencapai tujuan pembangunan

2.40 Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 - Sasaran Strategis 2

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025
Rasio Kemandirian Fiskal Daerah	Persen	4,34
Rasio Penerimaan PAD (Persen PDRB)	Persen	54,51
Proporsi Pajak Daerah terhadap PAD	Persen	59,73
Proporsi Retribusi Daerah terhadap PAD	Persen	0,86

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Sasaran Strategis 3

Meningkatnya perekonomian daerah dan terkendalinya tingkat inflasi daerah sesuai dengan fundamental ekonomi

2.41 Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 - Sasaran Strategis 3

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Miliar Rupiah	3.800
PDRB Atas Dasar Harga Konstan	Miliar Rupiah	2.159,33
PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)	Ribu Rupiah	11. 401,33
Rasio Gini	Persen	0,132
Tingkat inflasi	Persen	1
Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHK)	Persen	100
Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	Persen	16,73
Tingkat Kemiskinan (%)	Persen	13,04

4. Sasaran Strategis 4

Terwujudnya Kesehatan untuk semua

2.42 Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 - Sasaran Strategis 4

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025
Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Tahun	66,4
Total *Fertility Rate* (angka kelahiran total)	Anak	3,7
Angka Kematian Ibu (AKI)	Kasus	4
Angka Kematian Bayi (AKB)	Kasus	18
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen	25
Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	Orang	88,29
Cakupan imunisasi bayi lengkap	Kasus	4.159
Penemuan dan Pengobatan tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Kasus	656
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Masyarakat	3.775
lnsidensi HIV/AIDS	Persen	1
Persentase eliminasi malaria	Persen	100
Cakupan Pelayanan Kesehatan Gratis Program e-KTP (%)	Persen	100
Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	Persen	80

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Sasaran Strategis 5

Meningkatnya konektivitas jalan pada jalur utama dan aksesibilitas daerah tertinggal dan perbatasan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan

2.43 Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 - Sasaran Strategis 5

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025
Tingkat kemantapan jalan Jalan Kabupaten	Persen	48
Tingkat kemantapan jalan Jalan Desa Strategis	Persen	13,15
Indeks Pembangunan Infrastruktur	Persen	52,64

6. Sasaran Strategis 6

Meningkatnya rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman

2.44 Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 - Sasaran Strategis 6

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025
Rumah tangga dengan akses air minum aman	Persen	75,62
Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Persen	73,79

7. Sasaran Strategis 7

Terwujudnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

2.45 Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 - Sasaran Strategis 7

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025
Indeks Risiko Bencana	Angka	154,03
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	Persen	88,82
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	77,4

8. Sasaran Strategis 8

Terwujudnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

2.46 Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 - Sasaran Strategis 8

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,52
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,54
Kemampuan Literasi (SD)	Persen	31,3
Kemampuan Literasi (SMP)	Persen	33,85
Kemampuan Numerasi (SD)	Persen	29,2
Kemampuan Numerasi (SMP)	Persen	34
Pengembangan Karakter (SD)	Persen	52,18
Pengembangan Karakter (SMP)	Persen	49,55

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025
Iklim Keamanan Satuan Pendidikan (SD)	Persen	66,73
Iklim Keamanan Satuan Pendidikan (SMP)	Persen	64,3
Iklim Kesetaraan Gender (SD)	Persen	63,29
Iklim Kesetaraan Gender (SMP)	Persen	64,73
Iklim Kebhinekaan (SD)	Persen	67,5
Iklim Kebhinekaan (SMP)	Persen	68,82
Iklim Inklusivitas (SD)	Persen	53
Iklim Inklusivitas (SMP)	Persen	54,6
Angka Partisipasi Sekolah/ APS (SD)	Persen	99,78
Angka Partisipasi Sekolah/ APS (SMP)	Persen	93

9. Sasaran Strategis 9

Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif

2.47 Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 - Sasaran Strategis 9

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	56,8
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,396
Indeks Pembangunan Gender	Angka	94,03
Indeks Perlindungan Anak	Angka	60,9
Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	Angka	150
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Balita	Angka	1.500
Cakupan Kepemilikan Akta Cerai	Angka	3
Cakupan Kepemilikan Akta Nikah	Angka	250
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,7
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	73,12

10. Sasaran Strategis 10

Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang Inovatif, adaptif dan terintegrasi

2.48 Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 - Sasaran Strategis 10

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	B (Baik)
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B
Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP
Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,44
Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	100

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

11. Sasaran Strategis 11

Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang Inovatif, adaptif dan terintegrasi

2.49 Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 - Sasaran Strategis 11

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025
Jumlah perolehan medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov)	Mendali	2 Medali
Jumlah perolehan medali emas pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	Mendali	2 Medali
Peringkat pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov)	Peringkat	10 Besar
Peringkat pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	Peringkat	10 Besar
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	63,04

Terhadap 11 (sebelas) sasaran strategis yang ditetapkan dalam target perjanjian kinerja, didukung oleh ketersediaan anggaran sebesar **Rp. 930.146.741.928.**

2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Rumus yang digunakan:

$$Capaian\ Indikator\ Kinerja = \frac{\textbf{Realisasi}}{\textbf{Target/Rencana}} \ \textbf{x 100\%}$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja. Rumus yang digunakan:

$$Capaian\ Indikator\ Kinerja = \frac{\textbf{Target- (Realisasi-Target)}}{\textbf{Target/Rencana}} \ \textbf{x 100\%}$$

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Malaka digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

2.50 Skala Pengukuran Ordinal

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	≥100%	Baik Sekali (BS)
2.	75%-100%	Baik (B)
3.	55% -75%	Cukup (C)
4.	≤55 %	Kurang (K)

Secara umum, Pemerintah Kabupaten Malaka telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029, sasaran yang ditetapkan mencapai visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

- misi I terdapat 3 (tiga) sasaran dan 17 (tujuh belas) indikator kinerja;
- misi II terdapat 1 (satu) sasaran dan 13 (tiga belas) indikator kinerja;
- misi III terdapat 3 (tiga) sasaran dan 8 (delapan) indikator kinerja;
- misi IV terdapat 3 (tiga) sasaran dan 33 (tiga puluh tiga) indikator kinerja; dan
- misi V terdapat 1 (satu) sasaran dan 5 (lima) indikator.

Dari 11 (sebelas) sasaran dengan 76 (tujuh puluh enam) indikator kinerja, pencapaian indikator sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Malaka Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2.51 Pencapaian Indikator dan Sasaran

Misi		Jumlah Tujuan	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja Sasaran		Kategori	%
1	Mewujudkan Pertanian dan Pangan yang Berdaya Saing	1	3	17	7	Baik Sekali	41,18%
					6	Baik	35,29%
					1	Cukup	5,88%
					3	Kurang	17,65%
2	Meningkatkan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan, Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menyeluruh Untuk Masyarakat	1	1	13	4	Baik Sekali	30,77%
					4	Baik	30,77%
					4	Cukup	30,77%
					1	Kurang	7,69%
3	Mewujudkan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Terutama Di Daerah-Daerah Produktif Serta Infrastruktur Lainnya Termaksud Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana	1	3	8	0	Baik Sekali	0,00%
					7	Baik	87,50%
					1	Cukup	12,50%
					0	Kurang	0,00%
4	Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Aspek Jumlah, Kualitas,Kompetensi Dan Persebarannya Serta Mengembangkan Karakter ASN Dan Masyarakat	1	3	33	15	Baik Sekali	45,45%
					14	Baik	42,42%
					2	Cukup	6,06%
					2	Kurang	6,06%
5	Mengembangkan Olahraga Berprestasi	1	1	5	2	Baik Sekali	40,00%
					0	Baik	0,00%
					0	Cukup	0,00%
					3	Kurang	60,00%
JUMLAH		**5**	**11**	**76**	**76**		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Secara kumulatif, realisasi kinerja Pemerintah Daerah pada tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat positif dengan rata-rata **capaian kinerja** mencapai **97,38%**, yang secara kualitatif dikategorikan dalam predikat "**Baik**".

Distribusi predikat capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Baik Sekali: 28 indikator (36,84%)
- Baik: 31 indikator (40,79%)
- Cukup: 8 indikator (10,53%)
- Kurang: 9 indikator (11,84%)

Lonjakan kinerja yang paling menonjol terjadi pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kualitas sumber daya manusia, seperti pendidikan yang mencapai rata-rata 107,07% berkat peningkatan drastis pada kemampuan literasi dan numerasi siswa, serta sektor administrasi kependudukan yang mencatatkan efisiensi luar biasa melalui layanan jemput bola akta-akta sipil.

Capaian impresif pada indikator makro, seperti PDRB per Kapita yang melampaui target hingga 181,22%, membuktikan bahwa kebijakan stimulus ekonomi daerah mampu memberikan dampak pengganda (multiplier effect) yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Namun, di balik capaian rata-rata yang tinggi tersebut, masih terdapat 22,37% indikator yang berada pada kategori "cukup" dan "kurang" yang menjadi catatan kritis bagi akuntabilitas daerah. Faktor penghambat utama terletak pada rendahnya nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) yang hanya mencapai 51,44% (predikat CC) dan Indeks Reformasi Birokrasi pada angka 43,21% (predikat C). Kondisi ini menunjukkan adanya "*missing link*" antara keberhasilan teknis di lapangan dengan penguatan sistem tata kelola di internal birokrasi, yang diperburuk oleh rendahnya persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kompetensi.

Selain itu, pada sektor kesehatan, prevalensi stunting yang justru meningkat ke angka 31,10% serta rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB menjadi bukti bahwa pembangunan fisik dan ekonomi belum sepenuhnya berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sektor olahraga prestasi pun menjadi catatan hitam dengan nihilnya perolehan medali pada ajang Porprov, menandakan adanya stagnasi dalam pola pembinaan atlet senior.

Berdasarkan potret kinerja tersebut, Pemerintah Daerah menetapkan rekomendasi strategis yang akan menjadi fokus pada periode mendatang. Pertama, perlu dilakukan transformasi radikal pada tata kelola birokrasi melalui implementasi performance cascading yang lebih tajam agar setiap unit kerja memiliki keselarasan target yang jelas guna meningkatkan predikat AKIP dan RB. Kedua, strategi ekonomi harus segera beralih dari sekadar ekspor komoditas mentah menuju percepatan hilirisasi industri untuk mendongkrak Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan nilai tambah lokal. Ketiga, integrasi program lintas sektor dalam penanganan stunting dan peningkatan cakupan imunisasi dasar harus menjadi prioritas wajib yang tidak bisa ditawar. Terakhir, diperlukan evaluasi terhadap metode penetapan target pada indikator-indikator yang memiliki deviasi ekstrem agar perencanaan pembangunan ke depan tetap berpijak pada data fundamental yang realistis, kredibel, dan akuntabel.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.3.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Rincian dan analisis capaian kinerja masing- masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut:

1. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1

Tabel 2.52 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1

Meningkatkan Kemandirian Daerah Dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan Yang Berkualitas Secara Berkelanjutan						
No.	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**2025**		**Capaian Kinerja**	**Kategori Capaian**
			Target	**Realisasi**		
1.	lndeks Ketahanan Pangan (IKP)	Persen	80.25	73.0	91%	Baik
2.	Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan, Perikanan (%)	Persen	39.18	3.50	9%	
3.	Luas lahan pertanian pangan yang diolah	Hektar	33,155	32,797.00	99%	
4.	Produksi Padi	Ton/Hektar	27	31,137.38	115%	
5.	Produksi Jagung	Ton/Hektar	73,883	65,904.59	89.20%	
Rata - Rata Capaian Kinerja					**80.67%**	

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dinas Pertanian

Tabel diatas merupakan pencapaian sasaran strategis dari misi I yaitu Meningkatkan ketahanan pangan, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2025 sebesar 80,67% dengan kategori baik. Jika ditinjau dari setiap indikator, terdapat keberhasilan yang sangat signifikan pada sektor produksi padi yang mampu menembus angka 115%, mengindikasikan bahwa program intensifikasi lahan dan penggunaan teknologi pertanian tepat guna telah berjalan sangat efektif melampaui target yang ditetapkan. Di sisi lain, indikator luas lahan pertanian yang diolah (99%) serta indeks ketahanan pangan (91%) menunjukkan stabilitas yang terjaga dan perencanaan yang cukup akurat dalam mempertahankan sumber daya lahan serta ketersediaan pangan di daerah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Namun, terdapat anomali kritis pada indikator kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang hanya mencapai 9% dari target 39,18%. Rendahnya capaian ini mengindikasikan adanya hambatan struktural yang besar, kemungkinan disebabkan oleh penetapan target yang terlalu ambisius (*overestimated*) tanpa mempertimbangkan pergeseran struktur ekonomi daerah ke sektor jasa atau industri, atau akibat rendahnya nilai tambah produk pertanian karena minimnya industri pengolahan (hilirisasi) di dalam daerah. Selain itu, produksi jagung yang hanya mencapai 89,20% menunjukkan adanya faktor penghambat teknis di lapangan, seperti serangan hama atau anomali cuaca yang belum sepenuhnya mampu dimitigasi oleh para petani.

Sebagai rekomendasi strategis ke depan, pemerintah daerah perlu melakukan kaji ulang (*re-benchmarking*) terhadap penetapan target PDRB agar lebih realistis dan sesuai dengan dinamika ekonomi terkini. Upaya peningkatan kinerja tidak boleh lagi hanya berfokus pada kuantitas produksi mentah, tetapi harus mulai mengarah pada penguatan sektor hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi di daerah.

Selain itu, diperlukan penguatan sistem mitigasi bencana pertanian dan pendampingan penyuluh yang lebih intensif, khususnya untuk komoditas yang belum mencapai target, guna memastikan seluruh indikator kinerja dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2

Tabel 2.53 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2

Terwujudnya dukungan belanja daerah yang optimal untuk mendorong produktivitas dan mencapai tujuan pembangunan						
No.	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**2025**		**Capaian Kinerja**	**Kategori Capaian**
			Target	**Realisasi**		
1.	Rasio Kemandirian Fiskal Daerah	Persen	4,34	4,14	95,39%	Baik
2.	Rasio Penerimaan PAD (Persen PDRB)	Persen	54,51	49,7	91,18%	
3.	Proporsi Pajak Daerah terhadap PAD	Persen	59,73	49,3	82,54%	
4.	Proporsi Retribusi Daerah terhadap PAD	Persen	0,86	1,09	126,74%	
Rata - Rata Capaian Kinerja					**98,96%**	

Sumber: Badan Pengelolaan Keungan Pendapatan dan Aset Daerah

Tabel diatas merupakan pencapaian sasaran strategis dari misi I yaitu Meningkatkan ketahanan pangan, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerahyang dimana, dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 2 pada tahun 2025 sebesar 98.96% Analisis capaian kinerja sasaran strategis pada sektor kemandirian fiskal daerah menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan di antara berbagai indikator penyusunnya, namun secara keseluruhan mencerminkan upaya pemerintah daerah yang kuat dalam mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah. Indikator proporsi retribusi daerah terhadap PAD mencatatkan capaian tertinggi sebesar 126,74%, yang melampaui target secara substansial. Keberhasilan ini didorong oleh faktor pendukung berupa optimalisasi penarikan retribusi jasa umum dan jasa usaha, serta pemutakhiran basis data objek retribusi yang lebih akurat di lapangan.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Di sisi lain, rasio kemandirian fiskal daerah (95,39%) dan rasio penerimaan PAD terhadap PDRB (91,18%) berada pada kategori capaian yang baik dan stabil, menunjukkan bahwa meskipun daerah masih memiliki ketergantungan pada dana transfer pusat, terdapat tren positif dalam penguatan struktur fiskal internal.

Namun, perhatian khusus perlu diberikan pada indikator proporsi pajak daerah terhadap PAD yang hanya mencapai 82,54%. Rendahnya capaian ini menjadi faktor penghambat utama dalam optimalisasi kemandirian fiskal, yang kemungkinan disebabkan oleh belum maksimalnya intensifikasi pajak pada sektor-sektor potensial, adanya tunggakan pajak dari tahun sebelumnya, serta dampak fluktuasi ekonomi yang memengaruhi daya beli dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, ketergantungan pada sektor retribusi yang melampaui target (*over-achieved*) menunjukkan bahwa struktur PAD masih sangat bergantung pada pungutan jasa layanan dibandingkan basis pajak yang bersifat lebih berkelanjutan.

Sebagai rekomendasi strategis untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di periode mendatang, Pemerintah Daerah perlu melakukan akselerasi digitalisasi pemungutan pajak daerah (E-Tax) guna meminimalisir kebocoran dan meningkatkan transparansi. Perlu dilakukan pula perluasan basis pajak (extensifikasi) melalui pemetaan objek pajak baru serta penguatan penegakan hukum (*law enforcement*) bagi wajib pajak yang menunggak. Selain itu, Pemda disarankan untuk melakukan evaluasi terhadap regulasi pajak dan retribusi daerah agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi terkini, sehingga target fiskal yang ditetapkan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga mencerminkan potensi riil daerah guna mewujudkan kemandirian fiskal yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3

Tabel 2.54 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3

Meningkatnya perekonomian daerah dan terkendalinya tingkat inflasi daerah sesuai dengan fundamental ekonomi						
No.	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**2025**		**Capaian Kinerja**	**Kategori Capaian**
			Target	**Realisasi**		
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Miliar Rupiah	3.800,00	4.049,81	106,57%	Baik
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	Miliar Rupiah	2.159,33	2.214,37	102,55%	
3	PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)	Ribu Rupiah	11.401,33	20.661,00	181,22%	
4	Rasio Gini	Persen	0,132	0,015	11,36%	
5	Tingkat inflasi	Persen	1%	1,77%	177,00%	
6	Pembentukan Modal Tetap Bruto (ADHK)	Persen	100%	46,12%	46,12%	
7	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	Persen	16,73	10,75	64,26%	
8	Tingkat Kemiskinan (%)	Persen	13,04	13,52	103,68%	
Rata - Rata Capaian Kinerja					**99,09%**	

Sumber: Badan Pengelola Keungan Pendapatan dan Aset Daerah, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Bagian Ekonomi, Badan Pusat Statistik

Tabel diatas merupakan pencapaian sasaran strategis dari misi I yaitu Meningkatkan ketahanan pangan, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah, yang dimana, dari tabel di atas dapat dilihat analisis capaian kinerja sasaran strategis pada indikator ekonomi makro tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat impresif dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 99,09%, yang dikategorikan dalam predikat "Baik". Keberhasilan ini didominasi oleh pelampauan target pada indikator kesejahteraan masyarakat, di mana PDRB per Kapita mencapai 181,22% dari target yang ditetapkan, serta pertumbuhan PDRB baik atas dasar harga berlaku (106,57%) maupun harga konstan (102,55%) yang tetap terjaga di atas ekspektasi.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Faktor pendukung utama dari capaian ini adalah pemulihan aktivitas ekonomi domestik yang kuat serta efektivitas kebijakan stimulus ekonomi daerah yang mampu mendorong daya beli masyarakat secara signifikan. Selain itu, angka kemiskinan yang tercapai 103,68% (bermakna realisasi 13,52% sedikit di atas target 13,04% namun masih dalam koridor pengendalian) menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan mulai membuahkan hasil. Meskipun secara akumulatif menunjukkan hasil positif, terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian serius sebagai faktor penghambat pertumbuhan yang inklusif. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) hanya mencapai 46,12%, yang mengindikasikan rendahnya realisasi investasi aset tetap atau infrastruktur pendukung produksi di daerah pada tahun berjalan. Rendahnya investasi ini sejalan dengan kurang optimalnya kontribusi PDRB sektor industri pengolahan yang hanya mencapai 64,26%, menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah masih sangat bergantung pada sektor primer dan belum bergeser ke arah industrialisasi yang memberikan nilai tambah lebih tinggi.

Sementara itu, tingkat inflasi yang tercatat sebesar 1,77% (capaian 177% terhadap target 1%) mencerminkan adanya tekanan harga yang melampaui batas toleransi awal, yang jika tidak dikendalikan dapat menggerus daya beli masyarakat di masa mendatang.

Sebagai rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja, Pemerintah Daerah perlu melakukan akselerasi perbaikan iklim investasi guna mendorong peningkatan PMTB, terutama melalui penyederhanaan regulasi perizinan dan penyediaan infrastruktur kawasan industri. Strategi hilirisasi produk unggulan daerah harus menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB, sehingga ketergantungan pada komoditas mentah dapat dikurangi.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Selain itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu memperkuat koordinasi antarwilayah dalam menjaga rantai pasok pangan dan energi untuk memastikan inflasi tetap berada pada rentang kendali.

Evaluasi terhadap metode penetapan target juga disarankan agar tetap relevan dengan dinamika ekonomi global, sehingga perencanaan pembangunan di periode berikutnya menjadi lebih presisi dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat

4. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4

Tabel 2.55 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4

Terwujudnya Kesehatan untuk semua						
No.	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**2025**		**Capaian Kinerja**	**Kategori Capaian**
			Target	**Realisasi**		
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Tahun	66,4	65,34	98,40%	Baik Sekali
2	Total Fertility Rate (Angka kelahiran total)	Anak	3,7	2,69	72,70%	
3	Angka Kematian Ibu (AKI)	Kasus	4	3	75,00%	
4	Angka Kematian Bayi (AKB)	Kasus	18	22	122,22%	
5	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen	25%	31,10%	124,40%	
6	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	orang	89,29%	100%	111,99%	
7	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Kasus	4159	2487	59,80%	
8	Penemuan dan Pengobatan tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Kasus	656	364	55,49%	
9	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Masyarakat	3775	3438	91,07%	
10	lnsidensi HIV/AIDS	Persen	1%	0,17%	17,00%	

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Terwujudnya Kesehatan untuk semua						
No.	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**2025**		**Capaian Kinerja**	**Kategori Capaian**
			Target	**Realisasi**		
11	Persentase eliminasi malaria	Persen	100%	100%	100,00%	
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Gratis Program e-KTP (%)	Persen	100%	76,09%	76,09%	
13	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	Persen	80%	100%	125,00%	
Rata - Rata Capaian Kinerja					**86,86%**	

Sumber: Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduka Pelindungan Perempuan dan Anak

Tabel diatas merupakan pencapaian sasaran strategis dari misi II yaitu Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dimana, dari tabel di atas dapat diketahui analisis capaian kinerja sasaran strategis di sektor kesehatan tahun 2025 menunjukkan performa yang secara umum berada pada kategori sangat baik dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 86,87%. Keberhasilan ini tercermin dari realisasi indikator makro kesehatan seperti Usia Harapan Hidup (UHH) yang mencapai 98,40% serta keberhasilan dalam eliminasi malaria yang mencapai target 100%. Faktor pendukung utama dari capaian ini adalah optimalnya program cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (111,99%) dan tingginya kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat, yang ditunjukkan oleh capaian proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup sebesar 125%. Selain itu, pengendalian insidensi HIV/AIDS yang sangat efektif (realisasi 0,17% dari target 1%) menunjukkan keberhasilan program preventif dan edukasi kesehatan di masyarakat.

Namun demikian, laporan ini mencatat beberapa indikator kritis yang menjadi faktor penghambat utama dan memerlukan perhatian serius. Terdapat paradoks pada data kesehatan balita, di mana prevalensi stunting justru meningkat menjadi 31,10% (realisasi di atas target maksimal 25%) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang melampaui target dengan 22 kasus dari target 18 kasus.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Hambatan ini mengindikasikan adanya masalah mendasar pada cakupan imunisasi bayi lengkap yang hanya mencapai 59,80%, serta belum optimalnya deteksi dini penyakit menular seperti tuberkulosis yang capaian penemuannya hanya 55,49%.

Rendahnya cakupan imunisasi dan penemuan kasus penyakit menular menjadi alarm atas efektivitas layanan kesehatan primer di tingkat puskesmas dan posyandu yang kemungkinan terkendala oleh keterbatasan tenaga medis atau aksesibilitas layanan di wilayah tertentu.

Sebagai rekomendasi strategis, Pemerintah Daerah harus melakukan reorientasi program kesehatan dengan fokus utama pada percepatan penurunan stunting melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif yang lebih terintegrasi. Perlu dilakukan penguatan kembali program imunisasi dasar lengkap melalui sistem jemput bola (outreach) untuk memastikan perlindungan bagi bayi dan balita. Selain itu, optimalisasi cakupan pelayanan kesehatan gratis berbasis e-KTP (76,09%) perlu ditingkatkan melalui penyederhanaan prosedur administrasi agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan tanpa hambatan. Terakhir, penguatan sistem *surveilans* dan penemuan kasus TB secara aktif (active case finding) harus menjadi prioritas guna memutus rantai penularan penyakit menular, sehingga kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dapat meningkat sesuai dengan target perencanaan strategis daerah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5

Tabel 2.56 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5

Meningkatnya konektivitas jalan pada jalur utama dan aksesibilitas daerah tertinggal dan perbatasan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan						
No.	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**2025**		**Capaian Kinerja**	**Kategori Capaian**
			Target	**Realisasi**		
1	Tingkat kemantapan jalan Jalan Kabupaten	Persen	48,00%	45,42%	94,63%	Baik
2	Tingkat kemantapan jalan Jalan Desa Strategis	Persen	13,15%	10,32%	78,48%	
3	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Persen	52,64%	50,13%	95,23%	
Rata - Rata Capaian Kinerja					**89,45%**	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Tabel di atas merupakan pencapaian strategis dari Misi III yaitu meningkatkan interkoneksi antar wilayah untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta resiliensi bencana dan perubahan iklim. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata pencapaian kinerja dari sasaran ini di tahun 2025 yakni 89,44% dengan kategori capaian yang baik. Hasil capaian kinerja dengan kategori baik ini menunjukkan bahwa setiap target terhadap indikator kinerja dalam realisasinya hampir memenuhi target yang ada. Indikator pertama yakni tingkat kemantapan jalan-jalan kabupaten realisasinya 45,42% dari target 48,00% dengan pencapaian kinerja 94,63%. Indikator Indeks Pembangunan Infrastruktur, 50,13% dari target 52,64% dengan capaian kinerja 95,23%. Kedua indikator ini menunjukkan adanya pencapaian yang cukup signifikan, hal ini tentunya disebabkan juga faktor pendukung, di antaranya kebijakan dan perencanaan pemerintah yakni pemerintah menyusun rencana dan mengambil langkah-langkah kebijakan yang sesuai dengan permasalahan-permasalahn yang berkaitan dengan konektivitas dan aksebilitas jalan utama di daerah yang tertinggal.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Selain faktor tersebut, faktor berikutnya yakni Pengalokasian Anggaran terhadap sasaran ini. Anggaran dalam pencapaian terhadap sasaran ini sangat penting, hal ini dikarenakan sebagai pendukung utama untuk membiayai berbagai kebutuhan dalam sasaran ini.

Indikator Tingkat kemantapan jalan-jalan desa strategis realisasinya hanya 10,32% dari target 13,15% dengan capaian kinerja 78,48%, hal ini menunjukkan adanya faktor penghambat dalam pencapaian indikator ini seperti sistem Drainase yang kurang maksimal sehingga Air hujan yang tidak terkelola dengan baik menyebabkan genangan dan erosi, sehingga mempercepat kerusakan jalan. Kemungkinan faktor lain kondisi geografis yakni wilayah yang sering mengalami longsor atau banjir dapat merusak jalan dengan cepat. Sebagai langkah strategis kedepan, pemerintah daerah perlu mengakselerasi capaian kinerja di periode mendatang dan memastikan keberlanjutan fungsi infrastruktur dengan merumuskan rekomendasi sebagai berikut:

1. Redesain Prioritas Anggaran: Melakukan pemetaan ulang terhadap ruas jalan desa strategis dengan memprioritaskan jalur distribusi logistik dan akses layanan dasar untuk memaksimalkan dampak ekonomi di tengah keterbatasan fiskal.
2. Penguatan Konstruksi Hijau: Mewajibkan integrasi sistem drainase yang mumpuni pada setiap pembangunan jalan guna meminimalisir kerusakan dini akibat genangan air dan perubahan iklim.
3. Ekspansi Sumber Pembiayaan: Mendorong skema pembiayaan kreatif non-APBD, seperti optimalisasi dana CSR sektor industri dan pengusulan bantuan keuangan provinsi secara lebih masif untuk mengejar ketertinggalan kemantapan jalan desa.
4. Sistem Pengawasan Tonase: Memperketat regulasi dan pengawasan terhadap kendaraan bermuatan lebih (ODOL) melalui koordinasi lintas sektor guna menjaga usia pakai jalan kabupaten yang telah dalam kondisi mantap.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6

Tabel 2.57 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6

Meningkatnya rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman dan perbatasan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan						
No.	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**2025**		**Capaian Kinerja**	**Kategori Capaian**
			Target	**Realisasi**		
1.	Rumah tangga dengan akses air minum aman	Persen	75,62%	71,65%	94,75%	Baik
2.	Rumahtangga dengan akses sanitasi aman	Persen	73,79%	73,12%	99,09%	
Rata - Rata Capaian Kinerja					**96,92%**	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Tabel di atas merupakan pencapaian dari misi III yaitu meningkatkan interkoneksi antar wilayah untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta resiliensi bencana dan perubahan iklim. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata pencapaian kinerja dari sasaran ini di tahun 2025 yakni 96,92% ,dengan kategori capaian yang baik. Jika di tinjau dari setiap indikator, terdapat keberhasilan yang sangat signifikan pada indikator rumah tangga dengan akses air minum aman dengan presentase realisasinya 71,65% dari target 75,62% dengan capain kinerja 94,75%, pada indikator rumah tangga dengan akses sanitasi aman presentase realisasinya 73,12% dari target 73,79% dengan capaian kinerja 99,09%. Kedua indikator ini menunjukkan bahwa realisasi terhadap target hampir memenuhi presentase yang ditargetkan. Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh faktor sinergi pendanaan antara Dana Alokasi Khusus (DAK), APBD, dan Dana Desa yang terintegrasi secara tepat sasaran, serta didukung oleh meningkatnya partisipasi swadaya masyarakat dalam pemeliharaan sarana air minum komunal.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Namun demikian, terdapat beberapa hambatan signifikan yang menyebabkan target belum terpenuhi secara paripurna, di antaranya adalah anomali cuaca dengan intensitas curah hujan tinggi yang menghambat durasi pengerjaan fisik di lapangan, fluktuasi harga material konstruksi yang memicu penyesuaian volume pekerjaan, serta kendala geografis di wilayah perbukitan yang meningkatkan biaya per unit sambungan air minum.

Sebagai langkah perbaikan strategis di masa mendatang, Pemerintah Daerah merekomendasikan perlunya sinkronisasi perencanaan lintas sektor untuk memastikan pembangunan jalan selalu disertai dengan pembangunan drainase dan jaringan perpipaan yang terintegrasi guna menghindari inefisiensi anggaran. Selain itu, diperlukan penguatan kapasitas manajemen bagi kelompok pengelola air minum di tingkat desa untuk menjamin keberlanjutan sarana yang telah dibangun, serta percepatan skema pembiayaan alternatif di luar APBD, seperti optimalisasi dana CSR dan bantuan keuangan provinsi, untuk mengakselerasi peningkatan kualitas jalan desa yang memiliki nilai ekonomi tinggi namun memiliki keterbatasan fiskal dalam penanganannya.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

7. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7

Tabel 2.58 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7

Terwujudnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim						
No.	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**2025**		**Capaian Kinerja**	**Kategori Capaian**
			Target	**Realisasi**		
1.	Indeks Risiko Bencana	Angka	154,03	148,6	96,47%	Baik
2.	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	Persen	88,82%	84,55%	95,19%	
3.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	77,40%	48,18%	62,25%	
Rata - Rata Capaian Kinerja					**84,64%**	

Sumber: Badan Pusat Statistik, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel di atas merupakan pencapaian dari misi III yaitu meningkatkan interkoneksi antar wilayah untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta resiliensi bencana dan perubahan iklim. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata pencapaian kinerja dari sasaran ini di tahun 2025 yakni 84,64% ,dengan kategori capaian yang baik. Jika di tinjau dari setiap indikator, terdapat keberhasilan yang sangat signifikan pada indikator indeks risiko bencana dengan angka realisasinya 148,6 dari target 154,03 dengan capaian kinerja 96,47%, ini menunjukkan bahwa perencanaan dan strategi yang dilakukan dalam pencegahan terhadap risiko bencana sesuai dengan sasaran yang ada. Indikator yang kedua yakni Penurunan Intensitas Emisi GRK(%) dengan presentase realisasinya 84,55% dari target 88,82% dengan capaian kinerja 95,19%, dari pencapaian ini menunjukkan bahwa terdapat stabilitas efesiensi energi yang baik, pengelola limbah yang semakin baik, disamping itu kesadaran masyarakat terhadap penggunaan energi dan perubahan gaya hidup yang ramah lingkungan.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Disisi lain, indikator indeks kualitas lingkungan hidup dengan angka realisasi 48,18% dari target 77,40% dengan capaian 62,25%, dibandingkan dengan dua indikator di atas, indeks kualitas lingkungan hidup dalam realisasinya masih jauh dari yang ditargetkan, hal ini mengindikasikan adanya faktor penghambat yang dominan di indikator ini, kemungkinan disebabkan oleh kerusakan ekosistem dan perubahan iklim dan bencana alam serta kebijakan atau regulasi lingkungan yang masih lemah. Tercapainya kategori kinerja "Baik" secara umum didukung oleh faktor penguatan sistem peringatan dini bencana yang lebih terintegrasi hingga ke tingkat desa serta adanya peningkatan pengawasan terhadap emisi industri yang berdampak langsung pada penurunan gas rumah kaca secara daerah. Di sisi lain, faktor penghambat utama yang menyebabkan rendahnya capaian IKLH meliputi meningkatnya laju konversi lahan yang tidak terkendali, masih tingginya tingkat pencemaran air sungai akibat limbah domestik dan industri yang belum terolah sempurna, serta kurangnya optimalisasi pengelolaan sampah di tingkat hulu. Selain itu, keterbatasan anggaran untuk pemulihan ekosistem dan pengadaan alat pantau kualitas udara maupun air secara real-time juga menjadi kendala teknis dalam memenuhi target kualitas lingkungan hidup yang ideal.

Sebagai rekomendasi strategis guna meningkatkan kinerja di periode selanjutnya, Pemerintah Daerah perlu melakukan penguatan penegakan hukum lingkungan terhadap pelaku usaha yang melanggar baku mutu limbah serta mengintegrasikan program pemulihan daerah aliran sungai melalui gerakan reboisasi yang masif dan berkelanjutan. Diperlukan pula percepatan pembangunan infrastruktur pengolahan limbah terpusat dan optimalisasi bank sampah berbasis masyarakat untuk mengurangi beban pencemaran lingkungan yang secara langsung akan mendongkrak nilai IKLH. Selain itu, Pemerintah Daerah harus terus memprioritaskan alokasi anggaran untuk modernisasi teknologi mitigasi bencana dan pemantauan lingkungan berbasis digital agar data yang dihasilkan lebih akurat dalam mendukung pengambilan keputusan, sembari memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi daerah tetap berjalan selaras dengan prinsip kelestarian lingkungan

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8

Tabel 2.59 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8

Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata dan perbatasan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan						
No.	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**2025**		**Capaian Kinerja**	**Kategori Capaian**
			Target	**Realisasi**		
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,52	7,38	98,14%	Baik Sekali
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,54	12,84	94,83%	
3	Kemampuan Literasi (SD)	Persen	31,3	35,84	114,50%	
4	Kemampuan Literasi (SMP)	Persen	33,85	49	144,76%	
5	Kemampuan Numerasi (SD)	Persen	29,2	37,25	127,57%	
6	Kemampuan Numerasi (SMP)	Persen	34	49	144,12%	
7	Pengembangan Karakter (SD)	Persen	52,18	54,18	103,83%	
8	Pengembangan Karakter (SMP)	Persen	49,55	52,08	105,11%	
9	Iklim Keamanan Satuan Pendidikan (SD)	Persen	66,73	65,73	98,50%	
10	Iklim Keamanan Satuan Pendidikan (SMP)	Persen	64,3	63,61	98,93%	
11	Iklim Kesetaraan Gender (SD)	Persen	63,29	65,29	103,16%	
12	Iklim Kesetaraan Gender (SMP)	Persen	64,73	66,34	102,49%	
13	Iklim Kebhinekaan (SD)	Persen	67,5	65,62	97,21%	
14	Iklim Kebhinekaan (SMP)	Persen	68,82	66,96	97,30%	
15	Iklim Inklusivitas (SD)	Persen	53	52,32	98,72%	
16	Iklim Inklusivitas (SMP)	Persen	54,6	53,57	98,11%	
17	Angka Partisipasi Sekolah/ APS (SD)	Persen	99,78	99,78	100,00%	
18	Angka Partisipasi Sekolah/ APS (SMP)	Persen	93	93	100,00%	
Rata - Rata Capaian Kinerja					**107,07%**	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel di atas merupakan pencapaian dari misi IV yakni meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) ASN dan masyarakat yang berkarakter, inovatif dan berintegritas. Analisis capaian kinerja sasaran strategis di sektor pendidikan tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat impresif dengan rata-rata capaian kinerja mencapai 107,07%, yang menempatkan sektor ini dalam kategori predikat "Baik Sekali". Keberhasilan yang paling menonjol terlihat pada peningkatan kualitas output pembelajaran, di mana indikator Kemampuan Literasi dan Numerasi, baik di tingkat SD maupun SMP, melampaui target secara signifikan dengan rentang capaian antara 114,5% hingga 144,8%.

Faktor pendukung utama dari lonjakan kualitas ini adalah efektivitas implementasi kurikulum merdeka, pemanfaatan platform teknologi pendidikan oleh tenaga pendidik, serta program penguatan kompetensi guru yang terfokus pada metode pembelajaran aktif. Selain itu, terjaganya Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada level 100% serta iklim lingkungan sekolah (keamanan, inklusivitas, dan kesetaraan gender) yang stabil di angka 97% hingga 103% mencerminkan lingkungan belajar yang kondusif dan suportif bagi perkembangan peserta didik.

Namun, di balik keberhasilan aspek kualitas pembelajaran, terdapat catatan pada indikator makro pendidikan yang menjadi faktor penghambat bagi pembangunan sumber daya manusia jangka panjang. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) belum mencapai target penuh, masing-masing berada pada angka 98,1% dan 94,8%. Hambatan ini mengindikasikan masih adanya persoalan struktural seperti angka putus sekolah pada transisi jenjang pendidikan menengah atau kendala ekonomi keluarga yang memaksa anak usia sekolah memasuki dunia kerja lebih awal. Meskipun kemampuan kognitif siswa (literasi/numerasi) meningkat tajam, rendahnya HLS menunjukkan bahwa keberlanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi masih menjadi tantangan yang perlu diatasi agar kualitas individu sejalan dengan durasi pendidikan yang ditempuh.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sebagai rekomendasi strategis, Pemerintah Daerah perlu mengalihkan fokus dari sekadar penguatan kualitas instruksional menuju intervensi yang bersifat retensi siswa untuk meningkatkan angka Harapan Lama Sekolah. Program beasiswa daerah atau bantuan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu perlu diperluas jangkauannya guna meminimalisir risiko putus sekolah. Di samping itu, Pemerintah daerah disarankan untuk terus mempertahankan dan mereplikasi keberhasilan model penguatan literasi dan numerasi ke seluruh satuan pendidikan, sembari memperkuat integrasi pengembangan karakter agar lulusan tidak hanya unggul secara akademis tetapi juga memiliki integritas sesuai profil pelajar Pancasila.

Evaluasi mendalam terhadap penyebab disparitas antara target RLS/HLS dan realisasinya sangat diperlukan guna memastikan perencanaan pendidikan di masa mendatang lebih inklusif dan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan.

9. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9

Tabel 2.60 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9

Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif						
No.	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**2025**		**Capaian Kinerja**	**Kategori Capaian**
			Target	**Realisasi**		
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	56,8	51,8	91,20%	Baik Sekali
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,396	0,404	102,02%	
3	Indeks Pembangunan Gender	Angka	94,03	90,79	96,55%	
4	Indeks Perlindungan Anak	Angka	60,9	100	164,20%	
5	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	Angka	150	825	550,00%	
6	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Balita	Angka	1500	5023	334,87%	

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif						
No.	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**2025**		**Capaian Kinerja**	**Kategori Capaian**
			Target	**Realisasi**		
7	Cakupan Kepemilikan Akta Cerai	Angka	3	4	133,33%	
8	Cakupan Kepemilikan Akta Nikah	Angka	250	1050	420,00%	
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,70%	2,07%	55,95%	
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	73,12%	84,88%	116,08%	
Rata - Rata Capaian Kinerja					**206,42%**	
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						

Tabel diatas merupakan pencapaian sasaran strategis dari misi IV yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Aspek Jumlah, Kualitas, Kompetensi dan Persebarannya serta Pengembangan Karakter ASN dan Masyarakat yang dimana, dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2025 sebesar 206.42%. Dengan adanya dukungan kebijakan, koordinasi lintas sector, partisipasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maka upaya mewujudkan keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif dapat tercapai dengan kategori baik sekali. Adapun faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran ini adalah adanya pembinaan ketahanan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dalam keluarga, permenuhan hak-hak anak dan pembangunan peran dalam keluarga, adanya sosialisasi kesertaan gender, adanya kerja sama lintas sector. Lonjakan capaian yang sangat signifikan ini terutama didorong oleh sektor administrasi kependudukan, di mana cakupan kepemilikan akta-akta sipil seperti Akta Kematian (550%), Akta Nikah (420%), dan Akta Kelahiran Balita (334,87%) melampaui target secara eksponensial.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Faktor pendukung utama dari keberhasilan ini adalah efektivitas kebijakan jemput bola (mobile service) dalam layanan administrasi kependudukan serta integrasi sistem data kependudukan digital yang memudahkan akses masyarakat. Selain itu, sektor ketenagakerjaan menunjukkan tren positif dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang mencapai 116,08%, berbanding lurus dengan rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka yang terealisasi hanya 2,07% dari target 3,70%, menandakan daya serap pasar kerja lokal yang sangat baik. Namun, di balik tingginya capaian administratif tersebut, terdapat catatan penting pada indikator kualitas pembangunan manusia dan kesetaraan yang menjadi faktor penghambat bagi tercapainya keseimbangan sosial.

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) hanya mencapai 91,20% dan Indeks Pembangunan Gender berada pada angka 96,55%. Hambatan ini mengindikasikan bahwa meskipun layanan dasar kependudukan telah terpenuhi, aspek fungsional keluarga dan kesetaraan peran gender dalam pembangunan belum sepenuhnya optimal. Selain itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang mencapai 102,02% (di mana realisasi 0,404 lebih tinggi dari target 0,396) menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam aksesibilitas dan pengambilan keputusan antara laki-laki dan perempuan di wilayah tersebut.

Sebagai rekomendasi strategis, Pemerintah Daerah perlu melakukan sinkronisasi antara keberhasilan administratif kependudukan dengan penguatan kualitas hidup melalui program pemberdayaan keluarga yang lebih substantif. Pemanfaatan data kependudukan yang sudah tertib (surplus akta) harus dikonversi menjadi basis data intervensi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi perempuan guna menekan angka ketimpangan gender. Di sektor ketenagakerjaan, fokus harus mulai diarahkan pada peningkatan kualitas dan kompetensi angkatan kerja (upskilling) agar partisipasi yang tinggi juga dibarengi dengan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Selain itu, evaluasi terhadap metode penetapan target administrasi kependudukan perlu dilakukan agar target di

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

tahun mendatang lebih mencerminkan potensi riil lapangan dan menghindari disparitas angka capaian yang terlalu ekstrem, sehingga perencanaan pembangunan menjadi lebih terukur dan akuntabel.

10. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10

Tabel 2.61 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10

Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan Yang Inovatif, Adaptif dan Terintegrasi						
No.	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**2025**		**Capaian Kinerja**	**Kategori Capaian**
			Target	**Realisasi**		
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat	B	CC	51.44%	Cukup
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B	C	43.21%	
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	100.00%	
4	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3.44	3.23	93.90%	
5	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	100	62.5	62.50%	
Rata - Rata Capaian Kinerja					**70.21%**	

Sumber: Bagian Organisasi, Badan Pengelolaan Keuangan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tabel diatas merupakan pencapaian sasaran strategis dari misi IV yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Dalam Aspek Jumlah, Kualitas, Kompetensi dan Persebarannya serta Pengembangan Karakter ASN dan Masyarakat yang dimana, dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2025 sebesar 70.21%. dengan kategori cukup. Indikator keberhasilan utama terlihat pada aspek akuntabilitas keuangan, di mana Pemerintah Daerah berhasil mempertahankan Opini WTP dari BPK dengan capaian 100%. Selain itu, Indeks Daya Saing Daerah (93,90%) menunjukkan performa yang stabil. Faktor pendukung utama keberhasilan ini adalah

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

komitmen pimpinan dalam menjaga tertib administrasi keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan serta adanya upaya berkelanjutan dalam memetakan potensi keunggulan daerah guna menarik investasi dan inovasi.

Namun, terdapat hambatan signifikan pada aspek reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) hanya mencapai 51,44% dengan predikat CC (dari target B), sementara Indeks Reformasi Birokrasi berada pada angka 43,21% dengan predikat C. Faktor penghambat utama dalam capaian ini adalah belum sinkronnya perencanaan kinerja antar-organisasi perangkat daerah, mekanisme pemantauan kinerja yang belum berjalan secara berkala, serta rendahnya implementasi manajemen perubahan di tingkat unit kerja. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya, yakni hanya sebesar 62,50%, yang mengindikasikan adanya keterbatasan anggaran pengembangan SDM atau kurangnya pemetaan kebutuhan diklat yang spesifik bagi aparatur.

Sebagai rekomendasi strategis, Pemerintah Daerah perlu melakukan percepatan transformasi birokrasi melalui penguatan sistem manajemen kinerja terintegrasi (E-Sakip) guna memastikan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Diperlukan langkah konkret dalam peningkatan kapasitas ASN melalui program pelatihan yang lebih masif dan terstruktur (corporate university) untuk mendukung profesionalisme kerja. Selain itu, evaluasi mandiri (self-assessment) terhadap indikator-indikator reformasi birokrasi harus dilakukan lebih awal agar area-area perubahan yang masih lemah dapat segera diintervensi.

Dengan penguatan pada aspek tata kelola dan kompetensi SDM, diharapkan predikat AKIP dan RB dapat meningkat di periode mendatang, sehingga kualitas pelayanan publik dan efektivitas penggunaan anggaran dapat tercapai secara maksimal.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

11. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11

Tabel 2.62 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11

Meningkatnya Prestasi Olahraga Malaka Di Tingkat Regional dan Budaya Berolahraga Masyarakat						
No.	**Indikator Kinerja**	**Satuan**	**2025**		**Capaian Kinerja**	**Kategori Capaian**
			Target	**Realisasi**		
1	Jumlah perolehan medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov)	Mendali	2	0	0.00%	Kurang
2	Jumlah perolehan medali emas pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	Mendali	2	3	150.00%	
3	Peringkat pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov)	Peringkat	10	0	0.00%	
4	Peringkat pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	Peringkat	10	0	0.00%	
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	63.06	65.84	104.41%	
Rata - Rata Capaian Kinerja					**50.88%**	

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga

Tabel diatas merupakan pencapaian sasaran strategis dari misi V yaitu Mengembangkan Olahraga Berprestasi yang dimana, dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2025 sebesar 50.88% dengan kategori kurang. Meskipun angka rata-rata tersebut rendah, terdapat keberhasilan yang menonjol pada indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 104,41% dari target, serta perolehan medali emas pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) yang melampaui target sebesar 150%. Faktor pendukung utama dari capaian ini adalah efektivitas pembinaan atlet usia dini di tingkat pelajar serta sinergi program lintas sektor dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan yang berdampak langsung pada kenaikan angka IPM daerah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Namun, laporan ini mencatatkan deviasi kinerja yang sangat dalam pada sektor olahraga prestasi tingkat provinsi (Porprov), di mana indikator jumlah medali emas dan peringkat daerah menunjukkan angka 0%. Faktor penghambat utama dalam capaian ini adalah kegagalan dalam proses regenerasi atlet senior serta kemungkinan minimnya partisipasi atau persiapan kontingen daerah dalam ajang Porprov di tahun berjalan. Selain itu, indikator peringkat pada POPDA yang tercatat 0% meskipun jumlah medali emas melampaui target menunjukkan adanya ketidaksinkronan data atau kegagalan pencapaian target kolektif dalam klasemen umum. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembinaan olahraga masih bersifat parsial pada cabang olahraga tertentu saja dan belum mampu mendongkrak prestasi daerah secara komprehensif di tingkat regional.

Sebagai rekomendasi strategis, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga perlu melakukan evaluasi total terhadap sistem pembinaan atlet prestasi (Sport Development Index) dengan fokus pada transisi atlet dari jenjang pelajar (POPDA) ke jenjang senior (Porprov). Diperlukan pemetaan cabang olahraga unggulan yang memiliki potensi medali tinggi untuk diberikan dukungan sarana, prasarana, dan anggaran yang lebih intensif. Selain itu, sinkronisasi data pelaporan kinerja harus diperbaiki agar capaian medali emas berkorelasi positif dengan peringkat daerah. Untuk mempertahankan tren positif IPM, Pemda disarankan untuk terus mengintegrasikan program olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat masyarakat, sehingga prestasi olahraga tidak hanya menjadi kebanggaan seremonial tetapi juga menjadi instrumen peningkat kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.3.5. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025, pagu belanja daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.930.146.741.928, dengan realisasi sebesar Rp.833.348.619.153 (89,59%), untuk mendanai 700 (tujuh ratus) program/kegiatan dari 50 (lima puluh) perangkat daerah yang ada di Kabupaten Malaka, sesuai dengan dokumen perencanaan tahunan, sehingga dapat diperoleh capaian presentase 97,38% untuk pelaksanan kinerja 11 (sasaran strategis) dan 17 indikator kinerja. Secara kualitatif dikategorikan dalam predikat **"Baik"** Uraian rincian belanja belanja per program dan kegiatan dari masing-masing perangkat daerah sudah dijelaskan dalam Bab. I Pendahuluan

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 15 Tahun 1997, yang mengatur tata cara pengembangan kawasan transmigrasi.
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 (Lampiran II), yang menyebutkan pengembangan kawasan transmigrasi di Kobalima Timur sebagai bagian dari pengembangan kawasan strategis/potensial.
6. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2024 tentang Kementerian Transmigrasi.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2023;
8. Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2025
9. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KepmenDesa PDTT) Nomor 118 Tahun 2017, yang menetapkan beberapa kawasan transmigrasi di Indonesia, termasuk wilayah di NTT.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2024-2026 (berdasarkan Perda/Pergub NTT), yang mendukung pengembangan wilayah perbatasan dan kawasan transmigrasi.
11. Daftar Isian Pelaksanan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Satker Dinas Koperasi Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor: DIPA-152.03.4.694548/2025, Tanggal 2 Desember 2024.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Malaka

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Tahun 2025, Kabupaten Malaka sebagai garda terdepan perbatasan darat Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) mendapatkan kewenangan untuk melaksanakan tugas pembantuan urusan transmigrasi melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Satuan Kerja-Satker 694548).

Program transmigrasi di daerah perbatasan bertujuan menjaga kedaulatan NKRI, memperkuat ketahanan nasional, dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Tujuan berkelanjutan dari program transmigrasi antara lain:

1) mendorong kemandirian daerah; meskipun secara regulasi tanggung jawab utama pengembangan kawasan transmigrasi setelah maksimal lima tahun berada di tangan pemerintah daerah, banyak daerah belum siap secara mandiri mengelolanya, terutama dari sisi pendanaan dan perencanaan pembangunan. dana tp bertujuan untuk membantu daerah dalam hal ini hingga mereka mampu berdiri sendiri;
2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; diarahkan untuk menciptakan ekosistem kehidupan yang lengkap bagi transmigran, meliputi pembangunan infrastruktur dasar (rumah, jalan, air minum, listrik), fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan lapangan kerja dan ekonomi lokal. Hal ini bertujuan memastikan transmigran dapat menetap dan berkontribusi pada pembangunan wilayah;
3) mempercepat transformasi transmigrasi; mendukung agenda transformasi transmigrasi nasional agar kawasan transmigrasi dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif dan mandiri, sekaligus mendukung pemerataan pembangunan nasional. Termasuk dalam hal ini penyelesaian masalah legalitas tanah, pendampingan dan beasiswa bagi SDM transmigrasi, serta kolaborasi lintas sektor untuk kawasan ekonomi transmigrasi; dan

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4) memperkuat aspek strategis nasional: dana tugas pembantuan dapat digunakan untuk memperkuat pertahanan dan keamanan negara, menjaga integritas wilayah NKRI, serta mengoptimalkan potensi ekonomi lokal yang dapat mendukung ketahanan pangan dan kemakmuran daerah.

Lokasi pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten Malaka Tahun 2025 adalah pada kawasan transmigrasi Kobalima Timur, yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Kawasan transmigrasi di daerah perbatasan berperan penting dalam memperkuat pertahanan dan keamanan negara, serta menjaga integritas wilayah NKRI. Keberadaan masyarakat transmigran yang menetap dapat membantu mengisi wilayah dan menjadi bagian dari upaya pengamanan perbatasan.

Adapun yang melatarbelakangi pemberian tugas pembantuan di kawasan transmigrasi Kobalima Timur adalah:

1. Untuk potensi pengembangan ekonomi lokal.

   Wilayah Kobalima Timur memiliki potensi dalam sektor pertanian atau sumber daya alam lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal. Sejalan dengan konsep transmigrasi masa kini yang mengedepankan edukasi, industrialisasi, hilirisasi, dan digitalisasi, kawasan ini dapat dikembangkan menjadi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas dan ekspor, serta menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Selain itu, dengan dukungan yang tepat, kawasan transmigrasi di sini dapat berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan antar wilayah.
2. Pemberdayaan masyarakat dan pemerataan pembangunan.

   Program transmigrasi di Kobalima Timur awalnya terkait dengan penempatan eks pengungsi dari Timor Leste. Dengan adanya alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur serta fasilitas pendukung, kawasan ini dapat menjadi contoh pembangunan wilayah yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi ketidakseimbangan pembangunan antara daerah pusat dan daerah di perbatasan.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Jenis tugas pembantuan yang diterima berupa:

1. Kegiatan layanan dukungan menejemen internal, berupa layanan perkantoran, layanan organisasi dan tata kelola internal
2. Fasilitas dan pembinaan lembaga, berupa operasional pengelola pemukiman, monitoring dan evaluasi.
3. Fasilitas dan pembinaan masyarakat, berupa operasional layanan pendidikan, operasional layanan kesehatan dan pembinaan mental spiritual
4. Sarana pembangunan kawasan transmigrasi, berupa rehabilitasi dan peningkatan air bersih, rehap/peningkatan SHB di kawasan transmigrasi.
5. Prasarana bidang konektivitas darat (jalan), berupa rehabilitasi/peningkatan jalan non status SP Kapitan Meo.
6. Prasarana bidang konektivitas darat (jembatan), berupa jembatan yang direhabilitasi/ditingkatkan di kawasan transmigrasi

Dana tugas pembantuan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan didaerah serta menciptakan keselarasan dan sinergi secara nasional antara program dan kegiatan yang didanai dari APBN melalui program dan kegiatan yang didanai dari APBD.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3.3 Matriks Tugas Pembantuan

Tabel 3.1 Matriks Tugas Pembantuan

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Ket
1	Kementerian Transmigrasi	Keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia No. 92 Tahun 2025 tentang Pengelola Keuangan Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi Ta. 2025	Program Transmigrasi	Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur, Desa Kapitameo	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kab. Malaka	Rp.111.248.000	Rp. 109,359,040	98.30%	Kegiatan Tidak terialisasi 100% Karena Kelebihan Pagu yang tidak dapat digunakan seperti Perjalan Dinas
			Kegiatan Program Dukungan Menejemen (Output) Program dan Pembanguan Kawasan Transmigrasi						
			Rincian Kegiatan Layanan Dukungan Menejemen Internal						
			Fasilitas Dan Pembinaan Lembaga, Honorarium, Operasinal Pengelola Pemukiman, Monotoring dan Evaluasi.			Rp. 41,010,000	Rp. 41,010,000	100%	
			Fasilitas Dan Pembinaan Masyarakat			Rp. 55,640,000,00	Rp. 52,860,000	95,00%	Kegiatan Tidak Terlealisasikan 100% Karena Ada beberapa belanjan barang
			Sarana Pembangembangan Kawasan Transmigarsi	Sarana Air Bersih, Rehap Sekolah dan Pembagunan Toilet Di wilayah Transmigarsi		Rp. 2.097.020.000	Rp. 1.286.615.750	61,35%	Kegiatan Sarana Air Bersih Tidak terialisasi Karena Debet Air Tidak memenuhi Ketentuan

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Ket
			Prasarana Bidang Konektivitas Darat (jalan)	KUP Kapitameo, Desa Kapitameo		Rp. 3.465.000.000.000	Rp. 3,387,152,000,000	97.75 %	Kegiatan Tidak terialisasi 100% Karena Kelebihan Pagu yang tidak dapat digunakan seperti Pengunaan Pagu disesuaikan dengan Harga Lelang
			Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	Trans Tualaran, Desa Naet, Kec. Rinhat		Rp. 1,398,600,000,00	Rp. 1,393,994,440,00	97.75 %	Kegiatan Tidak terialisasi 100% Karena Kelebihan Pagu yang tidak dapat digunakan seperti Pengunaan Pagu disesuaikan dengan Harga Lelang
TOTAL ANGGARAN						**Rp. 7.168.518.000**	**Rp. 6.270.991.230**	**87.48%**	

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 3.1 DIPA Tugas Pembantuan

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen;

Periode Desember 2025

Kementerian : 152 KEMENTERIAN TRANSMIGRASI
Unit Organisasi 03 DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
Satuan Kerja : 694548 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MALAKA

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	**7,168,518,000**	**0**	**5,740,547,480**	**530,443,750**	**6,270,991,230**	**87.48 %**	**897,526,770**
D Program Transmigrasi	7,057,270,000	0	5,670,606,440	491,025,750	6,161,632,190	87.31 %	895,637,810
DW.7165 Pembangunan Kawasan Transmigrasi	7,057,270,000	0	5,670,606,440	491,025,750	6,161,632,190	87.31 %	895,637,810
QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	41,010,000	0	13,600,000	27,410,000	41,010,000	100.00	0
QDB.002 Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	41,010,000	0	13,600,000	27,410,000	41,010,000	100.00	0
054 Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di SP	41,010,000	0	13,600,000	27,410,000	41,010,000	100.00	0
QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	55,640,000	0	21,240,000	31,620,000	52,860,000	95.00 %	2,780,000
QDC.001 Layanan Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat di Satuan Permukiman dan Pusat SKP pada Kawasan Transmigrasi	55,640,000	0	21,240,000	31,620,000	52,860,000	95.00 %	2,780,000
051 Fasilitasi Layanan Sosial Budaya dan mental spiritual	55,640,000	0	21,240,000	31,620,000	52,860,000	95.00 %	2,780,000
RAI Sarana Pengembangan Kawasan	2,097,020,000	0	854,620,000	431,995,750	1,286,615,750	61.35 %	810,404,250
RAI.030 Sarana Permukiman yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP pada Kawasan Transmigrasi	206,000,000	0	205,800,000	0	205,800,000	99.90 %	200,000
053 Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Umum	206,000,000	0	205,800,000	0	205,800,000	99.90 %	200,000
RAI.031 Sarana Permukiman yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	1,891,020,000	0	648,820,000	431,995,750	1,080,815,750	57.16 %	810,204,250
051 Sarana Air Bersih yang Direhabilitasi / Ditingkatkan di Kawasan Transmigrasi	810,000,000	0	0	0	0	0.00 %	810,000,000
052 Fasilitas Umum yang Direhabilitasi / Ditingkatkan di Kawasan Transmigrasi	1,081,020,000	0	648,820,000	431,995,750	1,080,815,750	99.98 %	204,250
RBC Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	3,465,000,000	0	3,387,152,000	0	3,387,152,000	97.75 %	77,848,000
RBC.006 Jalan Non-Status yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	3,465,000,000	0	3,387,152,000	0	3,387,152,000	97.75 %	77,848,000
051 Rehabilitasi / Peningkatan Jalan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	3,465,000,000	0	3,387,152,000	0	3,387,152,000	97.75 %	77,848,000
RBF Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)	1,398,600,000	0	1,393,994,440	0	1,393,994,440	99.67 %	4,605,560
RBF.002 Jembatan yang Dikembangkan di Kawasan Transmigrasi	1,398,600,000	0	1,393,994,440	0	1,393,994,440	99.67 %	4,605,560
052 Jembatan yang Direhabilitasi / Ditingkatkan di Kawasan Transmigrasi	1,398,600,000	0	1,393,994,440	0	1,393,994,440	99.67 %	4,605,560
WA Program Dukungan Manajemen	111,248,000	0	69,941,040	39,418,000	109,359,040	98.30 %	1,888,960
WA.7169 Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	111,248,000	0	69,941,040	39,418,000	109,359,040	98.30 %	1,888,960
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	111,248,000	0	69,941,040	39,418,000	109,359,040	98.30 %	1,888,960
EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	52,120,000	0	37,641,040	12,590,000	50,231,040	96.38 %	1,888,960

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen;

Periode Desember 2025

Kementerian : 152 **KEMENTERIAN TRANSMIGRASI**

Unit Organisasi 03 **DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

Satuan Kerja : 694548 **DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MALAKA**

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
057 Layanan Operasional Satker Daerah	52,120,000	0	37,641,040	12,590,000	50,231,040	96.38 %	1,888,960
EBA.994 Layanan Perkantoran	59,128,000	0	32,300,000	26,828,000	59,128,000	100.00	0
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	59,128,000	0	32,300,000	26,828,000	59,128,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3.4 Capaian Kinerja Tugas Pembantuan

1. Target Kinerja

   Target kinerja dari pelaksanaan tugas pembantuan berfokus pada pembangunan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, bukan sekadar memindahkan penduduk di kabupeten Malaka.

   Pengaturan tugas pembantuan bidang transmigrasi Tahun Anggaran 2025 (termasuk perubahan) diatur melalui Peraturan Menteri Transmigrasi, yang melibatkan pembinaan administrasi oleh Sekjen, teknis oleh Dirjen terkait, dan pengawasan oleh Inspektur Jenderal.

2. Realisasi Tugas Pembantuan

Satuan Kerja	:	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Malaka (Satker 694548_
Pagu	:	Rp. 7.168.518.000
Realisasi	:	Rp. 6.270.991.230
Capaian	:	87.48%

3.5 Pemasalahan dan Kendala Pelaksanaan Tugas Pembantuan

1. Faktor cuaca dan geografis

   Proyek fisik (seperti pembangunan jalan dan Jembatan di wilayah transmigransi) terhambat oleh cuaca ekstrem, menyebabkan pekerjaan fisik bergeser ke tahun berikutnya.

2. Kendala Administratif dan Prosedural

   Revisi DIPA yang Rumit: Prosedur revisi anggaran yang membutuhkan waktu lama, terutama melibatkan perubahan rencana kegiatan di tengah tahun anggaran, karena ini terdampak juga pada Kendala Koordinasi dan Pelaksanaan

3. Kendala Koordinasi dan Pelaksanaan

   Pengadaan Barang/Jasa (PBJ): Keterlambatan proses tender di daerah membuat serapan anggaran menumpuk di akhir tahun anggaran.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3.6 Saran dan Tindak Lanjut

Penyerapan dana Tugas Pembantuan (TP) di Kementerian Transmigrasi perlu dimaksimalkan agar visi menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dapat tercapai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, upaya penguatan tata kelola dan pengawasan menjadi kunci.

Berikut adalah saran dan tindak lanjut agar penyerapan anggaran Tugas Pembantuan Kementerian Transmigrasi lebih maksimal:

1. Saran perbaikan tata kelola dan perencanaan
   - penyusunan juknis yang cepat dan tepat: mempercepat penerbitan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) tugas pembantuan oleh kementerian agar daerah dapat segera memulai perencanaan kegiatan di awal tahun anggaran;
   - sinkronisasi usulan daerah dan pusat: memastikan usulan program tugas pembantuan selaras dengan visi, misi, dan skala prioritas kementerian, yaitu pembangunan kawasan transmigrasi yang mandiri dan berdaya saing; dan
   - kesiapan lahan dan dokumen *clean & clear*: memastikan lokasi yang akan menerima bantuan tugas pembantuan sudah *clean and clear* (tidak dalam sengketa dan sudah *clean* secara hukum) sebelum anggaran dicairkan untuk menghindari keterlambatan fisik.
2. Tindak lanjut pelaksanaan dan pengawasan
   - penguatan peran inspektorat jenderal: meningkatkan pengawasan fungsional atas pelaksanaan tugas pembantuan untuk mencegah keterlambatan penyerapan atau kebocoran anggaran; dan
   - pendampingan intensif ke daerah: agar kementerian melakukan pendampingan (klinik anggaran) kepada perangkat daerah terkait pengadaan barang/jasa dan administrasi pelaporan, mengingat karakteristik wilayah transmigrasi yang unik dan tersebar.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib dipenuhi pemerintah daerah untuk setiap warga negara secara minimal

Tujuan utama SPM adalah menjamin hak warga negara atas pelayanan dasar secara merata, berkualitas, dan layak.

4.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah (KSDD & KSDPK).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

4.2. Bidang SPM (Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018)

1. Pendidikan: layanan pendidikan dasar.
2. Kesehatan: pelayanan dasar kesehatan (ibu hamil, balita, penyakit kronis).
3. Pekerjaan umum: infrastruktur dasar seperti air minum dan sanitasi.
4. Perumahan rakyat: penyediaan rumah layak huni.
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas): keamanan dan penanganan bencana.
6. Sosial: rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4.3. Komponen SPM

Komponen SPM terdiri dari jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan penerima pelayanan dasar.

Agar dapat terealisasi, SPM wajib diprioritaskan dalam perencanaan dan anggaran daerah, serta menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

4.4. Capaian SPM Kabupaten Malaka Tahun 2025

Capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) adalah persentase tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka dalam memenuhi jenis dan mutu pelayanan dasar wajib kepada masyarakat.

Berikut terlampir perangkat daerah pelaksana urusan SPM (Standar Pelayanan Minimal), antara lain:

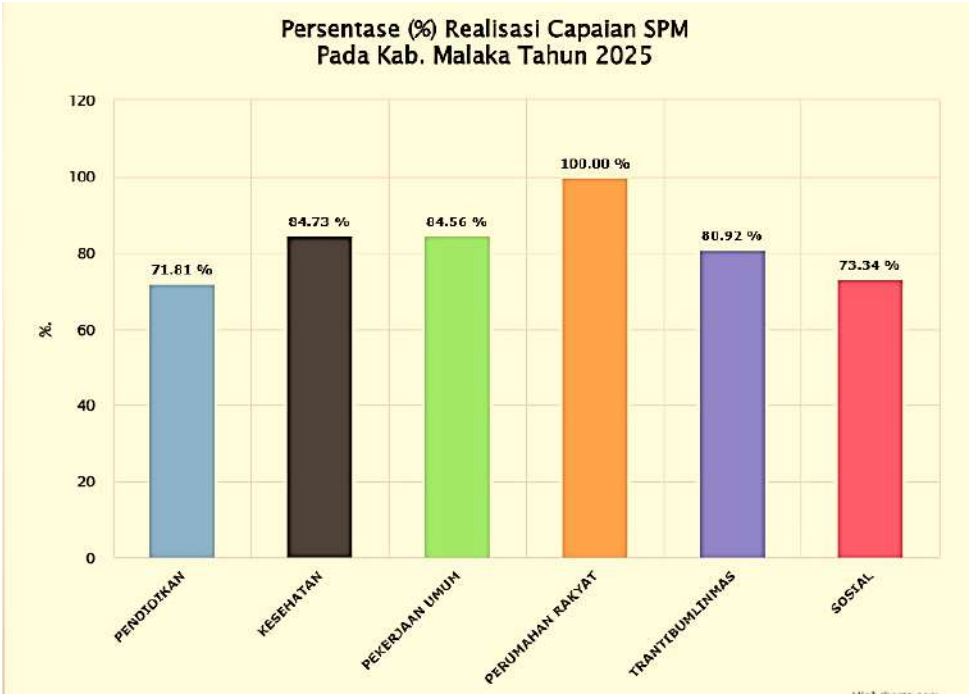
1. Pendidikan: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kesehatan: Dinas Kesehatan (berkoordinasi dengan Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan (RSUPP) Betun.
3. Pekerjaan umum: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Perumahan rakyat: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas): Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Secara garis besar, Capaian SPM Tahun 2025 di Kabupaten Malaka terlampir dalam gambar sebagai berikut:

1. Realisasi capaian SPM

Gambar 4.1. Presentasi realisasi capaian SPM



2. Realisasi anggaran SPM

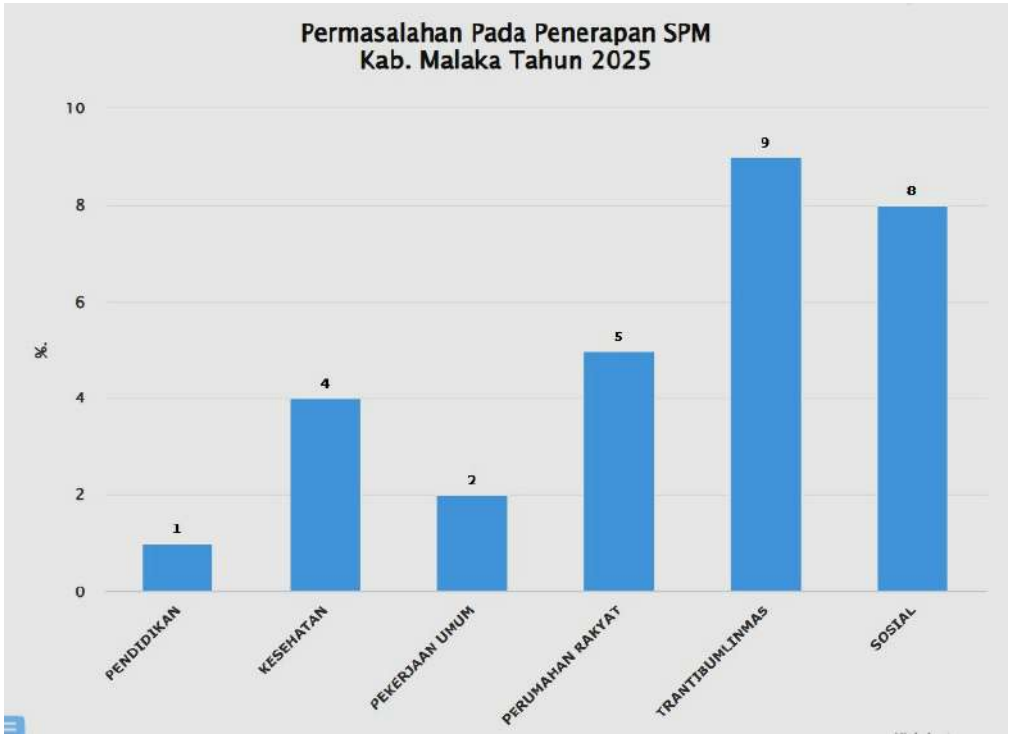
Gambar 4.2. 1. Presentasi Realisasi Anggaran SPM



Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Permasalahan SPM 2025

Gambar 4.3. Presentasi Permasalahan SPM



4. Tindak lanjut pelaksanaan SPM di Kabupaten Malaka Tahun 2025
   a) Membentuk SK Tim Penerapan SPM Tahun 2025 dengan Nomor: 28/HK/2025.
   b) Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor: mengoordinasi dan menyinkronkan data antar perangkat daerah pengampu SPM untuk memastikan seluruh pelayanan dasar berjalan sesuai standar.
   c) Pendampingan dan Asistensi: Bagian Pemerintahan melakukan asistensi penerapan SPM (pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, penyusunan rencana dan pemenuhan kebutuhan) kepada perangkat daerah pengampu, terutama untuk mengidentifikasi akar permasalahan jika terjadi rendahnya capaian.
   d) Menyusun SK Penetapan Target Jumlah Warga Negara Dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025 dan 2026.
   e) Menyusun Rencana Aksi (Renaksi) SPM: Bagian Pemerintahan berkoordinasi dengan perangkat daerah pengampu SPM dan perangkat daerah terkait untuk menyusun dokumen rencana aksi penerapan SPM Kabupaten Malaka yang berorientasi pada pemenuhan target tahunan.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Berikut penjabaran capaian SPM per urusan:

4.4.1. Urusan Pendidikan

Tabel 4.1. Urusan Pendidikan - Capaian SPM

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			%
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PRATAMA			71.81
1 .	**Pendidikan Dasar Usia Dini**					92.47
			Target 100% (SPM)	**APS Tahun N-1**	**Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N**	
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (5-6 tahun) *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	0	0	**0.00**	**0.00**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**73.41**
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	8047	7384	**663**	**91.76**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**19.06**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					95.30
	1 .Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase	35	33.72	**12.800**	**96.34**
	2 .Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase	20	18.85	**11.500**	**94.25**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			%
2 .	**Pendidikan Dasar**					73.48
			Target 100% (SPM)	**APS Tahun N-1**	**Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N**	
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-12 tahun) SD *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	99.78	97.92	**1.86**	**98.14**
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (13-15 tahun) SMP *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	93	95.85	**-2.85**	**103.06**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**53.70**
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	53267	35756	**17511**	**67.13**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**19.78**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					98.88
	SD (2025)					98.89
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	31.3	35.84	**-45.400**	**100.00**
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	29.2	37.25	**-80.500**	**100.00**
	3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	66.73	65.73	**10.000**	**98.50**
	4 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	67.5	65.62	**18.800**	**97.21**
	5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	53	52.32	**0.6800**	**98.72**
	SMP (2025)					98.87
	1 . Kemampuan literasi	Nilai	33.85	49	**-151.500**	**100.00**
	2 . Kemampuan numerasi	Nilai	34	49.22	**-152.200**	**100.00**
	3 . Indeks iklim keamanan	Nilai	64.3	63.61	**0.6900**	**98.93**
	4 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	68.82	66.96	**18.600**	**97.30**
	5 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	54.6	53.57	**10.300**	**98.11**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			%
3 .	**Pendidikan Kesetaraan**					49.50
			Target 100% (SPM)	**APS Tahun N-1**	**Selisih Yang Harus Dilayani di Tahun N**	
	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (7-18 tahun) KESETARAAN *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Persentase	0	0	**0.00**	**0.00**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**33.00**
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5891	2430	**3461**	**41.25**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**16.50**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					82.48
	1 .Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	Persentase	50	41.24	**87.600**	**82.48**

Tabel 4.2. Urusan Pendidikan - Anggaran Dasar

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. MALAKA	889,725,413,011
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	189,823,033,631
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	189,823,033,630
	APBD	189,823,033,630
	A. APBD MURNI	674,213,820
	B. APBD DAU	148,654,098,511
	C. APBD DAK FISIK	258,730,800
	D. APBD DAK NON FISIK	40,235,990,499

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	PENDANAAN	PAGU
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Tabel 4.3. Urusan Pendidikan - Rincian Kegiatan

NO.	PROG.	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI (Rupiah)	%
					PROG.	KEG.	SUB KEG.			
								3,582,446,030	**2,686,266,050**	**74.98**
1	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**									
	1	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) K20240327112412**						**770,449,000**	**392,658,250**	**50.96**
Angka Partisipasi Sekolah										
		1	**Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah**	**Ruang**	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0051	0	0	**0.00**
		2	**Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD**	**Peserta didik**	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0011	0	0	**0.00**
		3	**Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD**	**Orang**	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0015	0	0	**0.00**
		4	**Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan**	**Dokumen**	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0025	227,653,000	194,593,750	**85.48**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROG.	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI (Rupiah)	%
					PROG.	KEG.	SUB KEG.			
		5	**Pembangunan Ruang Kelas Baru**	**Ruang**	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0030	0	0	**0.00**
		6	**Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)**	**Unit**	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0040	0	0	**0.00**
		7	**Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik**	**Paket**	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0041	299,996,500	13,985,000	**4.66**
Kekhususan PAUD										
		1	**Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD**	**Unit**	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0045	0	0	**0.00**
		2	**Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD**	**Paket**	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0046	0	0	**0.00**
		3	**Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD**	**Orang**	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0016	0	0	**0.00**
		4	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD**	**Satuan Pendidikan**	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0017	0	0	**0.00**
		5	**Pengembangan konten digital untuk pendidikan**	**Konten Digital**	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0023	0	0	**0.00**
		6	**Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan**	**Orang**	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0024	0	0	**0.00**
		7	**Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan**	**Dokumen**	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0026	242,799,500	184,079,500	**75.82**
		8	**Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**Komunitas**	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0029	0	0	**0.00**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROG.	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI (Rupiah)	%
					PROG.	KEG.	SUB KEG.			
		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.03	1.01.02.2.03.0039	0	0	0.00
	JUMLAH INDIKATOR				770,449,000	392,658,250	50.96 %			
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) K20240327110629						1,006,475,205	965,932,875	95.97
Angka Partisipasi Sekolah										
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0001	0	0	0.00
		2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD / Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama / Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0054	0	0	0.00
		3	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0038	381,349,630	379,747,050	99.58
		4	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0046	0	0	0.00
		5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0047	0	0	0.00
		6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0051	66,850,000	66,783,150	99.90
Literasi										
		1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0055	0	0	0.00

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROG.	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI (Rupiah)	%
					PROG.	KEG.	SUB KEG.			
		2	**Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Orang**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0026	0	0	**0.00**
		3	**Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Orang**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0027	418,783,000	398,142,000	**95.07**
		4	**Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan**	**Orang**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0035	0	0	**0.00**
		5	**Pengembangan konten digital untuk pendidikan**	**Konten Digital**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	0	0	**0.00**
		6	**Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan**	**Orang**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0037	0	0	**0.00**
		7	**Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**Komunitas**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0041	0	0	**0.00**
		8	**Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik**	**Buku**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0045	0	0	**0.00**
		9	**Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan**	**Orang**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	0	0	**0.00**
		10	**Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik**	**Satuan Pendidikan**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0050	139,492,575	121,260,675	**86.93**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROG.	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI (Rupiah)	%
					PROG.	KEG.	SUB KEG.			
Numerasi										
		1	**Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama**	**Orang**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0026	0	0	**0.00**
		2	**Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama**	**Orang**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0027	0	0	**0.00**
		3	**Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan**	**Orang**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0035	0	0	**0.00**
		4	**Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan**	**Orang**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0037	0	0	**0.00**
		5	**Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**Komunitas**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0041	0	0	**0.00**
		6	**Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik**	**Satuan Pendidikan**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0050	0	0	**0.00**
		7	**Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik**	**Buku**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0045	0	0	**0.00**
		8	**Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik**	**Paket**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0055	0	0	**0.00**
		9	**Pengembangan konten digital untuk pendidikan**	**Konten Digital**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	0	0	**0.00**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROG.	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI (Rupiah)	%
					PROG.	KEG.	SUB KEG.			
		10	**Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan**	**Orang**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	0	0	**0.00**
Keamanan										
		1	**Pengembangan konten digital untuk pendidikan**	**Konten Digital**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	0	0	**0.00**
		2	**Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan**	**Orang**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	0	0	**0.00**
		3	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah**	**Satuan Pendidikan**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0028	0	0	**0.00**
		4	**Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi**	**Kegiatan**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0043	0	0	**0.00**
Kebhinekaan										
		1	**Pengembangan konten digital untuk pendidikan**	**Konten Digital**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	0	0	**0.00**
		2	**Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan**	**Orang**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	0	0	**0.00**
		3	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah**	**Satuan Pendidikan**	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0028	0	0	**0.00**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROG.	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI (Rupiah)	%
					PROG.	KEG.	SUB KEG.			
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0043	0	0	0.00
Inklusifitas										
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0036	0	0	0.00
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0049	0	0	0.00
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0028	0	0	0.00
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1.01.02	1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.0043	0	0	0.00
	JUMLAH INDIKATOR				1,006,475,205	965,932,875	95.97 %			
	3	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) K20240327110647						848,791,825	802,586,925	94.56
Angka Partisipasi Sekolah										
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0001	0	0	0.00
		2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0014	0	0	0.00
		3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0032	0	0	0.00

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROG.	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI (Rupiah)	%
					PROG.	KEG.	SUB KEG.			
		4	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0051	0	0	**0.00**
		5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0059	600,451,000	564,594,100	**94.03**
		6	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0062	0	0	**0.00**
Literasi										
		1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0067	0	0	**0.00**
		2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0039	0	0	**0.00**
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0040	174,997,000	173,200,000	**98.97**
		4	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0048	0	0	**0.00**
		5	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	0	0	**0.00**
		6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0050	0	0	**0.00**
		7	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0054	0	0	**0.00**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROG.	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI (Rupiah)	%
					PROG.	KEG.	SUB KEG.			
		8	**Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik**	**Satuan Pendidikan**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0058	73,343,825	64,792,825	**88.34**
		9	**Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan**	**Orang**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	0	0	**0.00**
		10	**Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik**	**Buku**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0061	0	0	**0.00**
Numerasi										
		1	**Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama**	**Orang**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0039	0	0	**0.00**
		2	**Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama**	**Orang**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0040	0	0	**0.00**
		3	**Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan**	**Orang**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0048	0	0	**0.00**
		4	**Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**Komunitas**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0054	0	0	**0.00**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROG.	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI (Rupiah)	%
					PROG.	KEG.	SUB KEG.			
		5	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0050	0	0	0.00
		6	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0058	0	0	0.00
		7	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0061	0	0	0.00
		8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0067	0	0	0.00
		9	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	0	0	0.00
		10	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	0	0	0.00
Keamanan										
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	0	0	0.00
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	0	0	0.00
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0041	0	0	0.00
		4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Keluarga	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0055	0	0	0.00

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROG.	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI (Rupiah)	%
					PROG.	KEG.	SUB KEG.			
Kebhinekaan										
		1	**Pengembangan konten digital untuk pendidikan**	**Konten Digital**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	0	0	**0.00**
		2	**Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan**	**Orang**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	0	0	**0.00**
		3	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah**	**Satuan Pendidikan**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0041	0	0	**0.00**
		4	**Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi**	**Kegiatan**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0055	0	0	**0.00**
Inklusifitas										
		1	**Pengembangan konten digital untuk pendidikan**	**Konten Digital**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0049	0	0	**0.00**
		2	**Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan**	**Orang**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0060	0	0	**0.00**
		3	**Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah**	**Satuan Pendidikan**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0041	0	0	**0.00**
		4	**Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi**	**Kegiatan**	1.01.02	1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.0055	0	0	**0.00**
	JUMLAH INDIKATOR				**848,791,825**	**802,586,925**	**94.56 %**			

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROG.	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI (Rupiah)	%
					PROG.	KEG.	SUB KEG.			
	4	**Pendidikan Kesetaraan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan K20250805052437**						**956,730,000**	**525,088,000**	**54.88**
Angka Partisipasi Sekolah										
		1	**Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Dokumen**	1.01.02	1.01.04.2.01	1.01.04.2.01.0001	110,778,500	96,388,000	**87.01**
		1	**Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Laporan**	1.01.02	1.01.04.2.01	1.01.04.2.01.0002	845,951,500	428,700,000	**50.68**
	JUMLAH INDIKATOR				**956,730,000**	**525,088,000**	**54.88 %**			
	5	**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah K20250807081842**						**0**	**0**	**0.00**
Literasi										
		1	**Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota**	**Buku**	1.01.02	1.01.06.2.01	1.01.06.2.01.0005	0	0	**0.00**
Numerasi										
		1	**Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota**	**Buku**	1.01.02	1.01.06.2.01	1.01.06.2.01.0005	0	0	**0.00**
	JUMLAH INDIKATOR				**0**	**0**	**0.00 %**			

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROG.	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	KODE			ANGGARAN (Rupiah)	REALISASI (Rupiah)	%
					PROG.	KEG.	SUB KEG.			
	JUMLAH PROGRAM				3,582,446,030	2,686,266,050	74.98 %			

Tabel 4.4. Urusan Pendidikan – Permasalahan

No	PERMASALAHAN PENERAPAN SPM
1 .	**PENGUMPULAN DATA**
	• Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Pengumpulan Data secara mandiri terkait APS masih sangat kurang karena belum melakukan pendataan secara mandiri dan belum ada anggaran yang mendukung pendataan APS
	• Pendidikan Kesetaraan Pengumpulan Data secara mandiri terkait APS masih sangat kurang karena belum melakukan pendataan secara mandiri dan belum ada anggaran yang mendukung pendataan APS dan belum ada pendataan khusus terkait angka putus sekolah sehingga tidak mempunyai data untuk menentukan target yang harus dilayani
	• Pendidikan Anak Usia Dini Pengumpulan data secara mandiri terkait APS masih sangat kurang dalam hal ini belum melakukan sensus secara mandiri dan peserta didik pada satuan PAUD masih banyak yang tidak sesuai dengan jenjang usia PAUD karena banyak peserta didik PAUD yang berusia dibawah 5 tahun dan adapun siswa yang berusia diatas 6 Tahun. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi pada satuan pendidikan untuk menerima siswa PAUD berdasarkan usia jenjang sekolah PAUD yaitu 5-6 Tahun
2 .	**PENGHITUNGAN KEBUTUHAN**
	• PAUD, Pendidikan Dasar (SD dan SMP) dan Pendidikan Kesetaraan Perhitungan kebutuhan belum sesuai karena ada permasalah pada pengumpulan data sehingga tidak ada data yang dapat digunakaan untuk menganalisis kebutuhan. Oleh karena itu, perencanaan selanjutnya harus mengalokasikan anggaran untuk pengumpulan data sehingga bisa digunakan untuk perhitungan kebutuhan. contohnya dalam analisis kebutuhan daya tampung siswa.
3 .	**PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**
	• PAUD, Pendidikan Dasar (SD dan SMP) dan Pendidikan Kesetaraan Perencanaan dan penganggaran belum Memperhatikan data dari Rapor Pendidikan sehingga belum mengakomodir keseluruhan pelayanan dasar di SPM bidang Pendidikan. Sehingga untuk selanjutnya dalam penganggaran lebih memperhatikan Rapor Pendidikan sehingga dapat mengakomodir pelayanan dasar pada bidang Pendidikan.
4 .	**PELAKSANAAN**
	• Indeks Distribusi Tidak ada Pemerataan (Data Diperoleh di SIM Penataan Guru/DAPODIK), Kurang dari 40% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi dan numerasi, Angka partisipasi kasar Kesetaraan tidak tersedia karena Pendidikan Kesetaraan tidak mengikuti asesmen Nasional , Realisasi Belum maksimal karena ada Pekerjaan Fisik pada Bidang SD dan SMP yang progres pekerjaan belum mencapai 100% sehingga tidak dapat dibayarkan dan ada pula kegiatan yang tidak berjalan sesuai rencana sehingga penyerapan anggaran kurang.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	PERMASALAHAN PENERAPAN SPM
5 .	**LAIN - LAIN**
	• Pentingnya sosialisasi penerapan SPM dari kementerian di akhir tahun sebelum Tahun Anggaran berjalan, sehingga Perencanaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dan Perlu adanya kerjasama dari Baperida dan Badan Pengelola Keuangan dan pendapatan Daerah untuk lebih memperhatikan perencanaan dari SKPD yang menangani pelayanan dasar agar perencanaan diutamakan untuk pelayanan dasar dalam hal ini dengan memperhatikan data pada Rapor Pendidikan

4.4.2. Urusan Kesehatan

Tabel 4.5. Urusan Kesehatan – Capaian SPM

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			%
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS MADYA			84.73
1 .	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**					70.15
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**50.97**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	Orang	4.239	2.701	**1538**	**63.72**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**19.17**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					95.87
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/Vial	2.701	2.701	**0**	**100.00**
	2 . Tablet tambah darah **(180 tablet x jumlah ibu hamil)**	Tablet	486.180	486.180	**0**	**100.00**
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	2.701	2.701	**0**	**100.00**
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	2.701	2.701	**0**	**100.00**
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	2.701	2.701	**0**	**100.00**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			%
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin **(proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)**	Paket	405	405	**0**	**100.00**
	7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	2.701	2.701	**0**	**100.00**
	8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	2.701	2.701	**0**	**100.00**
	9 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	2.701	2.701	**0**	**100.00**
	10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	20	20	**0**	**100.00**
	11 . Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG **(proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)**	Botol	180	180	**0**	**100.00**
	12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi **(angka ideal dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)**	Orang	84	25	**59**	**29.76**
	13 . Tenaga kesehatan : Bidan **(angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)**	Orang	211	296	**-85**	**100.00**
	14 . Tenaga kesehatan : Perawat **(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)**	Orang	238	241	**-3**	**100.00**
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	20	39	**-19**	**100.00**
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	20	41	**-21**	**100.00**
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) **(satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)**	Orang	2.701	2.701	**0**	**100.00**
2 .	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**					80.96
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**62.52**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	Orang	4.239	3.313	**926**	**78.16**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**18.44**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					92.20
	1 . Formulir partograf	Formulir	3.313	3.313	**0**	**100.00**
	2 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	3.313	3.313	**0**	**100.00**
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	3.313	3.313	**0**	**100.00**
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	20	20	**0**	**100.00**
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi **(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)**	Orang	84	25	**59**	**29.76**
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan **(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)**	Orang	211	296	**-85**	**100.00**
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat **(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)**	Orang	238	241	**-3**	**100.00**
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	20	39	**-19**	**100.00**
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	20	41	**-21**	**100.00**
3 .	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**					80.91
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**61.91**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	Orang	4.215	3.262	**953**	**77.39**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**19.00**
			Jumlah Mutu Yang Harus	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum**	

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			%
			Dilayani / Dipenuhi		Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					94.98
	1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	3.262	3.262	**0**	**100.00**
	2 . Vitamin K1 Injeksi	Ampul	3.262	3.262	**0**	**100.00**
	3 . Salep/tetes mata antibiotik **(sesuai standar 12-59 bulan)**	Orang	3.262	3.262	**0**	**100.00**
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	3.262	3.262	**0**	**100.00**
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) **(sesuai standar 12-59 bulan)**	Formulir	9.786	9.786	**0**	**100.00**
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	3.262	3.262	**0**	**100.00**
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) **(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)**	Paket	4	4	**0**	**100.00**
	8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	84	25	**59**	**29.76**
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	211	296	**-85**	**100.00**
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	238	241	**-3**	**100.00**
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	20	39	**-19**	**100.00**
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	20	56	**-36**	**100.00**
	13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	20	41	**-21**	**100.00**
	14 . Kader Kesehatan	Orang	2.424	2.424	**0**	**100.00**
4 .	**Pelayanan Kesehatan Balita**					85.35
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**66.97**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN BALITA	Orang	20.117	16.841	**3276**	**83.72**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**18.38**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			%
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					91.89
	1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir	16.841	16.841	**0**	**100.00**
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	16.841	16.841	**0**	**100.00**
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	16.841	16.841	**0**	**100.00**
	4 . Vitamin A Biru **(sesuai standar 6-11 bulan)**	Kapsul	1.146	1.146	**0**	**100.00**
	5 . Vitamin A Merah **(sesuai standar 12-59 bulan)**	Kapsul	11.106	11.106	**0**	**100.00**
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	16.841	16.841	**0**	**100.00**
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	16.841	16.841	**0**	**100.00**
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	16.841	16.841	**0**	**100.00**
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin	16.841	16.841	**0**	**100.00**
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	16.841	16.841	**0**	**100.00**
	11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB - Hib	Vaksin	16.841	16.841	**0**	**100.00**
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	16.841	16.841	**0**	**100.00**
	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	16.841	16.841	**0**	**100.00**
	14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	20	20	**0**	**100.00**
	15 . Formula terapi gizi buruk	Paket	0	0	**0**	**0.00**
	16 . Tenaga medis : Dokter	Orang	84	25	**59**	**29.76**
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	211	296	**-85**	**100.00**
	18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	238	241	**-3**	**100.00**
	19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	20	41	**-21**	**100.00**
	20 . Guru PAUD	Orang	432	432	**0**	**100.00**
	21 . Kader Kesehatan	Orang	2.424	2.424	**0**	**100.00**
5 .	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar**					92.95
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**78.17**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	Orang	38.137	37.265	**872**	**97.71**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**14.78**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					73.88
	1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku **(Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)**	Form/Buku	37.265	37.265	**0**	**100.00**
	2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan **(Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)**	Form/Buku	0	0	**0**	**0.00**
	3 . Kuesioner skrining kesehatan **(Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)**	Dokumen	37.265	37.265	**0**	**100.00**
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah **(Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)**	Formulir	37.265	37.265	**0**	**100.00**
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah **(Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)**	Formulir	0	0	**0**	**0.00**
	6 . Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah **(Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)**	Tablet	0	0	**0**	**0.00**
	7 . Alat pemeriksaan Hb **(Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)**	Alat	20	20	**0**	**100.00**
	8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip	37.265	37.265	**0**	**100.00**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			%
	(Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)					
	9 . Media promosi kesehatan **(Media khusus remaja sehat)**	Paket	20	0	**20**	**0.00**
	10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) **(sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)**	Vaksin	12.817	12.817	**0**	**100.00**
	11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	84	25	**59**	**29.76**
	12 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	211	296	**-85**	**100.00**
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	238	241	**-3**	**100.00**
	14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	20	41	**-21**	**100.00**
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	20	39	**-19**	**100.00**
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	20	65	**-45**	**100.00**
	17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	350	350	**0**	**100.00**
	18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	2.424	2.424	**0**	**100.00**
6 .	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**					98.91
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	Orang	116.858	117.442	**-584**	**100.00**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**18.91**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					94.55
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	100	100	**0**	**100.00**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			%
	2 . Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket	80	80	**0**	**100.00**
	3 . Alat : Tensimeter	Unit	20	20	**0**	**100.00**
	4 . Alat : Glukometer	Unit	20	20	**0**	**100.00**
	5 . Alat : Alat pemeriksa Hb	Unit	20	20	**0**	**100.00**
	6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket	117.442	117.442	**0**	**100.00**
	7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	117.442	117.442	**0**	**100.00**
	8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	117.442	117.442	**0**	**100.00**
	9 . Kit Opthalmologi komunitas	Unit	20	20	**0**	**100.00**
	10 . Kuesioner PUMA	Dokumen	117.442	117.442	**0**	**100.00**
	11 . Alat Pelayanan KB	Unit	40	40	**0**	**66.67**
	a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	20	20	**0**	**100.00**
	b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit	20	20	**0**	**100.00**
	c. Vasektomi set	Unit	0	0	**0**	**0.00**
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	117.442	117.442	**0**	**100.00**
	13 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/Vial	44.926	44.926	**0**	**100.00**
	14 . Tenaga medis : Dokter	Orang	84	25	**59**	**29.76**
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	211	296	**-85**	**100.00**
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	238	241	**-3**	**100.00**
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	24	41	**-17**	**100.00**
	18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	20	65	**-45**	**100.00**
	19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	2.424	2.424	**0**	**100.00**
7 .	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**					98.92
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	Orang	21.987	22.790	**-803**	**100.00**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**18.92**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					94.60
	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	100	100	**0**	**100.00**
	2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	20	20	**0**	**100.00**
	3 . Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	20	20	**0**	**100.00**
	4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	22.790	22.790	**0**	**100.00**
	5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	22.790	22.790	**0**	**100.00**
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	22.790	22.790	**0**	**100.00**
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	20	20	**0**	**100.00**
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	84	25	**59**	**29.76**
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	211	296	**-85**	**100.00**
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	238	241	**-3**	**100.00**
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	20	41	**-21**	**100.00**
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	20	65	**-45**	**100.00**
	13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	2.424	2.424	**0**	**100.00**
8 .	**Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**					90.85
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**72.86**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	Orang	3.775	3.438	**337**	**91.07**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**18.00**
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					89.98

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			%
	1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) **(panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)**	Paket	40	20	**20**	**50.00**
	2 . Obat Hipertensi	Paket	3.438	3.438	**0**	**100.00**
	3 . Tensimeter **(mengukur tekanan darah)**	Unit	20	20	**0**	**100.00**
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen	3.438	3.438	**0**	**100.00**
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) **(peningkatan pengetahuan masyarakat)**	Paket	20	20	**0**	**100.00**
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	84	25	**59**	**29.76**
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	211	296	**-85**	**100.00**
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	238	241	**-3**	**100.00**
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	20	41	**-21**	**100.00**
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	20	56	**-36**	**100.00**
	11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	20	39	**-19**	**100.00**
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	20	65	**-45**	**100.00**
9 .	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**					77.46
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**58.63**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	Orang	1.651	1.210	**441**	**73.29**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**18.83**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					94.15

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			%
	1 . Obat Diabetes Melitus **(melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)**	Paket	1.210	1.210	**0**	**100.00**
	2 . Fotometer atau Glukometer	Unit	20	20	**0**	**100.00**
	3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	1.210	1.210	**0**	**100.00**
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	60	60	**0**	**100.00**
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Pedoman	60	60	**0**	**100.00**
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	84	25	**59**	**29.76**
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	211	296	**-85**	**100.00**
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	238	241	**-3**	**100.00**
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	20	39	**-19**	**100.00**
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	20	65	**-45**	**100.00**
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	20	41	**-21**	**100.00**
	12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	20	20	**0**	**100.00**
10 .	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**					76.80
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**56.80**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT	Orang	169	120	**49**	**71.01**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00**
			Jumlah Mutu Yang Harus	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum**	

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			%
			Dilayani / Dipenuhi		Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00
	1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) **(minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)**	Buku	20	20	**0**	**100.00**
	2 . Penyediaan Psikofarmaka **(pengobatan/medikasi)**	Paket	120	120	**0**	**100.00**
	3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi **(instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)**	Formulir	120	120	**0**	**100.00**
	4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan **(pencatatan dan pelaporan)**	Formulir	120	120	**0**	**100.00**
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	20	20	**0**	**100.00**
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	20	20	**0**	**100.00**
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa **(contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)**	Orang	20	20	**0**	**100.00**
	8 . Tenaga profesional lainnya	Orang	20	20	**0**	**100.00**
	9 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	20	20	**0**	**100.00**
11 .	**Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**					87.01
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**67.01**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	Orang	3.189	2.671	**518**	**83.76**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	20	20	**0**	**100.00**
	2 . Reagen Zn TB	Kit	2.671	2.671	**0**	**100.00**
	3 . Masker bedah dan Masker N95	Paket	2.671	2.671	**0**	**100.00**
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	2.671	2.671	**0**	**100.00**
	5 . Katrid tes cepat molekuler	Tes	2.671	2.671	**0**	**100.00**
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	2.671	2.671	**0**	**100.00**
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	20	20	**0**	**100.00**
	8 . Tuberkulin	Vial	267	267	**0**	**100.00**
	9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	20	20	**0**	**100.00**
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	20	20	**0**	**100.00**
	11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	20	20	**0**	**100.00**
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	20	20	**0**	**100.00**
	13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	20	20	**0**	**100.00**
	14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	20	20	**0**	**100.00**
	15 . Kader Kesehatan	Orang	2.424	2.424	**0**	**100.00**
12 .	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)**					76.46
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**58.46**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. LAYANAN JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI TERHADAP : PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO	Orang	5.217	3.812	**1405**	**73.07**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			%
	TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS)					
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**18.00**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					90.00
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	20	20	**0**	**100.00**
	2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Tes	3.812	3.812	**0**	**100.00**
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	3.812	3.812	**0**	**100.00**
	4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	3.812	3.812	**0**	**100.00**
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	20	20	**0**	**100.00**
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	20	20	**0**	**100.00**
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	20	20	**0**	**100.00**
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	20	20	**0**	**100.00**
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	20	20	**0**	**100.00**
	10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	0	0	**0**	**0.00**

Tabel 4.6. Urusan Kesehatan – Anggaran Dasar

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. MALAKA	889.725.413.011
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	128.509.345.048
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	7.613.784.700
	APBD	7.613.784.700

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	PENDANAAN	PAGU
	A. APBD MURNI	-
	B. APBD DAU	20.400.000
	C. APBD DAK FISIK	-
	D. APBD DAK NON FISIK	7.593.384.700
	E. DANA BAGI HASIL	-
	F. KERJASAMA	-
	G. OTONOMI KHUSUS	-
	NON APBD	-
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	-
	APBN	-
	B. APBN-DEKONSENTRASI	-
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	-
	DANA LAINNYA	-

Tabel 4.7. Urusan Kesehatan – Rincian Kegiatan

NO.	PROG.	KEG.	SUB. KEG.	SATUAN	PAGU	REALISASI	%
	KAB. MALAKA				**7.641.891.500**	**6.975.904.000**	**91.29**
1	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**7.641.891.500**	**6.975.904.000**	**91.29**
	1	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota K2023237**			**7.641.891.500**	**6.975.904.000**	**91.29**
	1.02.02.2.02.0001	**1**	**Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil**	**Orang**	1.771.975.000	1.549.255.000	**87.43**
	1.02.02.2.02.0002	**2**	**Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin**	**Orang**	457.258.000	446.388.000	**97.62**
	1.02.02.2.02.0003	**3**	**Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir**	**Orang**	224.906.000	219.706.000	**97.69**
	1.02.02.2.02.0004	**4**	**Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita**	**Orang**	2.120.447.000	1.884.402.000	**88.87**
	1.02.02.2.02.0005	**5**	**Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**	**Orang**	679.250.000	645.150.000	**94.98**
	1.02.02.2.02.0006	**6**	**Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif**	**Orang**	629.820.000	590.790.000	**93.80**
	1.02.02.2.02.0007	**7**	**Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut**	**Orang**	340.800.000	323.790.000	**95.01**
	1.02.02.2.02.0008	**8**	**Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi**	**Orang**	237.793.000	220.192.000	**92.60**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROG.	KEG.	SUB. KEG.	SATUAN	PAGU	REALISASI	%
	1.02.02.2.02.0009	**9**	**Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus**	**Orang**	143.467.500	129.819.000	**90.49**
	1.02.02.2.02.0010	**10**	**Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat**	**Orang**	389.000.000	344.500.000	**88.56**
	1.02.02.2.02.0011	**11**	**Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**	**Orang**	557.783.000	539.320.000	**96.69**
	1.02.02.2.02.0012	**12**	**Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV**	**Orang**	89.392.000	82.592.000	**92.39**
	JUMLAH INDIKATOR				**7.641.891.500**	**6.975.904.000**	**91.29**
	JUMLAH PROGRAM				**7.641.891.500**	**6.975.904.000**	**91.29**

Tabel 4.8. Urusan Kesehatan - Permasalahan

NO	INDIKATOR SPM	PERMASALAHAN PENERAPAN SPM
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pelayanan Kesehatan Balita Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Permasalahan Untuk SPM 1 - SPM 7: - Koordinasi lintas program dan lintas sektor belum berjalan efektif - Kesadaran masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar masih rendah, terutama ANC '- Dukungan lintas sektor (desa, PKK, pendidikan) belum optimal dalam mendukung pencapaian SPM '- Kualitas dan kecepatan data pelaporan belum optimal '- Target sasaran tinggi (perhitungan sasaran menggunakan CBR)
8. 9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pelayanan Kesehatan Diabetes Melitus	Permasalahan untuk SPM 8 - 9 - Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pencegahan dan pengendalian penyakit - Rendahnya penanggung jawab program pelayanan kesehatan Puskesmas dalam pelaksanaan skrining - Penacatatan dan pelaporan logistik tidak optimal - Minimnya koordinasi penanggung jawab program baik di internal maupun ke Dinas Kesehatan
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Permasalahan untuk SPM 10 - Rendahnya penanggung jawab program pelayanan kesehatan Puskesmas dalam pelacakan dan penemuan kasus baru di Masyarakat - Penacatatan dan pelaporan logistik tidak optimal

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	INDIKATOR SPM	PERMASALAHAN PENERAPAN SPM
		- Minimnya koordinasi penanggung jawab program baik di internal maupun ke Dinas Kesehatan
		- Masyarakat menganggap bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat disebabkan oleh supranatural sehingga pasien tidak perlu mendapatkan obat
		- Kurangnya dukungan keluarga pasien tentang pentingnya pengobatan pada pasien ODGJ Berat
11. 12.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Permasalahan untuk SPM 11 dan 12
		- Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pencegahan dan pengendalian penyakit menular seperti TBC, HIV dll
		- Masih rendahnya pengetahuan penanggung jawab program pelayanan kesehatan Puskesmas dalam pelaksanaan skrining TBC dan HIV di masyarakat
		- Pencatatan dan pelaporan logistik belum optimal
		- Minimnya koordinasi penanggung jawab program baik di internal maupun ke Dinas Kesehatan

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4.4.3. Urusan Pekerjaan Umum

Tabel 4.9. Urusan Pekerjaan Umum – Capaian SPM

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			%
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					84.42
1 .	**Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari**					70.50
			Rekap Target (Harus Dilayani)	**Rekap Capaian (Terlayani)**	**Selisih**	
	JUMLAH PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI) ***tidak masuk dalam hitungan**	Orang	3.200	2.200	**1000**	**2,200.00**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**55.00**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	3.200	2.200	**1000**	**68.75**
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**15.50**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					77.50
	JARINGAN PERPIPAAN					55.00
Kuantitas SPAM						
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	800	440	**3.600.000**	**55.00**
Kualitas SPAM						
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	800	440	**3.600.000**	**55.00**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			%
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN					100.00
Kuantitas SPAM						
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	0	0	**0.0000**	**100.00**
Kualitas SPAM						
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga	0	0	**0.0000**	**100.00**
2 .	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik**					98.33
			Rekap Target (Harus Dilayani)	**Rekap Capaian (Terlayani)**	**Selisih**	
	JUMLAH PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI) ***tidak masuk dalam hitungan**	Orang	1.200	1.200	**0**	**1,200.00**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1.200	1.200	**0**	**100.00**
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**18.33**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					91.67
	KUANTITAS SPALD					91.67
	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	300	275	**250.000**	**91.67**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			%
	KUALITAS SPALD					91.67
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)						
	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	**0.0000**	**100.00**
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) *Mutu Tidak Boleh Ditutup Semua						
	1 . Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	300	275	**250.000**	**91.67**
	2 . Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	300	275	**250.000**	**91.67**

Tabel 4.10. Urusan Pekerjaan Umum – Anggaran Dasar

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. MALAKA	889.725.413.011
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	75.893.390.151
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	90.488.004.151
	APBD	90.488.004.151
	A. APBD MURNI	75.893.390.151
	B. APBD DAU	850.000.000
	C. APBD DAK FISIK	13.744.614.000
	D. APBD DAK NON FISIK	-
	E. DANA BAGI HASIL	-

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	PENDANAAN	PAGU
	F. KERJASAMA	-
	G. OTONOMI KHUSUS	-
	NON APBD	-
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	-
	APBN	-
	B. APBN-DEKONSENTRASI	-
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	-
	DANA LAINNYA	-

Tabel 4.11. Urusan Pekerjaan Umum – Rincian Kegiatan

NO.	PROG.	KEG.	SUB. KEG	SATUAN	RENCANA	REALISASI	%
	KAB. MALAKA				**1,049**	**0**	**0.00**
1	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**				**772**	**0**	**0.00**
	1	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638**			**772**	**0**	**0.00**
	1.03.03.2.01.0001	**1**	**Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM**	**Dokumen**	1	0	**0**
	1.03.03.2.01.0002	**2**	**Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.03.03.2.01.0003	**3**	**Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan**	**Liter/Detik**	0	0	**0**
	1.03.03.2.01.0004	**4**	**Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan**	**SR**	605	0	**0**
	1.03.03.2.01.0005	**5**	**Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan**	**Liter/Detik**	0	0	**0**
	1.03.03.2.01.0006	**6**	**Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan**	**Liter/Detik**	0	0	**0**
	1.03.03.2.01.0007	**7**	**Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan**	**SR**	0	0	**0**
	1.03.03.2.01.0008	**8**	**Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan**	**SR**	0	0	**0**
	1.03.03.2.01.0009	**9**	**Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum**	**Penyelenggara SPAM**	0	0	**0**
	1.03.03.2.01.0010	**10**	**Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri**	**Badan Usaha**	0	0	**0**
	1.03.03.2.01.0011	**11**	**Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat**	**Kelompok Masyarakat**	0	0	**0**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROG.	KEG.	SUB. KEG	SATUAN	RENCANA	REALISASI	%
	1.03.03.2.01.0012	**12**	**Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM**	**Unit**	0	0	**0**
	1.03.03.2.01.0013	**13**	**Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM**	**Unit**	0	0	**0**
	1.03.03.2.01.0014	**14**	**Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM**	**Penyelenggara SPAM**	0	0	**0%**
	1.03.03.2.01.0015	**15**	**Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan**	**Unit**	0	0	**0%**
	1.03.03.2.01.0016	**16**	**Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan**	**Unit**	0	0	**0%**
	1.03.03.2.01.0017	**17**	**Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan**	**Rumah Tangga**	0	0	**0%**
	1.03.03.2.01.0018	**18**	**Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan**	**-**	0	0	**0%**
	1.03.03.2.01.0019	**19**	**Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan**	**-**	0	0	**0%**
	1.03.03.2.01.0020	**20**	**Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan**	**Unit**	0	0	**0%**
	1.03.03.2.01.0021	**21**	**Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan**	**Unit**	0	0	**0%**
	1.03.03.2.01.0022	**22**	**Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan**	**Unit**	0	0	**0%**
	1.03.03.2.01.0023	**23**	**Peningkatan KapasitasKelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**	**Lembaga**	0	0	**0%**
	1.03.03.2.01.0024	**24**	**Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**	**Orang**	0	0	**0%**
	1.03.03.2.01.0025	**25**	**Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**	**Dokumen**	0	0	**0%**
	1.03.03.2.01.0026	**26**	**Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan**	**Liter/Detik**	0	0	**0%**
	1.03.03.2.01.0027	**27**	**Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa**	**Desa**	0	0	**0%**
	1.03.03.2.01.0028	**28**	**Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan**	**Liter/Detik**	0	0	**0%**
	1.03.03.2.01.0029	**29**	**Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**	**Unit**	0	0	**0%**
	1.03.03.2.01.0030	**30**	**Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Unit**	0	0	**0%**
	1.03.03.2.01.0031	**31**	**Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan**	**Unit**	0	0	**0%**
	1.03.03.2.01.0032	**32**	**Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan**	**SR**	166	0	**0%**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROG.	KEG.	SUB. KEG	SATUAN	RENCANA	REALISASI	%
	1.03.03.2.01.0033	**33**	**Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan**	**Unit**	0	0	**0%**
	JUMLAH INDIKATOR				**772**	**0**	**0.00**
	JUMLAH PROGRAM				**772**	**0**	**0.00**
2	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**				**277**	**0**	**0.00**
	2	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota K20240327112559**			**277**	**0**	**0.00**
	1.03.05.2.01.0001	**1**	**Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	2	0	**0**
	1.03.05.2.01.0002	**2**	**Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.03.05.2.01.0003	**3**	**Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota**	**Rumah Tangga**	0	0	**0**
	1.03.05.2.01.0004	**4**	**Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota**	**Rumah Tangga**	0	0	**0**
	1.03.05.2.01.0005	**5**	**Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman**	**Rumah Tangga**	0	0	**0**
	1.03.05.2.01.0006	**6**	**Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat**	**Rumah Tangga**	0	0	**0**
	1.03.05.2.01.0007	**7**	**Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik**	**Orang**	0	0	**0**
	1.03.05.2.01.0008	**8**	**Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik**	**Kelompok Masyarakat**	0	0	**0**
	1.03.05.2.01.0009	**9**	**Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik**	**Orang**	0	0	**0**
	1.03.05.2.01.0010	**10**	**Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik**	**Unit**	0	0	**0**
	1.03.05.2.01.0011	**11**	**Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.03.05.2.01.0012	**12**	**Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman**	**Rumah Tangga**	0	0	**0**
	1.03.05.2.01.0013	**13**	**Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja**	**Unit**	0	0	**0**
	1.03.05.2.01.0014	**14**	**Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja**	**Rumah Tangga**	0	0	**0**
	1.03.05.2.01.0015	**15**	**Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT**	**M^3/Hari**	0	0	**0**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROG.	KEG.	SUB. KEG	SATUAN	RENCANA	REALISASI	%
	1.03.05.2.01.0016	**16**	**Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT**	**M³/Hari**	0	0	**0**
	1.03.05.2.01.0017	**17**	**Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.03.05.2.01.0018	**18**	**Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Kawasan Tertentu**	**Unit**	0	0	**0**
	1.03.05.2.01.0019	**19**	**Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)**	**Unit**	0	0	**0**
	1.03.05.2.01.0020	**20**	**Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat**	**M³/Hari**	0	0	**0**
	1.03.05.2.01.0021	**21**	**Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)**	**M³/Hari**	0	0	**0**
	1.03.05.2.01.0022	**22**	**Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman**	**M³/Hari**	0	0	**0**
	1.03.05.2.01.0023	**23**	**Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat**	**M³/Hari**	0	0	**0**
	1.03.05.2.01.0024	**24**	**Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan**	**Unit**	0	0	**0**
	1.03.05.2.01.0025	**25**	**Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan**	**M³/Hari**	0	0	**0**
	1.03.05.2.01.0026	**26**	**Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Unit**	0	0	**0**
	1.03.05.2.01.0027	**27**	**Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat**	**M³/Hari**	0	0	**0**
	1.03.05.2.01.0028	**28**	**Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan**	**M³/Hari**	0	0	**0**
	1.03.05.2.01.0029	**29**	**Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman**	**Unit**	0	0	**0**
	1.03.05.2.01.0030	**30**	**Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu**	**M³/Hari**	0	0	**0**
	1.03.05.2.01.0031	**31**	**Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu**	**M³/Hari**	0	0	**0**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROG.	KEG.	SUB. KEG	SATUAN	RENCANA	REALISASI	%
	1.03.05.2.01.0032	**32**	**Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman**	**M³/Hari**	0	0	**0**
	1.03.05.2.01.0033	**33**	**Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja**	**Rumah Tangga**	0	0	**0**
	1.03.05.2.01.0034	**34**	**Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa**	**Desa**	0	0	**0**
	1.03.05.2.01.0035	**35**	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)**	**Penyelenggara**	0	0	**0**
	1.03.05.2.01.0036	**36**	**Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)**	**M³/Hari**	0	0	**0**
	1.03.05.2.01.0037	**37**	**Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja**	**Unit**	0	0	**0**
	1.03.05.2.01.0038	**38**	**Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)**	**Unit**	0	0	**0**
	1.03.05.2.01.0039	**39**	**Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat**	**Rumah Tangga**	275	0	**0**
	1.03.05.2.01.0040	**40**	**Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan SistemPengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)**	**Orang**	0	0	**0**
	1.03.05.2.01.0041	**41**	**Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)**	**Dokumen**	0	0	**0**
	JUMLAH INDIKATOR				**277**	**0**	**0.00**
	JUMLAH PROGRAM				**277**	**0**	**0.00**

Tabel 4.2. Urusan Pekerjaan Umum – Permasalahan

NO.	PERMASALAHAN
1	Kegiatan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan jaringan perpipaan tidak diadakan karena karena kebijakan pembangunan air minum nasional diarahkan pada pengembangan SPAM jaringan perpipaan yang dinilai lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat, serta sejalan dengan dokumen perencanaan, standar teknis, dan target pemenuhan akses air minum aman, sementara SPAM Bukan jaringan perpipaan memiliki keterbatasan dalam cakupan pelayanan, pengendalian kualitas air, dan keberlanjutan operasional.
2	Target pembangunan bidang Air Limbah Domestik ditetapkan sebanyak 300 unit. Dari target tersebut, sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) unit telah dapat direalisasikan melalui dukungan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK). Sementara itu, sisa 25 (dua puluh lima) unit direncanakan untuk dibiayai melalui sumber pendanaan di luar APBD, khususnya melalui program bantuan pemerintah pusat seperti SANIMAS. Namun, pada tahun berjalan Kabupaten Malaka tidak memperoleh alokasi bantuan pembiayaan dari program SANIMAS, Karena adanya Efisiensi Anggaran sehingga rencana pendanaan untuk 25 (dua puluh lima) unit

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PERMASALAHAN
	tersebut tidak dapat direalisasikan. Kondisi ini menyebabkan capaian pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah hanya mencapai 275 (dua ratus tujuh puluh lima) unit dan target 300 (tiga ratus) unit belum dapat terpenuhi sepenuhnya. Pembangunan sektor air limbah selama ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui berbagai program seperti SANIMAS. Namun, mengingat dukungan tersebut tidak selalu tersedia setiap tahun, diperlukan penguatan peran pemerintah daerah melalui optimalisasi pembiayaan dari Anggaran Daerah agar pembangunan dan pelayanan air limbah tetap berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan daerah serta dapat mencapai target SPM.

4.4.4. Urusan Perumahan Rakyat

Tabel 4.13. Urusan Perumahan Rakyat – Capaian SPM

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			%
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00
1 .	**Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**					100.00
	Bencana Meliputi :					
	a) Letusan gunung berapi;					
	b) Gempa bumi;					
	c) Tanah longsor;					
	d) Gelombang pasang;					
	e) Banjir bandang; dan/atau					
	f) Bencana lainnya.					
Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)						
	Tidak Terjadi (Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman) di Verifkasi oleh Sekber Pusat (contoh : dokumen RP3KP, dsb.) Tidak Masuk Kedalam Perhitungan					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	0	**100.00**
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (100%)				**-100%**	**100.00**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00
	1 . Format Tahapan		**Nilai Maksimum Pada TW 4 (100%)**			100.00
	1.PENDATAAN					100.00
	FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100.00
	FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100.00
	FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100.00
	FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH					100.00
	FORM 4.A.11 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA					100.00
	FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN/KOTA (<10 HA)					100.00
	FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA					100.00
						100.00

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			%
	2.PERHITUNGAN					
	FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100.00
	FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA :					100.00
	FORM 4.B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA :					100.00
	FORM 4.B.8 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA					100.00
	3.PERENCANAAN					100.00
	FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA :					100.00
	FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA :					100.00
2 .	**Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**					100.00
	Relokasi Program Pemerintah Meliputi : **a) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha;** **b) Penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;** **c) Pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman;** **d) Pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau** **e) Pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana)**					

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			%
Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah						
	Tidak Terjadi (Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman) di Verifkasi oleh Sekber Pusat (contoh : dokumen RP3KP, dsb.) Tidak Masuk Kedalam Perhitungan					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	0	**100.00**
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (100%)				**-100%**	**100.00**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00
	1 . Format Tahapan		**Nilai Maksimum Pada TW 4 (100%)**			100.00
	1.PENDATAAN					100.00
	FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100.00
	FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100.00
	FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100.00
	FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH					100.00

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			%
	FORM 4.A.11 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN DI KABUPATEN/KOTA					100.00
	FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN/KOTA (<10 HA)					100.00
	FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA					100.00
	2.PERHITUNGAN					100.00
	FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA					100.00
	FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA :					100.00
	FORM 4.B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA :					100.00
	FORM 4.B.8 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA					100.00
	3.PERENCANAAN					100.00
	FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA :					100.00
	FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA :					100.00

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 4.14. Urusan Perumahan Rakyat – Anggaran Dasar

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. MALAKA	889.725.413.011
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	66.400.000
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	66.400.000
	APBD	66.400.000
	A. APBD MURNI	-
	B. APBD DAU	66.400.000
	C. APBD DAK FISIK	-
	D. APBD DAK NON FISIK	-
	E. DANA BAGI HASIL	-
	F. KERJASAMA	-
	G. OTONOMI KHUSUS	-
	NON APBD	-
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	-
	APBN	-
	B. APBN-DEKONSENTRASI	-
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	-
	DANA LAINNYA	-

Tabel 4.15. Urusan Perumahan Rakyat – Rincian Kegiatan

NO	PROG.	KEG.	SUB. KEG.	SATUAN	TARGET	REALISASI	SERAPAN
	KAB. MALAKA				**0**	**0**	**0.00**
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**				**0**	**0**	**0.00**
	1	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023340**			**0**	**0**	**0.00**
	1.04.02.2.01.0001	**1**	**Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.04.02.2.01.0002	**2**	**Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan**	**Dokumen**	0	0	**0**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	PROG.	KEG.	SUB. KEG.	SATUAN	TARGET	REALISASI	SERAPAN
	1.04.02.2.01.0003	**3**	**Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.04.02.2.01.0004	**4**	**Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.04.02.2.01.0005	**5**	**Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.04.02.2.01.0006	**6**	**Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.04.02.2.01.0007	**7**	**Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.04.02.2.01.0008	**8**	**Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.04.02.2.01.0009	**9**	**Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.04.02.2.01.0010	**10**	**Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	0	0	**0**
	JUMLAH INDIKATOR				**0**	**0**	**0.00**
	2	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023348**			**0**	**0**	**0.00**
	1.04.02.2.03.0001	**1**	**Rehabilitasi rumah bagi korban bencana**	**Unit Rumah**	0	0	**0**
	1.04.02.2.03.0002	**2**	**Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.04.02.2.03.0003	**3**	**Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana**	**Ha**	0	0	**0**
	1.04.02.2.03.0004	**4**	**Pembangunan rumah bagi korban bencana**	**Unit Rumah**	0	0	**0**
	1.04.02.2.03.0005	**5**	**Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota**	**Unit Rumah**	0	0	**0**
	1.04.02.2.03.0006	**6**	**Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota**	**Unit Rumah**	0	0	**0**
	1.04.02.2.03.0007	**7**	**Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	**Rumah Tangga**	0	0	**0**
	1.04.02.2.03.0008	**8**	**Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota**	**Rumah Tangga**	0	0	**0**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	PROG.	KEG.	SUB. KEG.	SATUAN	TARGET	REALISASI	SERAPAN
	1.04.02.2.03.0009	**9**	**Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Unit Rumah**	0	0	**0**
	1.04.02.2.03.0010	**10**	**Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	**Unit Rumah**	0	0	**0**
	1.04.02.2.03.0011	**11**	**Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Unit Rumah**	0	0	**0**
	1.04.02.2.03.0012	**12**	**Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	**Unit Rumah**	0	0	**0**
	JUMLAH INDIKATOR				**0**	**0**	**0.00**
	JUMLAH PROGRAM				**0**	**0**	**0.00**

Tabel 4.16. Urusan Perumahan Rakyat – Permasalahan

No	PERMASALAHAN
1	Harus menjadi perhatian bersama bahwa perumahan merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat karena sampai saat ini masih banyak rumah yang tidak layak huni akibat dari bencana yang terjadi sehingga harus menjadi atensi khusus agar tidak menimbulkan masalah sosial yang berkepanjangan dan perlu adanya peningkatan sarana prasarana penunjang serta sumberdaya manusia yang memadai sehingga dapat meningkatkan pelayananan kepada masyarakat
2	Dalam pelaksanaan belum adanya kebijakan yang berpihak dalam mengurus masalah kebencanaan di bidang perumahan rakyat dikarenakan anggaran masih untuk kebutuhan pekerjaan di bidang lain sehingga dalam melakukan kegiatan ini masih menjadi kendala yang dihadapi saat ini
3	Dalam melakukan perencanaan untuk masyarakat yang terdampak bencana kami mengalami kendala dalam penganggaran sehingga menyesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah yang terbatas dalam memenuhi Kebutuhan dalam bidang perumahan rakyat
4	Kurangnya ketersediaan anggaran untuk perhitungan kebutuhan biaya dalam menunjang kegiatan Kebencanaan bagi masyarakat dalam bidang perumahan rakyat
5	Ketersedian sarana prasarana dan sumber daya manusia yang kurang serta Kerjasama antar stakeholder yang belum terjalin dengan baik untuk menunjang kegiatan pengumpulan data berupa data kebencanaan dalam bidang perumahan rakyat

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4.4.5. Urusan TrantibumLinmas

Tabel 4.17. Urusan Trantibumlinmas – Capaian SPM

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			%
KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						83.40
1 .	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten / Kota**					83.40
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	150	150	**0**	**100.00**
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				**-20%**	**3.40**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					16.98
	1 . Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP **(jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)**	unit	150	150	**0**	**100.00**
	2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 **(SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)**	dokumen	0	0	**0**	**0.00**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			%
	Data Dukung : 5321-20251001080809SOP SATPOL PP.pdf Status : Approved Catatan : Maximal 10 Mb Catatan : Bila Dokumen Lebih dari 1 Harap Digabungkan menjadi 1 File Terlebih dahulu , Kemudian Diupload.					
	3 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** **(Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)**	orang	158	3	**155**	**1.90**
	4 . Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	dokumen	10	0	**10**	**0.00**
	Data Dukung : Data Dukung Belum Di Upload Catatan : Maximal 10 Mb Catatan : Bila Dokumen Lebih dari 1 Harap Digabungkan menjadi 1 File Terlebih dahulu , Kemudian Diupload.					
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil **(kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)**	orang	75	0	**75**	**0.00**
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan **(pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)**	orang	75	0	**75**	**0.00**
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						77.76
1 .	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana**					77.76
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**77.76**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	10552	10256	**296**	**97.19**
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				**-20%**	**0.00**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					0.00
	1 . Penyusunan Kajian Risiko Bencana		0	0	**0**	**0.00**
	2 . Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		0	0	**0**	**0.00**
	1) . Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana ***Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu**					**0.00**
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar	0	0	**0**	**0.00**
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa	0	0	**0**	**0.00**
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	**0**	**0.00**
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	**0**	**0.00**
	2) . Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia ***Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu**					**0.00**
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media	0	0	**0**	**0.00**
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0	0	**0**	**0.00**
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit	0	0	**0**	**0.00**
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	**0**	**0.00**
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	**0**	**0.00**
	3) . Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik ***Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu**					**0.00**
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0	0	**0**	**0.00**
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0	0	**0**	**0.00**
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	**0**	**0.00**
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	**0**	**0.00**
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	**0**	**0.00**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			%
2 .	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**					77.76
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**77.76**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	10552	10256	**296**	**97.19**
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				**-20%**	**0.00**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					0.00
	1 . Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana		0	0	**0**	**0.00**
	2 . Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)		0	0	**0**	**0.00**
	3 . Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi		0	0	**0**	**0.00**
	1) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur ***Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu**					**0.00**
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	**0**	**0.00**
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	**0**	**0.00**
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0	0	**0**	**0.00**
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	**0**	**0.00**
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	**0**	**0.00**
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	**0**	**0.00**
	2) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara ***Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu**					**0.00**
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	**0**	**0.00**
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	**0**	**0.00**
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	0	0	**0**	**0.00**
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	**0**	**0.00**
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	**0**	**0.00**
	4 . Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	**0**	**0.00**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			%
	1) . Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise) ***Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu**					**0.00**
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	0	0	**0**	**0.00**
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	**0**	**0.00**
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	**0**	**0.00**
	2) . Gladi Lapang ***Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu**					**0.00**
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	0	0	**0**	**0.00**
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	**0**	**0.00**
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	**0**	**0.00**
	5 . Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaaan terhadap Bencana		0	0	**0**	**0.00**
	1) . Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana ***Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu**					**0.00**
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	hari	0	0	**0**	**0.00**
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan	0	0	**0**	**0.00**
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	orang	0	0	**0**	**0.00**
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	**0**	**0.00**
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	**0**	**0.00**
	2) . Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana ***Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu**					**0.00**
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	0	0	**0**	**0.00**
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit	0	0	**0**	**0.00**
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit	0	0	**0**	**0.00**
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	0	0	**0**	**0.00**
	3) . Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast ***Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu**					**0.00**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			%
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	**0**	**0.00**
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	**0**	**0.00**
	4) . Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat ***Tidak Boleh Ditutup Semua, Harus Dipilih Salah Satu**					**0.00**
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	**0**	**0.00**
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	**0**	**0.00**
	6 . Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		0	0	**0**	**0.00**
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	**0**	**0.00**
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	**0**	**0.00**
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	**0**	**0.00**
	d. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit	0	0	**0**	**0.00**
3 .	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**					77.76
Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)						
Download SK Yang Telah Di Upload **5321-20251218093926SK Perpanjangan Status Darurat.pdf**						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**77.76**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	10552	10256	**296**	**97.19**
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				**-20%**	**0.00**
			Jumlah Mutu Yang Harus	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum**	

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			%
			Dilayani / Dipenuhi		**Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					0.00
	1 . Respon Cepat Darurat Bencana		0	0	**0**	**0.00**
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	0	0	**0**	**0.00**
	b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang	0	0	**0**	**0.00**
	2 . Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		0	0	**0**	**0.00**
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	0	0	**0**	**0.00**
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	0	0	**0**	**0.00**
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	0	0	**0**	**0.00**
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	0	0	**0**	**0.00**
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	0	0	**0**	**0.00**
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	**0**	**0.00**
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	**0**	**0.00**
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang	0	0	**0**	**0.00**
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						81.61
1 .	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)**					81.61
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00**
			Jumlah Yang Harus Dilayani	**Jumlah Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	100	100	**0**	**100.00**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			%
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN (100%)				**-20%**	**1.61**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					8.06
	1 . Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	layanan	17	1	**16**	**5.88**
	2 . Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	dokumen	5	0	**5**	**0.00**
	Data Dukung : Data Dukung Belum Di Upload Catatan : Maximal 10 Mb Catatan : Bila Dokumen Lebih dari 1 Harap Digabungkan menjadi 1 File Terlebih dahulu , Kemudian Diupload.					
	3 . Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	unit	40	1	**39**	**2.50**
	4 . Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	18	0	**18**	**0.00**
	5 . Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Orang	5	1	**4**	**20.00**
	6 . Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Orang	5	1	**4**	**20.00**

Tabel 4.18. Urusan Trantibumlinmas – Anggaran Dasar

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. MALAKA	889.725.413.011
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	4.639.535.252
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	4.547.138.094
	APBD	4.547.138.094

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	PENDANAAN	PAGU
	A. APBD MURNI	2.860.819.276
	B. APBD DAU	1.670.611.318
	C. APBD DAK FISIK	-
	D. APBD DAK NON FISIK	-
	E. DANA BAGI HASIL	15.707.500
	F. KERJASAMA	-
	G. OTONOMI KHUSUS	-
	NON APBD	-
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	-
	APBN	-
	B. APBN-DEKONSENTRASI	-
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	-
	DANA LAINNYA	-

Tabel 4.19. Urusan Trantibumlinmas – Rincian Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
	KAB. MALAKA				**1,125,006,250**	**1,120,218,995**	**99.57**
1	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)**				**1,125,006,250**	**1,120,218,995**	**99.57**
	1	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota K2023444**			**0**	**0**	**0.00**
	1.05.02.2.01.0003	**1**	**Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.05.02.2.01.0004	**2**	**Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.05.02.2.01.0005	**3**	**Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia**	**Orang**	0	0	**0**
	1.05.02.2.01.0006	**4**	**Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum**	**Dokumen**	0	0	**0**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
	1.05.02.2.01.0007	**5**	**Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum**	**Unit**	0	0	**0**
	1.05.02.2.01.0008	**6**	**Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.05.02.2.01.0009	**7**	**Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada**	**Laporan**	0	0	**0**
	1.05.02.2.01.0010	**8**	**Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional**	**Orang**	0	0	**0**
	1.05.02.2.01.0011	**9**	**Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.05.02.2.01.0012	**10**	**Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan**	**Orang**	0	0	**0**
	1.05.02.2.01.0013	**11**	**Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat**	**Orang**	0	0	**0**
	1.05.02.2.01.0014	**12**	**Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas**	**Orang**	0	0	**0**
	1.05.02.2.01.0015	**13**	**Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan**	**Kasus**	0	0	**0**
	1.05.02.2.01.0015	**14**	**Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan**	**Laporan**	0	0	**0**
	1.05.02.2.01.0016	**15**	**Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa**	**Laporan**	0	0	**0**
	1.05.02.2.01.0016	**16**	**Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa**	**Kasus**	0	0	**0**
	1.05.02.2.01.0017	**17**	**Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah**	**Laporan**	0	0	**0**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
	1.05.02.2.01.0018	**18**	**Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Unit**	0	0	**0**
	JUMLAH INDIKATOR				**0**	**0**	**0.00**
	2	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota K2023455**			**1,125,006,250**	**1,120,218,995**	**99.57**
	1.05.02.2.02.0001	**1**	**Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Laporan**	0	0	**0**
	1.05.02.2.02.0002	**2**	**Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Laporan**	0	0	**0**
	1.05.02.2.02.0003	**3**	**Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Laporan**	0	0	**0**
	1.05.02.2.02.0004	**4**	**Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Laporan**	0	0	**0**
	1.05.02.2.02.0005	**5**	**Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan PeraturanKepala Daerah**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.05.02.2.02.0006	**6**	**Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)**	**Unit**	0	0	**0**
	1.05.02.2.02.0007	**7**	**Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Laporan**	0	0	**0**
	1.05.02.2.02.0008	**8**	**Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah**	**Laporan**	0	0	**0**
	1.05.02.2.02.0009	**9**	**Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.05.02.2.02.0010	**10**	**Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Laporan**	0	0	**0**
	1.05.02.2.02.0011	**11**	**Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah**	**Laporan**	1,109,298,750	1,104,511,495	**99.57**
	1.05.02.2.02.0012	**12**	**Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Laporan**	15,707,500	15,707,500	**100.00**
	JUMLAH INDIKATOR				**1,125,006,250**	**1,120,218,995**	**99.57**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
	3	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota K2023457**			**0**	**0**	**0.00**
	1.05.02.2.03.0002	**1**	**Pembentukan Sekretariat PPNS**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.05.02.2.03.0003	**2**	**Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.05.02.2.03.0004	**3**	**Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah**	**Laporan**	0	0	**0**
	1.05.02.2.03.0005	**4**	**Dukungan Operasional Sekretariat PPNS**	**Laporan**	0	0	**0**
	1.05.02.2.03.0006	**5**	**Pengembangan kapasitas dan karier PPNS**	**Laporan**	0	0	**0**
	JUMLAH INDIKATOR				**0**	**0**	**0.00**
	JUMLAH PROGRAM				**1,125,006,250**	**1,120,218,995**	**99.57**
2	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)**				**0**	**0**	**0.00**
	4	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota K2023456**			**0**	**0**	**0.00**
	1.05.03.2.01.0003	**1**	**Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.05.03.2.01.0004	**2**	**Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)**	**Orang**	0	0	**0**
	JUMLAH INDIKATOR				**0**	**0**	**0.00**
	5	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K20240401115443**			**0**	**0**	**0.00**
	1.05.03.2.02.0001	**1**	**Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.05.03.2.02.0002	**2**	**Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota**	**Orang**	0	0	**0**
	1.05.03.2.02.0003	**3**	**Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.05.03.2.02.0004	**4**	**Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	**Unit**	0	0	**0**
	1.05.03.2.02.0005	**5**	**Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan**	**Kawasan**	0	0	**0**
	1.05.03.2.02.0006	**6**	**Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana**	**Kawasan**	0	0	**0**
	1.05.03.2.02.0007	**7**	**Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota**	**-**	0	0	**0**
	1.05.03.2.02.0008	**8**	**Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota**	**Orang**	0	0	**0**
	1.05.03.2.02.0009	**9**	**Penyusunan rencana kontijensi**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.05.03.2.02.0010	**10**	**Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana**	**Orang**	0	0	**0**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
	1.05.03.2.02.0011	**11**	**Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.05.03.2.02.0012	**12**	**Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam**	**Keluarga**	0	0	**0**
	1.05.03.2.02.0013	**13**	**Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota**	**Kegiatan**	0	0	**0**
	1.05.03.2.02.0014	**14**	**Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.05.03.2.02.0015	**15**	**Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota**	**Unit**	0	0	**0**
	1.05.03.2.02.0016	**16**	**Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota**	**Kawasan**	0	0	**0**
	1.05.03.2.02.0017	**17**	**Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota**	**Laporan**	0	0	**0**
	JUMLAH INDIKATOR				**0**	**0**	**0.00**
	6	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2023445**			**0**	**0**	**0.00**
	1.05.03.2.03.0001	**1**	**Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas**	**Laporan**	0	0	**0**
	1.05.03.2.03.0002	**2**	**Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.05.03.2.03.0003	**3**	**Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota**	**Orang**	0	0	**0**
	1.05.03.2.03.0007	**4**	**Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.05.03.2.03.0008	**5**	**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota**	**Orang**	0	0	**0**
	1.05.03.2.03.0009	**6**	**Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota**	**Orang**	0	0	**0**
	1.05.03.2.03.0010	**7**	**Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.05.03.2.03.0011	**8**	**Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana**	**Laporan**	0	0	**0**
	JUMLAH INDIKATOR				**0**	**0**	**0.00**
	7	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2023446**			**0**	**0**	**0.00**
	1.05.03.2.04.0001	**1**	**Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.05.03.2.04.0002	**2**	**Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.05.03.2.04.0003	**3**	**Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	0	0	**0**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
	1.05.03.2.04.0004	**4**	**Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.05.03.2.04.0005	**5**	**Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana**	**Laporan**	0	0	**0**
	1.05.03.2.04.0006	**6**	**Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.05.03.2.04.0007	**7**	**Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota**	**Orang**	0	0	**0**
	1.05.03.2.04.0008	**8**	**Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota**	**Orang**	0	0	**0**
	1.05.03.2.04.0009	**9**	**Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.05.03.2.04.0010	**10**	**Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.05.03.2.04.0011	**11**	**Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usahadalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota**	**Lembaga**	0	0	**0**
	1.05.03.2.04.0012	**12**	**Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota**	**Laporan**	0	0	**0**
	1.05.03.2.04.0013	**13**	**Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota**	**Dokumen**	0	0	**0**
	JUMLAH INDIKATOR				**0**	**0**	**0.00**
	JUMLAH PROGRAM				**0**	**0**	**0.00**
3	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)**				**0**	**0**	**0.00**
	8	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023449**			**0**	**0**	**0.00**
	1.05.04.2.01.0001	**1**	**Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.05.04.2.01.0002	**2**	**Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.05.04.2.01.0003	**3**	**Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran**	**Laporan**	0	0	**0**
	1.05.04.2.01.0004	**4**	**Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	0	0	**0**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
	1.05.04.2.01.0005	**5**	**Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri**	**Unit**	0	0	**0**
	1.05.04.2.01.0007	**6**	**Pembinaan aparatur pemadam kebakaran**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.05.04.2.01.0008	**7**	**Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)**	**Unit**	0	0	**0**
	1.05.04.2.01.0011	**8**	**Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangann Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.05.04.2.01.0012	**9**	**Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran**	**Laporan**	0	0	**0**
	1.05.04.2.01.0013	**10**	**Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.05.04.2.01.0014	**11**	**Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.05.04.2.01.0015	**12**	**Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.05.04.2.01.0016	**13**	**Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.05.04.2.01.0017	**14**	**Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri**	**Unit**	0	0	**0**
	1.05.04.2.01.0018	**15**	**Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran**	**Orang**	0	0	**0**
	1.05.04.2.01.0019	**16**	**Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga**	**Dokumen**	0	0	**0**
	JUMLAH INDIKATOR				**0**	**0**	**0.00**
	9	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran K2023450**			**0**	**0**	**0.00**
	1.05.04.2.02.0001	**1**	**Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran**	**Dokumen**	0	0	**0**
	1.05.04.2.02.0002	**2**	**Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran**	**Dokumen**	0	0	**0**
	JUMLAH INDIKATOR				**0**	**0**	**0.00**
	10	**Investigasi Kejadian Kebakaran K2023451**			**0**	**0**	**0.00**
	1.05.04.2.03.0001	**1**	**Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran**	**Dokumen**	0	0	**0**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
	JUMLAH INDIKATOR				**0**	**0**	**0.00**
	11	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran K2023459**			**0**	**0**	**0.00**
	1.05.04.2.04.0001	**1**	**Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat**	**Orang**	0	0	**0**
	1.05.04.2.04.0002	**2**	**Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran**	**Desa**	0	0	**0**
	1.05.04.2.04.0003	**3**	**Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana**	**Dokumen**	0	0	**0**
	JUMLAH INDIKATOR				**0**	**0**	**0.00**
	12	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia K2023458**			**0**	**0**	**0.00**
	1.05.04.2.05.0001	**1**	**Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia**	**Laporan**	0	0	**0**
	1.05.04.2.05.0002	**2**	**Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi**	**Dokumen**	0		**0**
	1.05.04.2.05.0004	**3**	**Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi**	**Laporan**	0	0	**0**
	1.05.04.2.05.0005	**4**	**Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi**	**Unit**	0	0	**0**
	JUMLAH INDIKATOR				**0**	**0**	**0.00**
	JUMLAH PROGRAM				**0**	**0**	**0.00**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 4.20. Urusan Trantibumlinmas - Permasalahan

No	PERMASALAHAN
TRANTIBUM	
1	Belum tersedianya Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023
2	Masih rendahnya peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN (yang mengikuti diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM)
3	Kurangnya dukungan anggaran
DAMKAR	
1	Kurangnya dukungan sarana prasarana untuk respon cepat kebakaran
2	Kurangnya dukungan anggaran
KEBENCANAAN	
1	Belum adanya dokumen kebencanaan yang wajib dimiliki Pemerintah Kabupaten Malaka, antara lain: 1. Kajian Resiko Bencana (KRB) 2. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) 2. Rencana Kontijensi (Rekon)
2	Masih kurangnya ketersediaan SDM terlatih dan sarana prasarana untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi risiko dampak bencana sebelum terjadi di masyarakat dan lingkungan
3	Kurangnya dukungan sarana prasarana untuk respon cepat darurat bencana
4	Kurangnya dukungan anggaran

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4.4.6. Urusan Sosial

Tabel 4.21. Urusan Sosial – Capaian SPM

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			%
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PRATAMA			73.34
1 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti**					98.46
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00**
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	464	464	**0**	**100.00**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**18.46**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					92.31
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	464	464	**0.00**	**100.00**
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	36	36	**0.00**	**100.00**
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	464	464	**0.00**	**100.00**
	4 . Penyediaan sandang	Orang	464	464	**0.00**	**100.00**
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	464	0	**464.00**	**0.00**
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	464	464	**0.00**	**100.00**
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	464	464	**0.00**	**100.00**
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	464	464	**0.00**	**100.00**
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	8	8	**0.00**	**100.00**
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	5	5	**0.00**	**100.00**
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	1	1	**0.00**	**100.00**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			%
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	**0.00**	**100.00**
	13 . Layanan rujukan	Orang	1	1	**0.00**	**100.00**
2 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti**					100.00
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00**
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	61	61	**0**	**100.00**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00
	1 . Layanan data dan pengaduan	orang	10	10	**0.00**	**100.00**
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	37	37	**0.00**	**100.00**
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	383	383	**0.00**	**100.00**
	4 . Penyediaan sandang	Orang	100	100	**0.00**	**100.00**
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti	Orang	61	61	**0.00**	**100.00**
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	61	61	**0.00**	**100.00**
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	61	61	**0.00**	**100.00**
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	61	61	**0.00**	**100.00**
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	5	5	**0.00**	**100.00**
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	1	1	**0.00**	**100.00**
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	**0.00**	**100.00**
	12 . Layanan rujukan	Orang	1	1	**0.00**	**100.00**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			%
3 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti**					68.23
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**49.62**
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	1.335	828	**507**	**62.02**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**18.62**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					93.08
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	10	10	**0.00**	**100.00**
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	10	10	**0.00**	**100.00**
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	400	400	**0.00**	**100.00**
	4 . Penyediaan sandang	Orang	44	44	**0.00**	**100.00**
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	10	1	**9.00**	**10.00**
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	15	15	**0.00**	**100.00**
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	420	420	**0.00**	**100.00**
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	420	420	**0.00**	**100.00**
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1.335	1.335	**0.00**	**100.00**
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	5	5	**0.00**	**100.00**
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	1	1	**0.00**	**100.00**
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	**0.00**	**100.00**
	13 . Layanan rujukan	Orang	44	44	**0.00**	**100.00**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			%
4 .	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti**					0.00
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**0.00**
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI () :	Orang	0	0	**0**	**0.00**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**0.00**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					0.00
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	0	0	**0.00**	**0.00**
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	0	0	**0.00**	**0.00**
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	0	0	**0.00**	**0.00**
	4 . Penyediaan sandang	Orang	0	0	**0.00**	**0.00**
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	0	0	**0.00**	**0.00**
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	0	0	**0.00**	**0.00**
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	0	0	**0.00**	**0.00**
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	0	0	**0.00**	**0.00**
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	**0.00**	**0.00**
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	0	0	**0.00**	**0.00**
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	**0.00**	**0.00**
	12 . Layanan rujukan	Orang	0	0	**0.00**	**0.00**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			%
5 .	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**					100.00
Ya Terjadi Bencana						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				**-80%**	**80.00**
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	B. JUMLAH PENERIMA YANG HARUS DILAYANI (Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)) :	Orang	190	190	**0**	**100.00**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				**-20%**	**20.00**
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	190	190	**0.00**	**100.00**
	2 . Penyediaan sandang	Orang	100	100	**0.00**	**100.00**
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang	40	40	**0.00**	**100.00**
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	10	10	**0.00**	**100.00**
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	1	1	**0.00**	**100.00**

Tabel 4.22. Urusan Sosial – Anggaran Dasar

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. MALAKA	889.725.413.011
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	3.185.698.177
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	861.310.940
	APBD	861.310.940
	A. APBD MURNI	433.055.470
	B. APBD DAU	428.255.470
	C. APBD DAK FISIK	-
	D. APBD DAK NON FISIK	-

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	PENDANAAN	PAGU
	E. DANA BAGI HASIL	-
	F. KERJASAMA	-
	G. OTONOMI KHUSUS	-
	NON APBD	-
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	-
	APBN	-
	B. APBN-DEKONSENTRASI	-
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	-
	DANA LAINNYA	-

Tabel 4.23. Urusan Sosial – Rincian Kegiatan

NO.	PROG.	KEG.	SUB. KEG.	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
	KAB. MALAKA				**0**	**0**	**0.00**
1	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				**0**	**0**	**0.00**
	1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2023152**			**0**	**0**	**0.00**
	1.06.04.2.01.0001	**1**	**Penyediaan permakanan**	**Orang**	0	0	**0%**
	1.06.04.2.01.0002	**2**	**Penyediaan sandang**	**Orang**	0	0	**0%**
	1.06.04.2.01.0003	**3**	**Penyediaan alat bantu**	**Orang**	0	0	**0%**
	1.06.04.2.01.0004	**4**	**Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga**	**Orang**	0	0	**0%**
	1.06.04.2.01.0005	**5**	**Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial**	**Orang**	0	0	**0%**
	1.06.04.2.01.0006	**6**	**Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat**	**Orang**	0	0	**0%**
	1.06.04.2.01.0007	**7**	**Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak**	**Orang**	0	0	**0%**
	1.06.04.2.01.0008	**8**	**Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar**	**Orang**	0	0	**0%**
	1.06.04.2.01.0009	**9**	**Pemberian layanan data dan pengaduan**	**Orang**	0	0	**0%**
	1.06.04.2.01.0010	**10**	**Pemberian layanan kedaruratan**	**Orang**	0	0	**0%**
	1.06.04.2.01.0011	**11**	**Pemberian pelayanan penelusuran keluarga**	**Orang**	0	0	**0%**

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROG.	KEG.	SUB. KEG.	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
	1.06.04.2.01.0012	**12**	**Pemberian layanan rujukan**	**Dokumen**	0	0	**0%**
	JUMLAH INDIKATOR				**0**	**0**	**0.00**
	2	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153**			**0**	**0**	**0.00**
	1.06.06.2.01.0001	**1**	**Penyediaan makanan**	**Orang**	0	0	**0%**
	1.06.06.2.01.0002	**2**	**Penyediaan sandang**	**Orang**	0	0	**0%**
	1.06.06.2.01.0003	**3**	**Penyediaan tempat penampungan pengungsi**	**Unit**	0	0	**0%**
	1.06.06.2.01.0004	**4**	**Penanganan khusus bagi kelompok rentan**	**Orang**	0	0	**0%**
	1.06.06.2.01.0005	**5**	**Pelayanan dukungan Psikososial**	**Orang**	0	0	**0%**
	JUMLAH INDIKATOR				**0**	**0**	**0.00**
	JUMLAH PROGRAM				**0**	**0**	**0.00**

Tabel 4.24. Urusan Sosial - Permasalahan

NO	PERMASALAHAN
1	Kurangnya dukungan anggaran untuk mendanai kegiatan pemenuhan SPM: 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti 2. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti 3. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti
2	Kurangnya dukungan SDM untuk melakukan 4 (empat) tahapan SPM yakni pengumpulan data warga penerima, penghitungan kebutuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
3	Belum tersedianya panti, UPTD, atau Puskessos yang memadai untuk pelayanan dasar di lapangan

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB V
PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 ini disusun sebagai gambaran penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan daerah, yang telah dilaksanakan dalam berbagai bidang urusan dan dijabarkan dalam program serta kegiatan, sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di tahun pertama kepemimpinan dr. Stefanus Bria Seran, MPH (sebagai Bupati Malaka) dan Henri Melki Simu, A.Md (sebagai Wakil Bupati Malaka) telah dilaksanakan sesuai dengan asas desentralisasi dan tugas pembantuan serta berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Beberapa langkah strategis yang dilakukan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan antara lain melakukan konsolidasi birokrasi dan pelayanan publik, penyesuaian struktur organisasi untuk memastikan perangkat daerah siap bekerja mendukung visi misi daerah, peningkatan kinerja ASN, pembangunan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan serta pengembangan olahraga berprestasi.

Dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045, di Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Malaka juga telah mengimplementasikan 15 (lima belas) dari 17 (tujuh belas) Program Prioritas Prabowo-Gibran.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dan permasalahan dalam penyelengggaraan pemerintahan di Tahun 2025 oleh karena itu kami berkomitmen untuk memprioritaskan perbaikan pada tahun mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2025.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Semoga LPPD Kabupaten Malaka Tahun 2025 ini menjadi bahan evaluasi oleh Pemerintah, dalam rangka memantapkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik di Kabupaten Malaka.

Betun, 29 Maret 2026

Bupati Malaka,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

dr. Stefanus Bria Seran, MPH

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Disusun oleh:
PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PEMERINTAHAN
Jl. Sukabihanawa - Betun.Malaka Tengah-NTT